

**Sarekat Islam
Mencari Ideologi
1924-1945**

Nasihin

**Sarekat Islam
Mencari Ideologi
1924-1945**



PUSTAKA PELAJAR

SAREKAT ISLAM MENCARI IDEOLOGI 1924-1945

Penulis
Nasihin

Desain Cover
Haetamy el-Jaid

Tata Letak
Herry cK.

Cetakan I, November 2012

Penerbit
PUSTAKA PELAJAR
Celeban Timur UH III/548 Yogyakarta 55167
Telp. (0274) 381542, Fax. (0274) 383083
E-mail: pustakapelajar@yahoo.com

ISBN: 978-602-229-103-9

Pengantar Penerbit

Para pembaca yang budiman, tulisan yang hadir di hadapan pembaca ini adalah sekelumit tentang tema Pergerakan Nasional Indonesia atau khususnya tentang Sarekat Islam (SI). Tulisan ini merupakan sebuah rincian mengenai bangunan ideologi yang dipilih dan diterapkan oleh SI, PSI, atau PSII untuk mencapai tujuan atau cita-cita perjuangannya. Melalui ideologi dan sistem politik yang diterapkan inilah, SI, PSI, atau PSII mampu berproses sebagai sebuah organisasi yang besar pada masanya. Tulisan ini diharapkan dapat memacu para pembaca budiman

untuk terus menggali keilmuan tentang tema-tema Pergerakan Nasional Indonesia pada umumnya, dan khususnya tentang SI. Pertahankan yang lama yang baik, dan ambil yang baru yang lebih baik.

Dalam khazanah historiografi Indonesia, sejarah SI telah banyak ditulis oleh sejarawan Indonesia maupun asing. Banyaknya tulisan tentang sejarah SI, menjadikan tema seputar SI semakin menarik untuk dikaji lebih lanjut. Semoga terbitnya buku ini dapat memperkaya khazanah keilmuan serta membantu terlaksananya sebuah transformasi informasi yang berimbang mengenai tema-tema Pergerakan Nasional Indonesia pada umumnya dan tema SI khususnya. Selamat membaca! •

Pengantar Penulis

Alhamdulillahirobbilalamin, wajib kiranya saya ucapkan sebagai ungkapan rasa syukur yang tinggi atas karunia-Mu. Hanya dengan limpahan rahmat dan hidayah-Mu, penulis dapat menyelesaikan tulisan yang berjudul *Sarekat Islam Mencari Ideologi 1924-1945*.

Hadirnya buku di hadapan para pembaca budiman ini tidak terlepas dari bantuan banyak pihak. Izinkan penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada Prof. Dr. Suhartono yang dengan sabar membimbing dan mengoreksi tulisan ini. Terima kasih yang mendalam penulis haturkan kepada Drs. H. Ismail Jaelani (tokoh SI Jogjakarta), yang dengan rela hati memberikan informasi penting seputar SI, PSI, atau PSII, baik dalam skala lokal Jogjakarta, maupun skala nasional. Penulis sadar, sebuah informasi penting tidak mudah didapat, dan atas kerelaan beliau, informasi penting ini dapat saya rangkai menjadi sebuah tulisan yang ada di hadapan para pembaca saat ini.

Terima kasih kepada guru-guru kami di Pascasarjana Jurusan Sejarah, Fakultas Ilmu Budaya (FIB) Universitas Gadjah Mada (UGM), Prof. Dr. Djoko Suryo, Prof. Dr. Djoko Sukiman, Prof. Dr. Bambang Purwanto, Alm. Prof. Dr. Soegijanto Padmo, Prof. Dr. Heddy Shri Ahimsa-Putra, Dr. Sri Margana, Drs. Ahmad Adaby Darban, S.U., Dr. Harlem Siahaan, Dr. Suharko, Drs. Soedibyo, M. Hum., atas bimbingan bapak/ibu, tulisan ini dapat diselesaikan.

Kepada semua teman penulis, Ajo Harry Effendi, S.S., M.A., Bang Adam (kandidat doktor UGM), Abah (Kandidat Master UGM), Umi Barjiyah, S.Pd., M.A., Hairudin Amir, S.Pd., MA. terima kasih atas diskusi dan dorongannya kepada penulis untuk menyelesaikan tulisan ini. •

Yogyakarta, 4 Agustus 2009

Penulis

DAFTAR ISI

Pengantar Penerbit v

Pengantar Penulis vii

Daftar Isi ix

1 Pendahuluan • 1

- B. Permasalahan • 9
- C. Lingkup Penelitian • 11
- D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian • 13
- E. Tinjauan Pustaka • 14
- F. Kerangka Teoretis • 18
- G. Metode Penelitian • 22
- H. Sistematika Penulisan • 23

2 Kondisi Sosial-Politik pada Masa Politik Etis di Indonesia • 25

- A. Politik Etis: Proyek Modernitas Belanda • 25
- B. Rakyat Bumiputera Bersatu • 33

3 Pan-Islamisme: Munculnya Gagasan Perjuangan Islam • 42

- A. Semangat Gerakan Pan-Islamisme • 42
- B. Gagasan Perjuangan Islam • 50
- C. Gagasan SI tentang Bumiputera Zelfbestuur • 57
- D. SI Berjuang di dalam Volksraad • 72

4 Pertarungan Tingkat Elite • 80

- A. Gerakan Sosialis dan Radikalisasi
SI Semarang • 80
- B. Reaksi Tjokroaminoto:
Munculnya Gerakan Agama • 91
- C. Reaksi Pemerintah Hindia Belanda • 108
- D. Pecahnya Sarekat Islam (SI) • 113

5 Menentukan Basis Ideologi • 123

- A. Gerakan Buruh:
Menuju Cita-cita Komunisme • 123
- B. Gerakan Islam: Menuju Sosialisme Islam • 138
- C. Sosialisme Islam, Membuang Marxisme • 148

6 Landasan Ideologi: Realisasi Kebijakan Partai • 165

- A. Politik Hijrah dan Sikap Non-Kooperasi • 165
- B. Gerakan Islam:
Membangun Persatuan Organ Islam • 182

7 Penerapan Ideologi: Mencapai Kemerdekaan Indonesia • 207

- A. Terbentuknya PSII:
Program Asas dan Tandhim • 207

1. Struktur Organisasi PSII • 207
2. Program Asas dan Tandhim PSII • 216
- B. Disiplin Umum • 218
- C. Membangun Federasi Kebangsaan • 223
 1. Permufakatan Perhimpunan-Perhimpunan Politik Kebangsaan Indonesia (PPPKI) • 223
 2. Perjuangan di dalam Majelis Islam A'la Indonesia (MAI) • 245
 3. Berjuang dalam Gabungan Politik Indonesia (GAPI) • 254
- D. Runtuhnya Kekuasaan Belanda Atas Jepang • 262
 1. Situasi Masa Peralihan • 262
 2. Menentukan Dasar Negara Indonesia • 270

8 Kesimpulan • 280

Daftar Pustaka • 319

Daftar Istilah • 339

Daftar Singkatan • 342

Indeks • 346

Tentang Penulis • 349

— oo00oo —

Pendahuluan

Sosialisme itu memperbaiki nasibnya golongan manusia untuk memerangi sebab-sebab yang menimbulkan kemiskinan.

H.O.S. Tjokroaminoto, *Islam dan Sosialisme*
(Djakarta: Bulan Bintang, 1954)

Pada awal abad ke-20, gerakan *Pan Islamisme* di Timur Tengah mengalami perkembangan pesat. Bangkitnya kekuatan Turki Ottoman dan semakin kuatnya afiliasi politik dengan Jerman, menyebabkan gerakan Islam yang disokong oleh Turki meluas hingga ke Asia Tenggara, khususnya Indonesia.¹ *Pan Islamisme* dimaknai sebagai bentuk penyatuan seluruh umat Islam dalam satu ikatan setia kawan atau menghidupkan rasa persaudaraan antar umat Islam.² Semangat *Pan Islamisme* juga dapat dimaknai sebagai penyatuan seluruh dunia Islam (berdasarkan ajaran

Islam) di bawah satu kekuasaan politik dan agama yang dikepalai oleh seorang khalifah.³

Di Indonesia, pemikiran *Pan Islamisme* dibawa oleh para haji yang datang dari Arab setelah menjalankan ibadah haji di Mekah.⁴ Semangat *Pan Islamisme* disambut baik oleh rakyat bumiputera, terutama dari kalangan Islam. Melalui semangat gerakan *Pan Islamisme* inilah, rakyat bumiputera mampu membentuk sebuah persarekatan yaitu Sarekat Dagang Islamiah (SDI), sebagai upaya untuk bersatu dalam melawan praktik kolonialisme Belanda.⁵

SDI didirikan oleh Tiroadhisuryo pada 1909 di Bogor.⁶ Organisasi ini memakai dasar Islam. Islam dianggap mampu menjadi lokomotif sebuah gerakan bumiputera.⁷ Islam diupayakan mampu mengganti tatanan pemerintahan Hindia Belanda yang diskriminatif.⁸ Selain itu, Islam dijadikan sebagai pembanding dari sistem pemerintahan Hindia Belanda yang Kristen.⁹ Dengan dasar Islam inilah, SDI mampu menyebar luas tanpa terhalang oleh batas teritorial, suku, dan ras yang ada di Indonesia.¹⁰

Pada 1912, organisasi ini mendapat pengakuan dari Pemerintah Hindia Belanda dan menetapkan namanya menjadi Sarekat Islam (SI). Organisasi ini akhirnya dipimpin oleh Tjokroaminoto dari Surabaya, setelah menggantikan Haji Samanhoedi dari Surakarta.¹¹ Tahun 1916, Central Sarekat Islam (CSI) dibentuk, sebagai federasi SI lokal yang telah menyebar luas di berbagai wilayah di Indonesia.

Seiring dengan perkembangan SI di Indonesia, ideologi Sosialis juga mengalami perkembangan pesat di Indonesia. Sosialisme disebarkan di Indonesia oleh para propagandisnya dari Belanda seperti: Sneevliet, Barandesteder, Ir. Baars, Briggsma, dan Van Burink.¹² Para propagandis Sosialis mengembangkan gerakannya dengan cara melakukan infiltrasi dalam kelembagaan SI.¹³ Mereka membentuk organ pergerakan *Indische Sociaal Democratische Vereeniging* (ISDV) di Semarang. Untuk memperjuangkan kepentingan buruh, organ ini membentuk *Vereeniging voor Spoor en Tramweg Personeel* (VSTP), yang juga berkedudukan di Semarang. Pergerakan kaum Sosialis dan organ buruh ini, ternyata sangat menarik simpati para anggota SI, sehingga beberapa anggota SI turut serta menjadi anggota ISDV dan VSTP. Masuknya para anggota SI dalam kedua organisasi ini, semakin memperkuat posisi pergerakan kaum Sosialis serta organ pergerakan buruh. Sosialis menjadi wacana baru – selain *Pan Islamisme* – bagi para anggota SI di Indonesia. Dengan demikian, ISDV dan VSTP, selain mampu menarik simpati para anggota SI, juga mampu memainkan peran yang cukup baik dalam proses pergerakan nasional melawan Pemerintah Hindia Belanda yang kapitalistik.

Seiring dengan kemenangan revolusi Rusia tahun 1917, ISDV dan VSTP semakin serius dalam membina organ pergerakan buruh di Indonesia. VSTP menjadi ujung tombak pergerakan dalam mewujudkan cita-cita perjuangan kelas yang dimaksudkan. Pada tahap inilah, kecenderungan pergerakan Sosialis mulai bergerak menuju cita-cita perjuangan

an Komunisme (seperti yang diperjuangkan oleh kaum Bholshevik di Rusia). Untuk mempertegas ideologi serta model pergerakan organ ini, tanggal 23 Mei 1920, ISDV di rubah menjadi Partai Komunis Indonesia (PKI).¹⁴ Perubahan ISDV menjadi PKI sedikit banyak membuktikan bahwa Sosialisme telah menjadi jembatan menuju tercapainya gerakan Komunis di Indonesia.¹⁵

Melihat fenomena gerakan Komunis yang semakin kuat, pemimpin SI mulai khawatir terhadap keberadaan anggotanya yang semakin melebur dalam organ Komunis. Komunisme yang menjadi dasar perjuangan PKI, oleh beberapa pimpinan SI belum dapat diterima, karena cita-cita Komunisme dianggap dapat meruntuhkan nilai ketauhidan umat Islam. Sebagai upaya untuk membentengi nilai ideologis para anggota SI, maka para pimpinan SI memberlakukan disiplin partai terhadap PKI -dalam kelembagaan SI- pada 1921. Disiplin partai ini, merupakan strategi untuk memisahkan secara tegas antara SI dengan PKI sebagai sesama organ pergerakan bumiputera.¹⁶

Pada 1920-an, sikap keras yang dilakukan oleh berbagai organisasi pergerakan, mendapat tanggapan serius dari Pemerintah Hindia Belanda. Pembatasan hak berkumpul dan berserikat diberlakukan kepada partai politik dan seluruh rakyat bumiputera. Para pegawai dilarang mengikuti atau menjadi anggota partai politik. Pemerintah Hindia Belanda bertindak tegas terhadap organisasi atau partai yang dianggap membahayakan serta mengganggu *rust en orde* (keamanan dan ketertiban). Gubernur Jenderal

secara sepihak dapat membubarkan partai serta menghukum rakyat bumiputera yang dianggap melanggar *rust en orde*.¹⁷ Akibat diberlakukan *rechtspersoon* (larangan bagi setiap orang), beberapa tokoh pergerakan nasional yang dianggap melanggar ketentuan ini dijatuhi hukuman buang atau pengasingan. Kondisi demikian, menjadikan sikap gerakan organisasi serta partai mulai melunak dan lebih moderat.

Sebagai upaya untuk memperkuat nilai ideologis serta organ pergerakan yang secara modern bergerak di jalur politik, pada 1921, SI diubah menjadi Partai Sarekat Islam (PSI), dan baru 1923, partai ini secara resmi mulai berjalan. Sembari melakukan perbaikan atau restrukturisasi kelembagaan, dasar ideologis juga dimantapkan sebagai upaya untuk menata kembali arah perjuangan PSI. Untuk mencapai perjuangan yang lebih baik, perjuangan PSI lebih memihak terhadap gerakan *Pan Islamisme*. Melalui semangat *Pan Islamisme*, Tjokroaminoto (sebagai pimpinan besar partai) tetap menjadikan Islam sebagai dasar ideologi PSI. Di sisi yang lain, untuk menghalau sistem kapitalisasi yang dilakukan Pemerintah Hindia Belanda, PSI mengadopsi Sosialisme, sebagai dasar perjuangan untuk mencapai cita-cita persatuan dan kesejahteraan bagi seluruh umat Islam dan bumiputera di Indonesia. Seperti yang diungkapkan oleh Tjokroaminoto, bahwa Sosialisme itu *memperbaiki nasibnya golongan manusia untuk memerangi sebab-sebab yang menimbulkan kemiskinan*.¹⁸ Islam dan Sosialis diramu sedemikian rupa, sehingga menjadi ideologi yang “sempurna” dan

akrab disebut Sosialisme Islam. Pandangan besar inilah yang akhirnya menuntun arah perjuangan PSI dalam melawan kolonialisme Belanda untuk mencapai Indonesia Merdeka.

PSI yang juga mendapat tekanan dari Pemerintah Hindia Belanda, tidak serta merta melunak begitu saja. Sebagai upaya untuk menerapkan ideologi partai, PSI akhirnya mengambil sikap politik *hijrah* atau sikap *non-kooperasi* terhadap Pemerintah Hindia Belanda. Politik *hijrah* merupakan sebuah upaya untuk menarik PSI dalam wacana Islam Internasional. Yang dimaksud dengan politik *hijrah* adalah berpindah dari sesuatu yang tidak baik menuju kebaikan, seperti *hijrah*-nya Nabi Muhammad saw dari Mekah ke Madinah.¹⁹ Pemberlakuan sikap politik *hijrah*, juga terkait dengan pembatasan terhadap gerakan Komunis *pasca* kegagalannya melakukan pemberontakan terhadap Pemerintah Hindia Belanda tahun 1927 di Banten²⁰ dan Sumatera Barat.²¹

Pada 1927, persebaran ideologi Sosialisme Islam yang dikembangkan oleh PSI mengalami berbagai kendala. Secara kelembagaan, PSI pada tahun ini tidak lagi sebagai organ tunggal yang mengusung ide Islam, selain itu, organ lain yang mengusung ide nasionalis juga mulai bermunculan. Dengan demikian, perjuangan PSI dalam wilayah politik, semakin ketat, akibat banyaknya partai politik serta organisasi Islam yang bermunculan.

Secara politis dan ideologis, wacana Sosialisme Islam mendapat tantangan keras dari Soekarno yang menggagas wacana Sosialisme Indonesia yang dilembagakan dalam

Perserikatan Nasional Indonesia (selanjutnya disebut PNI Soekarno) tahun 1927. Kendati masing-masing mengusung identitas Sosialisme, sikap politik mereka dalam menerapkan ideologi Sosialis berbeda. Perbedaan sikap dan pandangan politis ini terletak pada *ruh* Islam sebagai sebuah agama melekat atau tidak di dalamnya. Soekarno secara tegas memisahkan antara agama dengan politik. Pemisahan agama dengan politik terlihat pada ide Soekarno dalam tulisannya tentang Nasionalisme, Islamisme, dan Marxisme. Soekarno menjelaskan bahwa, "inilah asas-asas yang dipe-luk oleh pergerakan rakyat diseluruh Asia".²²

Berbeda halnya dengan Tjokroaminoto, ide tentang Sosialisme Islam dilembagakan dalam PSI. Melalui politik *hijrah*, Sosialisme Islam dijalankan. Dalam Sosialisme Islam, agama (Islam) tidak dapat dipisahkan dari berbagai sikap pemeluknya. Islam sebagai sebuah agama tetap menyertai setiap pemeluknya dalam bersikap, baik itu sikap sosial, ekonomi, hukum, budaya serta politik. Pengejawantahan Sosialisme Islam, tidak dapat dibatasi oleh teritorial, bangsa, maupun ras, atau suku. Akan tetapi, Sosialisme Islam, merupakan sebuah identitas ideologis yang meliputi masing-masing pribadi umat Islam (dunia).

Pada 1930, PSI kembali mengubah namanya menjadi Partai Sarekat Islam Indonesia (PSII). Perubahan nama partai ini bertujuan untuk lebih memantapkan dasar ideologi partai. Sosialis menjadi sistem pemerintahan yang menjunjung tinggi persamaan hak di antara sesama manusia.²³ Persamaan hak di antara sesama manusia secara umum

diakomodir oleh negara dan diharapkan melalui sistem kenegaraan, tercipta sebuah masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera secara menyeluruh. Maksud dan tujuan dalam mewujudkan sebuah masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera tidak hanya didasarkan pada kebendaan seperti yang dimaknai oleh para pemikir Sosialis Barat. Sama rata-sama rasa, harus didasari oleh nilai persaudaraan yang luas, seperti yang diajarkan dalam Islam.²⁴ Sama rata-sama rasa yang didasari oleh persaudaraan Islam, tidak hanya dalam tataran duniawi, melainkan menjadi media untuk mencapai kehidupan yang lebih baik di akhirat kelak. Dengan demikian, Sosialisme merupakan sebuah tujuan dan tujuan ini didasari oleh Islam.

Sikap *non-kooperasi* PSII berakhir tahun 1942, seiring dengan berhasilnya Jepang mengusir Belanda di Indonesia. Jepang melakukan penghapusan lembaga-lembaga (termasuk PSII) yang terbentuk pada masa pemerintahan Belanda. Jepang hanya memberi kelonggaran kepada Majelis Islam A'la Indonesia (MIAI) sebagai federasi umat Islam di Indonesia yang telah dibentuk oleh PSII tahun 1930. Kendati PSII telah dibubarkan, upaya memperjuangkan Indonesia merdeka dengan dasar Sosialisme Islam terus berlanjut. MIAI menjadi jembatan dalam merealisasikan pembentukan lembaga ekonomi-sosial untuk kemakmuran rakyat Indonesia. Para anggota PSII dalam MIAI mengupayakan pembentukan *Bait al-mal* (rumah zakat), sebagai salah satu penopang sistem ekonomi-sosial Sosialisme Islam. *Bait al-mal* menjadi fondasi bagi tercapainya sebuah

sistem ekonomi-sosial dalam mewujudkan sama rasa-sama rasa yang didasari oleh Islam. Upaya pembentukan *Bait al-mal* oleh para anggota PSII, ternyata harus kandas, karena tidak mendapatkan persetujuan dari berbagai pihak dalam MIAI. Sejak inilah, perjuangan PSII melalui MIAI harus kandas, karena lembaga ini akhirnya dibubarkan oleh Jepang tahun 1943.²⁵

Sampai tahun 1945, ketika pemerintahan Jepang di Indonesia menjanjikan kemerdekaan kepada Indonesia, para nasionalis Islam (termasuk para anggota PSII), kembali memperjuangkan dasar ideologi Sosialisme Islam. Melalui BPU-PKI, kelompok nasionalisme Islam terus mempertahankan Islam sebagai dasar negara (bukan negara Islam), sedangkan sistem ekonomi-sosial, sedapat mungkin dijalankan atas dasar Sosialisme. Perjuangan yang dilakukan oleh kelompok nasionalis Islam ternyata mendapat perlawanan yang kuat dari kelompok nasionalis (sekuler), sehingga upaya mendasari Indonesia merdeka dengan Islam tidak tercapai sepenuhnya.

B. Permasalahan

Gerakan nasionalisme bumiputera muncul sebagai upaya untuk melakukan perlawanan terhadap praktik kolonialisme Belanda di Indonesia. Ketika berkembangnya wacana luar yang masuk ke Indonesia seperti: Islam (*Pan Islamisme*), Sosialisme, Komunisme, serta berbagai identitas ideologi yang lain, pergerakan nasional semakin memiliki warna ideologis. Wacana luar inilah yang akhirnya menjadi ciri

pergerakan rakyat bumiputera dalam melawan praktik kolonialisme Belanda di Indonesia.

PSI atau PSII sebagai lanjutan dari organisasi terbesar di Indonesia (SI) saat itu, secara tegas menerapkan ideologi Sosialisme Islam. Identitas ideologi menjadi dasar sebuah perjuangan dan pergerakan PSI atau PSII dalam wilayah politik untuk mencapai Indonesia merdeka. Pokok permasalahan dalam penulisan tulisan ini adalah: mengapa SI memutuskan untuk menjalankan Sosialisme Islam sebagai ideologi?

Untuk menjawab pertanyaan pokok itu, perlu diuraikan proses panjang perjuangan PSI atau PSII sebagai partai politik. Proses perjuangan yang dilakukan PSI atau PSII, dapat dibagi menjadi empat tahap. *Pertama*: masa awal munculnya semangat perjuangan yang muncul di Indonesia, sampai dengan terbentuknya organisasi SI. *Kedua*: masa pertumbuhan SI sebagai sebuah organisasi yang besar di Indonesia, hingga masa perpecahan di dalamnya. Tahap *ketiga*, membahas tentang penerapan ideologi Sosialisme Islam dalam kelembagaan PSI, atau PSII. *Keempat*: menjelaskan tentang proses pemantapan ideologi partai, dan realisasi perjuangan partai untuk mencapai Indonesia Merdeka yang berdasar Islam dengan sistem pemerintahan Sosialis.

Tahap kedua dan ketiga menjadi pembahasan penting dalam tulisan ini, karena berbagai literatur yang membahas tentang SI, PSI, atau PSII belum sepenuhnya menjelaskan secara tegas upaya penerapan ideologi Sosialisme Islam dalam partai itu. Kebijakan politik partai merupakan

perwujudan dari penerapan ideologi. Dengan demikian, Sosialisme Islam merupakan dasar gerak dan langkah perjuangan PSI, atau PSII, baik secara politik, sosial, ekonomi, hukum dan lain-lain, untuk mewujudkan sebuah masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera di bawah naungan negara Indonesia merdeka.

C. Lingkup Penelitian

Tulisan yang berjudul *Sarekat Islam mencari Ideologi 1924-1945*, difokuskan pada pergerakan PSI atau PSII yang menerapkan ideologi Sosialisme Islam melalui jalur pergerakan politik. Ideologi ini mampu menjiwai para anggota PSI atau PSII di setiap proses pergerakan nasional hingga masa kemerdekaan. Melalui identitas ideologis inilah, PSI atau PSII bergerak, serta membangun strategi perjuangan dalam mewujudkan Indonesia merdeka.

Melihat pentingnya ideologi bagi sebuah organisasi pergerakan, tentu ideologi sangat berpengaruh terhadap proses perkembangan dan keruntuhan PSI atau PSII, sehingga studi ini juga menjelaskan proses SI hingga mengalami perubahan menjadi PSI dan PSII. Selain itu, asosiasi kelembagaan, juga menjadi pembahasan tersendiri, sebagai upaya untuk membangun kekuatan, baik secara internal kelembagaan partai maupun untuk menggalang kekuatan bumiputera seutuhnya dalam mencapai kemerdekaan Indonesia.

Lingkup temporal penulisan tulisan ini adalah tahun 1924-1945. Tahun 1924, menjadi batasan awal penulisan,

karena pada tahun ini, ide tentang Sosialisme Islam dipublikasikan secara meluas oleh Tjokroaminoto (sebagai pimpinan besar PSI), dalam kongres al-Islam kedua di Garut. Sosialisme Islam, akhirnya dijadikan sebagai dasar ideologi partai untuk mencapai cita-cita perjuangan dalam wilayah politik. Identitas ideologis inilah yang membedakan dengan organisasi SI sebelumnya, yang hanya mendasarkan kepada Islam dan belum sepenuhnya bergerak dalam wilayah politik.

Tahun 1945 menjadi batasan akhir penulisan tulisan ini didasarkan kepada munculnya perdebatan panjang dari berbagai pihak untuk merumuskan dasar Negara Indonesia beserta perangkat sistem pemerintahannya. Proses penetapan dasar negara, tentu melalui perdebatan panjang di antara para anggota partai yang memiliki pandangan ideologi berbeda-beda. Melalui perdebatan panjang inilah, Pancasila akhirnya disepakati sebagai dasar negara Indonesia. Disepakatinya Pancasila sebagai dasar Negara Indonesia, menjadi tanda, bahwa perjuangan PSII dalam mengupayakan Islam sebagai dasar Negara Indonesia tidak berhasil sepenuhnya. Islam hanya bergerak di wilayah agama, dan bukan sebagai dasar negara yang diharapkan mampu mendasari sikap politik, sosial, ekonomi, hukum, yang dijalankan atas kewenangan sebuah negara yang merdeka. Islam hanya menjadi bagian identitas keagamaan bagi semua rakyat Indonesia, yang harus mengakui adanya Tuhan.

Secara spesifik arena yang dimaksudkan dalam tulisan ini adalah Jawa, karena titik sentral perkembangan pe-

mikiran Sosialisme Islam yang melekat dalam tubuh PSI atau PSII, diwarnai oleh para tokoh dari Jawa dan Sumatera. Ketika PSI sebagai sebuah partai politik yang muncul secara nasional, maka pembahasan akan melebar dalam skala Indonesia. Dengan demikian, Indonesia menjadi panggung dalam proses pergulatan ideologi Sosialisme Islam yang diusung oleh PSI atau PSII di Indonesia melalui proses politik.

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan hubungan Partai politik (PSII) dengan ideologi yang diterapkan (Sosialisme Islam). Penjelasan mengenai pola hubungan PSII dengan Sosialisme Islam yang diambil sebagai ideologi, akan diurai secara bertahap, *pertama*: untuk menjelaskan tentang masuk dan berkembangnya Islam dan Sosialisme sebagai wacana dominan pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20 di Indonesia. *Kedua*: untuk menjelaskan tentang pengadopsian wacana Islam dan Sosialis, sehingga menjadi ideologi Sosialisme Islam yang dija-lankan oleh PSI. *Ketiga*: untuk menjelaskan bahwa bangunan kesadaran nasionalisme yang diperjuangkan oleh SI, PSI, dan PSII adalah didasarkan pada Sosialisme Islam.

Pada sisi sosial, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran, bahwa bumiputera sebagai pihak terjajah, bukan berarti tidak memiliki otoritas untuk menentukan identitas serta stabilitas dari sebuah lembaga negara yang diinginkan. Artinya, bahwa kolonialisme mencipta-

kan sebuah karakter antipenjajahan yang diejawantahkan dalam sebuah perlawanan, baik dengan jalan frontal maupun politik.

Pada sisi pengetahuan, bahwa masing-masing orang atau pelaku ideologi tidak sebagai sesuatu yang statis, melainkan aktif. Pengetahuan yang dimiliki pelaku ideologi yang bersinergi dengan keagenan dalam dirinya bertemu dengan struktur halus yang mengitarinya, sehingga ideologi muncul dalam bentuk praksisnya sebagai hasil dialektis keduanya. Ketika makna dan hakikat ideologi telah dirumuskan, maka ideologi akan berubah menjadi sebuah bentuk yang praksis seperti perilaku, kebijakan sebuah lembaga sosial atau politik, serta proses pergerakan partai dalam mewujudkan cita-cita perjuangannya melalui jalur politik.

E. Tinjauan Pustaka

Beberapa penelitian tentang perkembangan wacana Islam dan Sosialis di Indonesia dapat dilihat dalam kumpulan tiga tulisan oleh J.G. Kaptain (editor) yang berjudul *Kekacauan dan Kerusuhan: Tiga Tulisan Tentang Pan Islamisme di Hindia Belanda Pada Akhir Abad Kesembilan Belas dan Awal Abad Kedua Puluh*. Tiga tulisan ini berbicara tentang persebaran kekuatan *Pan Islamisme*, di mana melalui *Pan Islamisme*, Islam muncul sebagai kekuatan besar di berbagai negara, terutama Indonesia.²⁶ Buku ini secara spesifik hanya berbicara mengenai munculnya pendorong rasa nasionalisme dari luar yaitu *Pan Islamisme*, akan tetapi ketiga penulis

tersebut tidak menjelaskan bagaimana wacana Islam tersebut dipahami serta diterapkan dalam kelembagaan partai sepenuhnya.

Berkaitan dengan kesinambungan antara wacana lokalitas Indonesia dengan kekuatan luar yaitu Islam dan Sosialis, lebih spesifik telah dibahas oleh A.P.E. Korver. *Sarekat Islam; Gerakan Ratu Adil?*. Buku ini secara jelas mengulas tentang bagaimana warna Islam bersinergi dengan kekuatan lokalitas Indonesia. SI sebagai sebuah perkumpulan yang didasari oleh pengetahuan Islam, tampil sebagai organisasi modern untuk mencapai Indonesia Merdeka. Kenyataannya, SI selalu menampilkan serta berwujud sebuah kekuatan kultural yang masih melekatkan semangat Ratu Adil²⁷ sebagai sebuah konsepsi luhur yang suatu saat akan muncul dan turun ke bumi untuk memberikan pertolongan kepada manusia. Label inilah yang selalu dibubuhkan kepada para pemimpin SI seperti Tjokroaminoto yang saat itu menjadi *hoofbestuur* (pimpinan besar) SI.

Nuansa milenarian, mesianistis serta ratu adil/ Imam Mahdi yang berkembang dalam tubuh SI tidak sepenuhnya menjadi sebuah generalisasi dalam tubuh SI secara kelembagaan. Akan tetapi, dimensi milenarian, mesianistis serta ratu adil/Imam Mahdi secara umum berkembang diarahkan masyarakat bawah, ketika warna kultural masih sangat kental di dalamnya. Oleh karena itu, nilai-nilai kultural yang bersemayam dalam warna modernitas kelembagaan SI sebagai organisasi massa dan pada tahap berikutnya menjadi partai politik PSI atau PSII, merupakan ciri

dari proses campuran antara wacana kultural Indonesia dengan Islam dan Modern.

Beberapa literatur lain membicarakan tentang pergerakan modern SI, PSI, atau PSII adalah Deliar Noer, *Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900-1942*. Buku ini pada dasarnya menjelaskan tentang pergerakan organisasi Islam di Indonesia pada masa penjajahan Belanda. Salah satu dari organ Islam adalah SI, PSI atau PSII. Dalam uraiannya, Noer memberikan porsi penjelasan lebih panjang tentang SI, PSI, atau PSII daripada organisasi Islam lainnya. Penjelasan mengenai SI, PSI atau PSII oleh Noer, lebih ditekankan pada pergerakan politik semata, sehingga penjelasan mengenai substansi penerapan ideologi SI, PSI atau PSII tidak tercakup sepenuhnya.

Literatur yang berbicara mengenai identitas ideologi SI, PSI, atau PSII adalah M. A. Gani, *Cita Dasar dan Pola Perjuangan Syarikat Islam*.²⁸ Buku ini menjelaskan tentang dasar ideologis perjuangan SI, PSI, atau PSII. Gani menjelaskan secara rinci tentang nilai ideologi yang menjadi dasar perjuangan SI, PSI, atau PSII, yang mana dasar ideologi tersebut tidak bertentangan dengan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Gani menjelaskan identitas ideologi SI, PSI, atau PSII secara doktrinal, bukan analisis yang sistematis tentang sebuah identitas ideologi yang diambil dan diterapkan dalam kelembagaan partai untuk menjiwai pergerakan serta cita-cita yang diperjuangkan.

Satu-satunya literatur yang membicarakan secara khusus tentang dasar identitas ideologi pada masa pergerakan

SI, PSI, atau PSII adalah Tjokroaminoto, *Islam dan Sosialisme*.²⁹ Buku ini secara spesifik membicarakan tentang dasar atau inti identitas ideologi Sosialisme Islam yang diterapkan dalam kelembagaan SI, PSI, atau PSII. Tjokroaminoto menjelaskan secara jelas bahwa identitas ideologi kelembagaan partai ini merupakan hasil meramu dari berbagai wacana yang telah bercampur di Indonesia, seperti identitas lokal, Islam (Timur Tengah), serta Sosialis (Barat). Masing-masing memiliki porsi yang seimbang dalam menjiwai sebuah proses pergerakan nasional dalam melawan penjajahan Belanda di Indonesia. Tjokroaminoto menjelaskan bahwa, Sosialisme telah menjiwai pergerakan SI, PSI atau PSII, sehingga menjadi organ pergerakan revolusioner, akan tetapi, Sosialisme yang dimaksudkan Tjokroaminoto bukan Sosialisme seperti yang dipahami oleh pemikir Barat. Sosialisme yang dimaksud adalah Sosialisme Islam. Tjokroaminoto dalam penjelasannya tetap menjadikan Islam sebagai dasar dari bangunan ideologi dalam kelembagaan SI, PSI, atau PSII.

Sebagai upaya untuk mencapai dan menerapkan identitas ideologi Sosialisme Islam, *Moeslim National Ondermijns*,³⁰ adalah satu-satunya tulisan Tjokroaminoto yang menjadi literatur inti dalam menjelaskan maksud dan makna ideologi Sosialisme Islam. Tulisan ini secara rinci menjelaskan tentang rumusan ideologi Sosialisme Islam yang akhirnya menjadi dasar ideologi SI, PSI, atau PSII.

F. Kerangka Teoretis

Kajian ini membahas tentang hubungan Partai politik dengan ideologi yang diterapkan. Dalam menjelaskan hubungan ini, terlebih dahulu harus dilihat beberapa gejala penting tentang perubahan-perubahan yang terjadi sekitar partai politik itu. Beberapa gejala penting terkait dengan perubahan-perubahan yang terjadi dalam partai politik adalah ideologi, organisasi, serta ciri pimpinan dan pengikut masing-masing.³¹ J. Eliseo Rochamora dalam kajiannya tentang *Nasionalisme Mencari Ideologi Bangkit dan Runtuhnya PNI (PNI) 1946-1965*, menjelaskan bahwa terdapat tiga faktor penting untuk menganalisis hubungan partai politik dengan ideologi yang diterapkan. *Pertama*: Perkembangan Politik Nasional.³² Aspek ini menjelaskan tentang rezim, karena masing-masing rezim dalam setiap perubahannya sangat memengaruhi perkembangan partai politik. *Kedua*: Elite.³³ Aspek ini menjelaskan tentang pertarungan elite nasional, terkait dengan pengklaiman terhadap basis massa atau pendukung partai politik itu. *Ketiga*: ideologis-kultural.³⁴ Aspek ini menjelaskan tentang perbedaan identitas ideologis-kultural seperti etnis, agama, budaya, serta primordialitas lainnya. Dalam hal ini, rezim menjadi medan pertarungan elite nasional, dan masing-masing elite nasional menggunakan ideologi-kultural sebagai klaim terhadap basis massa atau pendukungnya itu. Pada tahap pengklaiman itulah konsepsi ideologis mulai muncul.³⁵

Kajian ini secara spesifik menjelaskan hubungan Partai Sarekat Islam Indonesia (PSII) dengan Sosialisme

Islam yang diterapkan sebagai ideologi. Metode analisis yang digunakan adalah historis-kausalitas. Analisis ini bertujuan untuk merumuskan hubungan sebab-akibat antara suatu variabel dengan variabel yang lain.³⁶ Tiga faktor penting yang dijelaskan oleh Rochamora, akan diterapkan dalam menganalisis hubungan PSII dengan Sosialisme Islam yang dijadikan sebagai ideologi. *Pertama*: perkembangan politik nasional. Faktor ini menjelaskan tentang kondisi sosial-politik Indonesia yang sedang mengalami kolonialisasi Belanda. Beberapa gejala penting terkait dengan perubahan kebijakan Pemerintah Hindia Belanda tentang penerapan sistem ekonomi, pendidikan sebagai bagian dari politik etis serta haji sebagai bagian dari politik Islam, menjadi pembahasan penting.

Kedua: Elite. Faktor ini menjelaskan tentang pertarungan elite muslim³⁷ di internal partai, karena elite muslim inilah yang memberikan corak terhadap kelembagaan PSII. *Ketiga*: ideologi. Politik kolonial menjadi medan bagi berlangsungnya pertentangan elite di internal PSII. Pertarungan elite erat kaitannya dengan arah dan tujuan pergerakan yang ingin dicapai. Klaim atas basis massa terjadi sebagai upaya untuk menunjukkan kekuatannya masing-masing. Pada tahap pengklaiman basis massa inilah, semuanya ditarik pada konteks ideologi. Dengan demikian, ideologi sangat menentukan corak atau identitas PSII.

Terkait dengan batasan kajian ini, terdapat faktor penting lain yang belum diidentifikasi oleh Rochamora dalam kajiannya. Faktor yang dimaksud adalah perkembangan

gerakan *Pan-Islamisme*. Gerakan ini memberikan dorongan terhadap umat Islam Indonesia untuk bersatu di bawah panji-panji Islam. Analisis mengenai gerakan *pan Islamisme*, pada dasarnya tidak untuk menjelaskan gerakan itu sendiri, melainkan menjelaskan tentang pengadopsian semangat gerakan *Pan Islamisme* oleh masyarakat Bumiputera. Seperti yang dijelaskan Sartono Kartodirdjo, bahwa gerakan *Pan-Islamisme* mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap alam pikiran kaum Muslim di Indonesia.³⁸ Hal serupa juga dijelaskan oleh Anthony Reid, bahwa gerakan *Pan Islamisme* memberikan suatu basis ideologis untuk kerja sama di antara, atau di luar, satuan-satuan politik sendiri-sendiri, di dalam satu perjuangan politik di bawah bendera Islam.³⁹ Basis ideologis menjadi sangat penting karena sangat menentukan sebuah gerak juang partai politik dalam mencapai tujuan.⁴⁰ Dengan demikian, basis ideologis inilah yang memberikan ruang bagi terbentuknya kerja sama dalam perjuangan politik dengan gerakan sosialis⁴¹ yang saat itu juga berlangsung di Indonesia. Ketika kerja sama itu berlangsung, maka yang terjadi adalah penggabungan dua konsep ideologi antara Islam dan Sosialisme yang akrab disebut Sosialisme Islam.⁴²

Bagi umat Islam, apabila “Sosialisme” tidak bertentangan dan sejalan dengan yang diperintahkan Islam untuk diterima, maka Sosialisme itu dengan sendirinya dapat diterima sebagai ideologi nasional suatu negara. Akan tetapi, jika Sosialisme itu merupakan paham lain yang justru tidak dikehendaki Islam untuk diterima, berarti Islam justru telah

melakukan penyesuaian konsep, sampai akhirnya dapat disebut Sosialisme Islam. Apabila analisis terakhir ini yang menjadi landasan, maka secara tegas Islam memiliki kecacatan sebagai sebuah agama.⁴³ Kata "Islam" yang merupakan kata benda substantif, tentunya tidak dapat diturunkan menjadi kata sifat (adjective) yang menyifati kata "Sosialisme".⁴⁴

Apabila Sosialisme dirumuskan sebagai sebuah teori yang mengatur kehidupan sosial yang menuntut agar pemilikan dan pengawasan terhadap alat-alat produksi, modal, tanah, kekayaan dan sebagainya berada di tangan masyarakat secara utuh dan pengaturan serta pembagiannya juga disesuaikan dengan kepentingan seluruh anggota masyarakat, maka secara jelas Islam (sebagai agama atau pandangan hidup yang sempurna) tidak patut disandingkan dengan Sosialisme. Berbeda halnya ketika Sosialisme itu ditinjau sebagai sebuah konsep 'keadilan' bagi kehidupan manusia. Dalam konteks inilah, kata "Sosialisme" dapat gabungan dengan kata "Islam".⁴⁵

Ketika Sosialisme dipahami sebagai filsafat ekonomi (semua sistem produksi, pengelolaan, serta pendistribusian menjadi kewenangan negara), dan proses sejarah ditentukan oleh hal-hal yang sifatnya materialistik,⁴⁶ maka hal demikian bertentangan dengan al-Qur'an sebagai sumber utama Islam. al-Qur'an menyatakan bahwa pertimbangan-pertimbangan moral dan spiritual adalah utama dan asasi, sehingga tidak dapat diterima ketika faktor ekonomi menjadi sesuatu yang unggul, utama serta menentukan segalanya seperti yang dipahami oleh Marxian.⁴⁷ Konteks ke-

adilan dalam Sosialisme hanya digunakan sebagai sebuah model yang penerapannya dapat dilakukan oleh negara, sehingga Sosialisme dapat diterapkan sebagai sebuah ideologi negara, sedangkan Islam diposisikan sebagai substansi serta landasan penafsiran dalam mewujudkan keadilan bagi manusia.⁴⁸ Seperti yang diungkapkan oleh Tjokroaminoto, bahwa tujuan dari Sosialisme Islam adalah untuk mencapai kesejahteraan di dunia dan akhirat.⁴⁹

G. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode sejarah. Metode ini, mencari, menemukan, dan menguji sumber-sumber yang relevan, autentik dan kredibel. Ada empat tahapan yang harus dilalui seorang sejarawan dalam melakukan penelitian sejarah. Keempat tahapan tersebut adalah heuristik, kritik, interpretasi, dan penulisan sejarah.⁵⁰ Heuristik merupakan proses pengumpulan fakta sejarah atau sumber yang berkaitan dengan tema penelitian yang dikaji. Kritik merupakan bagian penting dalam metode sejarah, di mana kritik digunakan sebagai penentu sebuah fakta sejarah atau sumber sejarah layak atau tidak dijadikan sebagai sumber sejarah. Kritik dibedakan menjadi dua bagian yaitu ekstern dan intern. Kritik ekstern digunakan untuk melihat serta mencermati fakta sejarah atau sumber sejarah melalui bentuk verbal sebuah sumber sejarah. Kritik intern dijadikan sebagai pengukur keterkaitan sebuah sumber sejarah, apakah sumber sejarah tersebut relevan dengan tema yang dikaji atau tidak.

Interpretasi digunakan untuk melakukan pembacaan serta penafsiran secara metodologis melalui metodologi yang digunakan dalam menganalisis sebuah sumber sejarah. Dengan demikian, melalui interpretasi dengan memakai metodologi tertentu akan menghasilkan sebuah deskripsi serta argumentasi metodologis yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Tahap akhir adalah penulisan sejarah yang sistematis dan deskriptif-analitis.

Sumber yang digunakan dalam penulisan ini meliputi arsip, surat kabar, majalah, serta literatur ilmiah lainnya. Beberapa arsip seperti surat-surat dari residen, asisten residen, penasihat urusan bumiputera, Anggota pengurus SI. Arsip ini telah dibukukan dan diketuai oleh Prof. Dr. Sartono Kartodirdjo. *Arsip Nasional Republik Indonesia; Penerbitan Sumber-sumber Sejarah*. No. 7, tentang *Sarekat Islam*. Surat Kabar Medan Moeslimin, tahun 1915, 1917, 1918, 1919, 1920 dan 1924. Surat Kabar Medan Prijaji, tahun 1909 dan 1910. Surat Kabar Asia Raya, tahun 1944. Surat Kabar Darmokondo, terbit secara berkala tanggal 13, 15, 18 Mei 1914. Surat Kabar Neratja, Oetosan Hindia, yang dimuat secara berkala tahun 1914, serta berbagai jenis Majalah serta Surat kabar lainnya yang mendukung.

H. Sistematika Penulisan

Studi ini membahas tentang Sosialisme Islam yang dipilih dan diterapkan sebagai ideologi PSII. Beberapa faktor penting yang melandasi pilihan PSII terhadap ideologi Sosialisme Islam akan dibahas dalam 7 bab dan diakhiri dengan kesimpulan di Bab 8. Pada Bab 1 diuraikan latar belakang

situasi dan kondisi yang melingkupi SI, PSI, hingga perubahannya menjadi PSII dalam menentukan pilihan ideologinya. Bab 2, dijelaskan mengenai kondisi sosial-politik pada masa politik etis di Indonesia. Kondisi sosial-politik pada masa ini sangat berpengaruh terhadap perubahan dalam masyarakat bumiputera, terkait dengan munculnya nilai kebangsaan yang akhirnya diwujudkan dalam bentuk perserikatan. Bab 3, membahas tentang gerakan *Pan-Islamisme* di Indonesia. Gerakan *Pan-Islamisme* di Indonesia menjadi media bagi gerakan rakyat bumiputera yang mayoritas beragama Islam dalam melawan praktik kolonialisme Belanda di Indonesia.

Bab 4, menjelaskan tentang munculnya ideologi dan gerakan Sosialis yang saat itu menjadi media lain dalam melakukan perlawanan terhadap praktik Kolonialisme Belanda di Indonesia. Pertemuan dua wacana besar Islam dan Sosialis inilah yang akhirnya menjadikan Sarekat Islam (SI) sebagai organisasi terbesar bumiputera saat itu semakin dinamis. Pergesekan elite di tubuh SI mulai muncul dan tarik menarik di antara elite dalam menentukan identitas ideologi dan dasar gerakan, menjadikan SI terpecah belah. Bab 5, menjelaskan tentang proses pemilihan dan penentuan sebuah basis ideologi sebagai dasar pergerakan. Bab 6, membahas tentang identitas ideologi (Sosialisme Islam) yang telah dipilih oleh PSI dalam merealisasikan gerakannya yang berdasarkan Islam. Bab 7, membahas tentang penerapan identitas ideologi Sosialisme Islam dalam PSI yang saat itu telah berubah menjadi PSII. Bab 8, Kesimpulan. •

2

Kondisi Sosial-Politik pada Masa Politik Etis di Indonesia

Kedadaan perniagaan jang dilakoekan oleh bangsa Islam di Hindia Olanda, djika dibandingkan dengan pri perniagaan bangsa Europa adalah djaoehkoerang sampoernanja.....

—Tirtoadhisuryo, "Sarekat Dagang Islamiah" Medan Prijaji, 1909.

A. Politik Etis: Proyek Modernitas Belanda

Liberalisme ekonomi berlangsung di Indonesia pada 1870,⁵¹ seiring dengan diberlakukannya *Agrarische Wet* (hukum pertanahan)⁵² serta diperkenalkannya mata uang sebagai alat pembayaran yang sah oleh Pemerintah Belanda.⁵³ Akibat diberlakukannya hukum tersebut, maka modal swasta asing (Eropa) mulai mengalir di Indonesia dan diinvestasikan dalam industri perkebunan swasta, khususnya di Su-

matera dan Jawa. Para pendukung kebijakan ini berharap akan terwujud sebuah proses transformasi sistem ekonomi modern bagi petani bumiputera. Harapan demikian ternyata tidak terwujud, bahkan berlaku sebaliknya.⁵⁴ Para petani yang sebelumnya mengelola tanah pertaniannya sendiri, kini justru menjadi buruh (perkebunan). Industrialisasi menjadikan rakyat bumiputera sebagai bangsa kuli.⁵⁵ Kondisi demikian menarik berbagai kalangan yang ber-simpati terhadap kondisi rakyat bumiputera dengan cara melakukan kritik terhadap pemerintah Belanda. Berbagai kecaman terhadap pemerintah Belanda semakin banyak, dan memuncak dalam bentuk gugatan yang dilakukan oleh van Kol.⁵⁶

“pemerasan kekayaan di Jawa itulah, dulu oleh pemerintah kemudian oleh kaum modal swasta, menyebabkan daerah itu kurus miskin, ...semua itu adalah kesalahan pemerintah Belanda. Namun, tuan-tuan wakil rakyat, kesalahan itu adalah juga kesalahan tuan-tuan sekalian”⁵⁷

Akibat dari gugatan inilah, pemerintah Belanda membentuk sebuah lembaga yang bertugas menyelidiki kemiskinan (*Mindere Welvaart Commissie*) pada tahun.⁵⁸ Seiring dengan berlangsungnya penyelidikan itu, pemerintah Belanda secara sigap mengeluarkan sebuah kebijakan baru yaitu “Politik Etis” yang saat itu secara penuh didorong oleh C. Th. Van Deventer. Program utama kebijakan ini adalah upaya untuk memperbaiki kehidupan rakyat bumiputera seperti: irigasi, reboisasi, transmigrasi, sistem perkreditan, pendidikan, dan kesehatan masyarakat.⁵⁹

Abad ke-20 menjadi sebuah permulaan zaman baru (etis) dalam politik kolonial di Indonesia. Untuk menandai zaman baru tersebut, berbagai istilah baru muncul sebagai penanda atau penegas bahwa zaman etis adalah sebuah zaman “kemajuan menuju modernitas”. Kemajuan dalam arti, perkembangan di bawah kontrol atau pengawasan Belanda, sedangkan modernitas yang dimaksud tidak lain adalah sebuah pemahaman terhadap peradaban Barat.⁶⁰

Melalui semangat “kemajuan” tersebut, zaman etis meminjam istilah Furnivall, adalah zaman “ekspansi”, “efisiensi”, dan “kesejahteraan”, sedangkan *rust en orde* (keamanan dan ketertiban) menjadi kata kunci kolonialisme Belanda untuk mengikat semua wilayah Indonesia di bawah kekuasaan Belanda dengan cara-cara keras militeristik.⁶¹ Hal-hal yang berkaitan dengan ekonomi, sistem politik, terutama sekali adalah pendidikan ditingkatkan oleh Pemerintah Hindia Belanda. Seperti halnya Van Deventer, yang dianggap sebagai bapak kaum etis Belanda, ia membayangkan bahwa “kelahiran kembali Indonesia adalah melalui pendidikan yang baik”. Van Kol lebih menitikberatkan pada “cahaya terang” melalui pendidikan sampai ke desa-desa, sedangkan Abandanon melihat bahwa “pendidikan sebagai sebuah ikatan persahabatan dan kepercayaan yang akan mengemban semua orang yang berjalan di jalur kemajuan”.⁶² Dengan demikian, sistem pendidikan (pendidikan gaya Barat) menjadi bagian penting, dan menjadi tanda resmi dimulainya zaman etis di Indonesia. Penerapan pendidikan gaya Barat merupakan sebuah cara Belanda

untuk mencetak tenaga kerja dalam meningkatkan kegiatan bisnis swasta Belanda semata. Selain itu, pendidikan menjadi sarat utama bumiputera untuk menempuh jenjang karier dalam *pangreh praja*.⁶³

Pada zaman etis, pendidikan menjadi alat utama untuk “mengangkat” dan “menuntun” bumiputera menuju modernitas yang bercirikan Belanda. Untuk meningkatkan strata pendidikan di Indonesia, tahun 1914 pemerintah Hindia Belanda mendirikan *Hollandsche Inlandsche School* (HIS).⁶⁴ Bagi anak-anak Eropa, disediakan *Europeesche Lagere Scholen* (ELS). Sebagai tingkat lanjutan, masing-masing disediakan *Meer Uitgebreide Lagere Onderwijs* (MULO) dan *Hollandsche Burgerscholen* (HBS). Selain itu, juga disediakan sekolah pendidikan untuk bumiputera yaitu *Opleiding School voor Inlandsche Ambtenaren* (OSVIA).

Di sisi yang lain, sebagai bentuk dari reorganisasi pendidikan yang telah dilakukan (pada 1900-1902), maka dibentuklah sekolah pendidikan bagi dokter bumiputera *School tot Opleiding van Inlandsche Artsen* (STOVIA).⁶⁵ Gagasan awal dari dibentuknya pendidikan dokter ini berawal dari kebutuhan serta pentingnya kesehatan untuk meningkatkan kualitas pekerja Indonesia di perkebunan yang pengelolaannya di bawah kontrol Belanda (terutama dari pemilik perkebunan di Deli). Kebutuhan tenaga medis bumiputera dimaksudkan untuk menggantikan tenaga medis asing yang saat itu sangat sukar didapat dan terlalu mahal gajinya. Dengan demikian, jalan satu-satunya untuk mendapatkan tenaga medis yang handal dan gajinya murah

adalah dengan cara mendidik bumiputera sampai pada batas kesanggupan dalam menjalankan sebagian besar pekerjaan yang dilakukan oleh dokter yang berpendidikan lengkap.⁶⁶

Pendidikan yang dimaksudkan Belanda sebagai bagian dari politik etis, ternyata juga memberikan sebuah perubahan di kalangan bumiputera. Bagi anak-anak priayi atau mereka yang *berpunya* memiliki kesempatan untuk meneruskan pendidikan dengan model Belanda yang bersifat sekuler, rasial, serta membedakan secara linguistik. Melalui pendidikan tersebut, akhirnya memunculkan stratifikasi baru dalam konstruksi sosial masyarakat bumiputera. Di kalangan bumiputera, mereka akrab menyebut dirinya "kaum muda".⁶⁷

"Kaum muda" merupakan sebuah produk modernitas yang dicipta oleh Belanda. "Kaum muda" mencirikan sebuah struktur sosial yang berbeda dari "induk"-nya, ketika gaya, hiburan, serta penggunaan Bahasa Belanda dalam kehidupan sehari-hari menjadi ciri tersendiri di kalangan pemuda bumiputera itu.⁶⁸ Bagi "kaum muda", nilai-nilai baru yang dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari ternyata tidak mengupas sekian atribut budaya yang disandangnya sebagai bumiputera. Artinya, se-modern apa pun "kaum muda", tetap dilihat atau dipandang sebagai *inlander* bagi kelompok berkebangsaan Eropa. Dengan demikian, penyetaraan sebagai sesama manusia menjadi masalah baru di kalangan rakyat bumiputera.

Perbedaan yang muncul sebagai akibat adanya perbedaan pendidikan secara rasial dan linguistik serta perilaku-perilaku diskriminatif dari orang-orang Belanda, akhirnya memunculkan sentimen bagi kelompok muda yang merasa sama dan setara dengan orang-orang Belanda dan juga lainnya. Pada tahap inilah muncul sebuah semangat pertentangan dari beberapa mahasiswa bumiputera. Salah satu cara yang ditempuh mahasiswa bumiputera adalah keluar atau tidak meneruskan di dalam jenjang pendidikan yang telah disediakan oleh Belanda. Mereka secara sadar keluar dan menentukan arah baru mereka sebagai orang yang merdeka dan sama dengan lainnya.⁶⁹

Kesadaran untuk bersatu, selain muncul akibat sistem sosial yang diskriminatif yang sangat tampak antara rakyat bumiputera dengan Eropa, juga akibat semakin berkembangnya wacana persatuan itu dari pihak lain yang ada di Indonesia. Bagi kaum muda dan secara umum rakyat bumiputera, pemandangan sehari-hari yang secara kasat mata dapat dilihat dan dirasakan adalah munculnya sebuah rasa solidaritas yang cukup tinggi di kalangan orang-orang asing seperti China di Indonesia. Terbentuknya perkumpulan Tionghoa Hwe Koan (THHK) pada 1900 adalah bukti dari pencapaian sebuah solidaritas warga China di Indonesia. Upaya penyetaraan status sosial dan pendidikan dengan orang-orang Eropa terus dilakukan, sehingga THHK pada 1901 membentuk sekolah dasar pertama dengan model pendidikan modern.⁷⁰ Perkembangan pendidikan Tionghoa yang juga didukung adanya peningkatan sistem

perdagangan mendapat tanggapan positif dari Pemerintah Negara Tiongkok, sehingga, kemajuan di bidang keduanya berjalan cepat. Pada 1908, pemerintah Hindia Belanda mengambil alih sistem pembiayaan pendidikan China dengan cara mendirikan sekolah China-Belanda *Hollandsche Chineesche Scholen* (HCS), dan menjadikan bahasa Belanda sebagai bahasa pengantar. Sistem pendidikan ini merupakan upaya memodernisasi sistem pendidikan mereka secara bertahap bagi orang-orang China di Indonesia.⁷¹

Perkumpulan Tionghoa di Indonesia pada dasarnya tidak hanya berkaitan dengan mengangkat citra Tionghoa dalam struktur sosial di Indonesia yang dikelompokkan dalam golongan Timur Asing. Selain itu, pada dasarnya mereka memiliki sebuah agenda besar yang menjadi prioritas yaitu mewujudkan sebuah revolusi sosial untuk menggulingkan kekuasaan Kerajaan China di daratan China itu sendiri. Kekuatan yang dibangun oleh orang-orang China, baik di Indonesia maupun di luar Indonesia melaju begitu pesat, sehingga kekuatan berakumulasi menjadi satu dan pada 10 Oktober 1911, di Tiongkok terjadi pemberontakan Angkatan Muda di Wu Chang, Provinsi Hu Pei. Gerakan tersebut menggulingkan dinasti Man Ching, dan mengubahnya menjadi Republik. Negara ini akhirnya diambilalih dan dipimpin oleh seorang presiden yang bernama Sun Yat Sen.⁷² Munculnya kekuatan baru di Tiongkok, menjadikan warga China di Indonesia semakin menunjukkan kekuatan atas kesatuan yang telah dibentuknya itu. Melalui kekuatan yang dimilikinya, China merasa

bahwa mereka memiliki hak yang sama dengan bangsa kolonial dan mereka tidak mau disejajarkan dengan rakyat bumiputera.

Selain persatuan orang-orang China di Indonesia, rakyat bumiputera juga diperlihatkan sebuah persatuan yang terbangun secara kukuh dari bangsa Jepang. Persatuan bangsa Jepang berkembang dan turut mengiringi laju kekuatan armada perang dalam melakukan ekspansi kolonialisasi di berbagai negara lain. Kekuatan armada perang Jepang terletak pada kelompok *Daimyo*. Kekuatan kelompok *Daimyo* inilah yang pernah memukul mundur kekuatan Belanda dalam perang internasional. Akibat dari tekanan Jepang inilah, Belanda melakukan perundingan damai dengan Jepang yang disepakati melalui Konvensi Shimono-seki pada 1864. Melalui konsesi itulah, bangsa Jepang yang berada di Indonesia tidak digolongkan pada kelas Timur Asing atau bumiputera, melainkan Jepang memiliki posisi yang seimbang dengan orang-orang Belanda.⁷³ Selain kesuksesan pada 1864 itu, Jepang kembali meraih kesuksesannya pada 1905 ketika Jepang berhasil melumpuhkan armada perang Rusia.⁷⁴ Sebuah bukti nyata, bahwa persatuan dan kesatuanlah yang mendorong bangsa Jepang menjadi kuat dan mampu mencapai tujuan yang diinginkan.

Semangat persatuan yang diangankan oleh kaum muda pada dasarnya muncul dari sekian banyak fenomena yang hadir pada saat itu. Selain akibat dari tekanan kolonialisme Belanda yang diskriminatif, semangat persatuan dunia luar, baik yang berada di dalam atau di luar Indonesia, men-

jadi bukti nyata atas sebuah ide untuk mencipta persatuan di kalangan bumiputera.⁷⁵

B. Rakyat Bumiputera Bersatu

Kolonialisme Belanda memiliki arti penting terkait dengan masuknya unsur-unsur Barat dalam ranah kehidupan masyarakat Indonesia. Seperti yang diungkapkan oleh Harry J. Benda, bahwa perkembangan-perkembangan yang terjadi di Indonesia tidak sedikit merupakan akibat kumulatif dari rangsangan pengaruh Barat.⁷⁶ Peningkatan di bidang pendidikan bagi rakyat bumiputera –sebagai bagian dari program politik etis- memiliki andil besar dalam membuka wacana persamaan, dan persatuan bagi kalangan muda Indonsia. Untuk mencapai persamaan hak, kedudukan serta kewenangan sebagai sebuah bangsa, kaum muda membentuk perkumpulan bumiputera. Pada 1906, Tirtoadhisuryo bersama kawan-kawan mendirikan Syarekat Priaji.⁷⁷ Sarekat Priayi adalah sebuah persarikatan para bangsawan dan priayi. Tujuan dari organ ini adalah melalui persatuan para bangsawan dan priayi untuk menyejahterakan rakyat bumiputera melalui pendidikan dan pengajaran formal para anak-anak bangsawan dan priayi bumiputera. Ada 5 tujuan organ tersebut dan salah satunya adalah memberikan pengajaran dan pendidikan kepada semua bumi-putera yang tidak mampu.⁷⁸ Para penggagas Sarekat priayi adalah: 1) *Voorloopig Bestuur* R. Mas Prawirodiningrat, Ridder Oranje Nassau Hoofddjaksa Betawi: *President*; 2) Tamrin Moehamad Tabrie, *Commandant district Mangga*

Besar; 3) Taidji'in Moehadjilin, *Commandant district tanah abang*; Bachram, *Commandant district Pandjaringan*; R. Mas Tirtoadhiesoerjo, *Journalist di Waltevreden* (Leden serta merangkap sebagai *Secretaris-Thesuurier*).⁷⁹ *Vergadering* awal dilakukan di Meester Cornelis (Jati Negara), dan Patih Meester Cornelis menjadi penanggungjawab perkumpulan tersebut. Sejak pembentukan sarekat, jumlah keanggotaan telah mencapai 700 orang, hampir semua masyarakat Meester Cornelis melebur di dalamnya saat itu.⁸⁰

Seiring meningkatnya keanggotaan dalam Sarekat Priayi, surat kabar menjadi prioritas utama untuk menjalin warta di antara para anggota. Medan Priayi itulah nama surat kabarnya dan sejak 1 Januari 1907, pertama kali beredar sebagai surat kabar yang dimiliki bumiputera. Sesuai dengan motonya "*Oentoeq Radja-radja bangsawan asali, bangsawan pikiran, prijaji-prijaji dan kaum moeda dari bangsa pri-bumi serta bangsa jang dipersamahken di sehloeroeh Hindia-olanda*",⁸¹ surat kabar ini menampung semua aspirasi bumiputera tanpa terkecuali. Medan Priayi pada mulanya terbit seminggu sekali. Ketika semakin meningkatnya permintaan surat kabar di berbagai daerah, akhirnya diterbitkan secara harian. Melalui surat kabar itulah, ide bersatu bagi seluruh rakyat Indonesia disebar di seluruh Indonesia.

Kekuatan pers bumiputera saat itu menjadi sangat nyata dalam membangun jaringan di antara para anggota sarekat.⁸² Semakin berkembangnya surat kabar bumiputera, ternyata tidak dibarengi dengan meningkatnya kelembagaan di dalam Sarekat Priayi itu sendiri. Kekuatan

Sarekat Priayi semakin melemah. Unsur dominan kelemahan Sarekat Priayi adalah terbelenggalnya administrasi keuangan serta dasar organisasi yang bertumpu pada kesatuan para priayi bumiputera. Dasar persatuan Sarekat Priayi semakin mempersempit persebaran anggota dalam sarekat. Ruang gerak sarekat seolah-olah dibatasi dan tunduk pada aturan-aturan para priayi yang sebetulnya, mereka kebanyakan sebagai kaki tangan Pemerintah Hindia Belanda. Di lain pihak, para priayi merupakan kelompok sosial yang relatif lebih pasif dibandingkan dengan kelompok sosial lainnya. Secara politis, kelompok sosial priayi tidak mampu melawan setiap kebijakan Pemerintah Hindia Belanda yang diskriminatif, terkait dengan kebijakan Pemerintah Hindia Belanda yang lebih berpihak kepada mereka.

Melemahnya Sarekat Priayi tidak memengaruhi persebaran surat kabar Medan Priayi. Medan Priayi justru semakin menampilkan keuletan serta ketangguhan sebagai koran buatan bumiputera. Berbagai informasi telah diterbitkan dalam surat kabar tersebut. Bantuan hukum yang ditawarkan oleh surat kabar ini, semakin mempercepat arus perkembangan Medan Priayi. Saat itu, Medan Priayi menjadi koran dengan jumlah cetakan yang paling besar di Indonesia.

Runtuhnya Sarekat Priayi menjadi catatan khusus bagi Tirtoadhisuryo dan kawan-kawan, karena persatuan di kalangan priayi belum menjawab tuntutan bersatu bagi seluruh strata bumiputera di Indonesia. Setelah runtuhnya Sarekat Priayi, tepatnya pada 1908 perkumpulan Budi Utomo (selanjutnya disebut BU) di bentuk.⁸³ Pembentukan BU

dimotori oleh sebagian besar pelajar STOVIA yang terlahir dari kalangan priayi juga. BU dipimpin seorang Bupati Solo Raden Adipati Tirta Koesomo, dan Tjipto mangunkusumo bertindak sebagai Sekretaris.⁸⁴ Kekuatan BU begitu luar biasa di wilayah Batavia,⁸⁵ Solo dan Yogyakarta. Para pimpinan administratur dan para bawahannya berbondong-bondong menjadi anggota perkumpulan tersebut. Selain itu, masyarakat yang berada di wilayah *Vorstenlanden* (wilayah tanah kerajaan) juga tidak ketinggalan, mereka berbondong-bondong mendaftar sebagai anggota perkumpulan tersebut. Berbagai sekolahan dibentuk, dan pendidikan formal menjadi dasar kekuatan perkumpulan ini. Semakin lama perkumpulan ini hadir dalam masyarakat bumiputera, semakin tidak memperlihatkan kegigihan serta kegarangan dalam melawan sistem Pemerintahan Hindia Belanda yang diskriminatif, sebagaimana yang dirasakan oleh orang-orang di luar identitas priayi (yang secara umum beragama Islam).

Pada masa awal pembentukan BU, Tirtoadhisuryo (pimpinan redaksi Medan Priayi) menolak tawaran dr. Soetomo⁸⁶ untuk bergabung dalam lembaga tersebut. Penolakan Tirtoadhisuryo sangat jelas, bahwa BU dianggap tidak ubahnya Sarekat Priayi yang hanya menghimpun kekuatan para priayi. Tirtoadhisuryo tidak ingin mengulangi kegagalannya kembali dalam BU yang hanya mengikat persatuan priayi dan bukan persatuan seluruh bumiputera tanpa memandang ras, serta golongan dan tidak dibatasi geografis Jawa, Madura atau Sumatera.

Pada 1909, Tirtoadhisuryo mendirikan Sarikat Dagang Islamiah (selanjutnya disebut SDI).⁸⁷ Istilah “dagang” dianggap mewakili kelompok atau stratifikasi sosial tertentu. Para pedagang, merupakan bagian dari struktur sosial yang relatif memiliki tingkat kebebasan tinggi (tanpa tekanan pemerintah), sebagaimana hal tersebut berlaku bagi para priayi. Bebas atas tekanan ekonomi, serta bebas terhadap tekanan Pemerintah Kolonial Hindia Belanda.

Sesuai dengan namanya, SDI berasaskan Islam.⁸⁸ Dasar Islam merupakan tanggapan terhadap mayoritas bumiputera yang beragama Islam. Melalui dasar Islam dan bergerak di bidang perdagangan, kelembagaan tersebut diharapkan mampu menjawab dan mengikat rasa kesatuan bumiputera seluruhnya tanpa memandang golongan. Seperti yang diungkapkan oleh Tirtoadhisuryo:

Keadaan perniagaan jang dilakoekan oleh bangsa Islam di Hindia Olanda, djika dibandingkan dengan pri perniagaan bangsa Europa adalah djaoehkoerang sampoer-nanja. Martabat dan derajat pedagang Islam di Hindia ini ada sanget rendahnja. Kerna kekoerangan kesempoer-naan itoe, sehingga priboemi bangsa Islam jang berbangsa tiada begitoe soeka mendjadi kaum pedagang hanja jang teroedak, melainkan djabatan kepangkatan dan pekerdja-an jang sehoemoer-hoemoer tida melepaskan dirinja dari peri pekoelian...⁸⁹

Dalam tulisannya, Tirto melihat adanya ketimpangan dalam kehidupan para pedagang Islam bumiputera. Para pedagang Islam bumiputera tidak dapat diimbangkan

dengan para pedagang Eropa. Kaum pedagang Islam bumiputera akan terus menjadi bangsa *koeli* karena rendahnya status sosialnya. Ketidakseimbangan antara pedagang Islam dengan Eropa adalah karena tidak adanya rasa persatuan dan kesatuan di kalangan para pedagang Islam yang telah tersebar di seluruh penjuru Nusantara.

SDI menjadi satu-satunya kelembagaan yang dapat menampung seluruh strata sosial bumiputera. SDI sebagai perkumpulan yang disahkan oleh Pemerintah Hindia Belanda pada tahun permulaan pendiriannya, telah menarik perhatian banyak kalangan, baik para pedagang bumiputera, Arab dan China.⁹⁰ Berbagai pertemuan dilakukan, dan secara cepat berdiri cabang-cabang SDI di daerah dengan pusatnya di *Buitenzorg* (Bogor). Sebagai upaya untuk membangun ikatan serta persebaran informasi tentang tema-tema pergerakan saat itu, Medan Priayi kembali menjadi penyambung warta bagi seluruh anggota sarekat. Medan Priayi menjadi agen⁹¹ bagi persebaran SDI di berbagai daerah.

Struktur kepengurusan dibentuk dengan uraian sebagai berikut; *Presiden*: Sech Achmad bin Abdulrachman Badjenet (saudagar tinggal di bogor); *Vice President*: Mohamad Dagrim (Docter Djawa di Bogor); *Commissaris-commissaris*: Sech Achmad bin Said Badjenet, Sech Galib bin Said bin Tebe, Sech Mohammad bin Said Badjenet, Mas Railoes (kwasa tanah tinggal di Bogor), dan Hadji Mohammad Arsad (tinggal di Batavia); *Kassier*: Sech Said bin Abdurrachman Badjenet (di Bogor); *Secretaris Adviseur*: Raden Mas Tirtoadhisuryo (Hoofd Redacteur Medan Prijaji).⁹²

Selain SDI Bogor yang berlabel Islam, di Surakarta pada dasarnya telah berdiri organisasi yang juga berlabel Islam, sebelum SDI Bogor yang mendapat pengesahan dari Pemerintah Hindia Belanda pada 1909. Organisasi itu juga bernama Sarekat Dagang Islam (baca: SDI Surakarta). SDI Surakarta ini berdiri pada 16 Oktober 1905,⁹³ dan dipimpin oleh H. Samanhudi, seorang pedagang batik dari Laweyan.⁹⁴

SDI Surakarta memang tidak mendapat pengakuan dari Pemerintah Hindia Belanda, dan ketika terjadi bentrokan antara orang Tionghoa dengan bumiputera (melibatkan legiun Mangkunegoro), maka pemerintah Hindia Belanda melakukan penyelidikan terhadap masing-masing pihak itu. Pada tahap inilah, Samanhudi meminta bantuan kepada Tirtoadhisuryo untuk membuat Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga sebagai bukti bahwa SDI Surakarta adalah organisasi yang legal. Dengan demikian, SDI Surakarta akhirnya dimasukkan sebagai cabang SDI Bogor yang dipimpin oleh Tirtoadhisuryo.⁹⁵ Diresmikannya SDI Surakarta sebagai cabang SDI Bogor memang tidak bertentangan dengan *Statuten* dan *Huishoudelijk Reglement* SDI Bogor.

*fatzal 1. diloear Bogor maka djika banjaknja anggota ada lebih dari 50 orang maka disitoe diadakan tjabang dengan mempoenjai kaum pengeroes sendiri jang dipilih alih anggota-anggota disitoe dengan moefakatnja Hoofd Bestuur dari tjabang ini melakoekan pakerdjaan seperti wakilnya Hoofd Bestuur.*⁹⁶

SDI Surakarta berkembang sangat cepat.⁹⁷ Anggotanya tidak lagi terbatas pada para pedagang, melainkan ber-

bagai jenis strata masyarakat bumiputera. Konsentrasi utama SDI adalah mengamankan perdagangan bumiputera. Seiring dengan meningkatnya keanggotaan, SDI tidak hanya fokus pada aspek mengamankan perdagangan bumiputera, melainkan juga mengatur praktik berdagang serta penyebarannya. Dengan demikian, relasi perdagangan bumiputera menyebar di seluruh Nusantara. Sampai tahun 1910, SDI memiliki anggota sebanyak 300.000. Jumlah anggota sebanyak itu, menjadikan SDI sebagai organisasi terbesar di Indonesia saat itu.⁹⁸

Peningkatan anggota SDI tidak dapat dibendung. Hampir seluruh lapisan masyarakat bumiputera di luar pedagang, larut dalam keanggotaan sarekat. Seperti tujuan awal pembentukan SDI adalah untuk menyatukan seluruh bumiputera, maka SDI diubah namanya menjadi Sarekat Islam (SI). Perubahan nama SDI menjadi SI adalah menghilangkan kata “dagang” yang termaktub dalam nama perkumpulan serta Anggaran Dasarnya. Perubahan itu dilakukan pada 10 September 1912 di depan Akte Notaris Surakarta. Sejak ditetapkannya di depan Akta Notaris tersebut, maka perkumpulan ini tidak lagi memakai nama SDI melainkan SI.⁹⁹

Seiring dengan meningkatnya perdagangan bumiputera, SI telah menyebar di berbagai wilayah Indonesia. Seperti halnya di Surabaya. Perkembangan SI di Surabaya memainkan peranan yang penting dalam mengorganisir masyarakat dalam sebuah wadah perkumpulan bumiputera. SI Surabaya dipimpin oleh H.O.S Tjokroaminoto, yang

berikutnya menjadi *Hoofdbestuur* (pimpinan besar) SI.¹⁰⁰ Keberadaan SI Surabaya sangat membantu terjalinnya hubungan perdagangan secara meluas sebagai upaya memantapkan perekonomian bumiputera. Perdagangan merupakan salah satu aspek yang diprogramkan sebagai tujuan perkumpulan, selain tolong menolong dalam upacara kematian dan rasa persaudaraan. Pengejawantahan dari pengembangan perekonomian perdagangan adalah pembentukan sistem koperasi-koperasi konsumsi di berbagai cabang di daerah. Selain perdagangan dan perekonomian, agama, pendidikan, sosial, hukum, serta politik juga menjadi program yang dicanangkan oleh SI.

Kaum bumiputera telah sadar akan pentingnya sebuah perkumpulan dalam membangun rasa persatuan dan kesatuan. Ide dan gagasan bersatu bumiputera telah terwujud. Melalui SI, ide itu terus dibina dan dikembangkan menjadi lebih luas. Kebesaran SI menjadi tanda bahwa bumiputera telah menemukan kekuatannya. Sadar akan kekuatan yang dimiliki, SI mengorganisir berbagai serikat buruh. Melalui serikat buruh, SI mempraksiskan gerakannya untuk melawan perilaku diskriminatif serta berbagai penindasan yang dilakukan oleh pemerintah Hindia Belanda. •

3

Pan-Islamisme: Munculnya Gagasan Perjuangan Islam

*Saja rasa vereeniging2 anak negri bangsa kaoem moeslimin,
jang ada di Hindia Olanda tidak ada jang lebih besar,
...selainnja dari vereen:*

S.I. Tjikenmeuh Klapa Senggeh di Bogor, "Mitsalnja "S.I."
dan "antinja"", Medan Moeslimien, 1915.

A. Semangat Gerakan Pan-Islamisme

Telah berabad-abad Islam mewarnai kehidupan masyarakat Indonesia. Banyak bukti sejarah yang menjelaskan tentang masuk dan berkembangnya Islam di Indonesia. Di Jawa Timur, tepatnya di Kecamatan Leran, Gresik terdapat makam Fatima binti Maimun, yang meninggal pada 7 Rajab 475 H (1082 M).¹⁰¹ Di wilayah yang sama (Gresik)

juga terdapat makam Maulana Malik Ibrahim, yang meninggal 12 Rabiulawal 822 H (1419). Selain itu, terdapat Wali Sanga¹⁰² sebagai penyebar Islam di Jawa menjadi legenda yang bukti peninggalan fisiknya masih dapat dilihat hingga sekarang.¹⁰³

Di Sumatera, bukti perkembangan agama Islam juga dapat ditelusuri hingga sekarang. H. M. Zainuddin dianggap sebagai orang Islam pertama yang datang di Aceh. Ia adalah Komandan armada perang dari Persia yang saat itu membawa 33 buah kapal menuju Tiongkok. Kapal-kapal itu berlabuh di beberapa tempat seperti: Malaya, Kedah, Siam, Kamboja, Annam, Jawa, Brunai, Makassar, Kalimantan, Maluku, dan beberapa kapalnya juga singgah di pesisir Aceh (Andalas Utara) pada 82 H (717 M). Dari proses inilah, Islam dapat dikatakan telah disebarkan di Aceh, yang akhirnya memberi pengaruh bagi perkembangan kerajaan Perlak.¹⁰⁴

Sampai pada abad ke-20, perkembangan Islam di Indonesia semakin tampak. Kuatnya arus perkembangan Islam ini adalah akibat dari proses menyebarnya gerakan *Pan-Islamisme* (kebangkitan Islam) yang datang dari Timur Tengah. Melalui gerakan inilah, semangat pembaruan Islam hadir dan mewarnai pemikiran orang Indonesia yang sebelumnya telah memeluk agama Islam. Bangkitnya kekuatan Islam di Timur Tengah, memberikan sumbangsih cukup besar terbentuknya rasa kesatuan di kalangan bumi-putera.¹⁰⁵ Tidak terlepas dari dasar utama Turki yang Islam, sebuah kesadaran akan terbentuknya "Islam satu" menjadi

bagian motivasi penting dalam membantu umat Islam di Indonesia. *Pan-Islamisme* yang dimotori Turki dan juga perkembangan afiliasi politik internasional antara Turki dan Jerman, memberikan perhatian terhadap umat Islam di Indonesia.¹⁰⁶

Semangat gerakan *Pan-Islamisme* yang ada di Timur Tengah, hadir ke Indonesia di bawah oleh para haji yang datang setelah menunaikan ibadah haji di Mekah. Keterkaitan antara para haji sebagai penyebar warta Islam di Indonesia dengan perkembangan *Pan-Islamisme* di Timur Tengah bukanlah semata-mata sebuah kebetulan. Keterkaitan di antara keduanya selain sebagai sebuah upaya para haji untuk mendapatkan ilmu agama Islam di Mekah, juga terkait sebuah proses politik panjang yang dialami oleh para haji di Mekah menjelang abad ke-20.¹⁰⁷ Sirkulasi politik Internasional terkait kekuatan berbagai negara Islam (terutama Turki) yang mampu mengimbangi kekuatan negara di luar Islam, menjadi daya tarik tersendiri bagi umat Islam dunia. Dengan demikian, para haji yang telah bermukim di Mekah menyaksikan betapa pentingnya wacana Islam dan politik internasional bagi mereka. Melalui para haji yang pulang ke daerah asalnya masing-masing warta tersebut menyebar, sehingga peta kekuatan politik internasional serta militer Turki telah menarik simpati kalangan umat Islam Indonesia untuk bersatu di bawah panji-panji Islam dan di bawah naungan Turki Ottoman.

Haji merupakan bagian dari rukun Islam (bila mampu), sebagai umat Muhammad saw. Kewajiban haji bagi

setiap muslim harus diimbangi dengan adanya kemampuan seorang muslim secara menyeluruh, baik kemampuan secara ekonomis, fisik, kemantapan hati, serta kemantapan spiritual. Dengan demikian, Haji menjadi sebuah perjalanan sakral yang bernilai ibadah, sebagai wujud tunduknya seorang muslim kepada Allah SWT. Haji tidak hanya dilihat dari nilai ekonomisnya semata, akan tetapi, sifat dasar haji sebagai bagian yang tidak terpisahkan bagi orang Islam yang “mampu” untuk melengkapi nilai ke-Islam-an selain dari syahadat, shalat, zakat, dan puasa. Haji menjadi penutup kelengkapan nilai-nilai ke-Islam-an sebagai seorang muslim. Rukun Islam menjadi pengikat kesempurnaan seorang muslim yang benar-benar menjalankan agama Islam seperti yang telah di *mauidloh*-kan (dicontohkan) oleh Nabi Muhammad saw. Dengan demikian, berbagai cara akan dilakukan oleh orang muslim agar dapat menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci (Mekah).¹⁰⁸

Bentuk nyata dari pentingnya haji bagi orang Islam Indonesia adalah meningkatnya jumlah haji menjelang pertengahan abad ke-19. Jumlah jamaah haji pada 50-60-an mencapai 1600, pada 70-an mencapai 2600 dan pada 80-an mencapai 4600.¹⁰⁹ Pada 1900-1914, para jamaah haji yang datang ke Djedah sebanyak 192.167 orang. Jumlah keseluruhan jamaah haji dunia pada akhir 1914 adalah 56.855, sedangkan jamaah haji Indonesia yang tercatat adalah sebanyak 28.427. Dengan demikian, jumlah jamaah haji Indonesia, menyumbang lebih dari setengah jumlah jamaah haji dunia saat itu, sebuah jumlah yang sangat besar saat

itu.¹¹⁰

Sekembalinya mereka dari Mekah, berbagai ilmu diajarkan kepada masyarakat setempat. Pengajaran akrab dilakukan di pesantren.¹¹¹ Semakin banyaknya haji yang datang ke kampung halaman, semakin banyak pula pesantren yang berdiri di berbagai daerah di Indonesia. Kendati tidak semua haji mendirikan pesantren, akan tetapi haji mendapat posisi sosial yang tinggi sebagai orang yang dianggap saleh.

Bagi para haji yang mendirikan pesantren (umumnya disebut kyai), mereka menjadi pembimbing bagi para muridnya (santri). Kyai memiliki peran ganda dalam kehidupan sosial kemasyarakatan. Selain sebagai guru, kyai juga berperan sebagai pengganti orang tua bagi para santri yang bertempat tinggal di pesantren (mondok). Selain peran-peran tersebut, kyai juga dianggap memiliki kekuatan yang lebih dari manusia umumnya, sehingga ia sebagai orang yang disucikan di lingkungan pesantren.¹¹² Melalui kelebihan yang dimilikinya, para kyai menjadi pembimbing spiritual, baik bagi para santrinya maupun bagi masyarakat sekitar. Dari berbagai keistimewaan (yang bersifat magis, agamis, serta otoritas kepemimpinan) yang dimiliki seorang kyai, maka menjadi sangat lengkap seorang kyai dapat dianggap sebagai raja kecil dalam lingkup pesantren.¹¹³

Bentuk pengajaran pesantren umumnya mempelajari cara baca tulis huruf Arab dan menghafal beberapa bagian atau seluruh al-Qur'an. Selain baca tulis al-Qur'an, pendidikan penting lainnya adalah Syariat, Ketauhian, Fiqih,

Aqidah Akhlaq, Nahwu Syaraf. Tidak ketinggalan, berbagai amalan sufi atau tarikat menjadi kajian yang tidak terlupakan di dalam pesantren.¹¹⁴ Terkait dengan berbagai ajaran sufi atau tarekat (jalan menuju kesempurnaan ke-tauhid-an) yang berkembang di kalangan pesantren, sifat-sifat ajaran tersebut akhirnya mampu membangkitkan kekuatan bagi para pengikutnya.

Seiring dengan laju perkembangan *Pan-Islamisme*, Indonesia secara ketat telah dicengkeram oleh kolonialisme Belanda. Pemerintah Hindia Belanda sangat ketat dalam memberlakukan pencegahan terhadap laju perkembangan Islam itu. Dengan demikian, semangat kebangkitan Islam yang di bawah oleh para haji yang datang dari Mekah, akhirnya menjadi media untuk memperjuangkan kepentingan umat Islam di Indonesia. Pada prosesnya, wacana *Pan-Islamisme* semakin bersentuhan dalam ranah politik, sebagai upaya untuk memperjuangkan rakyat bumiputera yang tertindas oleh bentuk kolonialisme Belanda. Pada tahap inilah, *Pan-Islamisme* telah melebur dalam semangat perjuangan pembebasan melalui berbagai bentuk seperti pemberontakan, pergerakan melalui organisasi modern, dan lain-lain.¹¹⁵

Sikap-sikap penentangan yang dilakukan oleh bumiputera terhadap Belanda, pada dasarnya dipengaruhi banyak hal. Seperti halnya sikap sewenang-wenang Belanda terhadap bumiputera, serta yang paling penting adalah, proses Kristenisasi. Pada prosesnya, Kristenisasi justru menjadi salah satu program pemerintah Hindia Belanda yang saat itu diberlakukan oleh Gubernur Jenderal Idenburg tahun

1909. Diberlakukannya Kristenisasi di Indonesia adalah sebagai upaya untuk menekan laju perkembangan Islam di Indonesia. Bentuk-bentuk penekanan terhadap perkembangan Islam di Indonesia dimaksudkan oleh Belanda untuk memberikan pilihan bagi bumiputera dalam melaksanakan agama sebagai bagian penting kehidupan orang Indonesia. Proses penyebaran agama Kristen yang dilegal-kan oleh Pemerintah Hindia Belanda, oleh umat Islam lebih dilihat sebagai proses pengkafiran bumiputera yang saat itu mayoritas beragama Islam.¹¹⁶

Kristenisasi yang dilakukan oleh Pemerintah Hindia Belanda mendapat tanggapan yang sangat ketat dari bumiputera, terutama dari lingkungan kalangan umat Islam (pesantren). Para santri tidak diperkenankan berperilaku menyerupai orang Belanda. Hal demikian disebabkan, para kyai melarang para santrinya untuk tidak meniru apa pun yang berkaitan dengan orang Belanda. Larangan meniru gaya orang-orang Belanda tidak hanya sebatas pada agama yang berbeda, melainkan bentuk-bentuk pakaian serta berbagai tindak-tanduk lainnya. Seperti halnya yang dilakukan oleh Kyai Hasyim As'ari dari Jombang, ia melarang para santrinya untuk memakai pantalon, dasi dan sepatu, apabila niat penyerupaannya itu dimaksudkan untuk keseluruhannya termasuk kesombongannya, kekafirannya, dan kegagahan orang Belanda.¹¹⁷

Sebagai upaya untuk menekan laju persebaran agama Kristen di Indonesia, para kyai, haji dan ulama meningkatkan nilai-nilai ke-Islam-an serta membentuk sebuah per-

kumpulan sebagai wadah persatuan umat Islam bumiputera. Seperti halnya H. Samanhudi, H.O.S. Tjokroaminoto, H. Agus Salim serta berbagai haji lainnya, melalui organisasi Sarekat Islam (SI), mereka bergerak bersama bumiputera lainnya melawan bentuk-bentuk kolonialisme serta Kristenisasi yang dilakukan oleh Belanda. SI dalam perjuangannya juga dibantu oleh para tokoh beserta organ Islam lainnya seperti H. Achmad Dahlan, dengan Muhammadiyah; K.H. Wahab Hasbullah dan K.H. Hasyim Asy'ari, dengan Tswirul Afkar dan NU-nya, serta berbagai tokoh dan organ Islam lain yang juga mendukung arah perjuangan SI. Perlu dicatat lebih lanjut, jumlah haji yang bergabung dalam SI mencapai 10 % dari keseluruhan anggotanya saat itu.¹¹⁸ Dengan demikian, para haji yang bergabung dalam SI sebagai organ terbesar bumiputera saat itu, menjadi bukti yang tidak terbantahkan bahwa mereka memiliki peran penting dalam proses kebangkitan agama serta kebangkitan bumiputera awal abad ke-20 dalam melawan penjajahan Belanda.

Islamisasi yang telah berjalan sangat lama di Indonesia melalui para agennya dan di masanya masing-masing, menjadikan Islam menyebar di Indonesia. Islam menjadi bagian yang tidak terpisahkan bagi bumiputera. Islam telah mendarah daging di dalam sanubari bumiputera, dan haji menjadi penyambung warta yang sangat penting bagi tingkat ke-ilmu-an serta nilai-nilai mistik (sebagai bentuk singkretisme budaya) lainnya yang telah bercampur seiring me-

nyebarnya Islam di Indonesia.¹¹⁹

Bersamaan dengan kebangkitan agama di Indonesia, proses Islamisasi internasional yang di dalamnya juga terkait sikap politik Islam internasional (pembentukan *khilafah*) akhirnya bertemu pada sebuah titik dengan kebangkitan agama Islam di Indonesia. Pesatnya arus Islamisasi internasional serta sikap-sikap politik negara Islam yang diwakili oleh Turki (saat itu berafiliasi dengan Jerman) sangat membantu bagi terhubungnya antara Timur Tengah dengan Indonesia.¹²⁰

Keterhubungan antara Timur Tengah dengan Indonesia juga tampak pada proses pembentukan organisasi Islam yaitu SI. Sejak pendiriannya, para tokoh SI telah melakukan kontak dengan Turki. Turki sangat mendukung bagi kebesaran SI dalam memperjuangkan kepentingan Islam bumiputera untuk melawan kolonialisme Belanda. *Pan-Islamisme* tidak sekadar mengilhami terbentuknya persatuan bumiputera dan umat Islam di Indonesia, melainkan, menjadi penguat basis ideologis Islam dalam membentuk persatuan Islam internasional di Indonesia. Pada tahap inilah, semangat gerakan *Pan-Islamisme* semakin tampak dan cenderung menjadi bagian penting dalam proses perjuangan rakyat bumiputera (terutama SI) dalam melawan penjajahan Belanda yang kafir.

B. Gagasan Perjuangan Islam

Pergantian Gubernur Jenderal yang semula dipegang oleh Joannes B. van Heutz (1904-1909) dan digantikan

oleh A. Willem Frederik Idenburg (1909-1916)¹²¹, memiliki keuntungan serta kerugian dalam pergerakan SI menjelang tahun 1916. Persebaran kekuatan SI menjadi perhatian khusus bagi Idenburg menjelang akhir jabatannya. Perhatian khusus tersebut akhirnya berujung pada pemberian persetujuan terhadap pengajuan SI sebagai organisasi yang sah di Indonesia. Perlu dicermati lebih lanjut, pemberian legalitas terhadap SI bukan berarti SI dapat secara bebas untuk melakukan berbagai kegiatan seperti yang diharapkan. Pemberian legalitas tersebut pada dasarnya untuk menekan laju perkembangan SI.¹²² Upaya untuk menekan laju perkembangan SI tersebut terlihat ketika setiap SI yang tersebar di berbagai daerah, harus memiliki Anggaran Dasarnya masing-masing untuk disahkan sebagai organisasi yang legal. Artinya, SI harus mengubah sifat organisasinya yang sebelumnya terpusat dengan cabang-cabang di berbagai daerah, kini berubah dan setiap daerah memiliki kewenangan untuk memimpin kelembagaan SI-nya masing-masing.

Pengesahan terhadap SI beserta syarat-syarat kelembagaannya diterima baik oleh Tjokroaminoto sebagai *Hoofdbestuur* SI. Melihat kenyataan yang dapat meruntuhkan keberadaan SI, secara sigap Tjokroaminoto tepat tanggal 17-24 Juni 1916, mengadakan Kongres Nasional SI pertama yang diadakan di Bandung. Kongres tersebut pada dasarnya untuk membentuk Central Serikat Islam (CSI).¹²³ CSI dibentuk sebagai federasi dari berbagai SI lokal yang tersebar di seluruh Indonesia.¹²⁴ CSI secara struktural dipegang sepenuhnya oleh Tjokroaminoto dengan berbagai va-

riasi kepengurusan dalam setiap tahun pergantiannya.¹²⁵

Pasca terbentuknya CSI, Tjokroaminoto melakukan kunjungan ke berbagai daerah untuk membentuk beberapa organisasi SI lokal. *Vergadering* mulai diberlakukan untuk menandai proses pembentukan SI. Melalui kemampuan berpidato serta kekuatan suara baritonnya, Tjokroaminoto menjadi cahaya terang dalam SI. Hampir setiap warga bumiputera menggabungkan diri dalam SI. Tjokroaminoto selalu dielu-elukan sebagai *ratu adil*.¹²⁶ Sadar atas kemampuan serta daya tarik mistisnya sebagai orang Jawa, Tjokroaminoto semakin luas mempropagandakan SI di berbagai daerah untuk memperkuat basis SI di desa-desa di seluruh wilayah Indonesia.

Selain Tjokroaminoto, berbagai tokoh penting SI juga melakukan hal yang sama, seperti halnya Raden Gunawan, Abdul Moeis, serta Haji Agus Salim. Raden Gunawan melakukan propaganda di Jawa Barat hingga Sumatera Selatan. Abdul Moeis, melakukan propaganda di Sumatera Barat (tanah asal). H. Agus Salim, selain dia melakukan propaganda di berbagai daerah di Indonesia, melalui peminatan Islamnya, ia memperkuat basis ideologis dalam kelembagaan SI. Selain mereka, masih banyak anggota SI lainnya. Salah satu kader SI yang masih muda dan progresif muncul dari Semarang, Semaoen itulah namanya. Semaoen sebelumnya aktif sebagai propagandis *Vereniging voor spoor en Tramweg Personeel* (VSTP) dan tepat pada 6 Mei 1917, ia menjadi ketua SI Semarang.

Pasca dibentuknya CSI sebagai federasi SI lokal di ber-

bagai daerah, Tjokroaminoto beserta para aktivis SI lainnya, kembali menyuarakan Islam sebagai basis pergerakan SI. Identitas Islam tidak hanya digunakan untuk sekadar mengikat kaum pedagang bumiputera sebagai kelompok sosial yang relatif bebas, akan tetapi juga pada penerapan perilaku Islam dalam masyarakat.[†] Sebuah kenyataan yang tidak dapat ditolak, bahwa Islam telah melebur sebagai identitas bumiputera saat itu. Kebesaran SI melalui identitas Islam tidak hanya sekadar mengikat tali persaudaraan di antara bumiputera dalam beberapa hal, akan tetapi Islam selayaknya menjadi pengikat semuanya.

Gagasan Islam yang disuarakan oleh Tjokroaminoto seperti halnya pedang bermata dua. Di satu sisi, Islam dijadikan sebagai isu untuk mengikat kembali para pemodal Arab dan keturunannya yang sejak 1914 keluar sebagai donatur tetap SI dalam Oetoesan Hindia. Di sisi yang lain, Tjokroaminoto menggunakan Islam sebagai media pengikat bumiputera dalam melakukan perlawanan terhadap Pemerintah Belanda. Dengan demikian, Tjokroaminoto telah memainkan sebuah permainan yang sangat cantik bagi pergerakan bumiputera dan khususnya untuk SI. Kembalinya para donatur Arab, tentunya akan memberikan sumbangan dana bagi perjuangan SI dalam mengawal bumiputera yang mayoritas beragama Islam. Ketika pergerakan SI semakin kuat, SI dapat menggerakkan bumiputera dalam melawan penjajah Belanda.

Strategi yang dimainkan oleh Tjokroaminoto ternyata memiliki dampak yang besar bagi perkembangan SI. Organ

tersebut terus meningkat dan mendapat dukungan dari berbagai pihak, khususnya umat Islam bumiputera. Seperti halnya berikut ini:

Saja rasa vereeniging2 anak negri bangsa kaoem moeslimin, jang ada di Hindia Olanda tida ada jang lebih besar, dan blom perna vereeniging2 anak negri di H.O. jang soeda mendjadi kembang bibirnja dari roepa roepa bangsa jang ada di H.O. dan djadjahan lainnja, maoepoen sampe dibenoewa Europa, Hedjaz, d.l.l. selainnja dari vereen: S.I. Tapi saja rasa makanja sampe begitoe djaoeh terdengarnja boekan dari djahat of baiknja ini vereen. S.I. tjoema sadja orang orang lain bangsa ada sedikit kaget mendengar dan melihat dari tjepetnja Kaoem Moeslimin di H.O. soedah mengetahoei robahnja djaman, dan kemanoesiaan, kemadjoean kebangsaan menoeroet diini djaman jang, Modern" sampe dalem sedikit tempo sadja vereen: S.I. di H.O. soedah mempoenja ± 600,000 lid lid.¹²⁷

Maksud dari cuplikan tulisan ini pada dasarnya ingin menjelaskan bahwa berkembangnya SI adalah akibat adanya kesadaran rakyat bumiputera dan perkembangan umat Islam di Indonesia. Selebihnya dari tulisan tersebut, ingin menjelaskan bahwa perkembangan SI seharusnya disambut baik bagi semua kalangan bumiputera tanpa harus menghasut dan mencela keberadaan SI beserta anggota-anggotanya. Kebesaran SI sudah menjadi bukti bahwa SI yang telah memiliki keanggotaan mencapai 600.000 orang, melalui perkembangan umat Islam adalah baik untuk bumiputera.

Pada tahap inilah, SI kembali berjuang dengan menggunakan semangat Islam dan melebur serta memprakarsai terbentuknya berbagai organ lain dalam memperjuangkan

hal-hal yang berkaitan dengan perkembangan dan kemajuan Islam di Indonesia. Perkembangan SI yang dimaksudkan sebagai bagian dari perkembangan umat Islam di Indonesia tentu menjadi bagian penting proses pergerakan yang dilakukan oleh SI itu sendiri. Usaha untuk memajukan serta menolong berbagai hal berkaitan dengan perkembangan umat Islam, menjadi sebuah hal yang tidak dapat dipisahkan dari sifat dan fungsi SI di Indonesia. Seperti halnya proses kemunculan organisasi yang bernama *Alhelal Ahmar* dari Consulat General Toerki. Organ ini berkedudukan di Betawi yang bertujuan untuk membantu secara medis bagi para militer yang sedang berperang. Organisasi ini disambut baik dari berbagai kalangan baik SI maupun bumiputera lainnya, khususnya yang beragama Islam¹²⁸, sehingga berbagai cabang organ tersebut mulai bermunculan di berbagai daerah di Indonesia.

Selain itu, berbagai kebutuhan berkaitan dengan upaya peningkatan pengajaran umat Islam juga menjadi kebutuhan yang mendesak untuk diperjuangkan. Muhammadiyah sebagai organ bumiputera yang berkonsentrasi dalam bidang pendidikan serta pembaruan Islam, bersama-sama dengan SI turut memajukan pendidikan bagi bumiputera. Kebutuhan terhadap para guru serta berbagai panduan sistem pengajaran baca tulis al-Qur'an muncul atas kesadaran umat Islam di Indonesia, juga sebagai program yang secepatnya harus di realisasikan untuk kemajuan Islam di Indonesia.¹²⁹

Satu hal lagi yang juga diupayakan oleh SI beserta bumi-

putera lainnya adalah menggalang pendanaan bagi para haji yang tidak dapat pulang ke Indonesia akibat kekurangan uang. Kabar tentang adanya para haji yang kekurangan uang disampaikan secara tertulis oleh Consulat General Ottoman di Betawi.¹³⁰ Menyebarnya kabar tentang para haji yang kekurangan dana untuk perjalanan pulang ke Indonesia juga diterima oleh Dr. D.A. Rinkes sebagai penasihat Gubernur Jenderal di Indonesia dan diteruskan kepada para petinggi bumiputera. Para petinggi bumiputera akhirnya membentuk sebuah komite menolong haji-haji bermukim di Mekah. Kesepakatan pembentukan komite ini ditandatangani oleh beberapa pihak seperti berikut: 1) R.A.A. Achmad Djajadiningrat (regent te Serang); 2) Hadji Hassan Moestapa (Hoofdpanghoeloe te Bandung); 3) Dr. D.A. Rinkes (Adviseur voor Inlandsch zaken, te Weltevreden); 4) R. Pengoeloe Tafsir anom (Hoofdpengoeloe te Solo); dan 5) R.O.S. Tjokroaminoto (President Central S.I., te Soerabaja).¹³¹

Upaya SI untuk membantu para haji yang kekurangan uang pada dasarnya untuk menyelamatkan serta membantu bumiputera, bahwa haji merupakan bagian penting dalam proses perkembangan SI untuk mengawal bumiputera ke depan. Melalui para haji inilah, pendidikan Islam dapat berkembang secara cepat di Indonesia. Selain itu, upaya membantu para haji tersebut adalah untuk menyelamatkan aset SI, karena para haji menjadi garda terdepan dalam melawan kebijakan Kristenisasi yang diterapkan oleh Pemerintah Hindia Belanda.¹³²

C. Gagasan SI tentang *Bumiputera Zelfbestuur*

Melihat besarnya kelembagaan SI, tahun 1916 Tjokroaminoto melakukan Kongres Nasional SI pertama di Bandung. Penggunaan istilah “nasional” menjadi tanda SI telah muncul sebagai sebuah perkumpulan bumiputera yang besar dan tersebar di seluruh Nusantara. Kebesaran SI adalah wujud dari kebesaran identitas Islam yang ada di dalamnya. Melihat laju perkembangan SI begitu pesat, Tjokroaminoto berpikir, bahwa sudah layak bagi bumiputera untuk menentukan pemerintahannya sendiri seperti yang dicita-citakan. Seperti yang diungkapkan dalam pidatonya:

Wij hebben ons ras lief en met de kracht van de leer van onzen godsdienst (Islam) doen wij ons best om allen of het grootste gedeelte van onze bangsa een te maken, wij hebben lief het land, dat ons geboren zag en wij hebben lief het gouvernement, dat ons beschermt. Daarom zijn wij niet beschroomd om op alles, wat eij denken goed te zijn, de aandacht te vestigen, en te vragen het geen wij denken dat ons ras, onzen geboorte-grond en ons gouvernement zal kunnen verbeteren.¹³³

kita mencintai bangsa kita dan dengan ajaran agama kita (Islam), kita berusaha sepenuhnya untuk mempersatukan seluruh atau sebagian terbesar bangsa kita. Kita mencintai negeri yang telah menyaksikan kelahiran kita, dan kita mencintai pemerintah yang melindungi kita. Maka dari itu kita pun tidaklah segan-segan untuk meminta perhatiannya terhadap apa yang kita anggap baik, dan meminta segala sesuatu yang kita anggap dapat memperbaiki bangsa kita, tanah air kita dan pemerintah kita.

Tjokroaminoto pada dasarnya ingin menyampaikan cita-cita besar SI yaitu memiliki pemerintahan sendiri sebagai sebuah bangsa yang merdeka, bangsa yang dipimpin

oleh bagian dari bangsanya sendiri, bukan sebagai bangsa yang hidup di bawah tekanan kolonialisme Belanda. Ungkapan tentang *"kita mencintai pemerintah yang melindungi kita"* pada dasarnya bukan sebuah ungkapan yang tunduk terhadap Pemerintah Kolonial Belanda. Sangat jelas terlihat, bahwa bukan sebuah keberuntungan SI mendapat legalitasnya sebagai organisasi bumiputera, akan tetapi kebesaran SI menjadi fakta yang tidak dapat ditolak, sehingga memaksa Idenburg untuk mengesahkan SI sebagai organ bumiputera yang legal.¹³⁴

Ungkapan *"maka dari itu kita pun tidaklah segan-segan untuk meminta perhatiannya terhadap apa yang kita anggap baik, dan meminta segala sesuatu yang kita anggap dapat memperbaiki bangsa kita, tanah air kita dan pemerintah kita"*, menjadi sebuah penjelasan bahwa Tjokroaminoto tidak serta-merta tunduk terhadap Pemerintah Kolonial Belanda. Ungkapan tersebut adalah sebuah diplomasi politik tingkat tinggi sebagai upaya untuk meminimalisasi tekanan Belanda terhadap bumiputera. Menerima fasilitas pemerintah Belanda bukan berarti tunduk, melainkan untuk mencapai kebesaran bumiputera dalam merealisasikan cita-cita besarnya sebagai bangsa yang merdeka.

Gagasan masuknya SI dalam *Volksraad* (dewan rakyat) merupakan sebuah usaha besar dalam mengangkat bumiputera agar tidak diperlakukan oleh Pemerintah Hindia Belanda secara sewenang-wenang. *Volksraad* sebagai lembaga negara yang diharapkan berfungsi sebagai pembuat undang-undang, dianggap Tjokroaminoto sangat penting.

Perlu diingat, bahwa sebelum SI menjadi besar demikian, tahun 1912, SDI sebagai organ bumiputera (sebelum menjadi SI) mendapat tekanan dari pemerintah dalam hal ber-serikat, berkumpul serta mengadakan rapat. Dengan demikian, landasan tersebut mengilhami Tjokroaminoto agar SI yang telah mendapatkan pengakuan dari Pemerintah Hindia Belanda, benar-benar mampu memanfaatkan hak tersebut sebagai organ bumiputera yang benar-benar berjuang untuk kemakmuran bumiputera.

Kesempatan berpartisipasi dalam *Volksraad* menjadikan anggota SI akan mendapatkan sebuah kemakmuran bagi bumiputera melalui penentuan peraturan-peraturan yang dibuatnya sendiri. Tjokroaminoto melihat bahwa *zelfbestuur* (berpemerintahan sendiri) yang semula sebagai bentuk “desentralisasi Pemerintahan Hindia Belanda” patut untuk disikapi lebih lanjut. Artinya, *zelfbestuur* harus diraih tidak hanya di beberapa daerah atau sebagian daerah seperti yang dimaksudkan oleh Pemerintah Belanda, akan tetapi perlu diraih dan diperjuangkan bagi seluruh bumiputera. Seperti yang dikatakan:

Aanfankelijk hoopt Hare Majesteit slechts op het tot stand komen van zelfbestuur for gewesten of gedeelten van gewesten, maar wij zijn ervan overtuigd, dat in die verwachting van Hare Majesteit ook de bedoeling ligt opgesloten, om mattetijd zelfbestuur te geven voor geheel Nederlansh Indie.¹³⁵

Pada mulanya, Seri Baginda hanya mengharapkan terbentuknya *zelfbestuur* untuk daerah-daerah dan bagian-bagian daerah, namun kita yakin bahwa dalam harap-

an Seri Baginda juga tersimpul maksud untuk pada waktunya memberikan *zelfbestuur* bagi seluruh Hindia Belanda.

Maksud dari ucapan Tjokroaminoto pada dasarnya sudah dapat ditebak, bahwa dugulirkannya *zelfbestuur* dari Negara Belanda untuk Hindia Belanda, merupakan sebuah kesempatan. Walaupun pada dasarnya, *zelfbestuur* bukan seperti yang dipahami oleh bumiputera, akan tetapi, istilah itu harus diwujudkan secara pribadi untuk diterapkan kepada seluruh bumiputera tanpa kecuali. Melalui pencapaian itu, *Volksraad* menjadi ajang penting bagi bumiputera dalam merealisasikan gagasan *zelfbestuur* tersebut.

Selain ide dalam mencapai bumiputera berpemerintahan sendiri, Tjokroaminoto juga telah berpikir bahwa Pemerintah Hindia Belanda adalah Kapitalistik. Kapitalisasi yang dilakukan oleh Belanda telah menyeret bumiputera dalam kesengsaraan yang berkepanjangan. Seperti yang diucapkan:

...Men gevoelt hoe langer hoe meer, dat het niet meer past dat Indie geregeerd wordt door Holland, gelijk een landheer zijn perceelen beheert. Het is niet betamelijk Indie te beschouwen als een melkkoe, die slechts eten krijgt ter wille van haar melk; het is niet behoorlijk dit land te beschouwen als een plaats, waar de menschen slechts heengan met het doel om voordeel te behalen, en thans is het ook niet passend meer, dat de ingezetenen, voornamelijk Inlanders, geenrecht hebben van medezeggingschap in regeeringsaangelegenheden die het lot van hen regelen....¹³⁶

...orang semakin lama semakin merasakan, bahwa tidak pantas lagi Hindia tidak pantas lagi diperintah oleh Negeri Belanda, bagaikan seorang tuan tanah yang menguasai tanah-tanahnya. Tidak pada

tempatnyanya menganggap Hindia sebagai seekor sapi perahan yang hanya diberi makan demi susunya; tidaklah pantas untuk menganggap negeri ini sebagai tempat kemana orang berdatangan hanya untuk memperoleh keuntungan, dan sekarang sudah tidak pada tempatnya lagi, bahwa penduduknya, terutama anak negerinya sendiri, tidak mempunyai hak turut berbicara dalam soal-soal pemerintahan, yang mengatur nasib mereka....

Perilaku kapitalistik Belanda yang tidak memanusiakan bumiputera dianggap Tjokroaminoto sangat berlebihan, karena bumiputera hanya dimanfaatkan oleh Belanda untuk mendapatkan keuntungan bagi Belanda sendiri. Bumiputera telah banyak merasakan kesengsaraan, sehingga Tjokroaminoto mencontohkan, bumiputera sebagai *seekor sapi perahan yang hanya diberi makan demi susunya*. Sebagai bangsa yang besar, bumiputera seharusnya memiliki kewenangan atas dirinya sendiri, sehingga tidak lagi diperintah oleh Kolonialis Belanda. Melalui *Volksraad*, kembali Tjokroaminoto memantapkan tekad kepada Bumiputera untuk benar-benar memanfaatkan kesempatan tersebut.

Sebagai orang yang beragama Islam, Tjokroaminoto dan bumiputera benar-benar bersyukur telah keluar dari berbagai tekanan yang dilakukan Belanda. Tekanan dilawan dengan sekuat tenaga oleh bumiputera, sehingga berbagai tekanan yang diberlakukan Belanda terhadap SDI tahun 1912, benar-benar menjadi pelajaran penting bagi Tjokroaminoto dan bumiputera. Seperti yang diucapkan

Goode zij dank, God is zeer rechtvaardig, God verhoort de wanschen van zijn schepselen; Onze Koningen en de Regeering zijn beleidvol. Nu komt een groote verandering:

Artikel 111 *regeringsreglement*, dat de menschen het houden van politieke vergaderingen verbiedt, is vervallen (dood), en hoewel nog niet volkomen begraven...¹³⁷

kita bersyukur kepada Illahi, Tuhan yang maha adil, Tuhan telah mengabulkan permohonan makhluknya; ratu kita dan pemerintah sangat bijaksana. Sekarang telah terjadi perubahan besar; Pasal 111 Peraturan Pemerintah yang melarang orang-orang mengadakan rapat-rapat politik, sekarang telah tiada lagi (mati), dan walaupun belum dikubur seluruhnya....

Tjokroaminoto benar-benar mengajak bumiputera untuk bersyukur kepada Tuhan yang Maha Esa karena dikabulkannya doa untuk keselamatan bumiputera. Doa yang dimaksud oleh Tjokroaminoto dapat dimaknai sebagai sebuah pengharapan terhadap sebuah pertolongan atas berbagai musibah (tekanan oleh Belanda) yang dialami bumiputera. Terkabulnya doa (anggapan) tersebut kembali mengingatkan Tjokroaminoto sebagai umat Islam untuk mensyukuri nikmat yang telah didapat. Berbagai nikmat yang dapat dirasakan adalah, dicabutnya *regeeringsreglement* artikel 111 yang menyatakan adanya larangan berserikat, berkumpul serta rapat-rapat politik. Selain itu, *zelfbestuur* telah diberlakukan di Indonesia. Dengan demikian, Tjokroaminoto mengingatkan kepada semua bumiputera untuk mensyukuri nikmat yang telah diberikan dengan cara merawat serta mengejawantahkan dalam perilaku bumiputera untuk memerintah dirinya sendiri.

Memerintah dirinya sendiri berarti melawan Kapitalisme Belanda, yang mana kapitalisme sangat merugikan umat Islam dan bertentangan dengan Islam.¹³⁸ Bentuk-ben-

tuk kapitalisasi yang dianggap bertentangan dengan Islam adalah berkaitan dengan penganiayaan terhadap manusia yang lain, penganiayaan atas manusia lainnya bertolak belakang dengan salah satu dasar pembentukan SI yaitu terbentuknya rasa persaudaraan dan tolong menolong.¹³⁹

Selain kapitalisasi sangat merugikan bumiputera dan bertentangan dengan Islam, penolakan terhadap Kapitalisasi Belanda menjadi bagian dari penegas sikap SI yang juga telah disuarakan oleh berbagai anggota SI lainnya di berbagai daerah. Istilah penindasan serta bentuk-bentuk Kapitalistik yang dimaksud Tjokroaminoto adalah untuk memberikan penjelasan terhadap anggota SI, bahwa bergabungnya SI menjadi anggota *Volksraad* juga sebagai sebuah upaya untuk menolak kapitalisasi serta berbagai bentuk penindasan Belanda yang secara jelas merugikan bumiputera. Dengan demikian, Tjokroaminoto dan berbagai anggota SI lainnya menyerukan kepada bumiputera menolak Kapitalisme berdosa (*zondig kapitalisme*).¹⁴⁰

Ide dan gagasan mengajak SI bergabung ke dalam *Volksraad* lebih kuat ketika menjelang tahun 1917. Tahun 1917 SI mengadakan Kongres Nasional kedua. Dalam kongres tersebut Tjokroaminoto, Abdul Moeis serta beberapa anggota SI lainnya begitu gencar mengecam sistem desentralisasi Hindia (penerapan *zelfbestuur*) yang berwujud dalam Lembaga Dewan Kota dan Daerah. Sedangkan yang berhak menjadi anggota Dewan Kota atau Daerah hanya dari mereka bumiputera yang telah menjadi pegawai negeri atau Pangreh Praja. Berbagai kecaman muncul terkait dua

hal, *pertama*: terkait sistem desentralisasi yang melahirkan Dewan Kota dan Daerah. Sistem tersebut awalnya sangat menguntungkan bumiputera yang telah memiliki berbagai wakil dalam Pemerintah Hindia Belanda. Akan tetapi, berbagai wakil bumiputera dalam Pemerintah Hindia Belanda adalah dari para pegawai negeri atau Pangreh Praja. Sistem perwakilan tersebut sangat terbatas dan tidak dapat mencakup semua kepentingan serta aspirasi bumiputera seutuhnya.

Kedua: berbagai wakil bumiputera dalam Pemerintahan Hindia Belanda dari pihak Pangreh Praja atau pegawai negeri itu sendiri. Kekecewaan berbagai kalangan bumiputera (terutama anggota SI) sangat mendalam terkait adanya sikap-sikap para Pegawai Negeri yang justru tidak mengemban amanah bumiputera. Keberadaan mereka di dalam pemerintahan justru dimanfaatkan untuk kemakmuran pribadi. Ikatan yang dibangun bukan ikatan profesionalitas antara pemerintah dengan bupati sebagai pengemban amanah rakyat, melainkan sikap yang muncul adalah sifat kepatuhan bupati sebagai bawahan serta kaki tangan Belanda. Dengan demikian, hal-hal yang berkaitan dengan kemakmuran bumiputera yang terwujud dalam pembauran sistem desentralisasi untuk Hindia Belanda, tidak dapat dinikmati oleh bumiputera seutuhnya. Seperti yang diungkapkan oleh Tjokroaminoto dalam pidatonya.

Eveneens behooren de gekozen volksvertegenwoordigers ook ernstig van hun plicht doordrongen te zijn, zij behooren te beseffen dat zij gekozen zijn om de welvaart van het land en

van de groote massa te bevorderen. Daarom behooren de gekozenen bekwame personen te zijn en de verantwoordelijkheid te beseffen, welke hen is opgelegd. Zij moeten niet op eigen voordeel bedacht zijn, maar op de behartiging van aller belangen, van de belangen van het land. In Nederland heeft men de Staten-Generaal. Welke de volksvertegenwoordiging vormen.¹⁴¹

Dan para wakil rakyat yang terpilih harus pula menyadari sepenuhnya kewajiban-kewajiban mereka, mereka harus sadar bahwa mereka dipilih untuk meningkatkan kesejahteraan negara dan masyarakat luas. Maka itu, orang-orang yang dipilih harus orang-orang yang cakap dan penuh kesadaran akan tanggung jawab yang dibebankan kepada mereka. Mereka tidak boleh mengharapkan keuntungan pribadi, melainkan harus mengusahakan terjaminnya kepentingan seluruh rakyat, kepentingan negara. Di negeri Belanda terdapat Staten General yang merupakan suatu Dewan Perwakilan Rakyat.

Tjokroaminoto ingin menyampaikan bahwa para anggota *Volksraad* harus memiliki sikap yang tegas serta kemandirian dalam membangun bangsa dan negara untuk kemakmuran bumiputera. Para anggota harus memiliki kecakapan dan tidak mengambil keuntungan secara pribadi. Berbagai bentuk dan sikap yang telah dipraktikkan oleh anggota Dewan Kota dan Daerah menjadi catatan khusus bagi anggota-anggota SI. Sikap-sikap yang hanya menguntungkan diri sendiri serta tindakan represif terhadap bumiputera justru menjadi kebanggaan para anggota dewan tersebut. Sikap dan perilaku anggota Dewan Kota dan Daerah terse-

but justru memperkuat tindak represivitas Belanda terhadap bumiputera dengan meminjam tangan-tangan bumiputera itu sendiri melalui pangreh praja tersebut.¹⁴²

Sebagai bentuk kekecewaan mendalam terhadap sikap dan tindakan anggota *Volksraad* yang hanya diperuntukkan kepada segelintir orang, Tjokroaminoto dalam terusan pidotonya mengatakan:

...slechts lantsdienaren en rijken hebben daarin zitting, en als de Inlander (si kromo) eens iets van de Gewestelijke Raden te Hooren krijgt dan is het een last tot betalen van een nieuwe belasting!¹⁴³

...hanya pegawai negeri dan orang-orang kaya saja yang dapat turut bersidang di dalamnya, dan bila si kromo mendengar sesuatu dari dewan daerah biasanya hanya dalam bentuk perintah untuk membayar suatu pajak baru!

Tjokroaminoto merasa risih atas berbagai tindakan para bupati sebagai anggota Dewan Kota atau Daerah. Mereka hanyalah sebagian dari warga bumiputera. Keberadaan mereka diuntungkan oleh kedudukan mereka sebagai Pangreh Praja, sehingga mereka menjadi bagian yang terjaring dari persyaratan yang telah diberlakukan oleh Pemerintah Hindia Belanda. Kesempatan yang dimiliki oleh para bupati di berbagai daerah justru tidak dimanfaatkan untuk membantu bumiputera melalui kebijakannya. Kebijakan yang dikeluarkan justru bentuk ketaatan bupati pada Pemerintah Hindia Belanda, untuk mendapatkan acungan jempol dari pemerintah. Bukan sebaliknya, mendudukkan peran bupati sebagai pengayom bumiputera. Sikap para

bupati inilah yang sering kali menjadi kolonialisme baru bagi bumiputera dan memosisikan rakyat bumiputera sebagai pelayan pemerintah dengan hanya dimanfaatkan untuk sekadar membayar pajak belaka.

Setelah berbagai kecaman dilontarkan oleh Tjokroaminoto terhadap para anggota Dewan Kota dan Daerah berkaitan dengan sikap dan perilakunya, Tjokroaminoto kemudian memaparkan kepada Pemerintah Hindia Belanda berkaitan dengan faktor-faktor tidak terlaksananya sistem *zelfbestuur* bagi bumiputera seutuhnya.

Maar wanneer ons gevraagd werd of wij tevreden zijn met dat geschenk van de regeering, dan zouden wij liegen wanneer wij zeiden van ja. Alhoewel de Regeering ons het kiesrecht heeft geschonken, zoo blijkt toch duidelijk dat Zij niet graag te veel Inlanders (in de Gemeenteraden) ziet. In den Gemeenteraad van Batavia, die 24 leden telt, zijn maar 9 zetels voor inlanders beschikbaar gesteld.

Tetapi bila kita ditanya apakah kita merasa puas dengan hadiah pemerintah tersebut maka kita akan berdusta bila kita mengatakan "ya". Walaupun pemerintah telah memberikan kita hak pilih, tetapi jelas sekali bahwa ia sebenarnya tidak menginginkan terlalu banyak kaum bumipoetera didalam Dewan Kota. Didalam dewan kota Batavia yang jumlah anggotanya 24 orang, hanya 9 kursi disediakan untuk Bumiputera.

dalam terusan pidatonya, ia juga mengatakan:

...zoo is o.a. bepaald dat slechts die Inlanders het kiesrecht hebben, die de Nederlandsche taal machting zijn en een inkomen van minstens f 50,-'s maands hebben...maar moeten die volksvertegenwoordigers dan slechts uit de Gouvernements dienarengekozen worden?¹⁴⁴

...bumiputera yang mempunyai hak pilih hanyalah mereka yang dapat berbahasa belanda dan berpendapatan sedikitnya F.50,- (lima puluh Golden) setiap bulan...apakah para wakil rakyat itu harus terdiri dari semata-mata atas pegawai negeri?

Secara tegas Tjokroaminoto mengungkapkan bahwa desentralisasi Hindia Belanda sebagai bentuk penerapan *zelfbestuur* untuk bumiputera pada dasarnya timpang. Artinya bukti jumlah anggota Dewan Kota dan Daerah yang masih lebih besar pihak Belanda daripada bumiputera mempertegas tuduhan Tjokroaminoto terhadap Pemerintah Belanda yang tidak sungguh-sungguh menginginkan terciptanya *zelfbestuur* di Indonesia. Selain itu, berbagai syarat bagi pemilih yang didasarkan pada kepemilikan gaji (keuangan) minimal f.50,- semakin memberikan penjelasan bahwa rakyat Indonesia (ex. partikelir) tidak akan pernah menjadi pemilih seperti yang digolongkan oleh Pemerintah Hindia Belanda tersebut. Hal demikian sangat rasional, bahwa jumlah kepemilikan gaji atau keuangan minimal f.50,- hanya akan diperoleh bagi Pangreh Praja atau Pegawai Negeri dan bukan bumiputera seluruhnya.¹⁴⁵

Sebagaimana pandangan Tjokroaminoto tentang pembentukan *Volksraad* sebelumnya, bahwa *Volksraad* pada dasarnya adalah Dewan Rakyat, sehingga semua bumiputera selayaknya berhak atas dewan tersebut. Bagi para pemilih untuk terbentuknya Dewan Rakyat maka, rakyat seluruhnya pula memiliki kewenangan atas wakil yang akan dipilih dalam dewan tersebut. Tidak lagi Dewan Rakyat hanya diduduki oleh segelintir orang dari golongan para

bupati dan abdi negara lain di bawahnya, melainkan seluruh lapisan bumiputera tanpa terkecuali.

Kecaman terhadap Belanda serta anggota Dewan Kota dan Daerah juga disuarakan oleh anggota SI lainnya yaitu Abdul Moeis. Kecaman Moeis pada prinsipnya tidak jauh beda dengan Tjokroaminoto. Moeis lebih menyikapi pada persoalan Kapitalisme Belanda yang mengakibatkan runtuhnya nasionalisme serta sikap kebangsaan bumiputera. Moeis melihat bahwa masih terdapat berbagai pihak yang merasa tidak berkenan melihat bumiputera menjadi besar dan kuat yang dapat berdiri di kakinya sendiri. Berbagai sikap Belanda dalam menggulirkan *zelfbestuur* bagi bumiputera yang hanya dapat dimanfaatkan oleh segelintir orang merupakan bentuk atau cara Belanda memecah kekuatan persatuan bumiputera. Selain itu, berbagai pihak yang dianggap Moeis sangat berbahaya bagi bumiputera adalah orang-orang atau pihak-pihak seperti *tropenkoller*, penghasut serta musuh dalam selimut. Pihak-pihak seperti itu sangat berbahaya sehingga dapat mencederai rasa persatuan serta kebangsaan bumiputera. Seperti dalam pidatonya.

Maar deze groep van tropenkollers is niet de gevaarlijkste. Veel gevaarlijker zijn zij, die zich in onze beweging mengen kwasie om ons te helpen, doch inderdaad om ons tegen te werken. Zij verschuilen zich achter een vriendelijk gelaat en lieve woorden, zoodat vele Inlanders zich laten inpalmen, maar daarna worden deze als werktuigen gebruikt om het nationaliteitsgevoel te onderdrukken. Als dat niet goed lukt dan trachten zij tweedracht onder ons te zaaien. Deze middelen zijn reeds door eene Nederlandsche vereeniging in Indie toegepast en zulks is goedgekeurd in haar orgaan.¹⁴⁶

Namun demikian, kelompok tropenkoller ini bukanlah kelompok yang paling berbahaya. Yang lebih berbahaya lagi ialah mereka yang bercampur baur dalam perhimpunan kita berpura-pura untuk menolong kita, tetapi sebenarnya bekerja untuk menentang kita. Mereka berlindung di belakang wajah yang ramah dan kata-kata manis sehingga banyak kaum Bumiputera yang terkecoh karenanya, akan tetapi kaum bumiputera ini kemudian diperalat untuk menekan rasa kebangsaan tersebut. Bila siasat ini tidak berhasil baik, maka mereka akan berusaha memecah belah kita. Cara-cara seperti itu telah dijalankan oleh suatu perhimpunan Belanda di Hindia dan hal ini disetujui dalam majalah mereka.

Menurut pandangan Moeis, bahwa berbagai siasat yang dilakukan oleh Belanda serta berbagai pihak lainnya sangat merugikan bumiputera. Berbagai hal yang dilakukan oleh SI sebagai organ bumiputera telah dicerai berbagai pihak yang ingin memecah persatuan bumiputera. Yang dimaksud oleh Moeis dalam pidatonya tersebut adalah Sneevlit dan kawan-kawannya yang tergabung dalam *Indische Sociaal Demokratische Vereeniging* (ISDV). Ia dianggap Moeis didatangkan ke Indonesia untuk menyebarkan paham Marxis untuk memecah SI sebagai organ bumiputera yang besar. Mereka bekerja dengan cara melakukan infiltrasi kepada para anggota SI yang dianggap dapat mewakili pikiran serta angan-angan meraka untuk Indonesia. Kendati Moeis tidak menolak untuk menjalin hubungan dengan pihak-pihak Eropa dan lainnya, akan tetapi Moeis tetap bersikukuh bahwa bumiputera harus menjadi pemimpin bagi pergerakan bumiputera sendiri, bukan sebaliknya yaitu hanya diperalat untuk mencapai tujuan kelompok tersebut.

Berbagai kecaman terhadap Belanda serta bumiputera -layaknya Belanda- semakin keras disuarakan oleh anggota SI. Berbagai kebijakan Belanda serta para anggota Dewan Kota dan Daerah menjadi prioritas utama anggota SI. Sebagaimana kepentingan SI dalam *Volksraad*, SI juga menyoroti persoalan hak pemilih bumiputera. Kritikan anggota SI terhadap para anggota Dewan Kota dan Daerah yang tidak menampakkan sikap profesionalitasnya juga disambut baik oleh beberapa bupati yang kritis dan berpendidikan serta menjadikan dewan sebagai lembaga untuk menyejahterakan rakyat. Seperti halnya Hasan Djayadiningrat serta bupati-bupati lainnya. Ia secara tegas menentang praktik-praktik Kapitalisasi bupati yang menjadi anggota Dewan Kota dan Daerah yang hanya memperkaya diri semata. Selain itu, Hasan Djayadiningrat seorang yang berpendidikan, sangat mendukung organ-organ politik bumiputera turut berkecimpung dalam *Volksraad*, sehingga selain memperbanyak keanggotaan dalam dewan, juga diharapkan mampu menyuarakan aspirasi bumiputera secara luas.¹⁴⁷

Pencapaian sebuah bangsa berpemerintahan sendiri terus dikembangkan. Desakan terhadap Pemerintah Belanda untuk menyertakan semua bumiputera dalam menentukan kebijakan bangsanya sendiri terus dilakukan. Sampai pada sebuah kesimpulan, Pemerintah Hindia Belanda tidak dapat menolak bahwa bumiputera sepatutnya mendapatkan hak tersebut. *Volksraad* sebagai satu-satunya lembaga perwakilan bumiputera yang dibentuk oleh Peme-

rintah Hindia Belanda akhirnya menjadi ajang bagi bumiputera untuk mencetuskan gagasannya untuk kemakmuran bumiputera.

D. SI Berjuang di dalam *Volksraad*

Di bentuknya *Volksraad*, tentu telah dipertimbangkan oleh Van Limburg Stirum sebagai Gubernur Jenderal Hindia Belanda (1916-1920). Pertimbangan demikian terkait situasi Belanda yang saat itu terlibat perang di Eropa. Upaya melunak yang diberlakukan oleh Pemerintah Hindia Belanda terhadap Indonesia adalah sebuah dorongan serta sebuah reaksi agar Indonesia tetap mendukung upaya-upaya yang dilakukan oleh Belanda.

Sebagai upaya untuk merealisasikan kompromi Belanda terhadap Indonesia di masa perang tersebut, akhirnya Van Limburg Stirum mengupayakan berbagai tindakan terkait dengan hal tersebut. Sikap kompromi tersebut sangat terlihat, ketika Van Limburg Stirum sangat mendukung pergerakan bumiputera dengan terus mengupayakan Indonesia ke arah yang lebih otonom untuk mengatur dirinya sendiri. Keinginan tersebut, pada dasarnya tidak secara tegas dilakukan oleh Van Limburg Stirum, akan tetapi beberapa hal, terkait proses ke arah yang demikian cukup meyakinkan, bahwa kebebasan berkumpul dan berserikat dilegalkan dalam sistem administrasi kolonial. Selain itu, Van Limburg Stirum juga memberlakukan pajak yang tinggi terhadap ekspor dan impor perusahaan di Indonesia sebagai upaya untuk membangun sistem ekonomi Indonesia yang lebih stabil.¹⁴⁸

Tepat pada 19 Januari 1918, pemilihan anggota *Volksraad* dilakukan. Beberapa nama telah masuk penjangkaran sebagai anggota *Volksraad* yang dipilih oleh Pemerintah Hindia Belanda.¹⁴⁹ Ketika 19 nama telah muncul dan disahkan oleh Pemerintah Hindia Belanda, ternyata menjelang bulan Februari, Gubernur Jenderal Van Limburg Stirum mengakomodir beberapa pihak bumiputera yang dianggap benar-benar menginginkan kemajuan bagi bumiputera. Beberapa nama akhirnya disebut dan diangkat menjadi anggota *Volksraad* dan bergabung dengan ke-19 anggota *Volksraad* lainnya. Beberapa nama yang masuk adalah Mangkunegara Prang Wedana, Tjokroaminoto, Dwijosewojo, Tjipto Mangunkoesoemo, dan M. Tajeb. Dengan demikian, sejak februari itulah, Tjokroaminoto masuk sebagai anggota *Volksraad* sebagai perwakilan dari SI.¹⁵⁰

Menjelang bulan November sekitar akhir peperangan di Jerman tahun 1918 terkait penggulingan kerajaan dan terbentuknya sebuah republik yang didukung oleh golongan sosialis, menimbulkan persoalan di Negeri Belanda. Di sisi yang lain, partai Sosialis Demokrat Belanda mengadakan percobaan pengambilalihan pemerintahan Belanda, akan tetapi berkat kegigihan kelompok demokrat, kelompok sosialis akhirnya mundur dan pemerintahan dapat dipertahankan. Laporan tentang kekacauan di dalam pemerintahan Belanda akhirnya sampai di Indonesia. Laporan tersebut akhirnya direspons oleh orang-orang Sosialis Belanda dari *Sociaal Democratische Arbeiders Partij* (SDAP)¹⁵¹ di Indonesia seperti Ch.G.Cramer dan akhirnya membentuk fraksi

radicalle concentratie (konsentrasi radikal) dalam *Volksraad*. Fraksi ini bertujuan untuk mempercepat perluasan kewenangan *Volksraad* sebagai badan legeslatif yang sesungguhnya untuk bumiputera.¹⁵²

Lembaga tersebut pada prinsipnya diupayakan untuk mendukung kebijakan kelompok Sosialis Belanda dengan cara menarik simpati para anggota *Volksraad* di Indonesia.¹⁵³ Akan tetapi, apa pun pertentangan yang terjadi di antara sesama orang Belanda dengan organnya masing-masing tersebut, ternyata mendapat sambutan yang sangat baik dari para anggota *Volksraad* dari bumiputera, terutama SI. Sebagai upaya untuk mendukung fraksi *radicalle concentratie*, di luar *Volksraad* dibentuklah *democratische concentratie* sebagai badan kerja sama untuk mengusung gagasan serupa. Dalam *Democratische Concentratie*, dapat dikatakan bahwa hampir seluruhnya diduduki oleh para pemimpin SI seperti sebagai berikut: Ketua: Tjokroaminoto; Wakil: Haji Agus Salim; dan Sekretaris: Abdoel Moeis; serta terdapat tiga anggota yang masing-masing dari wakil Budi Utomo, wakil dari Insulind, dan wakil dari SDAP. *Concentarie* tersebut secara riil menuntut agar dapat berpartisipasi dalam Komisi Alting. Komisi Alting merupakan komisi yang ditugaskan untuk menyusun suatu rencana bagi sistem perwakilan di Indonesia. Disebutnya komisi Alting tersebut, terkait dengan nama ketuanya yaitu J.H. Carpentier Alting.¹⁵⁴

Begitu pula dengan Gubernur Jenderal Van Limburg Stirum, ia juga telah menerima laporan atas kekacauan pemerintahan Belanda. Sebagai bagian dari kelompok etisi,

ia secara sigap melakukan berbagai upaya untuk kembali menarik simpati para anggota *Volksraad* bumiputera agar dapat menerima serta mendukung kebijakan Van Limburg Stirum dan tidak mengikuti arus besar sebagaimana kebijakan politik kelompok sosialis Belanda. Dengan demikian, untuk mengupayakan hal tersebut, Van Limburg Stirum memberikan *November Beloften* (janji November) kepada bumiputera yaitu membentuk suatu komisi pembaruan yang bertugas untuk mempelajari berbagai kemungkinan perluasan dan perbaikan dalam sifat dan kekuasaan *Volksraad*.¹⁵⁵

Sebagai upaya untuk meyakinkan gagasan janji November tersebut, Van Limburg Stirum akhirnya memberikan kejelasan terhadap tugas serta kewenangan komisi pembaruan tersebut. Tugas dari komisi pembaruan adalah untuk memberikan masukan terhadap gubernur jenderal bagi terciptanya sistem desentralisasi pemerintahan Hindia Belanda. Komisi pembaruan dibentuk dan akhirnya menghasilkan sebuah rumusan bagi keberlangsungan hubungan antara Belanda dengan Hindia Belanda.

Rumusan yang dihasilkan adalah sebagai berikut: 1) merumuskan kembali pola hubungan Hindia Belanda dengan Belanda; 2) membangun susunan birokrasi Hindia Belanda; 3) mengembalikan atau memosisikan swapraja dalam sistem tata negara Hindia Belanda; 4) mengatur posisi kekuasaan yang ada di luar wewenang birokrasi Pemerintah Hindia Belanda; dan 5) *Volksraad* sebagai sebuah lembaga yang dapat mengatur masalah-masalah hubungan di antara sesama anggota masyarakat.¹⁵⁶

Praktis dari semua yang diupayakan oleh komisi tersebut adalah merumuskan sebuah kebijakan baru, terkait dengan pembentukan wilayah Indonesia menjadi propinsi-provinsi dan distrik-distrik, dimana daerah tersebut diwakili oleh badan perwakilannya masing-masing. Upaya pembentukan yang demikian, dianggap cukup mewakili keinginan dari berbagai pihak bumiputera, bahwa anggota *Volksraad* tidak diangkat, akan tetapi di pilih secara langsung oleh rakyat yang ditetapkan dalam pasal 6 ketentuan komisi pembaruan. Pasal tersebut menjelaskan bahwa semua masyarakat Indonesia tanpa dibedakan rasnya dapat menjadi anggota *Volksraad*, selain itu, dalam ketentuan tersebut juga di jelaskan memberikan perluasan kewenangan *Volksraad* sebagai lembaga legeslatif. Sebagai upaya untuk menyokong ketentuan yang telah dihasilkan oleh komisi pembaruan tersebut, kelompok etisi di Indonesia dan Belanda membentuk Komite Otonomi Hindia. Komite Otonomi Hindia memiliki susunan kepengurusan sebagai berikut: Ketua: R.A.A. Achmad Djajadiningrat; Sekretaris: A.F. Folkersma; dan selebihnya sebagai anggota: Mr. A.C. Wiessing, Ir. A.C. de Jongh, R.M.A. Koesoemo Oetojo, Ir. J. Van de Waerden, dan R.T. Wiranatakoesoemo. Sedangkan dari kelompok etisi di Belanda, komisi otonomi Hindia diisi oleh para profesor Indologi dari Universitas Leiden.¹⁵⁷

Seiring dengan pengajuan tuntutan yang dilakukan oleh *Democratische Concentratie* untuk bergabung dalam komisi Alting serta munculnya sebuah kondisi krisis yang terjadi di Indonesia maka, para pemimpin SI akhirnya se-

makin kuat dalam memperjuangkan tuntutan tersebut. Krisis ekonomi yang dapat dikatakan sangat berat, semakin dirasakan oleh bumiputera akibat dari meningkatnya berbagai kebutuhan hidup dan semakin minimnya upah para pekerja. Meningkatnya krisis di Indonesia, berakibat pada banyak rakyat bumiputera yang mengalami kelaparan dan kematian.

Para anggota *Volksraad* yang melihat kondisi demikian sangat perihatin dan menyuarakan kepada pemerintah untuk secepatnya menangani kondisi tersebut. Seperti halnya Tjokroaminoto, ia menanggapi kondisi demikian secara cepat agar dapat meringankan beban bumiputera. Tjokroaminoto yang juga sebagai *hoofdbestuur* SI menghadap dan mengajukan usulan kepada Gubernur Jenderal agar pemerintah mengurangi jumlah tanaman tebu sebanyak 50 %. Akan tetapi, permintaan tersebut ditolak oleh Pemerintah Hindia Belanda.

Ditolaknya usulan Tjokroaminoto di akhir tahun 1918, tetap tidak menyurutkan semangatnya untuk tetap mengupayakan agar tanaman perkebunan tebu yang sebagian besar dimiliki oleh para pemodal asing dikurangi. Tahun 1919, ia kembali mengusulkan hal yang sama, akan tetapi tuntutannya semakin berkurang yaitu menuntut agar tanaman tebu dikurangi sebanyak 25 %. Dasar tuntutan yang diajukan tersebut adalah pertimbangan tentang ancaman bahaya kelaparan di Jawa, sehingga SI berpendapat bahwa hendaklah tanah yang tidak digunakan untuk perkebunan tebu, dapat dimanfaatkan untuk menanam padi.¹⁵⁸

Usulan atau tuntutan ini dimunculkan dalam sidang *Volksraad* luar biasa tanggal 20 Februari 1919. Betapapun sudah dikurangi tuntutan pengurangan lahan tanaman tebu tersebut, hasil yang diperoleh tetaplah sama yaitu ditolak. Penolakan tidak hanya dari para pemodal asing yang berkecimpung dalam gula, kopi, teh, dan lain-lain, akan tetapi sanggahan juga muncul dari para pemodal perkebunan bumiputera sendiri. Dengan demikian, berbagai upaya untuk memajukan kepentingan bumiputera (baca: rakyat kecil) selalu mendapatkan rintangan yang sangat kuat dan Tjokroaminoto tidak dapat berbuat lebih dari itu.¹⁵⁹

Ditolaknya usulan Tjokroaminoto terkait dengan situasi bumiputera yang mengalami kelaparan, akhirnya mengundang reaksi dari para anggota SI lainnya. Seperti halnya Sosrokardono sebagai Sekretaris CSI, ia menuntut agar Tjokroaminoto dan Moeis meninggalkan *Volksraad*. Tuntutan terhadap Tjokroaminoto dan Moeis agar keluar dari *Volksraad* akhirnya dilembagakan dalam sebuah rapat CSI yang dilakukan pada 4 Maret 1919. Dalam rapat tersebut terjadi perdebatan antara pihak yang mendukung perjuangan dalam *Volksraad* dengan pihak yang menolak perjuangan di dalam *Volksraad*. Tjokroaminoto melihat bahwa, gagalnya para anggota SI mengusung pengurangan tanaman tebu, hanya sebatas tidak disetujuinya tuntutan tersebut oleh anggota *Volksraad* lainnya, sehingga tidak ada hubungannya dengan pelanggaran yang dilakukan oleh anggota SI di dalam *Volksraad*, yang berakibat pada kewenangan partai untuk menarik para anggota SI tersebut dari kelem-

bagaan *Volksraad*.¹⁶⁰ Dengan demikian, akhirnya dilakukan pungutan suara untuk memperoleh keputusan dalam rapat tersebut. Pungutan suara dihasilkan sebanyak 20 orang menolak dan 10 orang menerima, dengan demikian keputusan yang dihasilkan adalah tetap memberikan kesempatan kepada Tjokroaminoto dan Moeis untuk tetap berjuang di dalam *Volksraad*.

Di sisi yang lain, SI juga menyoroti Aksi Ketahanan Hindia (*Indie Weerbaar Actie*). Lembaga ini dibentuk akibat dari ketakutannya pihak Pemerintah Hindia Belanda, bahwa Perang Dunia 1 akan menyebar ke Indonesia. Berbagai perdebatan telah digelar terkait keikutsertaan SI dalam lembaga Ketahanan Hindia tersebut. Seperti halnya debat yang dilaksanakan pada 12 September 1917 di Surabaya. Perdebatan telah terjadi antara Moeis dengan Semaoen. Keduanya berpikir, dengan ikut serta dalam lembaga tersebut, masing-masing dapat menarik simpati rakyat serta simpati Belanda terhadap bumiputera, sehingga dapat menggerakkan seluruh bumiputera. •

4

Pertarungan Tingkat Elite

Yang kita inginkan adalah: sama rasa, terlepas dari perbedaan agama. CSI ingin mengangkat persamaan semua ras di Hindia sedemikian rupa sehingga mencapai (tahap) pemerintahan sendiri.

*--Tjokroaminoto, "Het S.I. Congres",
De Indische Gids, 40, 1918.*

A. Gerakan Sosialis dan Radikalisasi SI Semarang

1. Munculnya Gerakan Sosialis

Sosialisme merupakan salah satu dari ideologi besar dunia yang sangat berkembang di abad ke-20. Sosialisme hadir di Indonesia di bawah oleh propagandisnya seperti: E.F.W. Douwes Dekker, H.J.F.M. Sneevliet, Ir. A. Baars, dan Brigsma. Douwes Dekker merupakan salah satu dari sekian banyak orang Belanda yang mendukung pelaksanaan politik etis di Hindia Belanda. Dasar utama yang dimaksud oleh

Dekker adalah “Hindia untuk Hindia”. Melalui semangat itulah, Dekker membentuk sebuah perkumpulan di Semarang dengan nama *Semarangsche Keizervereeniging Club*. Organ ini adalah embrio *Indische Partij* (IP) yang didirikan pada 6 September 1912. Menjelang tahun 1913, asas organ ini ditolak oleh Pemerintah Hindia Belanda yang berakhir dengan pembubaran organ tersebut. Pasca dibubarkannya IP, para anggotanya berpindah ke Insulind.¹⁶¹ Tahun 1919, terjadi perombakan kelembagaan, sehingga namanya berubah menjadi *Nationale Indische Partij* (NIP). Sampai tahun berikutnya, organ ini juga dibubarkan oleh Pemerintah Hindia Belanda pada 1923.¹⁶² Melalui organ tersebut Dekker menarik berbagai kelompok muda untuk bergabung di dalamnya.¹⁶³

H.J.F.M. Sneevliet, merupakan propagandis Komunis Internasional (Komintern) yang berasal dari Belanda.¹⁶⁴ Ia datang ke Indonesia sebagai pekerja kereta api di Surabaya. Di Surabaya ia mendirikan ISDV.¹⁶⁵ Ketika melihat perkembangan Sosialisme di Semarang cukup mengesankan, ia memutuskan pindah ke Semarang dan bergabung dengan kelompok Sosialis lainnya.

Sebagai sesama orang yang berhaluan Sosialis, Sneevliet melihat NIP yang dipelopori oleh Dekker memiliki sentimen revolusioner melalui slogan perjuangannya yaitu “Hindia untuk Hindia”. Bagi Sneevliet, Dekker sebagai seorang keturunan Belanda, tentunya mengartikan Hindia bukanlah bumiputera, melainkan orang-orang dari keturunan Belanda atau *mestizo*. Di lain pihak, walaupun para anggota

NIP cukup tanggap terhadap persoalan kebangsaan bumiputera, akan tetapi, keanggotaan yang dimiliki NIP tidak terlalu signifikan, sehingga bagi Sneevliet, sangat sulit dalam membangun gerakan revolusioner yang mengakar. Satu-satunya jalan untuk mendapatkan kekuatan yang besar adalah melakukan infiltrasi terhadap SI yang sebelumnya telah banyak dipengaruhi oleh pemikiran etis Dekker.

Gagasan utama yang menjadi dasar ideologi Sosialisme adalah ajaran Karl Marx. Gagasan dasar Marxisme yang di bawah oleh para propagandis Sosialis meliputi dua hal. *Pertama*: Teori Sosial. Teori sosial Marxis melihat bahwa susunan masyarakat pada zaman mana pun secara fundamental ditentukan oleh metode-metode produksi dan distribusi kekayaan. Berbagai lembaga serta gagasan yang ada dalam masyarakat pada dasarnya berfungsi untuk mempertahankan kepentingan kelas yang memiliki dan mengontrol alat-alat produksi atau bentuk-bentuk utama kekayaan. Dengan demikian, kelompok atau kelas pemodal inilah yang menguasai struktur sosial untuk kepentingannya.¹⁶⁶

Kedua: Filsafat Sejarah. Dalam filsafat Sejarah, Marxis melihat bahwa perubahan masyarakat pada dasarnya bukan ditentukan oleh konflik gagasan seperti yang telah dirumuskan oleh Hegel,¹⁶⁷ akan tetapi, perubahan masyarakat ditentukan oleh konflik ekonomi, antara kepentingan ekonomi kelas yang memerintah dengan kelas yang diperintah.¹⁶⁸

Gagasan serta ide dasar Marxis yang demikian sangat memukau para aktivis SI, seperti halnya Semaoen¹⁶⁹, Darsono¹⁷⁰, Tan Malaka¹⁷¹ serta berbagai anggota lainnya. Ide

serta gagasan Marxis secara cepat menyebar dan menjadi diskusi menarik bagi kaum pergerakan SI. Gagasan Marxis sangat tepat bagi kondisi rakyat Indonesia yang telah mengalami penindasan kelas oleh Pemerintah Hindia Belanda. Realitas rakyat Indonesia yang demikian, menjadi ajang serta menjadi lahan percobaan yang menarik bagi kalangan bumiputera untuk menerapkan gagasan tersebut. Berbagai kajian tentang Marxis dan kesesuaiannya dengan kondisi di Indonesia, menjadi pendorong terciptanya sikap gerakan revolusioner yang diterapkan oleh SI.¹⁷² Operasional gerakan revolusioner SI terwujud dalam berbagai aksi pendampingan dan pembentukan serikat buruh di berbagai Industri di Indonesia. Melalui serikat sekerja, SI menjadi garda terdepan dalam mengontrol gerakan buruh di Indonesia.

ISDV dan VSTP yang telah menjadi garda terdepan dalam mengawal pergerakan buruh bumiputera telah memainkan peran pergerakan sangat penting, akan tetapi kebutuhan secara ideologis dan politik dalam mengikat gerakan buruh belum tercipta seutuhnya. Pada 1917, ketika berhasilnya Revolusi Rusia, di bulan Oktober, maka Sneevliet sebagai pengasuh para aktivis SI menarik ISDV menjadi sebuah organ yang lebih radikal. Tepat pada 23 Mei 1920, secara resmi ISDV berubah menjadi PKI. Sejak terbentuknya PKI inilah, para kader SI yang juga sebagai anggota ISDV melebur dalam PKI seutuhnya.¹⁷³ Yang dimaksud dengan radikal adalah menarik ideologi Marxis ke arah yang lebih riil yaitu Komunisme. Ide dasar Ko-

munisme adalah menghendaki kepemilikan negara dalam hal semua kekayaan, termasuk di dalamnya, baik barang produksi maupun barang-barang konsumsi.¹⁷⁴ Untuk menerapkan serta mencapai anasir tersebut, Komunisme menghendaki perubahan secara radikal untuk mewujudkan sistem pemerintahan yang totaliter.¹⁷⁵

2. Radikalisasi SI Semarang

Tahun 1916 menjadi titik tolak pertama menandai munculnya radikalisasi gerakan SI Semarang. Radikalisasi SI Semarang sangat terkait dengan penolakannya terhadap gagasan masuknya para anggota SI ke dalam *Volksraad*. Semaoen, Darsono, Baars, dan kawan-kawan, secara tegas melakukan berbagai bentuk pengecaman terhadap para anggota SI yang masuk dalam *Volksraad*. Seperti yang di-suarakan oleh Semaoen, bahwa *Volksraad* tidak lebih dari komedi. Ia mengatakan:

...Banyak kaoem bergerak menaroeh kepertjajaan besar pada kekoeasaannja komidi Volksraad, hal jang mana mengoerangkan kepertjajaan atas diri sendiri. Di dalam Volksraad pemerintah bisa taoe apa jang mendjadi pikirannja rakjat dan dengan pengetahoean itoe ia bisalah mengambil atoeran-atoeran jang tiada djadi sakit hatinja rakjat, *sehingga napsoe peperasan bisa-didjalankan teroes* dengan menjingkiri rasa keberatannja rakjat. Maka dari itoe siapa jang soeka dibikin dingin kipasnja pemerintah dinamakan Volksraad, baiklah tidoer lagi senjenjak-njenjaknja.¹⁷⁶

Menurut Semaoen, perjuangan SI melalui *Volksraad* justru menunjukkan kalau Tjokroaminoto sebagai *hoofdbestuur* SI, tidak anti terhadap bentuk-bentuk Kapitalisme

Belanda. Kelompok Semarang pada dasarnya mengajak SI untuk bersikap revolusioner dalam menghadapi sikap Belanda yang kapitalistik dan represif. Sikap kelompok Semarang justru mengarahkan untuk melakukan pembinaan terhadap buruh. Upaya perjuangan melalui buruh juga sangat berdasar, karena kapitalisasi industri Belanda menyeret bumiputera dalam keterpurukan ekonomi, sosial dan politik. Dengan demikian, kebutuhan yang mendesak adalah melakukan pengawalan terhadap buruh dan bukan larut dalam *Volksraad*.

Kerasnya penolakan Semaoen terhadap berbagai arah pergerakan SI yang dianggap tidak nyata dalam memperjuangkan bumiputera, sangat tampak ketika kongres CSI tahun 1917 menyetujui adanya dukungan SI terhadap *indie weerbaar*. Semaoen sebagai ketua SI Semarang menegaskan bahwa “Kami tidak suka mengeluarkan darah untuk keperluan orang lain, apalagi keperluan “*zondig kapitalisme*” (*kapitalisme yang berdosa*).¹⁷⁷ Maksud dari ucapan Semaoen demikian adalah bahwa *Indie Weerbaar* hanyalah sebuah upaya untuk memperkuat pertahanan Hindia Belanda dari kekuatan Jepang yang semakin bergerak ke selatan, yang dapat diperkirakan mencapai Indonesia. Ucapan Semaoen tentunya sangat beralasan, bahwa pertahanan untuk Hindia yang digerakkan oleh Pemerintah Hindia Belanda, pada dasarnya lebih menguntungkan orang-orang Belanda dan hanya sedikit bagi bumiputera. Belanda adalah penjajah, melalui kolonialismenya tersebut, kapitalisme menjadi dasar utama Belanda untuk tetap mempertahankan In-

donesia sebagai wilayah jajahannya. Dengan demikian, istilah *zondig kapitalisme* yang ditujukan kepada Belanda menandai bahwa Belanda tidak seharusnya mendapatkan bantuan dan dukungan dari bumiputera, terutama SI.

Sebagai upaya untuk menolak gerakan *indie werbaar* yang dianggap tidak menguntungkan bagi bumiputera, Semaoen sebagai pimpinan SI Semarang memutuskan untuk melakukan perjuangannya sendiri. Semaoen menggandeng para buruh untuk melakukan berbagai aksi pemogokan di berbagai daerah secara radikal. ISDV dan VSTP menjadi penyokong perjuangan Semaoen tersebut. Pergerakan buruh yang dilakukan semakin memperkuat daya juang para kadernya dalam memperkuat basis gerakannya. Gerakan buruh yang radikal menjadi garda terdepan dalam menentang semua kebijakan Pemerintah Hindia Belanda yang dapat merugikan bumiputera. Bentuk nyata dari radikalisme SI Semarang yang dipimpin oleh Semaoen sangat tampak pada tahun terakhir antara 1917-1918.

Tahun 1917-1918, terjadi krisis ekonomi yang disebabkan oleh meningkatnya laju inflasi di Indonesia. Inflasi yang begitu tinggi membuat para buruh menjadi resah akibat semakin menurunnya nilai nominal upah yang dihasilkan oleh buruh. Menurunnya upah buruh tersebut, akhirnya berdampak pada meningkatnya berbagai tuntutan buruh untuk segera meningkatkan kembali upah kerja untuk mencapai kesejahteraan hidup. Melalui kesempatan demikian, Semaoen mengakomodir berbagai serikat buruh dan mengawalnya untuk menyuarakan tuntutan aspirasinya. Pemogokan ada-

lah jalan yang dipilih untuk menekan para pemilik pabrik agar segera meningkatkan upah untuk kesejahteraan buruh tersebut. Beberapa rangkaian pemogokan dilakukan, seperti halnya pemogokan buruh pabrik perabotan yang mencapai dukungan ±300 orang. Disusul lagi pemogokan yang dilakukan oleh buruh cetak yang dipimpin oleh Vak-group SI Semarang, dan disusul juga oleh pemogokan para buruh mesin jahit Singer, buruh bengkel mobil, buruh transportasi kapal uap dan perahu. Masing-masing rangkaian pemogokan yang dipelopori oleh SI Semarang dan dipimpin oleh Semaoen, dan kawan-kawan, mencapai sukses besar, sehingga pemogokan tersebut meluas ke berbagai daerah seperti halnya Batavia, Surabaya, Bandung, dan berbagai daerah lainnya.

Berhasilnya berbagai pemogokan yang dikawal oleh SI Semarang dan dipimpin oleh Semaoen, akhirnya serikat pekerja di berbagai daerah tersebut memercayakan kepemimpinan perserikatan buruh pada SI Semarang. Dengan demikian, sejak keberhasilan dalam menggerakkan buruh itulah, SI Semarang semakin kuat dan secara drastis, nominal keanggotaannya bertambah sangat pesat. Tahun 1917 yang sebelumnya tercatat jumlah keanggotaan hanya mencapai 1700, meningkat pesat di tahun 1918 menjadi 20.000 anggota. Tahun inilah, sebuah masa, ketika SI Semarang mendapatkan kejayaan dalam memimpin pergerakan buruh di Indonesia.

Kesuksesan Semaoen dalam melakukan berbagai pemogokan buruh, akhirnya membuka kembali wacana per-

gerakan bumiputera bagi para anggota SI lainnya untuk mengupayakan pergerakan yang sesungguhnya. Semaoen tetap berkeyakinan bahwa pergerakan yang lebih nyata adalah mengawal bumiputera secara radikal dalam melawan bentuk Kolonialisme Belanda. Semaoen tetap bersikeras menentang para pembesar SI seperti Tjokroaminoto, Moeis, dan lainnya dalam membawa arah perjuangan SI melalui *Volksraad* serta memberikan dukungan terhadap *indie werbaar*.

Ketika perdebatan antara berbagai pihak dalam SI yang mendukung atau menolak *Volksraad* dan *indie werbaar* terus berlangsung, Tjokroaminoto sebagai *hoofdbestuur* SI berinisiatif mengakhiri perdebatan tersebut. Perdebatan diselesaikan secara resmi dalam kongres CSI ke-3 tahun 1918 di Surabaya. Berbagai pihak yang saling bertentangan akhirnya menyepakati bahwa, perdebatan tersebut dibatasi dalam kelembagaan organisasi, dan bukan atas nama pribadi.

Dalam kongres tersebut, Tjokroaminoto dan Moeis tetap dipercaya sebagai pimpinan serta wakil dalam menjalankan roda organisasi CSI. Keputusan dalam kongres ini, akhirnya saling menguntungkan berbagai pihak yang sebelumnya telah bertikai. Keputusan dalam kongres tersebut adalah:

mendukung berbagai pemogokan buruh yang teratur untuk memperbaiki nasib, mencari keadilan, dan melawan perbuatan sewenang-wenang...[dan] akan memajukan ikhtiar kaum buruh buat memperbaiki nasib, mencari keadilan, dan me-

lawan perbuatan sewenang-wenang itu... untuk menegakkan keadilan dan untuk menghapuskan tindakan-tindakan suka hati.¹⁷⁸

Setelah kesepakatan yang dikeluarkan dalam kongres CSI tahun 1918, berbagai anggota SI akhirnya saling menunjukkan keseriusannya dalam mengawal buruh sebagai poros gerakan SI untuk memperjuangkan bumiputera. Seperti halnya Suryopranoto pada 1919, ia membangun basis gerakan dalam serikat sekerja buruh pegadaian dan ia menjadi pimpinan serikat sekerja tersebut. Selain itu, Suryopranoto yang didukung oleh Tjokroaminoto, Agus Salim, dan Moeis, juga membentuk *Personel Fabriek Bond* (PFB) yang di dalamnya adalah perkumpulan serikat sekerja buruh pabrik gula.¹⁷⁹

Keputusan kongres ke-3 akhirnya dipertegas dalam kongres ke-4 tahun 1919. Keputusan tersebut didefinisikan secara jelas, ketika keputusan ini menjadi dasar atau landasan menuju Indonesia merdeka. Dengan demikian, kongres akhirnya menghasilkan sebuah keputusan bahwa, ketika Indonesia merdeka, federasi buruh akan berperan sebagai kamar pertama, sedangkan federasi partai-partai politik yang meliputi semua anggota dalam *Radicale Concentratie* berperan sebagai kamar kedua. Selain itu, dalam kongres ini juga disepakati dilakukannya restrukturisasi dan pembaruan Perkumpulan Pergerakan Kaum Buruh (PPKB) sebagai federasi berbagai organ buruh di Indonesia. Pembaruan struktur PPKB sebagai sebuah kekuatan eksternal SI adalah untuk mengikat para buruh yang saat

itu mencapai 72.000 orang.¹⁸⁰ Ketua dipegang oleh Semaoen, wakil: Suryopranoto, dan Sekretaris: H. Agus Salim.

Suryopranoto sebagai wakil PPKB yang juga terpilih sebagai wakil CSI tahun 1919 mendampingi Tjokroaminoto sebagai pimpinannya, mengusulkan agar Jogjakarta¹⁸¹ dijadikan sebagai pusat kedudukan gerakan PPKB. Usulan yang dimunculkan oleh Suryopranoto ternyata menuai kritik tajam dari Semaoen. Semaoen melihat bahwa usulan Suryopranoto tersebut adalah sebuah gelagat untuk menarik kantong-kantong pergerakan buruh di bawah kendali Tjokroaminoto dan kawan-kawannya. Selain itu, Semaoen sebagai perwakilan dari ISDV juga menilai bahwa ditariknya pusat-pusat pergerakan buruh menjadikan basis buruh yang telah mendekat ke Semarang, berbalik dan berpindah ke Yogyakarta. Dengan demikian, pergerakan buruh yang sebelumnya menjadi elemen dasar pergerakan SI Semarang dan ISDV, dapat diperkirakan oleh Semaoen akan lemah dan hancur.

Untuk menghindari berbagai hal, terkait dengan kecurigaan tersebut, Semaoen yang juga sebagai ketua PPKB akhirnya justru menarik kedudukan PPKB ke Semarang dengan dalih, bahwa ketua memiliki kewenangan untuk menentukan kedudukan pusat dari pergerakan tersebut berada. Ketika kedudukan PPKB telah diambil alih oleh Semaoen dan berpusat di Semarang, Semaoen kembali memainkan peran yang signifikan dalam pergerakan buruh di Indonesia. Melalui PPKB, Semaoen bersama buruh kembali melakukan berbagai aksi pemogokan dengan tujuan

yang sama, seperti yang dilakukan sebelumnya yaitu menuntut upah yang layak bagi para buruh.

SI yang telah melebur dalam berbagai serikat sekerja, kembali menjadi ujung tombak buruh dalam melakukan penolakan terhadap upah rendah. Melalui berbagai aksi pemogokan, SI memaksa Pemerintah Hindia Belanda mengkaji ulang standar upah pekerja melalui peraturan upah minimum yang telah diterapkan sebelumnya. Seperti halnya pemogokan yang dilakukan oleh buruh percetakan "Van Dorp" dan buruh kerja lainnya pada 1920 di Semarang. Pemogokan yang dilakukan oleh para buruh yang mencapai ±1000 orang tersebut bertujuan untuk meningkatkan gaji para pegawai dan karyawan. Akan tetapi, pemogokan tersebut gagal dan berakhir dengan pemecatan ribuan para pekerja.¹⁸²

B. Reaksi Tjokroaminoto: Munculnya Gerakan Agama

Sikap revolusioner dan berbagai aksi pemogokan yang dilakukan oleh Semaoen dan kawan-kawan, mengundang reaksi dari Tjokroaminoto sebagai *hoofdbeestuur* SI. Tjokroaminoto merasa telah kehilangan kendali CSI akibat munculnya reaksi keras yang ditimbulkan oleh gerakan buruh yang dimotori oleh SI Semarang yang telah terinfiltrasi Komunisme. Tjokroaminoto juga telah kehilangan momentum akibat keluarnya orang-orang Arab dan keturunan sebagai penyokong pendanaan surat kabar utusan Hindia, sehingga sangat sulit untuk menggerakkan kembali simpati para kader SI untuk mendukung Tjokroaminoto

sebagai pimpinan besar CSI. Di sisi yang lain, Semaoen dan kawan-lawan, juga menolak terhadap *Volksraad* dan gerakan *indie weerbaar*.

Berbagai penolakan yang dilakukan oleh Semaoen beserta para anggota SI Semarang lainnya terkait *Volksraad* dan gerakan *indie weerbaar*, sangat nyata memojokkan posisi Tjokroaminoto. Tjokroaminoto berpikir keras untuk mengembalikan citra dirinya sebagai pimpinan besar CSI dan sedapat mungkin mengambil peran dalam mengontrol massa bumiputera. Kesan demikian sangat tampak ketika Tjokroaminoto menyampaikan pidatonya dalam kongres CSI tahun 1917.

Yang kita inginkan adalah: sama rasa, terlepas dari perbedaan agama. CSI ingin mengangkat persamaan semua ras di Hindia sedemikian rupa sehingga mencapai (tahap) pemerintahan sendiri. CSI menentang kapitalisme. CSI tidak akan menolelir dominasi manusia terhadap manusia lainnya. CSI akan bekerja sama dengan siapa saja yang mau bekerja untuk kepentingan ini. CSI menginginkan pendidikan sehingga orang dapat bersuara dan menyumbang pada kesejahteraan Hindia. Pemerintahan sendiri yang suatu saat harus ada di Hindia, harus melibatkan (tingkat) partisipasi yang sama seperti pemerintahan sendiri di negeri Eropa. Tidak boleh ada komedi. Orientasi *Staat en Generaal* di Belanda sesungguhnya sejalan dengan jiwa SI. Mari kita tidak terus-terusan membentuk milik Belanda, tetapi bangsa Nederland [tepuk tangan...]. Jika ini tidak dapat dilakukan tahun ini atau tahun depan, biar-

kan itu terjadi sepuluh atau dua puluh tahun lagi. Tetapi, ini harus terjadi, dan kita tuntut itu [tepuk tangan...]. Tetapi, bersamaan dengan itu, benar jika kita menerimanya sekarang juga, kita masih terlalu bodoh untuk menerima [dengan sebaik-baiknya]. Oleh karena itu, perubahan datang bertahap, tidak terlalu bertahap tidak juga terlalu lambat.¹⁸³

Diplomasi Tjokroaminoto sangat halus dan sangat berwibawa sebagai seorang pimpinan besar CSI. Berbagai lontaran yang dimunculkan oleh Tjokroaminoto dalam pidato tersebut pada prinsipnya ingin menarik simpati anggota SI untuk mendukung keberadaan *Volksraad* di Indonesia. Bagaimanapun juga, ajakan kepada semua anggota SI itu terganjai dengan makin meningkatnya eksistensi Semaoen dalam mengorganisir para buruh sebagai kekuatan bumiputera dalam melawan Kapitalisme Belanda. Semaoen yang didukung oleh SI Semarang telah menarik minat para buruh untuk berjuang di bawah kendalinya.

Sebagai upaya untuk menarik simpati tersebut, Tjokroaminoto juga menyerukan hal yang sama seperti yang diinginkan oleh para pengikut Komunisme yaitu: CSI juga menolak Kapitalisme dan menolak dominasi manusia atas manusia lainnya. Selain itu, berbagai tuduhan miring yang dilontarkan oleh Semaoen terhadap Tjokroaminoto, disinggung untuk kembali dibalik sebagai senjata Tjokroaminoto dalam mengajak para anggota SI untuk mendukung dan bekerja di dalam *Volksraad* secara sungguh-sungguh, sehingga *Volksraad* tidak dianggap sebagai komedi.

Sebagai aktivis pergerakan, Tjokroaminoto yang telah menabur simpati kepada semua anggota SI untuk mendukung terbentuknya *Volksraad* di Indonesia, tentu tidak sedang menunggu hasil apa yang ia dapatkan, melainkan tetap melakukan berbagai bentuk nyata dalam mengupayakan pergerakan bumiputera. Pada tahap inilah Tjokroaminoto bergabung dengan al-Irsyad di Surabaya sebagai organ perkumpulan orang-orang Arab dan keturunan. al-Irsyad memperjuangkan berbagai kepentingan umat Islam dan menjadikan Islam sebagai garis perjuangan.

Selain al-Irsyad, Tjokroaminoto juga bergabung dengan gerakan Djawa Dipa. Gerakan ini muncul di Surabaya yang dipelopori oleh para anggota SI Surabaya seperti halnya Tirtodanoedjo dan Tjokrosoedarmo. Organ ini bertujuan untuk menghapus bahasa Jawa tinggi (kromo) menjadi bahasa Jawa biasa (ngoko). Selain itu, hal-hal yang berkaitan dengan atribut-atribut bangsawan (seperti gelar priayi diganti menjadi *wiro* untuk laki-laki dan *woro* untuk perempuan) menjadi tujuan dari organ tersebut. Nilai-nilai yang diperjuangkan oleh organ ini merupakan bentuk nyata dari sikap demokratisasi orang-orang Jawa. Melalui organ tersebut, Tjokroaminoto mengemas gerakan Djawa Dipa menjadi simbol-simbol kebangsaan bumiputera untuk menghilangkan "mental-mental budak" dan mempersiapkan bumiputera menuju kemajuan yaitu mencapai bumiputera *zelfbestuur*.

Bersamaan dengan kampanye tentang Djawa Dipa yang dilakukan oleh Tjokroaminoto, muncul sebuah

tulisan di surat kabar yang dianggap melecehkan umat Islam. Artikel tersebut ditulis oleh Djojodikoro dan disebar oleh Martodarsono¹⁸⁴ melalui surat kabar *Djawi Hisworo*. Cuplikan artikel tersebut berbunyi "*Gusti Kandjeng Nabi Rasael minoem A.V.H. gin, minoem opium, dan kadang soeka meng-isep opium*".¹⁸⁵ Artikel yang ditulis tersebut melecehkan Allah SWT dan Nabi Muhammad saw, sehingga mengakibatkan munculnya berbagai reaksi keras dari umat Islam yang diawali dari Surabaya.

Tjokroaminoto, memanfaatkan persebaran artikel yang disebar oleh Marthodarsono untuk mengangkat nilai-nilai kebangsaan yang lebih nyata, tanpa membeda-bedakan suku di dalamnya. Islam menjadi bagian yang penting dan patut menjadi ciri nilai kebangsaan bumiputera di Indonesia. Dengan demikian, Tjokroaminoto sebagai *Hoofdbestuur* SI Surabaya membentuk TKNM untuk menghalau sikap tidak suka yang diperlihatkan oleh kelompok SI Surakarta seperti halnya Marthodarsono, Samanhudi, dan Sosrokoernio, yang saat itu oleh Takashi Siraishi disebutkan tengah bersitegang dengan kelompok Tjokroaminoto dan Agus Salim dari SI Surabaya.

Mendapati situasi demikian, Tjokroaminoto akhirnya sedikit demi sedikit mengurangi aktivitasnya di dalam Djawa Dipa. Tjokroaminoto justru memainkan peran yang sangat penting dalam menanggapi persoalan tersebut. Tjokroaminoto bersama dengan SI Surabaya yang juga didukung oleh al-Irsyad melakukan berbagai upaya untuk menyikapi pelecehan agama tersebut secara besar-besaran.

Tjokroaminoto sedikit banyak telah mendapatkan peluang kembali untuk meningkatkan kepercayaan bumiputera (terutama umat Islam) kepada dirinya. Dengan demikian, untuk memantapkan upaya tersebut, Tjokroaminoto membentuk Tentara Kanjeng Nabi Moehammad saw (TKNM) pada tanggal 17 Februari 1918. Secepatnya struktur kepengurusan TKNM dibentuk dengan susunannya sebagai berikut: Pimpinan: Tjokroaminoto; Sekretaris: Sosrokar-dono; Bendahara: Sech Roebaja bin Ambarak bin Thalib (salah satu pimpinan al-Irsyad Surabaya).¹⁸⁶ Pasca ditetapkan kepengurusan TKNM, organ ini secepatnya melakukan *vergadering* bertempat di Kebon Raya Surabaya yang dihadiri oleh 35 ribu orang. Dalam *vergadering* tersebut akhirnya diputuskan sebuah tuntutan terhadap tindakan pelecehan agama yang dilakukan oleh Djojodikoro dan Martodarsono. Tuntutan yang diusung oleh TKNM Surabaya tersebut adalah agar keduanya diadili oleh Pemerintah Hindia Belanda.¹⁸⁷

Setelah pembentukan TKNM Surabaya, di berbagai daerah telah bermunculan sub-sub TKNM, kecuali Yogyakarta dan Semarang.¹⁸⁸ Di Solo, para anggota SI menyambut baik keberadaan TKNM Surabaya. *Vergadering* dibuka untuk membentuk sub TKNM Solo. *Vergadering* dilakukan tepat pada 24 Februari 1918 di taman *Sri Wedari*. Pembentukan TKNM Solo disambut baik oleh para anggota SI serta berbagai pihak anggota kerajaan. Acara dibuka oleh pimpinan SI Solo yaitu Haji Samanhudi. Selain itu, para anggota SI serta organ bumiputera lainnya juga cukup antusias

menyambut pembentukan sub TKNM tersebut, sehingga *vergadering* yang dilakukan di Solo tersebut menjadi *vergadering* besar dan menjadi sorotan berbagai pihak di Indonesia, terutama Pemerintah Hindia Belanda.¹⁸⁹

Dalam menyukkseskan *vergadering* di Solo, Tjokroaminoto, sebagai pimpinan besar TKNM, mengutus Sajid Hasan bin Abdurrachman bin Semit -salah satu anggota TKNM Surabaya- untuk mengesahkan sub TKNM di Solo. Adapun susunan kepengurusan TKNM Solo adalah sebagai berikut: President: M. H. A. Hisamzainie; Vice President: Sajid Mohammad Aldjoefri; Penningmeester: H. Ngabdoessalam dan Sech Oemar Sajid Soengkar; Commissaris: R. H. Ngadenan, R. H. Issom, R. H. Ngabdoelsoekoer, Sajid Achmad Assegaf, H. Achmad Siradj, Mohd. Alim, M. Katib Pakoeradji, Kijahi H. Aboenawar, Kijahi Nawawi, dan Sech Awab Ahbal; Adviseur: R. P. Tapsiranom, Bagoes H. Mohammad Edris, dan K.P.H. Koesoemodilogo; Sekretaris belum ada.¹⁹⁰

Setelah terbentuknya TKNM di berbagai daerah (terutama di Solo), ruang pergerakan SI mulai mencair. SI yang semula seolah-olah terkotak dalam empat wilayah yaitu Surabaya (Tjokroaminoto), Yogyakarta (Ahmad Dahlan juga sebagai pendiri Muhammadiyah), Solo (Samanhudi), dan Semarang (Semaon), kini mulai terjadi pergeseran yang cukup drastis. Kendati TKNM tidak menjadi bagian penting dalam proses perjuangan Tjokroaminoto, akan tetapi Tjokroaminoto mampu mengambil manfaat atas efek yang ditimbulkan setelah terbentuknya organ TKNM tersebut.

Gagasan pembentukan TKNM, bagi Tjokroaminoto, ibarat sekali dayung, dua, tiga pulau terlampaui. Tjokroaminoto dengan mengusung Islam sebagai ciri nilai kebangsaan bumiputera, ia mendapatkan beberapa keuntungan seperti: 1) Tjokroaminoto sedikit dapat menghimpun nilai-nilai demokratis dan Sosialisme yang saat itu terbengkalai; 2) Tjokroaminoto dapat menarik simpati kaum santri, putihan serta para saudagar Arab, sebagai penyokong pendanaan SI; 3) Tjokroaminoto dapat menarik simpati bumiputera dan SI untuk tidak mendukung gagasan kebangsaan Djawa Dipa yang juga didukung oleh kelompok SI Surakarta; dan 4) Melalui pendanaan yang diberikan dari kelompok pedagang Arab melalui TKNM, Tjokroaminoto dapat bergerak untuk masuk di lingkungan buruh untuk menyaingi dan mengimbangi kepemimpinan perserikatan buruh yang telah dikawal oleh SI Semarang. Di sisi yang lain, melalui strategi gerakan demikian, Tjokroaminoto juga berhasil mengarahkan bumiputera memakai Islam sebagai ciri nilai kebangsaan bumiputera. Selain itu, Tjokroaminoto juga telah berpikir dan memperjuangkan nilai-nilai ekonomis dalam SI untuk kemakmuran bumiputera.

Seiring dengan perkembangan TKNM, munculnya berbagai tuduhan bahwa TKNM merupakan kelompok atau pihak yang dianggap memecah persatuan bangsa, menjadi persoalan baru bagi para anggota SI. Munculnya tuduhan tersebut, berimbas pada munculnya pertentangan berkaitan dengan penegakan Islam di Indonesia di antara para anggota SI. Seperti halnya *Javaansche Nationalisme* (JN),

yang menuduh TKNM memecah belah persatuan bangsa. Akibat adanya tuduhan tersebut, situasi kembali memanas antara anggota SI yang membawai organ TKNM dengan JN sebagai bagian dari kelompok orang-orang Jawa. Demikian cuplikan sanggahan dari organ TKNM yang dialamatkan kepada JN:

Moela2 saja merasa girang hati melihat nama J.N. itoe.

Akan tetapi setelah, saja membatja toelisan J.N. itoe diseloeroeh soerat chabar Melajoe, maka kegirangan itoe beroebah mendjadi *kesedihan hati* jang amat sangat.

Mengapa begitoe? Karena saja laloe mengarti dengan terang, bahwa sebetoelnja J.N. itoe boekannja satoe pergerakan bangsa Djawa atau Hindia.

Pergerakan siapakah itoe? Djika diamati dengan soenggoeh2, laloe njata sekali, bahwa J.N. itoe satoe *koemidi* perboeatannja golongan jang koeat dan bentji sekali kepada bangsa Djawa.

Javaansche Nationalisme soenggoeh boleh dikatakan *ratjoen* jang akan dimakankan kepada bangsa Hindia soepaja mendjadi *hantjoer loeloeh hilang keroekoenannja*.

Hai bangsa Djawa! Bangoenlah Beloemlah toean2 merasa, bahwa banjak sekali akal koemidi jang seperti madoe manisnja, akan tetapi didalamnja berisi *ratjoen* jang amat berbahaja?

Tiga ratoes tahoen lamanja bangsa Djawa atau Hindia doedoek didalam doenia *tipoe tipoean*, sehingga kita seka-

rang merasa, bahwa dalam waktu yang panjang itu, kita *bermata tapi tidak melihat*.

Berpoeloe², ja beratoes² bangsa Djawa yang telah menjadi *perkakas* diboeat *meroesak bangsanja sendiri*, sehingga perkataan *natie* soedah tidak boleh dipakai oleh Boemipoetra lagi, malah² kita ini telah mendapat nama *onderdanen* saja.¹⁹¹

Maksud dari cuplikan tulisan tersebut adalah bahwa JN telah menganggap TKNM sebagai organ yang memecah persatuan bangsa. Menurut para anggota TKNM, justru bangsa yang dimaksud oleh TKNM lebih luas daripada se-kadar bangsa yang dimaksudkan oleh JN. Artinya, para anggota TKNM sangat sadar bahwa bangunan bangsa yang dapat mengikat semua elemen harus keluar dari nilai-nilai kesukuan (ex. Jawa). Dengan demikian, Islam yang dimaksudkan oleh TKNM dianggap mampu menyeberangi wilayah kesukuan dan tidak seperti JN yang hanya menyuarakan kesukuan Jawa semata.

Perlu diketahui lebih lanjut, situasi saat itu, Islam telah melebur dan menjadi sebuah pengikat bumiputera dan sebagai pembeda terhadap penjajah Belanda yang kafir. Identifikasi kafir di sini, lebih berdasar bahwa, masuk dan menyebarnya agama Kristen di Indonesia adalah hasil dari kebijakan Belanda. Belanda pada konteks saat itu adalah sama dengan Kristen, sehingga hal tersebut tidak didasarkan pada ajaran agama yang dimaksud, melainkan lebih pada sikap penolakan terhadap Kolonialisme Belanda itu sendiri. Dengan demikian, dalam konteks agama, agama Kristen tidak dapat dibandingkan dengan agama Islam.

Pasca munculnya berbagai kecaman dan saling tuding di antara para anggota TKNM dan JN, mulai bermunculan berbagai artikel dari orang-orang Islam yang juga sebagai anggota SI berkaitan dengan konsep bangsa dan cinta tanah air. Bangsa yang dimaksud sebagai sebuah entitas yang terbentang melebihi wilayah kultural dan geografis diterjemahkan dengan menggunakan bahasa cinta tanah air. Dalam hal ini, cinta tanah air yang menjadi titik tolak kedua (setelah persatuan Islam) dalam membangun nilai-nilai kebangsaan seirama dengan perjuangan Islam.¹⁹² Dengan demikian, cinta tanah air atau nilai-nilai kebangsaan menjadi sangat mendukung bagi terbentuknya persatuan bumiputera.¹⁹³

Melemahnya pergerakan TKNM di antaranya adalah terkait dengan masuknya Tjokroaminoto dalam *Volksraad* tahun 1918, sebagai upaya perjuangan yang ditempuh melalui jalur politik. Selain itu, pada tahun tersebut, situasi pergerakan buruh untuk menggerakkan bumiputera dalam melawan bentuk-bentuk Kapitalisme Belanda semakin memanas. Tjokroaminoto yang melihat TKNM tidak terlalu signifikan dalam menggerakkan bumiputera pada aspek kebangsaan, akhirnya memaksa Tjokroaminoto kembali memperbarui cara pandang dalam melihat konteks kebangsaan Indonesia dalam meraih kemerdekaannya. Cara pandang yang demikian inilah akhirnya membawa Tjokroaminoto lebih fokus pada pergerakan buruh, sebagai upaya yang lebih nyata dalam memperjuangkan aspek dasar kebutuhan bumiputera seperti ekonomi, sosial, dan politik yang ten-

tunya harus didasari oleh nilai-nilai Islam. Kondisi inilah yang akhirnya menggerakkan Tjokroaminoto untuk mengambil alih PPKB sebagai federasi berbagai organ pergerakan buruh yang bernaung di bawah kendali CSI.

Berbagai organ pergerakan buruh tergabung dalam PPKB yang dikontrol oleh CSI telah semakin menampakkan perjuangan SI dalam melawan berbagai bentuk Kapitalisme Belanda. Berbagai pemogokan telah diorganisir oleh PPKB yang saat itu terpusat di Semarang, akan tetapi, setelah kegagalan pemogokan menjelang tahun 1920, yang dipimpin oleh Semaoen, akhirnya kepengurusan PPKB diambil alih oleh Suryopranoto dan Agus Salim sebagai wakil dan sekretaris PPKB. Pengambilalihan tersebut dilakukan dengan cara mengubah kedudukan PPKB yang semula di Semarang, ditarik ke Yogyakarta pada akhir tahun 1920.¹⁹⁴

Penarikan PPKB dari Semarang ke Yogyakarta tersebut menandai pula dicabutnya dukungan Tjokroaminoto sebagai pimpinan besar CSI terhadap pola pergerakan buruh yang dilakukan oleh Semaoen. Pencabutan dukungan CSI terhadap kepemimpinan Semaoen dalam PPKB adalah, bahwa CSI menilai kegagalan pemogokan tersebut, ditengarai oleh masuknya peran-peran propagandis Komunis yang berlebihan dalam menentukan arah pergerakan buruh sesuai dengan cita dasar perjuangan Komunisme itu sendiri. Tjokroaminoto sebagai pimpinan besar CSI bersama organ Serikat Sekerja Pegadaian sebagai bagian dari organ terpenting PPKB yang dipimpin oleh Tjokroaminoto, Haji Agus Salim dan Moeis, merasa sangat pen-

ting untuk menentukan sikap proteksi terhadap arus Komunisme. Dengan demikian, Serikat Sekerja Pegadaian ketika melangsungkan kongres tahun 1921, memutuskan untuk tidak melakukan hubungan dengan organ-organ Komunisme.¹⁹⁵

Ditariknya PPKB ke Yogyakarta, sangat memukul Semaoen sebagai ketuanya saat itu. Penarikan posisi PPKB ke Yogyakarta, tidak dapat ditolak, sebagai kebijakan CSI, akan tetapi, Semaoen mengajukan kesepakatan untuk membantu para buruh yang telah dipecat akibat kegagalan pemogokan. Kesepakatan untuk menolong para buruh tersebut diterima oleh pihak Tjokroaminoto, sehingga dibentuklah Komite Derma untuk memberikan bantuan dana kepada para buruh pabrik yang telah dipecat akibat kegagalan pemogokan di tahun 1920 tersebut.¹⁹⁶

Setelah pembentukan Komite Derma di Yogyakarta, akhirnya Tjokroaminoto dkk, dapat mengamankan dan menarik berbagai organ gerakan buruh yang tergabung dalam PPKB. Semaoen menarik ISDV dan VSTP serta berbagai organ buruh pengikutnya dari PPKB, berkonsentrasi di Semarang. Reaksi yang paling keras Semaoen terhadap PPKB, dan CSI adalah melakukan pembubaran terhadap PPKB secara sepihak, akan tetapi pembubaran tersebut ditentang oleh Suryopranoto dan Agus Salim yang masing-masing sebagai wakil dan sekretaris PPKB. Dengan demikian, Semaoen, tidak memiliki kewenangan secara sepihak dalam membubarkan PPKB tersebut.

Sejak perselisihan inilah tensi pertentangan di antara para anggota SI kembali meningkat. Komunisme menjadi perdebatan panjang bagi para kader SI dalam menentukan arah perjuangan SI ke depan, untuk mewujudkan cita-cita Indonesia merdeka. Selain itu, akibat perdebatan tentang Komunisme, kantong kekuatan SI akhirnya terkotak menjadi dua kubu yaitu kubu Semarang yang dipelopori oleh Se-maoen, Darsono dan Baars, dengan kubu Yogyakarta yang dipelopori oleh Tjokroaminoto, Haji Agus Salim, Moeis, dan Suryopranoto. Masing-masing saling menunjukkan eksistensinya dalam organ gerakan buruh untuk melawan Kapitalisme dan Kolonialisme Belanda menuju Indonesia merdeka.

Seiring dengan laju pergerakan buruh dan makin melemahnya kondisi TKNM, akhirnya memicu reaksi dari berbagai kalangan (terutama dari Solo) yang sebelumnya menaruh harapan besar pada TKNM sebagai organ yang betul-betul menyuarakan Islam. Melemahnya sikap Tjokroaminoto dalam mengampanyekan anti terhadap artikel yang disebar oleh Marthodarsono, semakin memunculkan tuduhan bahwa TKNM tidak menghasilkan apa pun terhadap kemajuan Islam. Tjokroaminoto dianggap hanya memanfaatkan keuntungan dari organ tersebut. Di sisi yang lain, para anggota SI yang masih mengharapkan bahwa Islam harus dijalankan secara konsekuen mulai bermunculan sebagai bentuk protes. Dengan demikian, posisi Solo, belum dapat dikatakan melebur dengan Yogyakarta dan juga belum sepenuhnya memihak Semarang.

Seperti halnya H. Misbach, ia merupakan salah satu dari anggota SI di Surakarta. Sejak ia menjabat sebagai pemimpin Medan Moeslimien dan Islam Bergerak pada 1918, ia mendukung penuh keberadaan TKNM. Ia masih melihat bahwa TKNM membuktikan sebuah gerakan yang mendukung kemajuan Islam di Indonesia. Ketika melihat tidak adanya kemajuan yang dihasilkan oleh TKNM maka, ia akhirnya mempertanyakan keseriusan para pemimpinnya dalam menjalankan dan memperjuangkan Islam. TKNM tidak ubahnya Muhammadiyah yang tidak pernah konsekwen dalam memperjuangkan kemajuan Islam. Muhammadiyah yang dipimpin oleh Ahmad Dahlan di Yogyakarta, dianggap bukan sebagai "Islam Sejati", tetapi "Islam Lamisan".¹⁹⁷

Misbach sebagai sosok yang muncul dari para pedagang batik di Surakarta bersama-sama dengan Koesen, Harsoloemekso dan Darsosasmito, akhirnya membentuk persatuan yang disebut *Sidiq Amanah Tableg Fatonah* (SATV).¹⁹⁸ Dasar organ gerakan ini adalah "membangkitkan pergerakan agama Islam". Untuk merealisasikan tujuan gerakan ini, berbagai program telah disusun seperti halnya mengadakan pertemuan tablig SATV, menerbitkan jurnal, mendirikan sekolah-sekolah¹⁹⁹, dan melawan bentuk-bentuk pengisapan atau kapitalisasi. Seperti apa yang menjadi tujuan didirikannya organ tersebut, Misbach juga memberikan nama bagi surat kabar yang akan mendukung perjuangannya tersebut yaitu Islam Bergerak. Dibentuknya SATV, menunjukkan (untuk sementara waktu), Solo belum

memihak Yogyakarta atau Semarang, akan tetapi, dengan kebenciannya terhadap Muhammadiyah, sedikit menunjukkan keberatannya dengan Yogyakarta.

SATV yang dipimpin Misbach sangat bertentangan dengan Muhammadiyah dalam hal model perjuangannya. SATV lebih mengedepankan aksi dan pergerakan yang progresif untuk kepentingan Islam, sedangkan Muhammadiyah, berpikir bahwa bekerja untuk Muhammadiyah berarti sudah menjadi muslim yang sejati.²⁰⁰ Terjadinya berbagai persinggungan di antara para orang muslim yang juga sebagai anggota SI, menjadikan kelembagaan SI terkesan jalan sendiri-sendiri. Sejalan dengan perkembangan SATV yang dipimpin oleh Misbach, pergerakan Surakarta kembali mulai meningkat sejak kedatangan Tjipto Mangunkusumo akhir 1918 menjelang awal 1919 dengan membentuk Insulind. Keberadaan dua orang dalam organ pergerakan berbeda tersebut, menjadikan Surakarta menjadi perhatian khusus bagi Pemerintah Hindia Belanda. Insulind yang dipimpin oleh Tjipto akhirnya menarik simpati Misbach, sehingga keduanya menjadi duet organisatoris yang akhirnya menggerakkan para petani Surakarta menjadi agresif.

Semenjak bergabungnya Misbach dalam Insulind tersebut, Misbach muncul sebagai sosok yang lebih tegas dan radikal dalam menyuarakan antipenindasan dan Kapitalisme Belanda. Bentuk nyata dari radikalisasi Misbach adalah ketika ia bersama-sama dengan para petani melakukan pemogokan di wilayah Kartasura. Aktivitas ini dilakukan sebagai bagian dari bangkitnya kekuatan Insulind

baru setelah dibekukan oleh Pemerintah Hindia Belanda akibat pemogokan petani di Surakarta.²⁰¹ Dalam propagandanya di wilayah Kartasura, Misbach melakukan berbagai aksi pemogokan bersama para buruh dan petani di luar konstruksi SI, untuk menolak berbagai tekanan dan pola-pola penindasan yang dilakukan oleh Pemerintah Hindia Belanda.²⁰²

Munculnya Misbach dan Tjipto Mangunkoesoemo, menandai munculnya pergerakan radikal di Surakarta. Dalam konstalasi SI antara Semarang dengan Yogyakarta, Surakarta menjadi basis pergerakan lain yang relatif bebas. Bebas dalam arti, lebih memiliki coraknya sendiri sebagai bentuk meluasnya pergerakan SATV yang bersifat agama. Corak pergerakan SATV yang bersifat agama akhirnya mulai luntur dan berkembang semakin radikal akibat bergabungnya Misbach ke dalam Insulind. Tjipto Mangunkoesoemo dan Dekker menjadi propagandis Insulind yang handal, sehingga mampu memainkan peranan Misbach menjadi semakin radikal. Menjelang tahun 1920-an setelah keluarnya Misbach dari penjara, segera ia menggabungkan diri dengan SI Semarang. Sejak bergabungnya Misbach dengan SI Semarang itu, menandai hilangnya independensi pergerakan di Surakarta sebagai ciri pergerakan gabungan dari SATV dan Insulind. Surakarta telah memihak SI Semarang, di tengah pergolakan SI Semarang dengan Yogyakarta, yang saling memperjuangkan identitas ideologis berbeda antara Islam dan Komunis pada masa sulit di tahun 1921.

C. Reaksi Pemerintah Hindia Belanda

Di masa akhir kedudukan Limburg Stirum (1916-1920) sebagai Gubernur Jenderal di Hindia Belanda, berbagai upaya untuk dapat mengikat SI agar tunduk kepada Pemerintah Hindia Belanda terus diupayakan. Proteksi pemerintah terhadap SI sangat tampak menjelang tahun 1919, ketika pemerintah tidak sepenuhnya memberi kebebasan terhadap bumiputera untuk mengatur dirinya sendiri, akan tetapi justru memberikan ruang yang lebih luas terhadap pihak-pihak Kapitalis Belanda melakukan penghisaban terselubung kepada rakyat bumiputera. *Suiker syndicat* (sindikatis gula) memiliki peran yang besar dalam proses pengambilan kebijakan terkait perkembangan industrialisasi (terutama gula) di Hindia Belanda.

Tahun 1919 menjadi titik balik perjuangan SI terhadap Pemerintah Hindia Belanda. Perjuangan Tjokroaminoto di dalam *Volksraad* telah menuai reaksi keras dari berbagai pihak. Reaksi keras dilakukan oleh pemerintah, yang dalam hal ini, kendali kebijakannya dipegang sepenuhnya oleh para sindikatis gula.

Para sindikatis gula merasa tersinggung akibat usulan Tjokroaminoto pada 1918 dan 1919, ketika Tjokroaminoto mengusulkan adanya pengurangan 50% dan 25% tanah perkebunan tebu -untuk keperluan industri gula yang dimiliki oleh pemerintah- akibat semakin lemahnya sistem ekonomi bumiputera. Ulah Tjokroaminoto yang demikian, kendati tidak disepakati oleh *Volksraad*, akan tetapi menimbulkan kekhawatiran yang besar bagi para pemodal perke-

bunan gula. Kekhawatiran para sindikat gula sangat ber-
alasan, karena, Tjokroaminoto sebagai pimpinan besar SI
memiliki massa yang tidak dapat diremehkan. SI sebagai
organ besar bumiputera dikhawatirkan melakukan ber-
bagai aksi perusakan terhadap industri gula yang tersebar
di berbagai daerah di Indonesia. Berbagai aksi pemogokan
sepanjang tahun 1917-1918 menjadi bukti radikalisme SI,
sehingga dari berbagai peristiwa tersebut, meningkatkan
kekhawatiran para sindikat gula bagi keberlangsungan
industri tersebut di Indonesia. Selain itu, ketika usulan Tjo-
kroaminoto ditolak dalam *Volksraad*, seketika melakukan
pencabutan dukungan terhadap lembaga ini, adalah se-
buah kekhawatiran yang besar bagi para sindikat gula.

Sebagai upaya untuk menekan reaksi para anggota SI,
sindikat gula yang juga tergabung dalam *Personil Econom-
ics Bond* (PEB), akhirnya menggunakan organ ini melaku-
kan upaya secara “siluman” di luar kewenangan pemerin-
tah kolonial. PEB memelopori pembentukan berbagai or-
gan gerakan rakyat secara besar-besaran, sebagai upaya
untuk menandingi keberadaan SI dalam masyarakat.

PEB membentuk organ dari berbagai corak masyara-
kat bumiputera seperti memakai identitas Jawa, hingga
menggunakan identitas Arab atau Islam. Organ yang me-
miliki corak Jawa adalah Sarekat Hedjo (idjo) di Cianjur
dan Sumedang, Pamitran di Bandung, Sarekat Pompa di
Cimahi, *Tolak Bahla Towil Umur* (TBTO) di Tasikmalaya dan
Garut.²⁰³ Bentuk lain adalah organ yang bercorak Arab atau

Islam, seperti halnya Jamiatul Hasanah, Jamiatul Mutiin, dan Ahlu Sunnah Wal Jamaah.²⁰⁴

Sistem perekrutan para kadernya, dilakukan dengan cara memberikan gaji bagi siapa pun yang masuk dalam keanggotaan tersebut. Seperti halnya Ahlu Sunnah Wal Jamaah. Propagandisnya menyerukan kepada masyarakat bahwa bagi siapa saja yang masuk dalam organisasi tersebut tidak ditarik iuran, serta bagi para pengurusnya akan mendapat gaji yang layak. Berbagai janji dan proses yang dilakukan oleh organ ini akhirnya dapat ditelusuri bahwa sistem pendanaan yang menyokong organ tersebut adalah dari PEB.

Sarekat Hidjo juga memiliki keterkaitan yang sama dengan Ahlu Sunnah Wal Jamaah. Organ ini sangat menentang radikalisme SI yang mengusung Komunis sebagai ideologi dan dasar perjuangan SI. Begitu pula dengan TBTO -dalam perkembangannya- organ ini menentang PNI.²⁰⁵

Menyebarnya berbagai organ tersebut, terkait semakin kerasnya perlawanan para anggota SI terhadap praktik Kapitalisme dan Kolonialisme Belanda. Berbagai aksi pemogokan tersebut, akhirnya memicu keberanian bumiputera melakukan perlawanan terhadap pemerintah yang berakibat pada munculnya berbagai insiden penentangan secara fisik terhadap Pemerintah Hindia Belanda. Berbagai aksi kerusuhan sering kali disusul oleh aksi kerusuhan lainnya, seperti halnya terjadinya insiden Toli-toli di Sulawesi Tengah pada Juni 1919. Insiden ini berawal dari meningkatnya tekanan Pemerintah Hindia Belanda terhadap SI di daerah tersebut. Insiden ini terjadi, akibat meningkatnya

perlawanan yang dilakukan oleh anggota SI ketika diberlakukannya kerja paksa (*herendiensten*) selama bulan puasa. Masyarakat sebetulnya masih patuh dalam menjalankan kerja-kerja tersebut, akan tetapi, masyarakat meminta agar pekerjaan tersebut dihentikan sejenak menjelang bulan suci itu berlangsung, agar dapat melakukan ibadah.²⁰⁶ Tuntutan yang dilakukan oleh masyarakat tidak diterima oleh Pemerintah Hindia Belanda dan tetap mewajibkan kerja tersebut pada bulan ramadhan.

Akibat tidak diterimanya usulan tersebut, menyulut kemarahan masyarakat setempat dan melakukan aksi pembunuhan terhadap seorang kontrolir Belanda J.P. de Kat Angelino, serta beberapa orang pembantunya dari pihak bumiputera. Peristiwa ini terjadi bertepatan setelah usainya kunjungan Abdoel Moeis di Sulawesi Tengah. Pemerintah Hindia Belanda menuduh Moeis berada dibalik peristiwa tersebut. Dengan demikian, Moeis akhirnya ditangkap dan dipenjarakan atas tuduhan tersebut.

Ketika masih hangat-hangatnya insiden Toli-toli di Sulawesi Tengah, pada Juli 1919, terjadi insiden serupa di Cimarame Jawa Barat. Peristiwa ini terjadi akibat munculnya penolakan Haji Hassan untuk menyerahkan hasil bumi (beras) kepada Pemerintah Hindia Belanda sebanyak 42 pikul yang dihasilkan dari 10 bahu (1 bahu = 7096.5 in²) sawah yang dikelolanya. Penolakan Haji Hasan tersebut, karena beras yang dimilikinya adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari keluarganya yang berjumlah 84 anggota keluarga.

Penolakan Haji Hassan tersebut akhirnya memicu kemarahan para anggota satuan militer pemerintah setempat dan melakukan pengepungan rumah Haji Hassan. Dalam pengepungan tersebut, Haji Hasan dan empat anggota keluarganya ditembak meninggal, dua puluh orang luka-luka, sedangkan yang lainnya melarikan diri.²⁰⁷

Peristiwa ini memunculkan berbagai kecaman, baik dari bumiputera maupun pihak Belanda (penasihat Belanda G.A.J. Hazeu). Peristiwa tersebut dianggap sebagai bentuk kesewenang-wenangan pejabat pemerintah setempat terhadap bumiputera. Akibat banyaknya kecaman yang muncul akhirnya, pemerintah di Jakarta secepatnya melakukan restrukturisasi terhadap para pejabat setempat. Untuk menyelesaikan kasus ini, pemerintah melakukan penelusuran terhadap berbagai kemungkinan, terkait terjadinya peristiwa tersebut. Dalam penyelidikan yang dilakukan oleh Pemerintah Hindia Belanda, terjadinya peristiwa tersebut terkait dengan organisasi yang disebut Sarekat Islam *afdeling B*. Identifikasi terhadap istilah B pada dasarnya tidak ada kejelasan yang pasti, akan tetapi dapat dimungkinkan bahwa B adalah sebuah identifikasi kata *bugat* yang berarti pemberontak.²⁰⁸

Pihak-pihak yang dianggap terlibat peristiwa Toli-toli atau Cimareme Garut Jawa Barat ditangkap. Berbagai pihak yang dianggap terlibat dalam peristiwa tersebut adalah para anggota SI dan kelembagaan SI Garut akhirnya dibubarkan. Bubarnya SI Garut menyulut kemarahan Tjokroaminoto, yang akhirnya mengirim Moeis dan Alimin

untuk melakukan pengorganisasian kembali para anggota SI Garut dan berhasil membangunkan kembali kelembagaan tersebut.

Dari rangkaian peristiwa tersebut pada dasarnya memiliki dampak yang besar terhadap keberlangsungan SI di berbagai daerah di Indonesia. Akibat peristiwa itu, pemerintah mengeluarkan larangan berkumpul dan melakukan rapat. Larangan ini sangat dirasakan oleh SI, sehingga para anggotanya selalu menjadi target penangkapan karena dianggap melanggar aturan tersebut. SI telah mendapatkan tekanan yang luar biasa besar, sehingga berdampak pada makin melemahnya daya juang para anggota SI dalam melawan Pemerintah Hindia Belanda.

D. Pecahnya Sarekat Islam (SI)

Menjelang tahun 1920, dunia pergerakan bumiputera telah menampakkan ketidakberdayaannya dalam menghadapi sikap Pemerintah Hindia Belanda yang represif. Berbagai kebijakan baru berkaitan dengan penghapusan kebebasan berkumpul (mengadakan rapat), pengurangan atau penghapusan biaya kesejahteraan bagi para pekerja, serta kebijakan represif lainnya yang diberlakukan oleh Gubernur Jendral Dirk Fork pengganti Van Limburg Stirum.²⁰⁹ Gubernur jenderal baru tersebut tiba di Hindia Belanda tahun 1921. Sejak kedatangannya, berubah pula semua kebijakan yang telah diberlakukan oleh gubernur jenderal pendahulunya. Sebagaimana yang dilakukan oleh Idenburg, ia melihat berbagai aksi pemogokan lebih didasari oleh

kebutuhan ekonomi. Seperti yang terlihat dalam Suratnya kepada Dick Fork demikian:

Asal mula tujuan utama gerakan itu adalah ekonomis: orang ingin dengan menyatukan diri di bidang perdagangan dan industri, melepaskan diri dari perwalian orang Tionghoa. tetapi dia betul menyadari bahwa gerakan Sarekat Islam mempunyai watak keagamaan-Asiatik. Gerakan itu dengan pasti telah menemukan tanah yang siap digarap. Kebangkitan kesadaran akan dirinya, akan kekuatan dirinya sendiri sangat mungkin pertama-tama berbentuk mengambil posisi yang mandiri terhadap pangreh praja pribumi (*inlands bestuur*).²¹⁰

Dalam suratnya itu, Idenburg menjelaskan bahwa tindakan pemogokan yang didasari oleh kebutuhan ekonomi ini memiliki semangat keagamaan Asiatik. Selain itu, gerakan yang dimaksud adalah berorientasi pada Pangreh Praja pribumi (*inlands bestuur*). Dengan demikian, pada tahap pencapaian itulah gerakan pemogokan yang dilakukan oleh berbagai organ bumiputera dianggap juga sebagai bagian dari aksi politik.²¹¹ Pandangan demikian hampir dapat dikatakan seirama dari berbagai gubernur jenderal pendahulu Dick Forck, seperti halnya Van Heutz dan Van Limburg Stirum.²¹²

Berbagai aksi pemogokan yang dilakukan oleh serikat buruh serta terjadinya berbagai insiden, disikapi oleh Dirk Fork sebagai aksi politik dan dianggap menciderai *rust en orde* (keamanan dan ketertiban). Kondisi demikian dianggap telah merongrong keberadaan Pemerintah Hindia Belanda.

Terkait kesamaan dalam melihat sikap bumiputera dalam berbagai pemogokan sebagai aksi politik, akan tetapi para gubernur jenderal ini memiliki cara yang berbeda dalam menyikapi berbagai aksi yang dilakukan oleh bumiputera tersebut. Sikap yang ditunjukkan oleh Fock dalam menangani berbagai aksi pemogokan yang dilakukan oleh berbagai serikat buruh sebagai kekuatan eksternal SI adalah represif. Sikap represif tersebut tecermin pada pembentukan satuan khusus (intel) yang dijalankan oleh polisi sebagai kepanjangan tangan Pemerintah Hindia Belanda. Tugas satuan polisi adalah untuk mengamankan serta menindak bumiputera yang dianggap membahayakan dan mencederai *rust en orde*. Selain pembentukan satuan polisi untuk mengamankan berbagai pemogokan yang dilakukan oleh buruh maka, Dirk Fork juga mencabut izin melakukan *vergadering*. Akibat dari kebijakan yang diterapkan oleh Fork tersebut, rakyat bumiputera tidak mampu leluasa bergerak, karena selalu dicurigai oleh satuan kepolisian.²¹³

Kebijakan tersebut sangat menyulitkan berbagai pihak pada masa itu. Pemerintah tidak pandang bulu dalam memperlakukan para aktivis bumiputera, terutama SI. Para aktivis pergerakan menjadi target penangkapan atau pembuangan apabila disinyalir melakukan perbuatan yang dianggap mengganggu *rust en orde*. Dengan demikian, tahun 1921 menjadi masa menakutkan bagi para aktivis pergerakan. Masa-masa sulit akibat kebijakan represif Dirk Fork sangat tampak ketika melakukan penangkapan terhadap aktivis pergerakan bumiputera. Seperti halnya pe-

nangkapan yang diberlakukan kepada Sosrokardono terkait peristiwa *afdeling B*. Sosrokardono sebagai sekretaris CSI dikenai hukuman penjara selama empat tahun dimulai bulan Desember 1920. Sosrokardono dituduh atas partisipasinya dalam suatu organisasi yang bertujuan melakukan kejahatan.²¹⁴

Tjokroaminoto antara tahun 1921-1922 juga ditangkap terkait peristiwa yang sama. Tjokroaminoto dipenjara selama delapan bulan.²¹⁵ Tjokroaminoto juga dikenai pasal penahanan atas tuduhan sumpah palsu, sehingga dijatuhi hukuman selama satu tahun kurungan penjara, dipotong masa tahanan (Vonis dibatalkan oleh pengadilan tinggi).²¹⁶ Diterapkannya kebijakan represif oleh Fock tersebut, menandai berakhirnya masa etis di Hindia Belanda.²¹⁷

Sejalan dengan kebijakan Dirk Fork yang keras terhadap pergerakan bumiputera, tensi pergerakan dalam menentang Pemerintah Hindia Belanda mengalami penurunan. Turunnya kekuatan bumiputera dalam melakukan tekanan terhadap pemerintah kolonial dijadikan sebagai bahan refleksi bagi para aktivis pergerakan bumiputera untuk kembali menata strategi perjuangan yang lebih tepat. Upaya refleksi yang dilakukan oleh para aktivis pergerakan bumiputera rencananya dibahas dalam kongres CSI tahun 1920, akan tetapi kongres tersebut gagal akibat banyaknya para anggota SI yang di tahan dan kongres dilakukan pada 1921.

Ketika kongres tahun 1921 berlangsung, arah pembicaraan justru mengenai ideologi pergerakan. Masing-masing pihak saling bersikukuh terhadap arah perjuangan melalui

keyakinan ideologinya masing-masing. Darsono dan kawan-lawan, sebagai wakil dari SI Semarang (Semaoen berada di Rusia), tetap bersikukuh terhadap Komunisme, sedangkan Tjokroaminoto, Agus Salim, Moeis, serta Suryopranoto juga tetap pada pendirian awal yaitu Islam tetap sebagai ideologi dan cita dasar pergerakan SI dalam menentukan dasar kebangsaan menuju cita-cita Indonesia merdeka.

Perdebatan yang makin memanas akhirnya mengondisikan para anggota SI yang hadir saling menentukan dukungannya. Satu pihak mendukung arah perjuangan SI dengan Komunisme, sedangkan pihak lain, ingin mempertahankan Islam sebagai dasar perjuangan SI. Pihak yang ingin tetap memperjuangkan Islam sebagai dasar pergerakan SI, akhirnya mengusulkan disiplin partai terhadap PKI, sebagai upaya untuk membedakan antara Komunisme dengan Islam. Usulan tersebut ditolak oleh para anggota SI Semarang, akan tetapi para peserta kongres lainnya mendukung diberlakukannya disiplin tersebut.

Kelompok SI Semarang secara tegas menolak Islam sebagai dasar pergerakan serta menolak diterapkannya Islam dalam wilayah politik. Islam dianggap tidak cekatan dalam merespons perubahan serta terlalu lemah dalam melakukan perlawanan terhadap Pemerintah Hindia Belanda. Dasar penolakan SI Semarang terhadap Islam sangat jelas, karena SI Semarang telah menemukan Komunisme sebagai dasar pergerakan, yang dianggapnya mampu menggerakkan bumi-putera secara revolusioner. SI Semarang tidak lagi menempatkan Islam sebagai garis politik, Islam hanya sebatas agama,

dan hanya mengatur hal-hal yang sifatnya *imanen*, sehingga tidak dapat melebur dalam sikap politik yang sifatnya *profan*.

SI Semarang yang telah memilih Komunis sebagai ideologi, akhirnya bersama ISDV melebur dalam Partai Komunis Indonesia (PKI) pada 1920. Selain itu, VSTP dijadikan sebagai ujung tombak organ penggerakan buruh. Hanya dengan perjuangan buruh, sebuah penindasan yang diakibatkan dari sistem kelas sosial dapat dihapuskan untuk mencapai sebuah tatanan masyarakat tanpa kelas. Tanpa kelas berarti, hilangnya kelas sosial dalam masyarakat, yang selama ini sebagai faktor utama terjadinya penindasan manusia satu atas manusia yang lainnya. Hilangnya kelas sosial dalam masyarakat akan melahirkan kesejahteraan bagi manusia, sebagaimana yang dicita-citakan oleh Komunisme yaitu sama rata-sama rasa.²¹⁸

Cita dasar pergerakan SI Semarang berpijak pada dua kaki yang masing-masing tergabung dalam lembaga yang berbeda, ternyata tidak mendapat tanggapan baik dari kalangan SI di bawah kontrol Tjokroaminoto yang saat itu berpusat di Yogyakarta.²¹⁹ SI Semarang yang mengusung dasar ideologi Komunis, dimaknai telah semakin memperlihatkan adanya sifat sekularitas dalam hal agama dan politik. Dengan demikian, perbedaan pandangan tentang penempatan agama dan politik dalam mewujudkan cita-cita perjuangan menuju Indonesia merdeka menjadi perdebatan yang panjang di antara keduanya.

Model ideologi Komunis yang demikian sangat bertentangan dengan ide dan gagasan Tjokroaminoto dan Agus

Salim. Tjokroaminoto dan Agus Salim tetap mempertahankan Islam sebagai dasar pergerakan. Islam merupakan sebuah agama sekaligus ideologi yang mengatur semua hal tanpa terkecuali. Persoalan agama dan politik, bagi Tjokroaminoto dan Agus Salim tidak dapat dipisahkan secara tegas, akan tetapi justru segala sikap dan perilaku sosial, ekonomi, politik, harus berlandaskan Islam yang bersumber pada al-Qur'an dan al-Hadits. Lebih jauh Tjokroaminoto dan Agus Salim menjelaskan, bahwa Islam menjadi fondasi terbentuknya rasa nasionalisme kebangsaan Indonesia.²²⁰

Perdebatan terus berlanjut, berbagai kecaman dari kedua belah pihak terus muncul, sehingga tidak menemukan persamaan di antara keduanya. Untuk menghindari perselisihan lebih lanjut, sedangkan perjuangan yang nyata untuk melawan bentuk-bentuk Kapitalisme Belanda secepatnya harus direalisasikan. Perdebatan keduanya yang telah meluas hingga tidak terlihat lagi batas-batas lembaga dan pribadi di dalamnya, akhirnya semakin mempertegas keinginan Agus Salim, Moeis dan Suryopranoto untuk segera mengakhiri kebersamaannya dengan SI Semarang dengan cara mengesahkan disiplin partai yang juga telah disepakati oleh para peserta kongres lainnya.²²¹ Pihak SI Semarang yang telah memprediksi hasil keputusan tersebut tetap tenang dan menerima hasil keputusan tersebut.

Disiplin partai menjadi keputusan yang tidak dapat ditolak dan harus dilakukan, karena telah menjadi keputusan kongres. Yang dimaksud dengan disiplin partai adalah memberikan kesempatan untuk memilih salah satu lembaga bagi

anggota SI yang sebelumnya memiliki keanggotaan ganda dengan PKI. Disiplin partai dimaksudkan untuk menertibkan SI dari berbagai hal yang dianggap dapat merugikan SI itu sendiri.

Perlu dicatat lebih lanjut, bahwa agenda besar Agus Salim dan Moeis menerapkan disiplin partai dalam SI adalah sengaja untuk mengurangi atau menghilangkan unsur ideologi Komunis yang telah menyebar dalam SI Semarang dan beberapa SI afiliasinya. Dengan demikian, diberlakukannya disiplin partai, akhirnya mengikis berbagai anggota SI yang sebelumnya telah memiliki keanggotaan ganda dengan PKI. Beberapa kelompok yang telah menentukan sikap keluar dari SI karena memiliki keanggotaan ganda adalah SI Semarang, Kudus, Ambarawa dan Sukabumi yang sebelumnya masuk dalam kelembagaan ISDV. Penerapan disiplin partai tersebut, secara tegas memisahkan ideologi Islam dengan ideologi Komunis yang juga memisahkan pusat organ pergerakan Semarang dengan Yogyakarta.²²²

Setelah diberlakukannya disiplin partai, berbagai pergerakan buruh yang dilakukan oleh masing-masing pihak terus berlangsung. Upaya untuk saling menguasai organ pergerakan buruh semakin nyata terlihat. SI Semarang dan berbagai cabang yang telah mendukungnya mengubah namanya menjadi Sarekat Rakyat (SR)²²³, sedangkan untuk menyalurkan haluan politiknya, masing-masing masuk ke dalam PKI.

Meleburnya SI Semarang dalam PKI tentunya semakin memperkuat posisinya saat itu sebagai pelopor perge-

rakan buruh di Indonesia. VSTP sebagai organ pergerakan buruh yang tetap aktif, menjadi misil yang semakin kuat yang akhirnya mampu menjelajah secara luas, sehingga mampu menggandeng berbagai organ buruh lain di bawah kontrol PKI. VSTP menjadi organ buruh yang paling potensial dalam mengusung ide-ide Komunisme. Dalam prosesnya, PKI juga didukung oleh para aktivis pergerakan lain seperti Mas Marco Kartodikromo, Sosrokardono, Haji Misbach (ketua M.M. dan I.B.)²²⁴, serta berbagai pihak lain yang juga ikut memperkuat barisan di bawah naungan PKI. Dengan demikian, PKI semakin terlihat sebagai sebuah organ yang revolusioner melawan Pemerintah Hindia Belanda dan mempertegas perbedaannya dengan organ pergerakan lain.

Begitu pula dengan SI Yogyakarta beserta afiliasinya, mereka membangun basis kekuatan pergerakan dari berbagai organ SI yang mendukung upaya untuk tetap memperjuangkan Islam sebagai ideologi dan dasar pergerakan mereka. Kelompok ini sementara tetap menggunakan kelembagaan SI,²²⁵ akan tetapi organ ini telah dirombak sedemikian rupa dengan cara melakukan restrukturisasi, sebagai upaya untuk membentuk sebuah organ pergerakan baru. Restrukturisasi yang dilakukan, tentunya menandai pula munculnya berbagai perubahan dalam membangun arah perjuangan organ ini. Hal-hal yang berkaitan dengan *platform* partai, tujuan, serta basis massa dikaji ulang untuk mempertegas (baca: membedakan) identitas partai politiknya dengan partai lain sebagai upaya untuk mempertegas pula

arah perjuangan menuju Indonesia merdeka serta untuk membedakan pula dengan organ pergerakan lain seperti PKI. Seiring dengan gagasan restrukturisasi dalam SI, organ ini juga tetap mengupayakan sebuah pergerakan yang revolusioner melalui organ pergerakan buruh. Persatuan Pegawai Pegadaian Bumiputera (PPPB), menjadi garda terdepan dalam memperjuangkan bumiputera melawan Pemerintah Hindia Belanda yang represif.

Masing-masing organ pada prinsipnya telah saling membedakan satu dengan lainnya. Keduanya, saling menentukan identitas kelembagaan yang berbeda akibat diberlakukannya disiplin partai terhadap PKI. Kedua belah pihak tidak ingin kehilangan massa pendukungnya, yaitu buruh. Dengan demikian, kedua lembaga itu kembali bersaing untuk menarik simpati rakyat Indonesia agar saling bergerak di bawah kendalinya masing-masing pada proses selanjutnya. •

5 Menentukan Basis Ideologi

Agama Islam berkembang di Hindia, Agama Islam beraroem gandanja di seloeroeh Hindia, begitoe kata orang jang baroe birahi kata-kata...

H. Misbah, "Perbarisan Islam Bergerak: Sikap Kita", *Islam Bergerak*, 20 November 1922.

A. Gerakan Buruh: Menuju Cita-cita Komunisme

Sekembalinya Semaoen dari Uni Soviet tahun 1922, Semaoen telah menyaksikan adanya disiplin partai yang diberlakukan dalam SI. Disiplin partai yang diberlakukan tersebut tidak menciutkan semangatnya dalam memperjuangkan bumiputera secara revolusioner. Semaoen bersama kawan-kawan lainnya lebih memperkuat serikat buruh, khususnya VSTP. Oleh Semaoen, organ buruh ini, menjadi garda terdepan dalam menentang semua kebijakan pemerintah serta sebagai motor dalam mempertegas gagasan

Komunisme yang dicita-citakan. Sikap tersebut sangat menguntungkan SI di bawah kontrol Semaoen, karena hampir semua kekuatan buruh saat itu lebur dalam VSTP sebagai sebuah organ yang mampu bergerak secara radikal dalam melawan penindasan Pemerintah Hindia Belanda.

Ketika arah pergerakan PKI dan VSTP benar-benar terlihat sebagai bentuk yang revolusioner dalam melawan tekanan Pemerintah Hindia Belanda, berbagai pihak akhirnya ikut mendukung arah perjuangan PKI. Beberapa aktivis pergerakan yang ikut bergabung dengan PKI adalah Mas Marco Kartodikromo, Sosrokardono, Haji Misbach (ketua M.M. dan I.B.), serta berbagai pihak lain yang juga ikut memperkuat barisan di bawah naungan PKI. Mas Marco pada dasarnya sejak 1918, setelah keluar dari penjara Weltevreden akibat *pers delik*, ia memperkuat barisan ini dengan aktif sebagai editor Sinar Djawa (berubah menjadi Sinar Hindia), yang juga bertindak sebagai Komisaris SI Semarang.²²⁶ Begitu juga dengan Sosrokardono, ia bergabung dengan barisan ini pada 1922. Ia bergabung dengan PKI setelah keluar dari penjara akibat kasus *afdeling B* di Cimoreme, Garut Jawa Barat tahun 1919.

Haji Misbach merupakan sosok muslim yang radikal dari Surakarta. Sama seperti keduanya, Misbach bergabung dengan PKI setelah keluar dari penjara akibat peristiwa pemogokan petani dan buruh yang diorganisir melalui SATV dan Insulind di Surakarta. Sekembalinya dari penjara, ia bergabung dengan PKI dan kembali menunjukkan sifat reaksionernya terhadap Pemerintah Hindia Belanda dan

juga bereaksi terhadap pihak-pihak orang Islam yang dianggapnya terlalu lemah dalam memperjuangkan Islam.

Untuk menandai bahwa Misbach telah keluar dari penjara dan tetap konsisten berjuang secara revolusioner, sembari menyapa para pembaca Medan Moeslimien, di akhir tulisannya, Misbach mengatakan demikian:

...Awat Saudara awat! Djikalau ada saorang jang mengakoe atao menjeboet dirinja saorang moekmien dan Islam, teroetama pemimpinja, tetapi misi ada jang bersifat moenafik, djangan sampai kaget, moesti akan menerima tendangan dari saia.²²⁷

Ancaman yang dilakukan oleh Misbach ini sangat jelas dituduhkan kepada orang-orang Islam yang munafik, akan tetapi, tidak secara eksplisit ditujukan kepada siapa. Tuduhan tersebut sangat dimungkinkan kepada Muhammadiah, hal ini terkait dengan tulisannya Misbach yang lain dalam *Islam Bergerak* Tanggal 20 November 1922, *Perbarisan Islam Bergerak: Sikap Kita*. Di akhir tulisannya ia mengatakan demikian:

Agama Islam berkembang di Hindia, Agama Islam beraroem gandanja di seloeroeh Hindia, begitoe kata orang jang baroe birahi kata-kata, sehingga perkoempoelannja kaum modal poetih merasa perloe mendirikan perkoempoelan Islam dinamaken *Djamijatoel Kasanah*, kaum modal Djawa dinamaken *Mohammadijah (M.D.)* langkah dan tradjangnja 2 perserikatan itoe tida berbeda, jang dipentingken menjiar-siarken agama Islam dengan tida memerangi fitnah, walaupun jang ditindas tinggal tertindas, dan jang menindas tinggal menindas, en toch tidak ambil moemet

asalkan soedah menjiarkan agama; malahan sebagaimana telah beroelang-oelang dikabarkan di I.B. sini ada djoega jang mendjadi rentenir.²²⁸

Di sini Misbach secara tegas mengecam Muhammadiyah yang dianggap tidak sepenuhnya memperjuangkan Islam, karena tidak memerangi fitnah dan tidak bereaksi terhadap praktik-praktik penindasan. Misbach akan melawan siapa pun yang tidak memperjuangkan Islam sepenuhnya seperti yang diyakininya.

Misbach sangat antusias terhadap PKI dan sosok muslim ini, mencoba menggabungkan nilai-nilai ke-Islaman dengan arah perjuangan PKI yang revolusioner. Ia mengkritik berbagai pihak yang justru dianggapnya melemahkan pergerakan bumiputera dalam memperjuangkan Islam seperti Ahmad Dahlan dengan Muhammadiyah-nya.²²⁹

Munculnya berbagai pihak seperti orang-orang di atas, menjadikan PKI sebagai sebuah organ yang semakin kuat dengan model pergerakan yang revolusioner. Kegagalan pemogokan yang dilakukan pada 1919, ternyata tidak melemahkan PKI, justru kegagalan tersebut menjadi pelecut bagi PKI untuk kembali melakukan berbagai aksi pemogokan buruh yang lebih besar dan revolusioner.

Begitu pula dengan SI Yogyakarta beserta afiliasinya, mereka membangun basis kekuatan pergerakan dari berbagai organ SI yang mendukung upaya untuk tetap memperjuangkan Islam sebagai ideologi dan dasar pergerakan mereka. Kelompok ini akhirnya mengupayakan untuk pembentukan lembaga baru dalam memperjuangkan arah dan

tujuan pergerakan bumiputera. Identitas baru yang sedang dibentuk, tentunya menandai pula munculnya berbagai perubahan dalam membangun arah perjuangan organ ini. Hal-hal yang berkaitan dengan *platform* partai, tujuan, serta basis massa dikaji ulang untuk mempertegas (baca: membedakan) identitas partai politiknya dengan partai lain sebagai upaya untuk mempertegas pula arah perjuangan menuju Indonesia merdeka.

Organ pergerakan tetap menjadi daya tarik yang memikat bagi pejuang bumiputera, sehingga masing-masing organ tersebut saling berebut simpati dari berbagai pihak untuk bergabung dalam organ yang dipimpinnya masing-masing. Akan tetapi, ketika Dirk Fork memberlakukan kebijakan ekonomi baru untuk mengubah kebijakan Van Limburg Stirum yang dianggapnya terlalu berlebihan. Fork melakukan pengetatan di bidang ekonomi²³⁰ dan menaikkan pajak untuk meningkatkan pendapatan bagi Pemerintah Hindia Belanda.²³¹ Dengan demikian, pengetatan anggaran pengeluaran Pemerintah Hindia Belanda akibat dari kebijakan ekonomi yang diberlakukan oleh Fork, semakin menguntungkan Belanda dan sebaliknya bagi bumiputera. Bumiputera mengalami kemiskinan yang hebat yang berakibat pada meluasnya kelaparan di hampir seluruh penjuru pulau Jawa khususnya.

Meningkatnya pajak penduduk, pengetatan terhadap jumlah buruh sebagai bentuk efisiensi, serta makin menurunnya kurs uang dari gaji buruh yang didapat tentunya semakin memberatkan bumiputera. Dari berbagai pihak,

terutama organ pergerakan baik SI Semarang, SI Yogyakarta, serta organ pergerakan lainnya secara cepat menyikapi kondisi tersebut. Masing-masing organ pergerakan buruh kembali mengambil sikap melakukan pemogokan di berbagai daerah di Indonesia untuk menentang kebijakan Fork yang dianggapnya sangat memberatkan bumiputera. Pada saat inilah, sejak diberlakukannya disiplin partai terhadap PKI dalam SI, SI Semarang untuk pertamakalinya bergabung dengan CSI, bersama-sama melakukan aksi pemogokan bersama para buruh di bawah kendali organnya masing-masing.

Di Yogyakarta, aksi pemogokan diakomodir oleh Abdoel Moeis, ketua PPPB pada tanggal 12 Januari tahun 1922. Aksi pemogokan ini meluas dan diikuti oleh berbagai buruh pegadaian di berbagai daerah seperti halnya Cirebon, Pekalongan, Kedu, Semarang, Rembang, Kediri, Surabaya, dan Pasuruan. Aksi pemogokan ini menuntut adanya kenaikan gaji buruh. Tuntutan yang diajukan tersebut sangat logis, karena kenaikan gaji yang dimaksud sangat membantu para buruh dalam mencukupi kebutuhannya sehari-hari akibat munculnya krisis di tahun-tahun tersebut. Dengan demikian, aksi tersebut menarik para buruh untuk bergabung dalam menyuarakan tuntutan ini.²³²

Kendati pada mulanya pemogokan yang dipelopori oleh PPPB untuk diakhiri secara damai, akan tetapi Pemerintah Hindia Belanda tetap menindak semua yang terlibat dalam aksi pemogokan. Melihat kondisi demikian, PPPB yang dipimpin oleh Moeis akhirnya tetap meneruskan aksi pe-

mogokan tersebut. Pemogokan ini secara cepat menyebar dan tidak hanya dari PPPB, akan tetapi berbagai pihak seperti halnya PKI, Revolutionaire Vakcentrale yang dipimpin Tan Malaka dan Bergsma, BU, Muhammadiyah dan serikat buruh lainnya bersatu melakukan aksi tersebut. Aksi pemogokan yang dilakukan para buruh ini akhirnya gagal dan beberapa propagandisnya seperti Tan Malaka²³³ dan Bergsma dikenai pasal pembuangan oleh Pemerintah Hindia Belanda.²³⁴

Gagalnya aksi pemogokan tersebut tetap tidak menyurutkan sikap dan gerakan melawan penindasan yang dilakukan oleh kapitalisme Pemerintah Hindia Belanda. Berbagai aksi pemogokan yang lain terus terjadi menjelang tahun-tahun berikutnya. Ditangkapnya para propagandis pergerakan buruh, tidak menyurutkan pihak-pihak lain untuk mengambil alih posisi sebagai propagandis pergerakan buruh. Kini tibalah masa Haji Misbach untuk menggerakkan buruh di berbagai daerah di Indonesia. Penjara bagi Misbach tidaklah menyurutkan semangatnya untuk tetap melakukan perlawanan terhadap Pemerintah Hindia Belanda. Misbach telah menjelma menjadi sebuah kekuatan baru bagi pergerakan buruh di bawah naungan PKI.

Misbach benar-benar membuktikan ancamannya tersebut kepada semua orang Islam yang dianggapnya munafik dan tidak sungguh-sungguh dalam memperjuangkan Islam. Setelah mengkritik Ahmad Dahlan dengan Muhammadiyah-nya, Misbach juga mengkritik Tjokroaminoto yang dianggapnya telah memecah persatuan pergerakan

umat Islam akibat diberlakukannya disiplin partai pada 1921 yang mengakibatkan perpecahan di dalam tubuh SI. Demikian ia mengatakan:

Oleh karena itoe, didalam Qoeran boekannya tjoema isi keterangan satoe of doea fatsal kebaikan sadja, akan tetapi dalam al Qoeran isi beberapa pengetahoean dn beberapa keterangan kebaikan dan perdjalanen jang boesoek, dengan begitoe manoesia jang diberi fikiran oleh Toehan soepaja memikirkan akan kebaikan jang baik itoe mendatangkan keselamatan dan berbahagia dalam doenia wal achirat. Mereka bisa mendjaoehi jang boesoek-boesoek itoe soepaja slamat dari bahaya doenia wal achirat, mendjadi adanja siksa itoe sesoenggoehnya tergantoeng didalam perdjalanen, tidaklah memakai disiepline sebagai sarekat Islam Tjokroaminoto jang ada pada sekarang ini. Tjokroaminoto mengoeatirkan pergerakan jang dipimpinnja. kemasoekan kominiest dan lain-lainnja Pendapetannja jang sebagai itoe apakah dari kebodohannja apa dari boesoek tabiatnja.²³⁵

Dalam tulisannya itu, Misbach ingin mengatakan bahwa disiplin partai yang diterapkan oleh Tjokroaminoto dalam SI adalah tidak tepat. Untuk mengatakan bahwa tindakan Tjokroaminoto tersebut tidak tepat, Misbach mengaitkan argumentasinya dengan tuntunan al-Qur'an yang membawa kebaikan. Selain itu, Misbach mengatakan bahwa seharusnya kesalahan atau kebaikan akan terlihat dalam perjalanan atau proses, dan bukan dengan cara melakukan atau menerapkan disiplin partai seperti yang dilakukan oleh Tjokroaminoto. Misbach seolah-olah menggurui Tjokroaminoto dengan mencela keputusan disiplin partai tersebut. Tjokroaminoto dianggap sangat takut terhadap Komunis, sehingga Mis-

bach menyindir dengan memberikan dua kemungkinan terhadap Tjokroaminoto apakah kemungkinan tersebut terkait karena kebodohnya atau justru karena tabiatnya.

Terkait dua kemungkinan yang dimaksudkan oleh Misbach, bahwa tabiat yang dimaksudkan adalah tentang perilaku Tjokroaminoto yang dianggapnya tidak konsisten terhadap Islam dalam kehidupan sehari-harinya termasuk kesukaannya terhadap perempuan. Di awal tulisan ini, Misbach menjelaskan bahwa:

Oleh karena itoe dibawah ini kami perloekan menerangkan bagaimana keadahan Tjokroaminoto moleai tersangkoet afdeling B. sampai kedjadian S.I. pehak Tjokro sesoedah Cong-gres C.S.I di Madioen jang baroe baroe. Ketahoelah t.t. pembatja M.M. jang termoeia, pikir, dan rasakan betoel² dengan perasaan jang merdika agar mendapat boeah jang baik. Diwaktoe Tjokroaminoto dalam tahanan boei glodog Batavia menoeroet keterangan jang kami dapat dari istri Tjokro sendiri (Siroes, bekas tandak) atau keterangan dari sahabat kami jang waktoe didalam Glodog mereka sama menerangkan dari sebab ketjintaannja dan belaskasiannja istri Tjokroaminoto kepada Tjokroaminoto dan sangat ichtiar bisanja ketemoe kepada lakinja, sampailah dia tidak takoet sakit pajah dan mengeloearkan banjak oeang.

Dengan ichtiar jang sematjam itoe lama kelamakan maka kaboellah jang di sengadjanja, ialah istri Tjokroaminoto bisa masoek dalam kamar boei dengan leloeasa penoch kemerdikaan. Dengan begitoe kedatanganlah apa jang dimaksudkan kedoea laki binik didalam kamar boei itoe jang soedah lama di kandoengnja. Kedjadian jang sematjam itoe

boekannya biasa sadja akan tetapi mendjadi keheranan kawan-kawannya atau segala orang, karena beloemlah selama-lamanya ada kedjadian dalam boei jang tergandjil sebagai kedjadian jang terseboet diatas. Dengan kedjadian itoe maka banjaklah orang jang berpendapetan: Apakah kira-nja istri Tjokro itoe soedah semoefakat dengan setan-setan dan gendroewo-gendroewo jang membaoereksa?

Dari tulisan ini, Misbach pada mulanya menerangkan tentang pekerjaan istri Tjokroaminoto sebagai bekas tandak. Penebalan kata "Siroes, bekas tandak", menunjukkan bahwa Misbach juga mencela dari pekerjaan yang dilakukan oleh Istri Tjokroaminoto dianggap tidak sesuai dengan Islam, karena pekerjaan tandak seringkali bertalian erat dengan minum-minuman keras dan main perempuan bagi laki-laki. Berkaitan dengan tabiat Tjokroaminoto yang dimaksudkan oleh Misbach adalah terkait perilaku istri Tjokroaminoto dengan caranya, sehingga dapat keluar masuk penjara untuk menemui Tjokroaminoto. Dengan demikian, tabiat Tjokroaminoto yang dimaksudkan oleh Misbach adalah terkait: 1) perilaku pekerjaan istri Tjokroaminoto sebagai bekas tandak; 2) dihubungkan dengan mudahnya istri Tjokroaminoto keluar masuk penjara untuk menemui Tjokroaminoto; dan 3) pertemuan keduanya di dalam penjara antara laki-laki dan perempuan.

Kritikan terhadap Tjokroaminoto terkait dengan pemberlakuan disiplin partai dalam SI tahun 1921 masih sangat hangat bagi kekecewaan Misbach terhadap kemunafikan orang Islam yang dimaksudkan dalam tulisannya tahun

1922, seperti halnya Muhammadiyah. Dengan demikian kritikan atau tuduhan yang dilakukan oleh Misbach terhadap Tjokroaminoto adalah sebagai bagian dari kritikan Misbach terhadap SI yang juga seperti Muhammadiyah dan Tjokroaminoto dianggap sebagai orang yang munafik.

Dari tulisan Misbach tersebut terkesan memaksa dan lebih menunjukkan bahwa ia (Misbach) adalah bagian dari kelompok yang tidak setuju dengan adanya penerapan disiplin partai. Lebih dari itu, tulisan tersebut terkesan emosional atas tuduhannya terhadap pribadi Tjokroaminoto sebagai pimpinan besar SI. Di samping itu, tuduhan sepe-nuhnya ditujukan pada Tjokroaminoto oleh Misbach adalah sebuah kecerobohan, dimana saat itu kendali SI tidak lagi sepenuhnya dipegang oleh Tjokroaminoto (dipenjara akibat insiden Garut 1921-1922) dan ide disiplin partai justru dimunculkan oleh Agus Salim, Moeis yang juga didukung oleh Suryopranoto. Takashi Shiraishi Juga mengkritisi hal serupa, bahwa Misbach pada prinsipnya tidak larut sepe-nuhnya dalam *jaman reaksi*, di mana pertarungan sesungguhnya terjadi antara kelompok SI revolusioner dengan SI demokratis. Tulisan Misbach tersebut lahir pada *jaman partai*, di mana situasi tersebut telah berlalu, akan tetapi semangat Misbach masih menyala, sehingga tidak sesuai pada tempatnya.²³⁶

Pada 1923, Semaoen yang masih berkonsentrasi terhadap VSTP, kembali mengorganisir para buruh kereta api di Semarang dan aksi pemogokan pun dilakukan. Isu mengenai pemogokan buruh kereta api, disebar di berbagai daerah

di mana kantong-kantong buruh kereta api. Menyebarnya berbagai aksi pemogokan para buruh kereta api tersebut, ternyata juga akibat reaksi dari para aktivis pergerakan yang sangat cekatan. Para propagandis PKI telah menyebar dan melakukan berbagai upaya untuk menarik simpati buruh agar bergabung melakukan pemogokan tersebut. Salah satu aktor yang sangat berperan adalah Misbach. Misbach melakukan berbagai propaganda di berbagai daerah menjelang dilakukannya aksi pemogokan tersebut. Misbach menjadi agen penting dalam proses menyebarnya aksi mogok buruh terbesar di akhir tahun 1923. Akibat usaha keras dari berbagai propagandis PKI tersebut, isu pemogokan disambut baik oleh para serikat buruh kereta api di berbagai daerah, seperti halnya para buruh kereta api di Kertosono, Kediri, Wonokromo, Sidoarjo, Ponorogo, Jombang, Madiun, Surabaya, Bangil, Pasuruan, Malang, Cirebon, Pekalongan, Tegal, Kudus.

Meluasnya isu pemogokan para buruh kereta api tersebut, akhirnya menarik para buruh yang juga dari organ pergerakan buruh lainnya. Pemogokan ini meluas dan secara berantai menjadi pemogokan besar-besaran di seluruh Indonesia.²³⁷ Pemogokan yang dilakukan para pekerja kereta api ini mengajukan penolakan terhadap kebijakan yang diberlakukan kepada mereka seperti halnya penghapusan tunjangan biaya hidup, pengurangan jumlah kenaikan gaji tahunan, dan lain-lain. Dalam proses pemogokan tersebut, Semaon mencoba melakukan berbagai antisipasi terlebih dahulu sebelum menjalankan aksi tersebut secara total.

Semaoen menghimbau para anggota VSTP dan para buruh lainnya untuk menunggu perundingan terlebih dahulu dan bergerak pasca ditolaknya tuntutan yang diajukan tersebut. Apa daya, berbagai antisipasi yang dimaksudkan oleh Semaoen ternyata tidak seperti yang diharapkan, dan aksi tersebut gagal. Gagalnya aksi pemogokan besar-besaran tersebut berakibat pada penangkapan pihak-pihak yang dianggap terlibat. Seperti halnya Semaoen, ia harus menebus kegagalan tersebut dengan pengasingan. Semaoen ditangkap oleh Pemerintah Hindia Belanda tanggal 8 Mei tahun 1923 dan atas permohonannya, ia dibuang ke Belanda.²³⁸

Di tengah penangkapan para propagandis PKI dan berbagai pihak yang terlibat dalam peristiwa pemogokan, Misbach secara diam-diam melakukan pengorganisasian kembali terhadap para buruh. Selain buruh, Misbach juga menarik simpati dari kalangan mantan anggota SATV yang sejalan dengan dirinya di Surakarta. Sembari melakukan pengorganisasian tersebut, menjelang bulan Juni, Misbach yang dibantu oleh rekannya Moetakalimoen, Partoatmodjo (bekas sekretaris pertama komite PPKB Semarang dan propagandis VSTP), Sastropanitro, Sandjojo (karyawan firma komersial Belanda di Semarang), Soewarno, Sjarief, Hardjodiwongso, dan beberapa anggota lainnya, datang ke Surakarta mendirikan PKI *afdeling* Surakarta.²³⁹

Pertengahan Juni, sebuah insiden di Surakarta terjadi. Terjadi sabotase rel kereta api yang mengakibatkan gerbong kereta api tergelincir dari rel nya. Di susul lagi tanggal 20 Juni, sebuah bom dilemparkan ke kereta api jurusan Poer-

wosari-Wonogiri. Akibat dari peristiwa tersebut, keamanan lebih ditingkatkan oleh para satuan polisi Pemerintah Hindia Belanda dengan cara melakukan penjagaan dan memantau pergerakan Misbach. Pengetatan yang dilakukan terhadap Misbach, akhirnya ia memutuskan untuk bergerak di luar Surakarta.

Perubahan wilayah pergerakan yang dilakukan oleh Misbach, ternyata mendapatkan hasil yang luar biasa. Ia lebih leluasa dalam melakukan propaganda di berbagai daerah seperti: Nganjuk, Madiun, Magelang, Yogyakarta, Kebumen, dan berbagai tempat lainnya. Misbach menjadi pioner pergerakan yang bernaung di bawah PKI. Semakin kuatnya posisi Misbach dalam pergerakan tersebut, semakin banyak pula berbagai peristiwa sabotase yang terjadi di Surakarta. Mulai dari pembakaran sebuah rumah pada bulan Oktober dan pembakaran keperluan sekaten, serta pembakaran terhadap material bangunan yang digunakan untuk membangun masjid dan sekolahan di sekitar Mangkunegaran. Selain dari jenis pembakaran tersebut, berbagai sabotase pembakaran di tempat lain juga semakin meluas yang juga disusul oleh peristiwa pengeboman mobil dan daerah sekitar peristirahatan sunan. Di Madiun juga terjadi peristiwa serupa, sebuah sabotase terhadap rel kereta api yang mengakibatkan gerbong tergelincir, selain itu dalam peristiwa Madiun ini, bom kembali meledak dan menewaskan beberapa orang yang ada di sekitarnya. Dengan kata lain, pengeboman serta kekacauan terjadi di berbagai daerah, di mana titik-titik sentral kereta api berada.

Kekacauan akibat peristiwa tersebut sangat membingungkan pihak kepolisian Pemerintah Hindia Belanda, sehingga pihak kepolisian mencurigai siapa pun yang ikut terlibat dalam peristiwa tersebut. Kepolisian pada prinsipnya berkeyakinan terhadap para anggota PKI sebagai penyebab kerusuhan tersebut, akan tetapi secara hukum, mereka tidak mendapatkan bukti yang cukup untuk melempar tuduhan yang sangat berdasar. Dengan demikian, pihak kepolisian melakukan penangkapan terhadap siapa pun (terutama para anggota PKI) yang dicurigai sebagai pelaku dalam peristiwa tersebut.

Pengeboman tersebut sangat berisiko bagi Pemerintah Hindia Belanda, karena akibat pengeboman kereta api tersebut, jalur transportasi kereta api mengalami kemacetan sehingga mengganggu sirkulasi barang produksi yang akan dikirim ke berbagai daerah, di mana pada bulan-bulan itu, (akhir tahun 1923), merupakan masa di mana perkebunan tebu telah siap dipanen dan dikirim ke penggilingan-penggilingan untuk dijadikan sebagai bahan dasar gula.²⁴⁰

Akibat dari kekecewaan pemerintah, karena macetnya sistem transportasi kereta api tersebut, pemerintah melakukan penyelidikan dan Misbach dituduh sebagai otak dari semua itu. Misbach di tangkap dan dipenjara, sambil menunggu keputusan dari pemerintah terkait hukuman yang pasti yang dijatuhkan kepada Misbach. Pemerintah akhirnya memutuskan untuk menghukum Misbach dengan hukuman buang. Misbach dibuang ke Manokwari dan sejak pembuangan inilah, Misbach akhirnya absen dalam dunia pergerakan

untuk memperjuangkan bumiputera secara revolusioner. Masih dalam masa pembuangannya tersebut, Misbach tetap menuliskan serangkaian gagasan Islam dan Komunisme yang ia padukan sebagai sebuah pengetahuan bagi para pembaca di Medan Moeslimien, bahwa Islam memiliki keterikatan yang dalam dengan Komunisme dalam melawan praktik-praktik kapitalisme Pemerintah Hindia Belanda.²⁴¹ Sampai akhir hayatnya, akhirnya Misbach menutup mata di Manokwari, dan semenjak itulah sosok Misbach tetap dikenang sebagai seorang pejuang bumiputera yang tangguh.

Hal serupa juga berlaku bagi Moeis, ia ditangkap dan dipenjara oleh Pemerintah Hindia Belanda. Pasca ditangkapnya Abdoel Moeis, tentunya berakibat melemahnya PPKB dan PPPB yang berakibat pada bubarnya organ tersebut. Akibat ditangkapnya berbagai aktivis pergerakan baik dari PKI maupun CSI, semakin melemahkan perjuangan bumiputera dalam memperjuangkan Indonesi merdeka. Dengan demikian, kondisi tersebut, semakin menunjukkan bahwa, Pemerintah Hindia Belanda sangat kuat dan bertindak tanpa kompromi terhadap pergerakan bumiputera.

B. Gerakan Islam: Menuju Sosialisme Islam

Restrukturisasi dalam kelembagaan SI yang diputuskan tahun 1921 akhirnya secara resmi diberlakukan pada 17-23 Februari 1923, setelah berlangsungnya Kongres Nasional ketujuh di Madiun. Dalam kongres ini, akhirnya diputuskan untuk membentuk organ pergerakan baru yang

secara tegas bergerak di jalur politik dengan membentuk Partai Sarekat Islam (PSI).

Dibentuknya PSI, menandai bahwa identitas serta struktur partai menjadi lebih jelas daripada sebelumnya ketika masih bernaung di dalam SI yang secara modern belum dapat dikatakan sebagai partai politik. Kongres tersebut juga menghasilkan perubahan keterangan asas dan Islam (baca: Sosialisme Islam) secara tegas ditetapkan sebagai ideologi SI.²⁴² Pembentukan keterangan asas tersebut juga terkait dengan dibentuknya kongres al-Islam di tahun 1922 yang dilakukan oleh Tjokroaminoto dan Agus Salim di Cirebon. Dalam kongres itulah, Tjokroaminoto menyerukan untuk mengusung cita-cita dasar pergerakan bumiputera yang berlandaskan Islam dan Sosialisme.

Proses peleburan masing-masing cabang SI di berbagai daerah menjadi PSI yang berasaskan Islam terus dilakukan. Kondisi demikian masih terlihat pada kongres nasional PSI tahun 1924, ketika tarik menarik kepentingan di berbagai cabang SI masih berlanjut.²⁴³ Seperti halnya proses perubahan nama serta arah perjuangan pergerakan SI menjadi PSI di Bogor. Tepat pada malam minggu, tanggal 20 April (4) tahun 1924, sebuah *oprichtingsvergadering afdeling Partij Islam Sarekat (P.I.S.)* Bogor dilakukan. Dalam *vergadering* tersebut dihadiri oleh Haji Agus Salim dan acara tersebut dihadiri oleh 20 orang sebagai undangan dan dilakukan di rumah sekolah S.I di gang sepatu, No. 15. Bogor.

Dalam *vergadering* ini, Haji Agus Salim berbicara banyak terkait situasi berbagai organ pergerakan di Indone-

sia. Haji Agus Salim membandingkan berbagai organ pergerakan yang ada di Indonesia yang tidak dipimpin oleh Tjokroaminoto adalah tidak bernyawa. Seperti yang dijelaskan berikut:

Lebih enak kita katakan pergerakan itoe dimatikan oleh pemimpinnja. Mana segala pergerakan ra'jat jang tidak ada dikepalai oleh Tjokro, jang ada njawa. Pasoendan, N.I.P. mentjahari kekoeatan kepada ra'jat, itoe poen kaloet belaka. Sebagai P.E.B. dan P.K.I. berbeda keadaannja dengan pergerakan ra'jat lain. Kedoea pergerakan itoe tidak memoe-ngoet oeroenan dari pada anak ra'jat, melainkan memoengoet oeroenan dari loearan. P.E.B. mendapat sokongan atau belandja dari kaoem-kaoem goela dan persaudagaran jang besar-besar. P.K.I mendapat ongkost dari Moskou dari negeri Belanda d.s.b., djadi tidak dari pada kita ra'jat. Mana bekas mana boeatan P.E.B., mana bekas dan mana boeatan P.K.I. Pendeknja ombak pergerakan ra'jat dalam 2 tahoen ini mati.²⁴

Haji Agus Salim, pada dasarnya ingin menyampaikan bahwa berbagai organ pergerakan lain di luar SI atau PSI yang akan dibentuk, masing-masing tidak dibangun dari kekuatan bumiputera seutuhnya, lebih-lebih dari segi pendanaan, sehingga berbagai organ pergerakan yang ada di Indonesia tidak mencirikan bentuk-bentuk semangat yang muncul dari bumiputera seutuhnya. Sebagaimana yang dicirikan oleh NIP, PKI, yang masing-masing organisasi tersebut bukan murni muncul dari semangat bumiputera. Begitu juga dengan PEB, organ ini, justru jelas-jelas dibentuk oleh Pemerintah Hindia Belanda.

Vergadering tersebut, membicarakan tentang upaya-upaya agar kelembagaan PSI secepatnya dapat menggantikan keberadaan SI. Menurut Haji Agus Salim, perlu dibentuk terlebih dahulu sebuah komite, sebagai tim kerja untuk merumuskan terbentuknya PSI Cabang Bogor, sehingga akan lebih memudahkan dalam merumuskan sebuah kelembagaan partai yang lebih cepat dan lebih efektif. Beberapa nama yang masuk dalam komite tersebut adalah: 1) toean Hadji Kembar, mendapatkan 11 suara; 2) toean Soerawinata, mendapatkan 11 suara; 3) toean St. M. J. Samah, mendapatkan 11 suara; 4) toean Kalsih, mendapat 8 suara; dan 5) toean Rachmat Soedarno, mendapat 6 suara. Terbentuknya komite tersebut, *vergadering* akhirnya ditutup.²⁴⁵

Proses restrukturisasi menjadi PSI, serta upaya pembaruan cita dasar (asas) perjuangan dilakukan, maka berbagai kebijakan yang telah diberlakukan oleh CSI sebelumnya, kembali dikaji sebagai upaya untuk menyeimbangkan sebuah model gerakan yang lebih nyata sebagai partai politik. Seperti halnya kebijakan CSI mendukung *Volksraad* yang sejak 1918 telah diperjuangkan, akan tetapi, ketika melihat proses di dalam *Volksraad* tidak mendapatkan hasil yang maksimal, maka kebijakan tersebut di rubah dan mengupayakan bentuk perjuangan lain yang dianggap lebih tepat.

Persoalan untuk menarik dukungan di dalam *Volksraad* semakin meningkat, akibat perjuangan di dalam *Volksraad* semakin tidak mendapatkan hasil yang lebih baik. Seperti halnya sejak tahun 1918, 1919, usulan terhadap pe-

ngurangan tanah perkebunan tebu dalam *Volksraad* ditolak karena tidak menguntungkan bagi pemerintah, dan pemerintah masih melihat bahwa usulan tersebut masih belum saatnya diberlakukan. Menjelang 1920, diberlakukan pembatasan terhadap *vergadering* serta berkumpul dan awal 1921, hak melakukan *vergadering* atau berkumpul telah sepenuhnya dicabut dengan alasan *rust en orde*. Selain itu, penangkapan Tjokroaminoto sebagai pimpinan SI justru menambah kekecewaan mendalam bagi anggota SI. Pembebasan Tjokroaminoto tidak serta-merta memulihkan kekecewaan tersebut, akan tetapi justru lebih mempertegas sikap PSI secepatnya keluar dari *Volksraad*.

Sikap menarik diri dari *Volksraad* benar-benar direalisasikan oleh PSI, akan tetapi, PSI masih memberikan kebebasan terhadap para anggotanya untuk masuk di dalam *Volksraad* atas nama pribadi. Seperti halnya Suroso (anggota *volksraad* dari CSI), ia diminta untuk berhenti dari keanggotaan *Volksraad*, terkait penunjukannya oleh Pemerintah Hindia Belanda dalam lembaga tersebut atas nama CSI.²⁴⁶ Selain itu, Tjokroaminoto, ketika ditawarkan Pemerintah Hindia Belanda untuk kembali menjadi anggota *Volksraad*, secara tegas ia menolak tawaran tersebut.²⁴⁷

Sebagai ungkapan kekecewaan mendalam tersebut, SI menarik semua anggotanya dalam *Volksraad* dan menandai adanya pergeseran sikap PSI yang sebelumnya kooperasi menjadi *non-kooperasi* terhadap Pemerintah Hindia Belanda.²⁴⁸ Sikap tegas keluarnya PSI dari *Volksraad* akhirnya secara resmi diputuskan dalam kongres nasional PSI

tahun 1924 di Surabaya. Sejak tahun inilah, PSI benar-benar tidak memiliki wakil dalam *Volksraad*.²⁴⁹

Munculnya gagasan sikap *non-kooperasi*, akibat reaksi Agus Salim ketika melihat bahwa perjuangan di dalam *Volk-sraad* tidak menghasilkan sebuah perubahan yang jelas bagi bumiputera. Haji Agus Salim menganggap bahwa *Volksraad* hanya sebagai “komedi omong”²⁵⁰, sehingga PSI tidak selamanya mempertahankan diri dalam sistem keanggotaan dalam *volksraad*.

Sikap *non-kooperasi* PSI sangat terlihat sejak 1924. sejak tahun tersebut, PSI tidak lagi berjuang dalam sistem Pemerintahan Hindia Belanda, melainkan lebih memfokuskan diri pada perbaikan sistem kepartaian serta membangun kekuatan Islam untuk mendapatkan simpati berbagai organ Islam serta dukungan internasional. Sikap *non-kooperasi* tersebut akhirnya lebih mempertegas PSI sebagai sebuah partai politik untuk menerapkan sikap politiknya tersebut. Sikap politik yang diambil adalah politik *hijrah*. Rumusan tentang politik *hijrah*, dapat dilihat dalam pemandangan dari berbagai kader PSI di Yogyakarta, 20 Juli 1924. Maksud dari pemandangan tersebut adalah, menyikapi berbagai serangan yang ditujukan terhadap kelompok PSI oleh berbagai pihak seperti halnya pihak Komunis serta berbagai pihak terkait lainnya. Di samping itu, pemandangan tersebut merupakan bagian dari penerapan asas Sosialisme Islam yang akhirnya menjadi pendorong bagi pengukuhan sebuah perubahan strukturalisasi dalam kelembagaan PSI. Dalam acara tersebut, hampir semua pengurus partai hadir

seperti: Suryopranoto, Mohammad Hani, Martodiredjo, Tjokroaminoto, serta Haji Agus Salim.

Mohammad Hani menjelaskan tentang asas Islam. Ia mengatakan demikian:

Petjah-petjah manoesia karena berlain-lainan i'tikadnja. Siapa jang koeat teroes menjalankan maksoednja tentoe mendapat kemenangan diboemi. Islam haroes demikian poela. Tandji'oel-baq harus ada pada Islam. Doenia tentoe mendjadi selamat. Hal ini soedah kedjadian, boekan tjita-tjita sagja. Agama Islam dapat membangoenkan dan menjelamatkan manoesia dengan sempoerna dalam 23 tahoen. Boesoek mendjadi baik, rendah mendjadi tinggi, aniaja mendjadi belas kasihan, sifat madmoemah mendjadi mahmoedah. Boekan tjita-tjita, seperti kebanyakan boeatan orang jang mengakoe hendak menjelamatkan kemanoesiaan. Tetapi soedah didjalankan. Apa sebab, djika kita orang Islam menoeroet Koeran bomi tiada selamat dan moelia. Sebab itoe haroes manoesia berpegang atas Islam, jang soedah terang baiknja. Koeran itoe semoeanja soedah didjalankan , sedjak K.N. Moehammad. Ini satoe dari pada si'ar Islam. Sembahjanglah dimana² djoega tempatnja pada waktoenja sembahjang, baik dipinggir lorong ataupun di station dan lain-lainnja.²⁵¹

Asas Islam yang dijelaskan oleh Mohammad Hani, lebih diarahkan pada dasar ke-tauhid-an seseorang yang beragama Islam (=disebut mukmin). al-Qur'an telah diturunkan sebagai pedoman bagi umat manusia di bumi, dan hendaknya manusia berpegang teguh terhadap Agama Islam, sebagai satu-satunya agama yang benar, agar manusia selamat dunia dan akhirat. al-Qur'an telah diajarkan dan dijalankan oleh Nabi Muhammad saw, dan ajaran tersebut, telah menjadi bukti bahwa Islam telah ter-

uji sebagaimana yang telah dilihat dalam perkembangan Islam di dunia. Dirikanlah shalat, karena shalat adalah sebuah amalan ibadah wajib yang menjadi penentu bagi semua jenis amal ibadah yang lainnya.

Haji Agus Salim menambahkan tentang asas Islam tersebut, terkait dengan suri tauladan yang telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad saw serta empat sahabatnya. Hanya dengan mencontoh suri tauladan mereka, kita sebagai umat di bumi akan mendapatkan serta membuat kesejahteraan di atas bumi.

Semoea orang haroes sama, perkataan ini djika keloe ar dari moeloet orang jang kalah tiada ada artinja sama sekali. Tetapi sedjak Islam mendapat kemenangan besar, persamaan manoesia inilah jang dikemoekakan dalam Islam. Lasjkar Islam 140000 masoek ke Mekah dengan kemenangan, hanja 8 orang sadja moesoeh jang terboenoeh. Apa sebab? Karena dalam Islam dikemoekakan belas kasihan kepada manoesia. Tiadalah ada ketemoe dalam tarich doenia hal jang demikian itoe, baik orang Kristen, Boeda, Zoroaster, dan lain-lainnja. Sovjet, jang dipoedji-poedji oleh periboet ramai, oleh Komunisten, dalam kemenangannja boekan main besar aniajanja kepada fihak jang kalah. Berpoloeh beratoes riboe fihak jang kalah diboenoeh tiada dengan semena-mena. Aniaja soedah tentoe tiada bisa mendjadi alasan [fondament] oentoek mendirikan keselamatan doenia.²⁵²

Secara jelas Agus Salim menjelaskan dari tarich (tahun) Islam, bahwa dalam kemenangannya, Islam tidak menjadi sebuah kekuatan yang membunuh bagi musuh-musuhnya, melainkan sebagai sebuah pengayom bagi mereka yang mau hidup berdampingan.

Dari berbagai pandangan yang dijelaskan di atas, kini giliran Tjokroaminoto, ia lebih mempertegas asas yang di-anut oleh PSI sekaligus merealisasikan asas tersebut menjadi sebuah arah perjuangan yang lebih praksis. Demikian Tjokroaminoto menjelaskan:

Keroesakan manoesia dalam pergaoelan hidoep ini karena doea perkara, ja'ni karena ada:

1. 190

Privaatbezit, jang ada menoeroet hoekoem Islam. Dalam Islam boemi itoe kepoenjaan Allah, orang hanja seolah-olah memindjam. Tetapi sekarang ada orang jang mempoenjai 3000 baoe tanah, ada jang sama sekali tiada mempunyai, dsb.

2. meerwaarde, ja'ni soeatoe kelebihan harga. Riba' dalam Islam.

Kedoeanja itoe telah ada dalam Islam.

Perkataan RIBA' artinja lebih lebar lagi artinja dari pada meerwaarde.

Keadaan sekarang ini memang keadaan kafir, haroes hilang dari boemi diganti keadaan Islam.²⁵³

Dalam uraian tersebut, Tjokroaminoto lebih jelas dalam melihat sebuah asas Islam dan tujuannya yang dihubungkan dengan pola dasar kehidupan manusia dalam masyarakat. Segala sesuatu yang berkaitan dengan kepemilikan pribadi patut untuk dihilangkan, karena hakikat manusia lahir ke dunia, tidak membawa apa pun, dan dunia telah dipersiapkan sebelumnya oleh Allah sebagai pemiliknya. Manusia hadir ke dunia, tanpa membawa bekal apa pun, dan hal demikian juga berlaku bagi manusia lainnya sebagai makhluk tuhan. Dengan demikian, segala sesuatu yang

ada di bumi ini, yang telah diciptakan oleh Allah dan diperuntukkan bagi manusia, hendaknya tidak dijadikan sebagai alat untuk mengisap serta mencari keuntungan dari orang lain dengan cara menindas, untuk mendapatkan keuntungan pribadi.

Tjokroaminoto telah melihat, berbagai bentuk pengisapan dan ketimpangan telah merajalela di Indonesia, baik itu dilakukan oleh pemerintah maupun antara individu dengan individu lainnya yang dapat dilihat dalam bentuk kepemilikan tanah pada masing-masing orang. Tjokroaminoto melihat, bahwa kondisi yang demikian, telah jauh keluar dari nilai-nilai ajaran Islam, sehingga patut kiranya untuk dihancurkan dan kembali pada ajaran Islam yang damai, tanpa penindasan dan saling menolong satu sama lainnya sebagai sesama saudara.

Dari penjelasan Tjokroaminoto tersebut, tentunya dapat ditarik sebuah garis lurus antara Islam dengan Sosialis. Yang dimaksud dengan nilai-nilai Sosialisme adalah terciptanya sebuah masyarakat yang adil tanpa penindasan satu oleh yang lainnya, serta terwujudnya sama rasa dan sama rata. Perlu digarisbawahi, bahwa upaya menuju tujuan tersebut tidak serta-merta sebagaimana yang telah dimaksudkan oleh para pemikir Sosialisme Barat, melainkan sebuah perwujudan kehidupan sama rata-sama rata yang didasari oleh nilai-nilai ke-tauhid-an, serta sebuah sistem sosial, budaya, ekonomi, serta politik sebagaimana yang telah di contohkan oleh Nabi Muhammad dan empat sahabatnya.

C. *Sosialisasi Islam, Membuang Marxisme*

Dari perjalanan panjang PSI menuju cita-cita besar Indonesia merdeka, tentunya harus memiliki perangkat yang lengkap. Perangkat yang dimaksud adalah berkaitan dengan basis massa, asas kebangsaan sebagai pengikat massa, serta nilai-nilai ideologis yang akan menuntun manusia dalam menentukan konstruksi sebuah negara yaitu Indonesia Merdeka. Ketiganya menjadi perangkat yang harus dipenuhi, dan untuk memenuhi berbagai perangkat tersebut, PSI secara perlahan tetapi pasti mengumpulkan satu per satu hingga perangkat tersebut dianggap telah cukup untuk membangun Indonesia merdeka yang dapat diperintah oleh dirinya sendiri.

Berbagai upaya untuk memperkuat basis massa telah diupayakan oleh SI, akan tetapi, setelah diberlakukannya disiplin partai tahun 1921 terhadap PKI, kekuatan basis massa di tubuh SI kembali goyah. SI yang akhirnya berubah menjadi PSI kembali membangun basis massa untuk memperkuat organ pergerakan tersebut. Tahun 1921 merupakan babak baru PSI meyongsong pergerakan nasional bumiputera. Perubahan identitas SI menjadi PSI adalah untuk membedakan secara tegas dari organ-organ lain, terutama PKI. Dasar pembentukan PSI, lebih mempertegas dalam mengusung cita-cita Islam. Hal ini sangat terlihat dengan tetap mencantumkan identitas Islam dalam nama kelembagaan partai tersebut. Islam tetap dijunjung tinggi sebagai sebuah kerangka dasar dalam membangun identitas ke-

bangsaan. Islam menjadi pembanding dari semangat Komunisme yang diusung oleh PKI. Selain itu, untuk memperkuat dasar perjuangan di bawah naungan identitas Islam, model gerakan Sosialisme menjadi penegas terhadap sikap PSI sebagai sebuah partai politik dan organ bumiputera dalam melawan bentuk-bentuk Kapitalisme yang melebur dalam praktik kolonialisme Belanda dan yang menyerupainya. Dengan demikian, setelah disiplin partai, sebuah upaya yang nyata menuju cita-cita besar kemerdekaan Indonesia adalah membedakan secara tegas identitas perjuangan organ pergerakan PSI dengan lainnya dan mengusung cita-cita Islam dengan model pergerakan Sosialisme menjadi landasan perjuangan pada proses selanjutnya.

PSI sebagai organ bumiputera yang secara tegas mengusung dasar kebangsaan di bawah panji-panji Islam dengan menggunakan model pergerakan Sosialisme, tepat tahun 1922, hal-hal yang diupayakan tersebut mulai direalisasikan. Realisasi tersebut adalah proses pembentukan wadah bagi seluruh umat Islam dan berbagai organ Islam yang mulai bermunculan saat itu. Kongres al-Islam merupakan bentuk kongkret untuk menyatukan dasar kebangsaan di bawah panji Islam, dalam menjawab berbagai tantangan bumiputera (khususnya umat Islam), baik di Indonesia maupun dunia. Persatuan umat Islam adalah kunci dari pembentukan wadah tersebut. *Pan-Islamisme* yang datang dari Timur Tengah kembali mengilhami para tokoh PSI untuk menyatukan berbagai organ Islam yang mulai bermunculan. Pan-Islamisme menjadi pendorong untuk mewujudkan

persatuan umat Islam Indonesia dalam membangun dasar nilai kebangsaan menuju Indonesia merdeka.

Sejak berlangsungnya kongres al-Islam, PSI terus mengupayakan persatuan bagi umat Islam menuju cita-cita Indonesia merdeka. Pembentukan basis massa telah digalang, organ Islam dan berbagai umat Islam beserta bumiputera lainnya telah diikat dalam sebuah wadah pergerakan PSI, dan berbagai ajaran Islam yang telah dikembangkan oleh berbagai organ Islam menjadi penyanggah kekuatan PSI. Ketika basis massa mulai bertambah dan menunjukkan kekuatannya, PSI akhirnya mengikat masing-masing elemen baik Islam maupun bumiputera lainnya melalui pergerakan Sosialisme untuk mewujudkan nilai-nilai kebangsaan Indonesia yang majemuk di bawah panji Islam. Nilai-nilai kebangsaan yang dibangun atas dasar Islam dan Sosialisme menyebar dan menjadi ikatan ideologis yang akan membimbing bumiputera bersama PSI menuju Indonesia merdeka.

Tepat pada kongres al-Islam ke-2 tahun 1924 di Garut, Tjokroaminoto sebagai pimpinan besar PSI menyerukan Sosialisme Islam kepada seluruh umat Islam, sebagai landasan ideologis PSI menuju cita-cita Indonesia merdeka. Islam dimaksudkan sebagai sebuah bingkai untuk mengawal pergerakan bumiputera menuju kesempurnaan kehidupan di akhirat dan Sosialisme menjadi mesin penggerak menuju kesempurnaan kehidupan dunia. Dengan demikian, pergerakan Sosialisme dikontrol oleh identitas ke-Islaman untuk mencapai sebuah kesempurnaan hidup baik di dunia

maupun di akhirat. Cita-cita besar inilah yang menjadi semangat bagi para tokoh PSI untuk terus berjuang dalam melawan berbagai bentuk penindasan (dalam bentuk apa pun) yang diberlakukan oleh manusia terhadap manusia lainnya, bangsa satu dengan bangsa lainnya, dan lain-lain. Dalam pidato kongres al-Islam ke-2 tersebut, Tjokroaminoto mengatakan:

“bukan sekali-kali maksud saja dalam Congres ini akan membuat propaganda jang bersipat politiek semata-mata, tetapi dari karena bahagian terbesar dari pada peri-kemanusiaan jang menanggung sengsara dalam pelbagai bahagian dunia, memandang dan menganggap jang akan dapat melepaskan mereka dari pada kesengsaraan itu ialah Socialisme, maka merasalah saja memikul wadajib akan membeberkan uraian jang singkat sekali tentang “socialisme” (atau keselamatannya pergaulan hidup manusia bersama), sebagai jang dikehendaki oleh agama Islam dan oleh ke-Islaman kita. Uraian saja tentang Socialisme ini perlukah djuga:

1. dengan seboleh-bolehnya akan membangunkan perasaanja ummat Islam dinegeri tumpah-darah kita, agar supaya mereka merasa dan mengerti benar-benar, bahwa agama kita bukan s saja menghendaki keselamatan masing-masing orang jang memeluknja, tetapi menghendaki djuga keselamatan segenap pergaulan hidup manusia bersama, ialah keselamatan segenap perikemanusiaan – bahwasanja agama Islam kita itu agama Perdamaian atau agama Keselamatan adanya;
2. untuk membantah perkataan setengah orang, jang mengatakan agama Islam tidak Tjakap menuntut atau memajukan keperluan politiek, sociaal dan economie.²⁵⁴

Maksud dari pidato Tjokroaminoto tersebut adalah ingin menjelaskan bahwa bumiputera masih mendapati sebuah

keadaan yang sengsara. Kesengsaraan sudah jelas diakibatkan oleh pengisapan Kapitalisme yang melebur di dalam berbagai praktik kolonialisme Belanda. Kolonialisme harus dilawan dan untuk melawan praktik kolonialisme Belanda, bumiputera sebagai bagian dari umat Islam tentunya membutuhkan sebuah model gerakan yang tepat dan revolusioner. Model gerakan yang dimaksud adalah Sosialisme. Maksud dari Sosialisme adalah sebuah pandangan menuju maksud akan mencapai cita-cita kemerdekaan umat.²⁵⁵

Sosialisme oleh Tjokroaminoto tidak dianggap sebagai sebuah hal yang harus ditentang, selama Sosialisme yang dimaksud adalah berlandaskan Agama Islam yang sudah bertahun-tahun dipeluk oleh mayoritas bumiputera. Keseesuaian Sosialisme dengan Islam adalah sama-sama memperjuangkan nilai-nilai kemanusiaan untuk keberlangsungan hidup di dunia sebagai sesama makhluk sosial serta makhluk Allah, yang nantinya akan mempertanggungjawabkan setiap amal ibadahnya di hari akhir. Memperjuangkan nilai-nilai kemanusiaan tentunya hanya berkaitan dengan hal-hal yang sifatnya keduniawian (profan), sedangkan nilai-nilai ketuhanan (imanen) yang telah diyakini oleh rakyat bumiputera sebagai umat Islam, tentunya menjadi pengikat untuk mencapai keselamatan akhirat. Dengan demikian, Sosialisme Islam menjadi perpaduan yang ideal untuk menuntun manusia menuju kehidupan dunia yang sejahtera dan mencapai derajat kemanusiaan menuju kehidupan akhirat yang baik²⁵⁶.

Di sini Tjokroaminoto juga menjelaskan bahwa Islam yang sejak lama telah mengilhami bumiputera dalam melakukan pergerakan melawan berbagai bentuk penindasan, bukan sebuah hal yang remeh. Islam merupakan elemen yang hebat dan dahsyat, bukan sebaliknya, dan Islam telah berjuang melalui berbagai bentuk perjuangan, baik melalui perjuangan sosial, politik, dan ekonomi. Islam menyerukan kepada seluruh manusia untuk bersikap dan bertindak menuju keselamatan hidup di dunia dan di akhirat.

Lebih jauh Tjokroaminoto menjelaskan secara panjang lebar tentang Sosialisme yang dimaksudkan. Sosialisme merupakan bagian dari identitas Barat. Sosialis pada dasarnya sebagai sebuah ideologi penyeimbang dari penyebaran ideologi Kapitalis yang telah berkembang pesat di dunia melalui praktik-praktik kolonisasi yang dilakukan oleh negara-negara industri. Sistem penyeimbang yang dimiliki oleh ideologi Sosialis terhadap praktik-praktik Kapitalisme semakin lama semakin menarik bangsa-bangsa yang sedang dieksploitasi atas nama modernitas. Gaya perlawanan yang revolusioner akhirnya memikat para agen sejarah sebagai mesin pendobrak dari proses Kapitalisasi yang dipraktikkan oleh pihak-pihak kolonialis. Melalui proses yang panjang, Sosialisme mengalir deras dan menjadi wacana menarik bagi kalangan pergerakan nasional bumiputera dalam melawan bentuk-bentuk kolonialisme Belanda.²⁵⁷

Dikalau kita menjebutkan socialisme itu satu peraturan tentang urusan harta-benda (economisch stelsel), maka tiadalah kita maksudkan, bahwa socialisme itu tidak djuga mempeladjar-

kan adjaran-adjaran agama dan falasifah (wijsgeerig). Sebaliknya: tiap-tiap matjam socialisme adalah berdasar kepada asas-asas falasifah atau asas-asas agama, sedangkan socialisme jang wadjib dituntut dan dilakukan oleh ummat Islam itu bukannya socialisme jang lain, melainkan socialisme jang berdasar kepada asas-asas Islam belaka.²⁵⁸

Tjokroaminoto menjelaskan bahwa Sosialisme adalah *satu peraturan tentang urusan harta-benda*. Maksud dari Sosialisme tersebut bukan berarti hal-hal yang hanya berkaitan dengan harta benda (sistem ekonomi) secara praktis (filsafat) untuk kesejahteraan kehidupan manusia di dunia belaka, akan tetapi peraturan tentang harta benda tersebut tentunya harus dilandasi dengan agama agar peraturan tersebut menjadikan manusia juga mendapatkan kesejahteraan di akhirat. Sosialisme yang tidak sekadar menjelaskan peraturan-peraturan tentang harta benda menuju kesejahteraan dunia melainkan juga akhirat yang dimaksudkan adalah Sosialisme Islam.

Dasar utama Sosialisme Islam adalah "*kaanan nasu ummatan wahidatan*"²⁵⁹ yang artinya: "Peri kemanusiaan adalah menjadi satu persatuan". Selain itu Tjokroaminoto juga menjelaskan tentang sabda Allah dalam al-Quran yang memerintahkan kepada kita semua harus membuat perdamaian (keselamatan) di antara sesama manusia di bumi dan Allah telah menjadikan manusia dari seorang laki-laki dan perempuan, serta Allah telah memisahkan kita menjadi golongan-golongan dan suku-suku, agar supaya mengetahui satu sama lain.²⁶⁰

Untuk mempertegas dasar Sosialisme Islam, Tjokroaminoto kembali menjelaskan tentang sabda Allah dalam al-Quran, bahwa "Allah telah menghilangkan kecongkakan dan kesombongan di atas asal keturunan yang tinggi. Seorang Arab tidak mempunyai ketinggian atau kebesaran yang melebihi seorang asing, melainkan barang apa yang telah yakin bagi dia karena takut dan baktinya kepada Tuhan". Sabda Allah yang lain adalah, "bahwa Allah hanyalah satu saja, dan asalnya sekalian manusia itu hanyalah satu, mereka mempunyai agama hanyalah satu juga".

Tjokroaminoto kembali mencontohkan lebih jelas bagaimana nilai-nilai yang terkandung dalam Islam tentang persamaan serta persaudaraan yang lebih tinggi. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Allah dalam al-Quran, bahwa sekalian anak adam itu ialah anggotanya satu badan yang beraturan (*organisch lichaam*), karena mereka itu telah dijadikan dari satu asal, apabila salah satu anggotanya mendapat sakit, maka kesakitannya itu menjadikan rusak teraturnya segenap badan (*organisme*). Demikianlah sebuah dasar atau pokok nilai-nilai tentang Sosialisme yang sejati yaitu Sosialisme cara Islam (bukan Sosialisme cara Barat).²⁶¹

Landasan dari dasar Sosialisme Islam ialah al-Quran dan al-Hadits. Dasar tersebut hanyalah sebuah teks (kata atau kalimat yang tersusun), dan tentunya hal demikian hanya bersifat normatif belaka, akan tetapi ketika sebuah teks diterjemahkan dalam kehidupan sehari-hari sebagai sebuah perilaku sehari-hari, tentunya nilai-normatif tersebut akan hilang dan berubah menjadi makna yang nyata

(transenden). Pada tahap inilah, Tjokroaminoto menjelaskan bagaimana perilaku yang dilakukan oleh manusia, khususnya umat Islam yang secara nyata melakukan tindakan tersebut dalam kehidupannya sehari-hari.

Berkaitan dengan pergaulan hidup manusia bersama (Sociale Hervormer), nabi telah mencontohkan tentang sebuah pergaulan hidup bersama yang menjunjung tinggi nilai-nilai persamaan, persaudaraan. Tentang persamaan, sejak lama umat Islam diperintahkan oleh Allah melalui Nabi Muhammad, sekali tiap hari Jumat, melakukan shalat Jumat secara bersama-sama tanpa membedakan tempat dan derajat satu dengan lainnya. Nabi juga telah mencontohkan dan menganjurkan bahwa dalam sebuah masa, di mana ketika seorang muslim telah mampu (segalanya), hendaknya menunaikan ibadah haji (rukun Islam yang terakhir), ke Mekah. Dalam ibadah haji inilah, semua jenis manusia, dari yang kecil hingga besar, tua dan muda, laki-laki dan perempuan, dan lain-lain, masing-masing mengenakan pakaian yang sama (pakaian ihram) dan melakukan ritual yang sama pula tanpa membedakan satu dengan lainnya. Perbedaan satu dengan yang lainnya tentunya ada, akan tetapi bukan manusia yang berhak menilainya, melainkan hanya Allah sang pencipta, sedangkan yang dinilai bukanlah dari hal-hal yang bersifat fisik, melainkan amal ibadahnya seseorang di dunia.

Tentang persaudaraan, nabi juga telah mencontohkan bahwa dalam setiap selesai shalat, setiap muslim tentunya saling berjabat tangan yang menandakan sebuah bentuk saling bermaafan satu dengan lainnya. Persaudaraan terus

dibangun, setiap kali sesama muslim bertemu, yaitu dengan saling mengucapkan salam, yang menandakan saling men-doakan untuk keselamatan bagi sekalian umat Islam tersebut. Nilai-nilai persaudaraan yang terbangun demikian inilah, ketika berakumulasi secara luas dan besar hingga hilangnya batas-batas negara atau teritorial (dunia) –sebagaimana ketika seluruh umat Islam dunia bertemu di Mekah, untuk berhaji– maka, tentunya persaudaraan yang demikian, memiliki makna yang lebih besar daripada sekadar persaudaraan sebangsa dalam satu negara. Nilai-nilai persaudaraan dalam Islam, tidak hanya diperuntukkan bagi sesama umat Islam belaka, melainkan, lebih dari itu yaitu antara sesama manusia, bahkan dengan sesama manusia yang berbeda agama, Islam mengharuskan untuk saling bersaudara, akan tetapi dengan sebuah catatan, bahwa mereka juga menginginkan persaudaraan tersebut.²⁶²

Berkaitan dengan nilai-nilai ekonomi, atau asas keder-mawanan umat Islam, Nabi Muhammad juga telah men-contohkan dengan perilakunya, sebagaimana diterangkan dalam al-Quran, bahwa umat Islam diwajibkan (bukan hanya kebajikan, melainkan keharusan yang tidak dapat ditinggalkan) untuk bersedekah atau berzakat. Demikian tertuang dalam al-Quran, “kamu tidak pernah akan dapat mencapai keadilan, kecuali apabila kamu telah memberikan daripada apa yang kamu cintai dan tuhan mengetahui apa yang kamu berikan itu”.²⁶³

Di dalam Islam, terdapat banyak aturan tentang pe-rintah beramal, baik beramal yang sifatnya atas kehendak

pribadi (amal jariyah), maupun atas perintah Allah yang wajib (Zakat). Selain itu, orang-orang yang berhak menerima amal jariyah atau zakat juga telah diatur dan telah ditetapkan, bahwa mereka yang berhak menerima ada 8 golongan²⁶⁴ dan masing-masing golongan tersebut tidak ada di antaranya adalah sesama orang kaya, melainkan mereka adalah orang-orang yang benar-benar patut untuk mendapatkan bagian tersebut.

Dalam hal sistem pemerintahan, Tjokroaminoto juga memberikan pandangan yang jelas, tentang sistem pemerintahan yang baik. Selain itu, ia juga memberikan kritikan dari berbagai sistem pemerintahan yang dianggapnya tidak baik, sebagaimana yang pada masa itu telah berlangsung. Demikian ia menjelaskan:

Satu keradjaan (staat) jang terdjadi dari pada orang-orang jang tidak beradab, tidak berkeutamaan didalam batinnja dan tidak berazas jang kuat dan sutji, tetapi penuh dengan nafsu akan menipu dan penuh dengan keinginan jang kasar, baik orang jang kaya maupun orang jang miskin, maka staat jang demikian itu selama-lamanja tidak bisa mendjadi staat jang sempurna baiknja, meskipun Gouvernementnja teratur setjara socialistisch djuga. Sebenarnjalah, kekuasaan memerintah dan memimpin jang ada didalam tangan banjak jang tidak patut, itu lebih tidak boleh disabarkan daripada kekuasaan jang ada didalam sedikit tangan jang terpilih baik-baik.

Kalau satu Gouvernement diperintahkan setjara Monarchaal, maka terutama sekali jang mesti diawaskan dan diamat-amati oleh ra'jat, jaitu fihaknja Radja dan keluarganya; pada pemerintahan setjara Aristocratisch dan Oligarchisch, maka agaknya pertama-tama sekali jang harus diawaskan jaitu kecakapannja beberapa orang jang memegang kekuasaan itu. Dalam

pada pemerintahan setjara Democratisch, haruslah pertamata sekali diawaskan ketjakapannja bahagian terbesar dari kaum jang memegang kekuasaan, tetapi dalam pada pemerintahan setjara Socialistisch, ta'boleh tidak haruslah didjaga, bahwa segenapnja Staat (Keradjaan)-ialah segenapnja penduduk- hendaknja ada pada deradjat jang tjukup tingginja tentang peladjaran, kepandaian budi-pekeri dan kepandaian 'aql-nja. Tambah perlunja memperbaiki urusan pemerintahan dan pemeliharaan, bertambah pula perlunja memperbaiki tabi'at dan peranginja tiap-tiap orang.

Apabila rasa democratie jang benar-benar termasuk dalam hatinja orang, jang tidak beruntung dan tidak bertjampur tangan dalam pembikinan wet, tidak turut memerintah Gouvernement atau Staat dan tidak pula turut mengatur Maatschappij, nistjajalah ia akan bersakit hatinja, apabila ia mendapat penggodaan sedikit satja dalam pada mempergunakan kemerdekaannya, dalam pada merasakan kekajaan dan kesenangannya, baik penggodaan itu dilakukan perorang-orang atau pun dilakukan oleh satu perkumpulan orang-orang. Buat dia, maka peraturan Socialistisch jang tidak sempurna itu samalah djahatnya dengan peraturan Autocratisch (tjara memerintah, jang segala kekuasaan ada didalam tangannya seorang-orang jang berkuasa belaka).

Pemandangan diatas ini tidak sekali-kali bermaksud memudji matjam pemerintahan jang ada ditangannya seorang-orang, ditangannya sekeluarga atau ditangannya segolongan (kelas) manusia. Matjam pemerintahan jang serupa ini memang sudah njata mendjadi sumber penghidupan atau tempat persandarrannya peraturan djahat "kapitalisme", jang mendjadi sebab rusaknya dunia dan peri-kemanusiaan. Aristochratie, Oligarchie, apalagi Autocratie dan Despotisme (peraturan pemerintahan dengan semau-mau sendiri) sekarang sudah ditolak selama-lamanja oleh peri-kemanusiaan, tidak ada matjam pemerintahan dan peraturan pergaulan hidup bersama, melainkan *Democratie* dan *Socialisme* djuga adanya. Tetapi daripada

uraian yang termuat dibawah ini, akan njata bahwa pergaulan hidup manusia bersama yang teratur dan bersifat sebagai adanya pada sekarang (Modernemaatschappij) *tidak* atau *belum*lah tjakap akan menerima Socialisme yang sejati.²⁶⁵

Dari uraian di atas, Tjokroaminoto ingin menjelaskan tentang dua hal, yaitu tentang ketidaklayakan seorang pemimpin, dan kedua adalah contoh tentang sistem pemerintahan yang tidak baik atau menjadi perkakasny Kapitalisme. *Pertama*: sebuah sistem pemerintahan apabila dijalankan oleh orang yang tidak memiliki keutamaan (landasan agama) di dalam batinnya dan senantiasa didorong oleh nafsu menipu atau keinginan yang kasar (menindas), siapapun orangnya, atau dengan sistem pemerintahan apa pun (Sosialis, Demokratis, Aristokrasi, Oligarki, dan lain-lain), niscaya negara tersebut, tidak akan berjalan dengan baik bagi seluruh rakyatnya.

Kedua: ketika seorang pemimpin telah memiliki keluhuran (berdasar agama), tentunya harus diimbangi dengan pemilihan sebuah sistem pemerintahan yang baik pula. Baik dalam arti, bahwa sistem yang dijalankan ini dapat menjamin sebuah persamaan hak di dalam masyarakat, menjamin tingkat pendidikan yang sama tinggi, serta memberi pelajaran tentang budi pekerti serta akal yang seimbang. Tjokroaminoto menjelaskan bahwa, sistem pemerintahan yang baik adalah Sosialis, akan tetapi, Sosialis yang dimaksudkan bukanlah Sosialis yang sebagaimana dicirikan oleh orang Barat.

Dalam lanjutan tulisannya, Tjokroaminoto menjelaskan tentang sistem pemerintahan Sosialis yang dimaksud:

Zaman sekarang ini sungguh satu zaman jang kasar sifat dan tabi'atnja, satu zaman jang terutama sekali hanja mengemuka-mukakan peri-kebendaan belaka (zaman jang berta'biat materialistisch). Dalam zaman jang kasar tabia'atnja ini, kita melihatkan betapa keras dan kasarnja perlawanan berebutan penghidupan, bukan sadya perlawanan antara seorang manusia dengan manusia jang lainnya, tetapi djuga perlawanan antara golongan (klas) dengan golongan (klas), antara pergaulan hidup bersama dengan pergaulan hidup bersama, antara bangsa dan bangsa, rakjat dengan rakjat, negeri dengan negeri dan benua dengan benua, malahan djuga sekarang mulai ada perlawanan antara bangsa manusia laki-laki dengan bangsa manusia perempuan. Lagi pula rupa-rupa hal-ichwal pada zaman sekarang ini memaksa orang berta'biat laba' dan tama', sehingga tidak kurang-kurang orang jang sampai hatinja menjelakakan saudaranya sendiri jang seibu dan sebapa, hanjalah melulu untuk memenuhi nafsu dan kesenangan sendiri. Peri-bahasa Djawa mengatakan: *zaman sekarang ini satu zaman gila!* Mengingat hal jang demikian ini, maka haruslah seorang sudah bersenang hati, apabila ia tinggal di satu negeri jang Gouvernementnja teratur setjara Democratisch dengan ta'putus diusahakan sampai pergaulan hidup bersama mendjadi tjakap akan menerima peraturan Socialistisch bagi Gouvernementnja itu. Kita harus mengakui dan menjatakan, bahwa hingga kini tiadalah satu bahagian dunia kita ini jang sudah bersiap-lengkap akan menerima matjam Gouvernement jang Socialistisch benar-benar. Peraturan Sovjet di Rusland pun, jang sudah njata tidak sekali-kali mengindahkan kemerdekaan manusia, dalam masa jang achir-achir ini kerap kali menundjukkan ta'biatnja jang Imperialistisch, menindas segala kejakinan jang tidak bersamaan dengan kejakinannya; ta'biat jang serupa itu bukan sekali-kali ta'biat Socialistisch jang kita harapkan. Sifat jang demikian itu tidak kurang dan tidak lebih daripada sifatnja barang jang "busuk".

... Zaman sekarang ini zaman mengemuka-mukakan kebangsaan dan warna kulit melebihi hak-hak persaudaraan. Zaman

sekarang ini zamannja kehilangan tjita-tjita perdamaian jang sedjati, sehingga satu bangsa bersiap sendjata lebih kuat daripada bangsa jang lainnja. Zaman sekarang ini zamannja mendapatkan "Gas Ratjun" untuk membunuh beribu, berpuluh ribu, ja membunuh berdjuta orang sesama machluk Allah. Zaman sekarang ini, zamannja si Kapitalist menjembah Njai Belorong (Mammon), zamannja si Materialist menjembah Barang-benda (Stof)! Pada zaman sekarang, dengan hal-ichwal seperti adanja sekarang, tiadalah orang tjakap membangun Keradjaan setjara Sosialistisch untuk kesenangan dan keselamatan umum, sebagai jang dulu sudah didirikan oleh Chalifah Islam Sajidinah Oemar r.d.a. satu Keradjaan (Staat) setjara Sosialistisch Islam jang demikian ini tiadalah orang dapat mendirikanja, kalau segenap pergaulan hidup bersama lebih dulu tidak dibersihkan dan dimadjukannja tjita-tjita keadaban dan kesofanan, sedang tjita-tjita politiek, sociaal, moraal, industrie, economie, semuanja haruslah berdasar perikeutamaan belaka.²⁶⁶

Dari uraian di atas, Tjokromainoto menjelaskan, bahwa zaman ini adalah sebuah zaman yang kasar, yang telah menghilangkan dasar keutamaan hubungan sesama manusia yaitu kemanusiaan dan persaudaraan. Masing-masing manusia saling mengagung-agungkan harta, dan harta itulah yang akhirnya mendorong manusia saling menguasai satu dengan lainnya. penguasaan manusia atas manusia lain tidak hanya dilakukan antarkelas sosial, melainkan semua jenis manusia. Kendati Sosialisme telah mengajarkan tentang nilai-nilai kemanusiaan, persaudaraan, akan tetapi Soviet, yang saat itu telah menjalankan sistem pemerintahan tersebut, ternyata tidak ada bedanya dengan negara lain yang memberlakukan sistem pemerintahan yang kapitalistik. Mereka sama saja telah menghilangkan dasar-

dasar kemanusiaan serta persaudaraan di antara sesama manusia. Dengan demikian, Tjokroaminoto menyerukan kepada kita bahwa kembalilah kepada sistem pemerintahan Sosialisme Islam, sebagaimana yang dulu telah diterapkan oleh Umar bin Khottob ketika memimpin Negara Arab.²⁶⁷ Sistem pemerintahan Sosialisme Islam secara tegas menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan persamaan (dalam hal apa pun) di antara sesama manusia tanpa terkecuali.

Dari berbagai uraian yang telah dipaparkan oleh Tjokroaminoto di atas, dapatlah ditarik sebuah benang merah, bahwa Tjokroaminoto, mendasarkan pandangannya tentang Sosialisme adalah untuk menolak sistem Kapitalisme yang dibangun oleh orang-orang Barat. Di sisi yang lain, Sosialisme Islam yang dimaksudkan oleh Tjokroaminoto adalah untuk menolak serta menjelaskan kembali makna Sosialisme –beserta turunanya, Komunisme– yang tidak didasarkan kepada al-Quran dan al-Hadits, melainkan dari pemikirannya Karl Marx. Demikian Tjokroaminoto menjelaskan:

Saja tidak bisa menutup pendahuluan ini, kalau lebih dulu saja belum menguraikan *Socialisme*, jang pada dewasa ini umumnja dipeluk oleh kaum Socialist dan djuga oleh kaum Communist dinegeri-negeri Barat, jaitu jang lumrahnja disebut *wetenschappelijk socialisme* (socialisme berdasarkan pengetahuan) atau disebut djuga *Marxisme* namanja. Maksudnja uraian ini ialah buat menundjukkan, bahwa kita –orang Islam– tidak boleh dan dan tidak dapat menerima segenapnja *wetenschappelijk socialisme* peladjaran Karl Marx itu.

Meskipun wetenschappelijk socialisme menampak dan mengakui dirinja satu peraturan tentang urusan harta-benda (economisch stelsel), tetapi sesungguhnya Marxisme (pedjaran Marx) itu sama sekali berdiri diatas dasar tjita-tjita jang semamata beralasan perkara hikmah belaka (wijsgeerige basis). ...

Kenjataan-kenjataan jang terbentang diatas ini tjukuplah membuktikan, bahwa *historisch materialisme* pelajarannya Karl Marx, jang mendjadi dasarnya dia punja wetenschhappelijk socialisme, adalah dengan senjata-njatanja mungkir akan keadaan Tuhan, malaikat, roh dan beberapa perkara jang lain pula, jang diadajarkan oleh segala agama, terutama sekali oleh Islam.²⁶⁸

Dari penjelasan yang diuraikan oleh Tjokroaminoto tentang sebuah gagasan atau ide yang ditolak dalam membangun dasar Sosialisme Islam adalah sebuah nilai-nilai persamaan, persaudaraan dalam segi sosial, ekonomi, politik, serta agama, dan lain-lain, sebagaimana yang telah digagas oleh Karl Marx.²⁶⁹ Dengan demikian, yang dimaksud Sosialisme Islam oleh Tjokroaminoto adalah sebuah persamaan, persaudaraan dalam segi sosial, ekonomi, politik, dan lain-lain, yang didasarkan kepada agama Islam, dan sistem pemerintahan yang dapat diterapkan adalah sebagaimana yang telah diterapkan oleh Nabi Muhammad serta ke empat sahabatnya dahulu kala. •

6

Landasan Ideologi: Realisasi Kebijakan Partai

Tali-persatoean Islam kita masih koerang lengkap, masih koerang koekoeh, dan masih beloem selesai djoega pemasangnja tali-persatoean jang mengikat Oemat Islam dinegeri toempah-darah kita dengan Oemat Islam diloear Hindia kita.

Tjokroaminoto, "Congres Moeslim Doenia"

Bintang Islam, 1925.

A. Politik *Hijrah* dan Sikap *Non-Kooperasi*

Realisasi dari penerapan politik *hijrah* dan sikap *non--kooperasi* PSI secara tegas dirumuskan dalam kongres PSI tahun 1927 di Pekalongan. Maksud dari rumusan dalam kongres PSI di Pekalongan adalah menilai berbagai pihak dan juga organ pergerakan, terkait hal-hal yang dianggap menghambat kemajuan PSI sebagai organ pergerakan yang bergerak di jalur politik. Demikian hasil kesepakatan dalam

kongres tersebut:

Kalau ada sesuatu perhimpunan atau perserikatan Islam yang terpandang merintangi jalannya atau kemajuan PSI: [Partai Sarekat Islam], maka afdeling-afdeling (=cabang) partai diperkenankan melakukan disiplin terhadap kepada perhimpunan atau perserikatan yang serupa itu. Kalau ada sesuatu perhimpunan atau perserikatan Islam yang ternyata dari perbuatan lid-lid [anggota]-nya dari pada bicara-bicara dalam vergedering [=rapat-rapat]-nya, berhaluan membenci politik, atau menjauhkan rakyat Hindia dari pada pergerakan politik sebagai yang dikehendaki oleh partai SI, maka partai SI harus bersikap bermusuhan terhadap kepada perhimpunan atau perserikatan serupa itu.²⁷⁰

Hasil kongres PSI di Pekalongan secara tegas memberikan kewenangan terhadap *afdeling-afdeling* PSI untuk memperlakukan disiplin terhadap siapa pun apabila dianggap merintangi jalannya kemajuan PSI. Selain itu, disiplin juga dapat diberlakukan kepada organ pergerakan apa pun yang dalam praktiknya membenci politik dan pergerakan politik sebagaimana yang telah dijalankan oleh PSI. Sikap politik *Hijrah* PSI adalah menjunjung tinggi sikap *non-kooperasi* terhadap Pemerintah Hindia Belanda. Sikap yang demikian ini, akhirnya berimbas pada semakin protektif-nya PSI dalam memilah berbagai organ atau pihak yang telah bergabung dengan PSI sebelumnya, seperti halnya dengan Muhammadiyah.

Perseteruan antara Muhammadiyah dengan PSI pada dasarnya sudah muncul sejak tahun-tahun sebelumnya, terkait dengan tuduhan yang diarahkan kepada Tjokroaminoto dan PSI oleh Haji Soedjak pada akhir 1926. Haji Soedjak

mengatakan bahwa S.O.S Tjokroaminoto tidak berfaedah selama beliau ada di Mekah sebagai utusan al-Islam Kongres, terkait dengan lemahnya kemampuan bahasa Arabnya. Selain itu, kemampuan bahasa Inggris yang dimiliki oleh Tjokroaminoto, dianggap bahasa Inggris desa, yang dalam hal ini berbeda dengan Mas Mansur. Tjokroaminoto juga dianggap telah berpecah-belah dengan Mas Mansur, terkait dengan uang saku yang dipegang sepenuhnya oleh Tjokroaminoto selama di Mekah. Keuangan tersebut sangat kacau, mengingat Tjokroaminoto selalu potong ayam untuk memenuhi kebutuhan makannya sehari-hari.²⁷¹

Akibat dari tuduhan yang dilakukan oleh Haji Soedjak tersebut maka, *Afdeeling* PSI Randoebelatoeng bereaksi, karena tuduhan tersebut tidak berdasar, yang dianggap sebagai pencemaran nama baik bagi pimpinan besar PSI dan juga sebagai pimpinan kongres al-Islam. Reaksi dari *Afdeeling* PSI Randoebelatoeng adalah melayangkan ma'loemat terhadap Muhammadiyah. Berikut isi ma'loemat tersebut:

1. Moehammadijah memboenoeh S.I. dengan boek-ti: di mana ada berdiri Moehammadijah S.I. mati:
2. Dimana-manavergadering Moehammadijah memboesoek-boesoekan S.I.
3. Moehammadijah telah pernah memboesoekan S.I. lantaran S.I. berpolitiek.
4. Perkara Moehammadijah akan mengirim oetoesan ke Hidjaz boeat actie baroe, tetapi ditolak oleh oetoesan S.O.S. Tjokroaminoto.
5. Moehamamdijah di da'wa minta toeloeng ke-

pada Resident Djokja soepaja Suiker fabriek soeka beri subsidie f 1000 setahoennja kepada Moehammdijah dan M.D. sanggoep kirim goeroe agama boeat mengadjar di fabriek seberapa fabriek minta goeroe, M.D. sanggoep menoeroeti (alias djamijatoel chasanah P.E.B.)

6. Moehamamdijah dapat tambah subsidie menjadi f 24 000, setahoen.
7. dan lain-lainnja masih banyak.²⁷²

Akibat dari beredarnya pamflet serta ma'loemat yang telah disebar dalam berbagai surat kabar oleh *afdeeling* S.I. Randoebelatoeng, maka Pengurus Besar Muhammadiyah akhirnya juga bereaksi untuk secepatnya melakukan klarifikasi terhadap munculnya berbagai tuduhan dari kedua belah pihak yang masing-masing dianggap tidak berdasar. Sebagai upaya untuk tetap menjaga keharmonisan hubungan di antara PSI dengan Muhammadiyah, Pengurus Besar Muhammadiyah mengeluarkan ma'loemat, terhadap kedua belah pihak yang sedang bertikai. Dalam ma'loematnya, Pengurus Besar Muhammadiyah menjelaskan bahwa informasi yang beredar tersebut adalah fitnah, yang dianggap dapat memecah belah persatuan di antara umat Islam. Pengurus Besar Muhammadiyah menginstruksikan kepada seluruh anggotanya serta berbagai cabang atau group-group semuanya untuk tidak menghiraukan adanya pemberitaan tidak benar tersebut. Demikian cuplikan ma'loemat tersebut:

Maka oleh karena segala toedoehan dan da'waan, tida njata dan tida benar, dan membawa dalil dari kabar-kabarnja sadja, teranglah, bahwa soerat *Ma'loemat itoe semata-mata fitnah* oentoek memetjah dan mengadoe di antara persatoean dan persaudaraan Moehammadijah dengan S.I.

Oleh sebab soedah njata itor fitnah, maka sikap Pengurus Besar Muhammadijah terhadap kepada itoe soerat Ma'loemat jang dibikin dari P.S.I afd., Randoebelatoeng, tida perloe di rewes lagi alias didiamkan sadja, ta' perloe di timbangi. Tetapi Pengurus Besar Muhammadijah di Djokja, bersikap: minta dengan segala hormat, tapi dengan sangat djoega kepada sekalian tjabang- tjabang, group-group dan oemoemnja kepada sekalian leden Mohammadijah laki dan perempoean di seloeroeh Hindia Timoer, jang menerima soerat Ma'loemat terseboet, atau meskipoen jang beloem menerima, atau jang hanja mendengar kabar hal itoe, hendaklah bersikap pendijam dan ta' oesah terdengar dan terfikir, tapi dengan pengharapan sangat oleh Pengoeroes Besar Moehammadijah di Djokja, hendaklah dengan seberapa bolih bekerdja keras dan soenggoeh-soeangoeh, akan kewadajibannja dalam kalangan Moehammadijah.²⁷³

Ma'loemat ini langsung dikeluarkan oleh Pengurus Besar Muhammadiyah dan ditandatangani oleh *voorzitter* H. Ibrahim dan Secretaris H. Hasim. Ma'loemat ini sementara menjadi peredam dari munculnya benih-benih perseteruan di antara Muhammadiyah dengan PSI di akhir 1926, akan tetapi perseteruan tersebut muncul kembali dan semakin tidak ada ujung pangkalnya. Keadaan yang demikian, semakin merisaukan berbagai pihak terutama PSI, sehingga, sesuai dengan keputusan kongres di Pekalongan 1927, maka beberapa *afdeling* PSI pada tahun tersebut memberlakukan disiplin terhadap Muhammadiyah.

Setelah diberlakukannya disiplin terhadap Muhammadiyah, pihak Muhammadiyah bereaksi dan melakukan

pembelaan terhadap keputusan tersebut. Bagi Muhammadiyah, keputusan PSI dianggap sangat sepihak sebagai sebuah tuduhan yang tidak beralasan *alias* fitnah. Reaksi Muhammadiyah yang demikian terkait dengan sikap dan keberadaan Muhammadiyah yang sejak lama setia berdampingan dan bersama-sama dengan SI dalam memperjuangkan Islam dan bumiputera di Indonesia. Dengan demikian, Muhammadiyah tidak mungkin mencederai kebersamaannya dengan SI yang telah dibina sejak lama. Tuduhan yang dialamatkan kepada Muhammadiyah adalah sebuah bentuk pecah belah antara sesama umat Islam, terutama antara SI dengan Muhammadiyah yang dimunculkan oleh pihak-pihak luar yang tidak suka dengan kedua organ pergerakan tersebut. Demikian sanggahan yang dilakukan oleh Muhammadiyah:

Pertanjakan: doeloe kita mengetahoei benar, bahwa pergerakan S.I. dengan pergerakan Moehammadijah itoe adalah bolih dikata mendjadi satoe dan bantoe membantoe didalam segala pekerdjaan dan oesaha, jang berhoeboengan dengan keislaman. Malah bolih dioempamakan demikian:

“Moehammadijah itoe bolih dioempamakan kaoem Tani jang pekerdjannja menanam padi. Sedang S.I. itoe sebagai orang pendjaga sawah, jang agar soepaja Sawah itoe djangan sampai terganggu oleh Babi hoetan jang senantiasa akan meroesakan Padi, jang ditanam oleh Moehammadijah. Jang achirnja tanaman padi itoe, kalau semat dan berboeah baik, mendjadi sendi penghidoepan bersama di antara S.I. dan Moehammadijah?

Akan tetapi, setelah S.I. berganti boeloe dan nama menjadi P.S.I. roepanja bekerdja bersama, ja'ni bertani dengan pendjaga soedah menjadi petjah. Boekan sadja hanya petjah, akan tetapi malah menjadi orang jang permoesoeh-moesoehan dengan hebatnja, sehingga si P.S.I. soedah tida mengingat lagi akan hidoep bersama, seolah-olah pekerdjaan pertanian dan pendjagaan itoe akan dikerdjakan dengan sendirinja sebagai orang jang bertama'?

Jang demikian itoe, apakah sebab-sebabnja?²⁷⁴

Maksud dari ungkapan sebagaimana yang disebutkan di atas tentang perumpamaan petani dan penjaga sawah memang tepat, akan tetapi, apabila terdapat sebuah ketidakcocokan sebagai sebuah konsekuensi kepartaian, maka hal-hal yang dimaksudkan oleh pihak Muhammadiyah tersebut tentunya kurang tepat, sehingga disiplin yang diberlakukan oleh PSI terhadap Muhammadiyah adalah sebuah upaya untuk bersikap konsisten dan menjunjung tinggi sikap organisasi sebagai sebuah kebijakan partai yang harus dijalankan secara bersama-sama secara konsekuen.

SI dan Muhammadiyah adalah dua lembaga yang bersatu sejak awal pendirian organ tersebut, sehingga masing-masing keduanya dapat dikatakan tidak terdapat rahasia yang harus disembunyikan, karena kedua lembaga tersebut sejak awal telah berjuang bersama dalam wilayah yang berbeda serta saling memiliki keanggotaan yang sama. Ahmad Dahlan misalnya, ia adalah pendiri Muhammadiyah tahun 1912, dan sejak 1913, telah menjadi *advisseur* S.I. Sejak itulah, antara Ahmad Dahlan dengan Tjokroaminoto, secara bersama-sama membangun basis pergerakan

Islam di Indoenesia di dalam SI. Muhammadiyah dengan SI, memiliki kesepakatan secara normatif pada 1920, dan mereka menjalankan kesepakatan tersebut secara bersama-sama. Muhammadiyah membangun Islam dalam wilayah Sosial-keagamaan, sedangkan SI, memperjuangkan Islam melalui jalur politik. Dengan demikian, tuduhan terhadap Muhammadiyah yang anti politik tidaklah benar, karena keberadaan para anggota Muhammadiyah yang juga sebagai anggota PSI juga sama-sama bergerak di dua wilayah tersebut. Berikut terusan pembelaan Muhammadiyah:

Moelai tahoen 1911, kita soedah mendjadi lidnja Moehammadijah di Yogyakarta. Dan moelai tahoen 1913, kita djoega soedah mendjadi lidnja Sjarikat Islam di Yogyakarta.

Moelai tahoen 1915, kita moelai mendjadi Bestuurnja Moehammadijah sebagai lid. H.B. di Yogyakarta mendjabat Secretaris. Moelai tahoen 1919, kita mendjadi lid bestuur C.S.I. sebagai Commissaris bahagian Djawa Tengah.

Pada tahoen 1920, dalam kalangan H.B. Moehammadijah kita masih mendjabat Secretaris, tetapi pada tahoen itoelah kita mendjadi Penningmeester didalam kalangan C.S.I.

Sampai tahoen sekarang ini, kita mendjadi vicevoorzitter H.B. Moehammadijah dan moelai boelan December 1926, kita dikeloearkan dari kalangan S.I. oleh sebab C.S.I. diboebarkan dan diganti P.S.I. sedang P.S.I. ada atoeran Decipline di antara P.S.I. dengan Moehamamdijah.²⁷⁵

...

Djadi sekarang, menoeroet lahirnja, P.S.I. itoe boekan S.I. jang lama itoe, tetapi semata-mata adalah perserikatan jang baroe berdiri sadja, meskipoen hakekatnja pendirian P.S.I. itoe hanja satoe daja oepaja sadja oentoek membangoenkan S.I. lama itoe, soepaja mata S.I. lama itoe tertoe toep berganti nama P.S.I.

Tetapi sifat dan thabiat dan dasarnja masih tetap S.I. lama. Djadi keloear kita dari kalangan P.S.I. itoe, hanja keloear karena pergantian nama, tetapi beloemlah keloear menoeroet Thabi'at dan dasarnja P.S.I. itoe. Maka oleh karena itoe kita adalah berkejakinan jang soenggoeh-soenggoeh, bahwa pertjetjokan di antara P.S.I. dengan Moehammadijah jang sekarang ini tida lain melainkan timboel semata-mata daripada fitnah jang datang dari loearnja S.I. dan Moehammadijah. Bagai kita masih tetap pertjaja, bahwa pertjetjokan itoe akan lenjap dan persatoeannja djoega akan kembali tetap, asalkan fitnah jang menggoda itoe soedah lenjap.

Dari uraian yang telah dijelaskan oleh pihak Muhammadiyah di atas, tentunya dapat diambil sebuah kesimpulan, bahwa Muhammadiyah pada dasarnya masih mengakui keberadaan S.I. dan Muhammadiyah tetap sebagai bagian dari anggotanya. Sejak bergantinya nama SI menjadi PSI pada 1923 dan secara resmi diberlakukan pada 1927, dalam pembelaannya, Muhammadiyah juga secara kelembagaan tidak lagi mengakui keberadaan PSI, yang dianggap sebagai sebuah perkumpulan baru yang tidak memiliki kewenangan dalam menjalankan disiplin terhadap salah satu anggotanya, termasuk Muhammadiyah.

Seiring dengan makin menajamnya perpecahan antara PSI dengan Muhammadiyah, PSI yang sebelumnya telah membentuk Majelis Ulama yang juga didukung oleh Muhamamadiyah di akhir 1926, kini majelis tersebut akhirnya ditarik di bawah sistem kelembagaan PSI. Menjelang tahun 1928, Majelis Ulama melakukan *vergadering* untuk membicarakan tentang tafsir al-Qur'an Inggris karangan Mohammad Ali yang diterjemahkan oleh Tjokroaminoto.

Tepat pukul 9 malam Sabtu tanggal 27/28 Januari 1928, di gedung *Islamijahschool* telah berkumpul berbagai pihak yang akan menyimak tentang pembicaraan tersebut. Berbagai ulama, serta berbagai pihak yang ikut berkepentingan di dalamnya turut hadir pula. Dari kalangan ulama PSI adalah: Haji Agus Salim, H.O.S. Tjokroaminoto, dan Mirza wali Ahmad Baig (penanggung jawab, sebagai wakil dari *hoofdbestuur* Ahmadiyah di Lahore. Sebagai pihak penanya, mereka juga turut berdatangan seperti: H. Hadikoesoemo dan R. Hadjid (dari pihak Muhammadiyah Yogyakarta); A.Hasan dan Haji Zamzam (dari Persatuan Islam Bandung); R. Moh. Isom, Sech Awad bin Sachbbal; Ahmad Bachaswan dari Solo (masing-masing dari pihak pribadi); kyai Koeljoebi dari Kudus, S.D. Hanie H.B. Walfadjri, H. Abdullahsiradj (Panghulu Pekualaman dari pihak PSI), dan H. Mas Mansoer dari Surabaya, H. Anwaroedin dari Rembang, Pers Djawa Melayu, Tiong Howa dan Pers Belanda, semua hadir. Dari pihak pemerintah adalah *Adv. Voor Inlandchezaken*, Van der Plaas dan Soetan Moehammad Zain, tamu dari Inggris, serta pihak polisi juga telah hadir dalam acara tersebut.

Sembari berlangsungnya acara tersebut, kyai Anwaroeddin sebagai *voorzitterschap* memberikan kesempatan kepada Tjokroaminoto sebagai pihak penerjemah untuk mengungkapkan berbagai alasan menerjemahkan Tafsir Maulwi Moehammad Ali. Tjokroaminoto menjelaskan, bahwa ketertarikannya untuk menerjemahkan tafsir tersebut, adalah semasa ketika ia berpindah dari Babad ke Yogya-

karta dan di Yogyakarta ia bertemu dengan Haji Fachrudin²⁷⁶ (saat itu masih menjabat dalam CSI) yang akhirnya memperkenalkan dirinya dengan Mirza wali Ahmad Baig yang akhirnya Tjokroaminoto berkenan untuk menerjemahkan tafsir tersebut yang juga saat itu diketahui oleh Mas Mansur dari Surabaya.

Setelah panjang lebar menjelaskan tentang awal mula usaha Tjokroaminoto memulai menerjemahkan tafsir tersebut, akhirnya *voorzitter* memberikan kesempatan kepada para hadirin yang datang untuk bertanya. H. Hadikoesoemo adalah penanya pertama yang sebelumnya mengajukan pertanyaan terkait apa, bagaimana dan siap yang akan menjadi hakim dalam menentukan benar tidaknya tafsir tersebut. Pada tahap inilah muncul berbagai upaya dari berbagai pihak untuk memberikan pandangan bahwa agar para ulama yang hadir inilah yang akhirnya menjadi penentu atas benar dan salahnya tafsir tersebut.

Melihat reaksi yang demikian memojokkan Tjokroaminoto, Agus Salim akhirnya unjuk bicara dan menerangkan bahwa tidak semestinya forum ulama ini menjadi penentu terhadap tafsir tersebut. Banyak tafsir yang telah beredar dan di antara berbagai tafsir tersebut juga memiliki perbedaan satu dengan lainnya tidak menjadi sebuah persoalan dan tidak dipersoalkan bagi para ulama semuanya yang hadir. Perdebatan akhirnya terus berlangsung dan Mas Mansur memberikan sanggahan terhadap pertanyaan atau sanggahan yang dilakukan oleh H. Hadikoesoemo, sehingga debat tersebut akhirnya dapat diselesaikan dan

ditutup oleh *voorzitter*. Terkait waktu yang telah larut malam dan sanggahan dari H. Hadikoesoemo tidak terlalu kuat, maka tafsir yang diterjemahkan oleh Tjokroaminoto tersebut akhirnya dapat diselesaikan dan selayaknya dapat dipergunakan, akan tetapi perdebatan tersebut masih dapat dilanjutkan.²⁷⁷

Untuk menyikapi tafsir Maulwi Moehammad Ali yang diterjemahkan oleh Tjokroaminoto tersebut, di tahun 1928 ini, Muhammadiyah justru bergabung dengan pihak NU yang sebelumnya pernah dikecewakan oleh Muhammadiyah dengan PSI tahun 1926. Mereka menilai bahwa Tjokroaminoto tidak cukup layak dan berwibawa dalam menerjemahkan tafsir Maulwi Moehammad Ali tersebut. Pihak Muhammadiyah dan NU, menilai bahwa tidak layaknya Tjokroaminoto dalam menerjemahkan tafsir Maulwi Moehammad Ali tersebut, disebabkan buruknya pencitraan dirinya dalam masyarakat, terkait kasus keuangan dalam kepemimpinannya, serta keberadaan istrinya sebagai bekas ronggeng dari Solo.

Berbagai penulis juga menilai bahwa, Muhammadiyah dan NU tetap menolak terjemahan Maulwi Moehammad Ali tersebut, pada dasarnya bukan karena terjemahan Tjokroaminoto-nya, melainkan tafsir tersebut adalah sebuah produk dari Ahmadiyah, yang masih dianggap tidak cukup layak dalam menafsirkan al-Qur'an. Deliar Noer, juga mengatakan, bahwa bergabungnya Muhammadiyah dengan NU, yang pada mulanya berseberangan, adalah akibat dari upaya untuk menentang keberadaan organ Ahma-

diyah. Penentangan terhadap Ahmadiyah, adalah terkait beberapa hal seperti: Ahmadiyah di Lahore, dianggap sebagai antek dari kolonialisme Inggris. Selain itu, tafsir Maulwi yang ditulis oleh Muhammad Ali sebagai representasi dari tuntunan organ Ahmadiyah tersebut terdapat beberapa ketidakcocokan dengan tafsir yang lain, yang dianggap cukup jauh menyimpang dari ajaran Islam.

Saling singgung di antara anggota PSI dengan Muhammadiyah masih terus berlanjut pada 1928 tersebut. Saling singgung di antara keduanya kembali muncul, terkait persoalan matinya organ PSI, akibat berdirinya Muhammadiyah di tempat yang sama. Seperti halnya keberadaan PSI di Purwokerto, Pekalongan,²⁷⁸ Kudus dan Ponorogo,²⁷⁹ hingga Jawa Timur dan Jawa Barat. Masing-masing kelembagaan PSI di berbagai daerah tersebut terus mengalami kemunduran akibat makin berkembangnya Muhammadiyah di daerah yang sama tersebut.²⁸⁰

Kini informasi yang semakin berkembang tidak hanya berkaitan dengan bahwa Muhammadiyah benci terhadap SI dan politik, akan tetapi lebih dari itu yaitu Muhammadiyah telah menjadi pengikut kaum Kapitalisme gula. *Hoofd-bestuur* Muhammadiyah (saat itu dijabat oleh H. Fachrudin), dikabarkan mendapat subsidi sebanyak f1000 per bulan dari pihak *onderneming* gula di Jokjakarta. Kompensasi yang diberikan oleh Muhammadiyah kepada pihak *onderneming* gula adalah memberikan guru agama seberapa banyak yang diinginkan untuk mengajar di perkebunan tersebut. Demikian cuplikan mengenai penjelasan tersebut:

Fitnah itoe boekan sadja perkara Moehammadijah dikatakan bentji kepada S.I. dan politiek, tetapi ditambah poela Moehammadijah mendjadi perkakasnja kaoem kapitalisten goela. H.B. dikabarkannja mendapat subsidi dari Onderneeming goela di Djokja f 1000, saban boelannja jang H.B. menjanggoepi memberi goeroe agama seberapa banjaknja. Boekan sadja mendjadi perkakas Onderneeming, tetapi mendjadi perkakas pemerintah boeat memboenoh pergerakan S.I. dan Politiek.²⁸¹

PSI menganggap bahwa ketika Muhammadiyah menerima bantuan atau subsidi pendidikan yang diberikan kepada sekolah-sekolah Muhammadiyah oleh Pemerintah Hindia Belanda, telah menjadi bukti yang cukup bagi PSI untuk mendisiplinkan Muhammadiyah.²⁸² Apa pun alasannya pemberian bantuan tersebut merupakan bagian dari sikap-sikap yang kooperatif terhadap pemerintah, yang dalam hal ini tidak sesuai dengan sikap *non-kooperasi* yang telah diikrarkan bersama oleh Muhammadiyah sebagai sekutu PSI pada 1924.

Sebagai upaya untuk menangkal tuduhan yang dilancarkan pihak PSI, Fachroedin sebagai *hoofdbestuur* Muhammadiyah menanggapi demikian:

T. Tjokro soedah beroelang-oelang melahirkan pembitjaraannja dihadapan kaoemnja dan orang-orang jang di kirabeloem mengerti keadaan Moehammadijah jang sedjatinja. Demikianlah katanja:

Sesoenggoehnja Moehammadijah, teroetama H.B. ja itoe soedah keterlaloean. Pemerintah adalah mengoetoes kepada Resident van der Jag pergi ke Sumatra oetoeok memeriksa keadaan berontakan di Sumatra, dan bagaimana tjaranja menghilangkannja dengan haloes. Maka setelah T. Resident van der

Jag kembali dari Sumatra, memberikan verslag kepada pemerintah, bahwa rasa pemberontakan itoe bisa dihilangkan kalau Moehammadijah dapat masoek di seloeroeh Sumatra. Lebih-lebih dimana ada onderneeming karet dan Tembakau. Disana T. R. Van der Jag soedah berdamai kepada sekalian onderneeming di Sumatra, soepaja membantoe pergerakan Moehammadijah, bilamana Moehammadijah datang di Sumatra.

Maka setelah T. R. Van Der Jag memberi verslag kepada pemerintah jang demikian itoe, laloe pemerintah agoeng perintah kepada Resident Yogyakarta, soepaja bisa bitjarakan hal itoe kepada H. B. Moehammadijah, dan segala ongkos keperluan H. B. Nanti akan ditanggoeng oleh pemerintah. Maka oleh karena itoe, terdjadilah H. B. Moehammadijah pada boelan Sjawal ini, mengoetoes seorang pemimpin Moehammadijah, jaitoe T. H. Fachroedin boeat propaganda ke sumatra Barat sampai ke Sumatra Timoer, mengadakan propaganda Moehammadijah. Demikianlah fitnah jang diperkirakan dapat membahajai kepada Moehammadijah.²⁸³

Maksud dari cuplikan pembelaan yang dilakukan oleh Fachroedin atas nama Muhammadiyah, terkait pemberian subsidi pendidikan yang diberikan Pemerintah Hindia Belanda kepada Muhammadiyah adalah tidak benar. Pemerintah Hindia Belanda memang memberikan pendanaan kepada Muhammadiyah, akan tetapi tidak sebagaimana yang dituduhkan oleh para anggota PSI, terutama oleh Tjokroaminoto seperti di atas. Pemberian pendanaan kepada Muhammadiyah hanya sebatas memberi kemudahan dalam melakukan propaganda di Sumatera Barat dan Timur,²⁸⁴ akibat di daerah tersebut sedang terjadi pergolakan yang dianggap Pemerintah Hindia Belanda sangat berbahaya bagi pemerintah. Pemerintah Hindia Belanda akhirnya me-

minta bantuan kepada Muhammadiyah agar dapat menggerakkan Muhammadiyah di daerah tersebut, sehingga tidak melakukan pemberontakan terhadap pemerintah dan pemerintah akan memberikan ganti ongkos terhadap proses pembentukan serta propaganda Muhammadiyah selama di daerah tersebut. Bagi Muhammadiyah, sambil melakukan propaganda Muhammadiyah sebagai upaya untuk membesarkan jangkauan perkembangan Muhammadiyah yang juga mendapat ganti pembiayaan, maka hal tersebut bukanlah sepenuhnya sebagai bentuk tunduk dan membantu terhadap Pemerintah Hindia Belanda.

Dari rangkaian tersebut, pada dasarnya yang dimaksudkan oleh Fachroedin, terlepas sebuah upaya yang saling menguntungkan serta niatan yang tidak didasarkan untuk membantu Pemerintah Hindia Belanda, bagi PSI adalah sebuah hal yang dianggap telah menguntungkan pihak Pemerintah Hindia Belanda. Apa pun bentuk dan alasannya, apabila menguntungkan Pemerintah Hindia Belanda yang secara tegas sebagai musuh para pergerakan bumiputera, adalah sebuah bentuk yang dianggap antipolitik. Ketika hal tersebut dilakukan oleh Muhammadiyah sebagai sekutu PSI, tentunya berseberangan dengan PSI sebagai partai politik yang secara tegas memusuhi Pemerintah Hindia Belanda. Selain itu, apa pun alasannya pemberian bantuan tersebut merupakan bagian dari sikap-sikap yang kooperasi terhadap pemerintah, yang dalam hal ini tidak sesuai dengan sikap *non-kooperatif* yang telah diikrarkan bersama oleh Muhammadiyah sebagai sekutu PSI pada 1924.

Sampai tahun 1929, ketika perseteruan di antara PSI dengan Muhammadiyah semakin tidak dapat dilihat ujung pangkalnya, maka PSI akhirnya mengambil tindakan untuk memberlakukan secara resmi disiplin terhadap Muhammadiyah sebagai sebuah keputusan partai dalam kongres PSI tahun 1929. Disiplin tersebut berarti bahwa seluruh anggota Muhammadiyah harus keluar dari sistem keanggotaan PSI, dan apabila masih ingin tetap dalam PSI, maka harus menanggalkan keanggotaannya di dalam Muhammadiyah.²⁸⁵ Terkait sikap Muhammadiyah yang dianggap telah bersekutu dengan Belanda, Sukiman sebagai kader PSI, melancarkan kecaman terhadap Muhammadiyah. Demikian yang dikatakan Sukiman:

Bahwa Muhammadiyah oleh sifatnya (perserikatan sosial), oleh perserikatannya yang rapat dengan pemerintah (penerimaan subsidi dan bagian dalam lotre besar), oleh kelakuan propagandanya (yang melahirkan sikap anti-politik dan antinasional) dan oleh kecintaan luar biasa yang dihadapkan oleh pemerintah istimewa di dalam masa kecurigaan di antara pihak pemerintah dan pihak pergerakan nasional, kemudian daripada perusuhan komunis bulan November itu haruslah Muhammadiyah dipandang sebagai organisasi antipolitik²⁸⁶ bertopeng (berkedok).²⁸⁷

Noer menjelaskan bahwa, sebutan "organisasi anti-politik" dalam zaman pergerakan merupakan nama terburuk yang diberikan kepada sebuah organ tertentu yang dianggap telah berpihak kepada Belanda. Dengan demikian, Muhammadiyah menjadi sebuah organisasi yang

dianggap telah melanggar ketentuan sikap *non-kooperasi* terhadap Pemerintah Hindia Belanda.

Setelah diberlakukannya disiplin oleh PSI terhadap Muhammadiyah, Muhammadiyah juga menerapkan disiplin organisasi terhadap PSI sebagai bentuk reaksi yang sama. Kebijakan tersebut lebih didasarkan pada penolakan Muhammadiyah terhadap sikap politik PSI yang konfrontatif.²⁸⁸

Keluarnya para anggota Muhammadiyah dari PSI, semakin memperkecil popularitas PSI di mata anggotanya, karena sejak berdirinya Muhammadiyah pada 1912, terjadi dualisme keanggotaan antara Muhammadiyah dengan SI.²⁸⁹ Dengan demikian, sejak diterapkannya disiplin terhadap Muhammadiyah tersebut, lemah pula keanggotaan dalam PSI. Jumlah keanggotaan SI sejak tahun 1918 mencapai 2.000.000 orang, sedangkan 1930, keanggotaan merosot drastis menjadi 19.000 orang.²⁹⁰ Berbeda dengan Muhammadiyah, organ ini keanggotaannya semakin meningkat dari sebelumnya. Pada 1925, tercatat keanggotaan Muhammadiyah tersebar dalam 29 cabang yang keseluruhannya mencapai 4000 anggota. Sampai tahun 1928, keanggotaan Muhammadiyah meningkat menjadi 17.000 anggota.²⁹¹

B. Gerakan Islam:

Membangun Persatuan Organ Islam

Perubahan arah perjuangan Tjokroaminoto yang sebelumnya bergerak di jalur politik, kini bergerak di jalur

agama, oleh sebagian sejarawan seperti halnya Takashi Siraishi, Van Niel, mengatakan bahwa perubahan tersebut lebih didasarkan pada meningkatnya kekuatan organ buruh yang diakomodir oleh PKI dan melemahnya kekuatan PSI.²⁹² Berbeda halnya dengan Wardini Ahmad, ia menjelaskan bahwa saat itu para pemimpin organisasi-organisasi Islam merasa sangat penting untuk membentuk sebuah wadah perkumpulan untuk membicarakan hal-hal berkaitan dengan persoalan Islam. Munculnya keinginan untuk bersatu, terkait kondisi yang memprihatinkan bagi dunia Islam akibat kemiskinan, keterbelakangan, dan penjajahan, serta berbagai perpecahan yang telah terjadi di antara umat Islam Indonesia. Berbagai pertimbangan yang demikian itulah yang mendorong pihak-pihak orang Islam mengambil langkah-langkah nyata ke arah pendekatan hubungan semua organisasi dan paham keagamaan Islam di Indonesia.²⁹³

Berbeda halnya dengan Deliar Noer, ia melihat lebih luas terhadap fenomena tersebut. Bahwa usaha mengadakan kongres al-Islam tidaklah semata-mata atas inisiatif SI, tidak pula peranannya di dalam kongres-kongres ini didasarkan pada keinginan mempertahankan kepemimpinan di dalam gerakan Islam umumnya seperti yang dituduhkan oleh beberapa orang penulis asing. Dengan demikian, perubahan arah perjuangan Tjokroaminoto dari jalur politik ke agama adalah wajar-wajar saja.²⁹⁴

Sikap Tjokroaminoto pada dasarnya tidak dapat dikatakan sebagai bentuk perubahan sikap gerakannya, me-

lainkan sebuah lanjutan pemikiran Tjokroaminoto yang telah diperjuangkan sebelumnya. Sikap tersebut adalah bentuk konsistensi Tjokroaminoto dan para pendukungnya untuk memperjuangkan Islam, baik dari segi sosial, ekonomi, budaya, dan juga politik, sedangkan partai politik dalam konteks modern adalah sebuah lembaga yang dapat mengusung ide dan cita-cita perjuangan tersebut.

Setelah keluarnya Tjokroaminoto dari penjara tahun 1922 terkait peristiwa *afdeling B*, Tjokroaminoto akhirnya kembali berjuang dan memperkuat barisan pergerakan bumiputera. Tjokroaminoto telah larut dan ikut merasakan bagaimana bentuk nyata represif-nya Pemerintah Hindia Belanda terhadap rakyat bumiputera serta para pemimpin pergerakan buruh di Indonesia. Tjokroaminoto kembali memimpin PSI dan melakukan berbagai perbaikan, terutama pada sikap gerakan serta nilai ideologis PSI yaitu Sosialisme Islam.

Gagalnya pergerakan yang dimotori oleh organ buruh menambah kekecewaan Tjokroaminoto terhadap pergerakan organ buruh yang dianggapnya belum matang. Tjokroaminoto sangat menyayangkan Moeis sebagai kader PSI yang dianggapnya terlalu ceroboh dalam melakukan berbagai aksi pemogokan yang berakhir dengan sebuah penahanan dan bubarnya organ buruh penting yaitu PPKB dan PPPB yang telah dirintis oleh Tjokroaminoto, Agus Salim, Moeis serta Suryopranoto. Kekecewaan Tjokroaminoto tersebut sangat beralasan, karena berbagai organ gerakan buruh yang sangat penting tersebut harus bubar dan hilang, se-

hingga sangat menyulitkan PSI untuk kembali bergerak bersama organ tersebut.²⁹⁵

Tjokroaminoto sebagai begawan pergerakan, ketika melihat berbagai peristiwa yang berakibat pada melemahnya sendi-sendi pergerakan bumiputera tidak tinggal diam. Tjokroaminoto sembari dalam pengasingannya di daerah Kedungjati, kembali merencanakan untuk mengembalikan citra pergerakan bumiputera di bawah naungan PSI. Perubahan dari SI menjadi PSI lebih mempertegas posisinya sebagai organ gerakan serta sebagai organ politik. Singkatnya, sekilas dari pandangan tersebut, mencirikan bahwa PSI sebagai partai politik yang bersandar pada ideologi Islam tidak memisahkan antara Islam sebagai agama dengan Islam sebagai ideologi yang bergerak melalui organ partai untuk memperjuangkan bumiputera melalui jalur politik. Artinya, Islam menjadi dasar semua hal, baik yang bersifat sosial, budaya, ekonomi dan juga politik, melebur menjadi satu kesatuan yang utuh. Segala pencapaian menuju keselamatan, sesuai dengan makna Islam itu sendiri yaitu Selamat dunia dan akhirat dapat diupayakan.²⁹⁶

Sebagai upaya untuk kembali membangun pergerakan bumiputera, Tjokroaminoto kembali mengorganisir para anggota PSI yang semakin lemah dengan mengadakan kongres PSI di Madiun tahun 1923. Kongres tersebut membicarakan tentang strategi pergerakan baru sambil melihat dan menganalisis berbagai peristiwa yang telah dilalui sebagai sebuah pelajaran yang sangat berharga. Tjokroaminoto telah melihat dan merasakan bahwa bergerak di jalur

organ pergerakan buruh telah gagal, sehingga harus diwujudkan sebuah bentuk baru pergerakan dengan mengorganisir kembali berbagai kekuatan yang dapat menunjang pergerakan tersebut menjadi kuat. Tjokroaminoto tetap berpegang teguh pada Islam, karena Islam tetap kuat dan mampu bertahan sebagai sebuah pengikat serta ideologi dan dasar pergerakan. Islam dapat dikatakan tidak sepenuhnya mendapati ajalnya seperti yang telah terjadi pada Komunisme yang direpresentasikan oleh organ pergerakan buruh. Kini selayaknya mengaca dari pengalaman, bahwa organ pergerakan buruh dapat dikatakan telah lemah, sehingga basis pergerakan harus diganti dengan basis pergerakan baru yaitu membangun basis pergerakan melalui persatuan dari berbagai organ Islam. Dengan demikian, PSI sebagai sebuah organ politik yang baru, tetap berlandaskan pada ideologi Islam dan tetap mengusung Islam sebagai dasar perjuangannya serta basis kekuatan diubah dengan cara membangun persatuan dari berbagai organ Islam yang mulai bermunculan di tahun-tahun tersebut.

Tjokroaminoto kini telah kembali memimpin pergerakan bumiputera melalui PSI yang mengupayakan basis dukungan dari berbagai organ Islam bumiputera. Sebagai upaya untuk mewujudkan hal tersebut, Tjokroaminoto melakukan pengorganisasian terhadap berbagai organ pergerakan Islam yang dibantu oleh Agus Salim. Pada Oktober 1922, Tjokroaminoto dan H. Agus Salim melalui PSI mengadakan kongres Islam besar di Cirebon.²⁹⁷ Kongres Islam besar tersebut bertujuan untuk mencari persatuan dalam

beberapa hal penting berkaitan dengan Agama Islam, seperti yang diumumkan dalam Medan Moeslimin berikut:

1) Hal peladjaran Ilmoe Agama Islam; 2) Hal pendidikan anak-anak agar soepaja kelak hidoepnja soenggoeh-soenggoeh menurut waton Islam; 3) seboleh-bolehnja akan mengetahoei asas-azasnja roepa-roepa perkoempoelan jang maksoednja akan memadjoekan ke-Islam-an seperti: Moham-madiyah, Al Irsad, Perserikatan Oelama, Taswiroel Afkar, Nah-datoel Waton, Sidik Amanat Tableg Vatonah dan lain-lain; 4) apakah di tanah Hindia perloe diadakan Raad Oelama, kalau perloe bagai manakah haroes atau boleh didirikan, dan apakah hak dan kwadjibannja Raad itoe?; 5) hal pendiriannja Comite Hadji, dan; 6) hal pemeliharaan zinazat berhoeboeng dengan pemeriksaan Dokter.²⁹⁸

Maksud dan tujuan dari diadakannya kongres Islam besar di Cirebon, sangat menarik untuk diperhatikan. Apabila ditinjau lebih lanjut berkaitan dengan posisi dan kondisi PSI setelah perpecahannya dalam SI, ternyata kongres tersebut tidak hanya sekadar berkaitan dengan urusan Agama Islam, tetapi sebagai upaya untuk menyatukan organ-organ Islam yang mulai bermunculan dalam satu wadah. Upaya untuk mengikat berbagai organ Islam tersebut berkaitan dengan munculnya berbagai organ lain yang sekuler seperti halnya Komunisme, Nasionalisme-kebangsaan dan Nasionalisme Jawa. Selain itu, yang menjadi pokok adalah menarik dukungan secara politik bagi organ-organ Islam tersebut untuk mendukung gerakan *Pan-Islamisme*.

Dari pelaksanaan kongres tersebut ternyata tidak seperti yang diharapkan oleh PSI sebelumnya. Dalam kongres ini yang terjadi justru sebuah perdebatan panjang ber-

kaitan dengan *taqlid* serta penolakan terhadap madzab, antara kelompok pembaru dengan kelompok yang mempertahankan tradisi di antara sesama ormas Islam. Semakin memanasnya perdebatan tersebut, mengakibatkan munculnya benih perseteruan di antara keduanya. Pada proses inilah, PSI sebagai kelompok yang netral menjadi penengah.

Pada Mei 1924, kongres al-Islam kembali dilakukan tepatnya di Garut. Dalam kongres kedua ini, kelompok yang mempertahankan tradisi sepenuhnya tidak hadir, akan tetapi kongres tersebut berjalan terus sehingga menghasilkan sebuah keputusan yaitu pembentukan badan koordinasi. Pembentukan badan ini, lebih didasarkan pada sikap-sikap yang mendukung gerakan *Pan-Islamisme*, sebagaimana kemenangan gerakan tersebut direpresentasikan oleh Turki dalam melawan Yunani dan Armenia. Kemenangan Turki tersebut dapat diartikan sebagai sebuah perwujudan pembebasan dunia Islam dari bentuk-bentuk kolonialisme Barat. Sebagaimana yang telah dikabarkan oleh Bintang Islam dalam tajuk *Islam dan Bolsjewisme*, tahun 1924:

Kemenangannya kaoem moeda Toerki menggemparkan doenia asia teroetama Islam. Soerat-soerat kabar di Asia paling belakang ada rame membitjarakan itoe, dan didoega tida djaoeh lagi temponja: "Asia boeat orang Asia".

Belon lama djoeroe kabar di Balkan dari Nieuwe Rott, Crt, soeda bitjarakan itoe gerakan.

Sjeik dari kaoem senoessi jang soeda beberapa lamanja djadi tetapoe dari pemerenta di angora, soeda djoega menjatakan maksoednja.

Kaoem senoessi ada satoe kaoem jang koeat di doenia Islam, ada berpoeloe million orang dari itoe kaoem tersiar di Tripolitanie sedeng tempat kedoedoekannja jang kepala ada di Marokko, algerie, Tunis, Egypte, Arabie, Br. Indie, Ned. Indie? Enz.

“Kita maoe ikoet toeladannja Toerkie”, kata itoe Sjeik, “kita nanti berklai sampe tida ada lagi seorang asing berdiam di Tripolitie.

Doenia Islam moesti terbebas sama sekali dari pemerintahan bangsa Barat. Kaloe rahajat Islam soeda lepaskan dirinja dari pemerentahan Barat kemoedian bekerdja keras boeat ambil poelang dari bangsa Barat apa jang ia ada lebi dari kita, oe-pama perniagaan, ilmoe pengetahoean dan atoeran tjara bekerja.

Dalam itoe hal sadja orang Islam boleh bekerdja bersama-sama dengan bangsa Barat sedang laen dari itoe sama sekali tinggal Islam, sebab dalamnja ada terkandoeng harta begitoe besar harganja, jang kita tida boleh berpisa.

Dengan tjara bagimana djoega kita orang nanti melepaskan diri.

Dengan djalan baik bisa djadi kalaoe bangsa Barat jang sekarang memrenta dikasi mengerti kedoea pihaknja moesti dilakoekan sama rata atawa orang-orang Islam jang sekarang toendoek di bawah prentanja dibiarkan tjari nasibnja sendiri. Hal ini ada penting boeat kedoea pihaknja.

Laen dari itoe, tentoelah dengan djalan tida baik, tetapi biar bagaimana djoega kita moesti bebas...²⁹⁹

Dari kabar di atas, dapat kita simak, bahwa pergerakan dunia Islam luar telah menampakkan hasil jerih-payahnya dalam melawan bentuk kolonialisme bangsa Barat.³⁰⁰ Seperti halnya bangsa Tripoli, bangsa ini telah melakukan

sebuah perlawanan besar-besaran terhadap pemerintah kolonial Itali, sehingga bangsa ini mampu memerintah dirinya sendiri melalui Dewan Rakyat.³⁰¹ Demikian pula di Indonesia, tentunya pergerakan dunia Islam luar menjadi pendorong sebuah semangat untuk melakukan berbagai perlawanan terhadap Pemerintah Kolonial Belanda. Perkembangan dunia Islam telah terlihat sebagai sebuah bukti yang tidak dapat ditolak, baik di belahan dunia lain maupun di Indonesia.³⁰² Untuk mencapai sebuah negara yang merdeka, tentunya harus dibutuhkan berbagai perangkat yang kuat, di antaranya adalah persatuan. Dengan demikian, Tjokroaminoto terus berupaya untuk mengikat berbagai organ umat Islam dalam satu wadah melalui kongres al-Islam tersebut.

Pada Pebruari 1924 muncul polemik tentang Khilafah di Turki. Persoalan tersebut muncul karena pemimpin nasional Turki yaitu Kemal Attaturk menghapus lembaga kekhalifahan, sebagai simbol dalam dunia Islam. Melalui sikap tersebut, Kemal pada prinsipnya ingin membawa Turki menjadi sebuah negara modern seperti negara Eropa pada umumnya. Selain itu, penghapusan Khalifah juga didasarkan pada aspek-aspek kewenangan yang tidak dijalankan sepenuhnya oleh Khalifah Abdul al-Majid di Turki. Khalifah Abdul al-Majid yang menjabat sebagai khalifah saat itu, pada praktiknya, dianggap oleh Kemal, tidak melakukan serta menjalankan kewenangan sepenuhnya secara politik sebagai seorang khalifah. Abdul al-Majid dapat dianggap melanggar tradisi kekhalifahan yang

selama ini telah berjalan. Dengan demikian, pembubaran atau penghapusan sistem kekhalifahan dengan cara mengusir Abdul al-Madjid dari Turki, merupakan sebuah bentuk kekecewaan Kemal terhadap umat Islam, karena seolah-olah hanya Turki yang mengurus persoalan Khalifah.³⁰³

Setelah pengusiran Abdul al-Madjid yang dilakukan oleh pemerintahan Kemal, Abdul al-Madjid akhirnya meminta bantuan kepada Mesir dan di Mesir ia difasilitasi oleh para ulama yang akhirnya, para ulama Mesir tersebut melakukan pengkajian ulang terhadap keberadaan khalifah untuk dunia Islam. Setelah keputusan Turki tentang penghapusan khalifah dan perubahan sikap politik Turki tersebut, para ulama Mesir (dipimpin oleh Syaikh al-Azhar), akhirnya mengambil inisiatif untuk mengundang para ulama sedunia untuk membicarakan hal tersebut dengan seluruh umat Islam dunia pada 25 Maret 1924 di Kairo.

Munculnya perubahan sikap politik Turki serta dukungan Mesir dalam menjembatani persoalan khalifah, ternyata menarik sebuah perbincangan lebih lanjut bagi organ Islam di Indonesia. Berbagai organ Islam ini akhirnya melakukan pertemuan pada 4 Agustus 1924 yang dihadiri oleh PSI, Muhammadiyah³⁰⁴, al-Irsyad³⁰⁵, al-Ta'dibiyah, Taswirul Afkar³⁰⁶, Ta'mirul Masjid, dan berbagai organisasi Islam lainnya.³⁰⁷ Dalam pertemuan tersebut akhirnya diputuskan untuk membentuk Komite Khilafah yang didirikan pada 4 Oktober di Surabaya dengan susunan kepantiaan sebagai berikut: Ketua: Wondosudirdjo (akhirnya akrab disebut Wondoamiseno) (PSI); Wakil Ketua: K. H.

A Wahab Chasbullah (Taswirul Afkar).³⁰⁸ Dalam pertemuan yang dilakukan oleh Komite Khilafah akhirnya menetapkan pihak-pihak yang akan diberangkatkan ke Kairo untuk menghadiri perundingan umat Islam sedunia tersebut. Beberapa nama yang dimaksud adalah Soerjopranoto (PSI), Fachruddin (Muhammadiyah), dan K.H. Wahab Chasbullah (Taswirul Afkar).

Sebagai dukungan terhadap terbentuknya komite khilafah maka, pada Desember 1924, kongres al-Islam ketiga kembali dilakukan di Surabaya. Pihak yang memegang teguh tradisi diminta oleh Tjokroaminoto untuk menghadiri kongres. Dalam kongres ini, akan dibicarakan tentang persetujuan yang terjadi antara kelompok pembaru dengan kelompok yang memegang teguh tradisi dalam kongres pertama. Pada kongres ketiga inilah diperoleh sebuah kesepakatan di antara kedua kelompok tersebut.³⁰⁹ Persatuan di kalangan organ Islam sangat dibutuhkan, karena fenomena internasional telah menunjukkan adanya polemik berkaitan dengan Politik Islam yaitu khalifah, sehingga di antara organ umat Islam Indonesia harus bersatu dalam menghadapi polemik tersebut.

Merujuk pada kesepakatan komite khilafah maka, dalam kongres ketiga inilah nama-nama yang ditunjuk untuk menghadiri kongres di Kairo, disepakati sebagai keputusan kongres di Surabaya. Akan tetapi, kongres di Kairo sampai pada prosesnya tidak dapat dilaksanakan akibat terjadinya pertempuran di Hijaz, sehingga keputusan kongres yang dimaksud tidak terlaksana.³¹⁰

Raja yang berkuasa di Hidjaz saat itu adalah Syarief Husain, akan tetapi, tindakan Raja Husain sangat merugikan dari berbagai pihak. Perbuatannya ini sangat menindas dan dapat dikatakan sebuah pencitraan yang buruk sebagai seorang raja yang memiliki kewenangan terhadap umat Islam dan Mekah sepenuhnya. Perihal demikian sangat jelas dirasakan oleh para anggota masyarakat setempat, dan juga berbagai pihak yang berada di Mekah, khususnya orang Islam Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji. Demikian pengakuan dari para jamaah haji dari Indonesia di Mekah:

Apabila kami membatja brita dari tanah Hedjaz di dalam halaman B.I. baik berita itoe dari radja Hoesin maoepoen dari wakil Gouvernement Belanda jang ada di sana, tergeraklah hati kami dengan gemetar, karna semoea perchabaran dari tanah Hedjaz (dari fehak radja Hoesin) boeat kami poenja pertimbangan berita jang semata-mata palsoe, berita jang menoeoet mata bangsa kita.

Di dalam taoen 22. kami ada di sana (Mekah), kami di sana merasa loeas pemandangan kami tentang adanja peperintahan Hedjaz berhoeboeng dengan bangsa kita jang sedang di negeri Mekah jang tidak lajak kami toetoerkan dalam soerat-soerat kabar. Sampe dewasa ini rahasia kami itoe beloer terben-tang dalam S.K., baik B.I. maoepoen jang lain, kerna kami kawatir tersangka mendjadi pengasoet kepada bangsa kita jang akan pergi Hadji, tetapi setelah kami membatja B.I.I No. 22, taoen 23, dan No. 1, taoen 24, maka tergeraklah hati kami berhoeboeng dengan "berita dari Cunsul Blanda di Djedah", berita jang mana, oendang-oendang dari Radja Hoesin, barang siapa jang dirampok dalam perdjalan ke Medinah hendak memberitahoekan kepada Hosin sebelum orang hadji maoe kombali, maka oerang itoe akan dikasi kombali olehnja; itoe kami poenja pendapetan

tidak bisa masoek dalam aqal manoesia jang waras, kerna itoe sesoenggoehnja menoetoep mata kepada kita orang Djawa. Betapa kami mesti berkata demikian? Ja; kami mengerti bahwa Hoesin itoe boekan Radja jang kaja sebagai radja-radja jang lain, kerna ia mendjadi radja itoe baharoe sadsja sedang mengatoer negerinja beloen beres armadanja beloen lengkap, rajatnja masih beloen tantram, laskar-laskarnya banjaknja tiada sebrapa. Kami soedah taoe (soedah liat)...³¹¹

Dari penjelasan di atas, tentunya dapat kita lihat bagaimana sikap seorang raja yang memiliki kewenangan penuh atas Mekah, sebagai pusat ibadah umat Islam dunia. Syarif Hussain, justru tidak memberikan pengayoman terhadap masyarakat dunia Islam di berbagai penjuru dunia yang datang ke Mekah untuk menunaikan ibadah haji.³¹² Melalui sikapnya tersebut, serta berbagai sikap politik terkait perebutan tentang status khalifah di dunia Islam maka, muncullah perlawanan dari Ibnu Saud dan akhirnya Ibnu Saud menggantikan Syarif Husain sebagai seorang raja yang memiliki kewenangan sepenuhnya terhadap Mekah sebagai pusat ibadah bagi umat Islam dunia.

Berkaitan dengan terjadinya peristiwa perpecahan di Hijaz tersebut, Tjokroaminoto sebagai pimpinan besar kongres yang saat itu berada di Yogyakarta, kembali ingin mengumpulkan pihak-pihak umat Islam untuk membicarakan hal tersebut. Dalam suratnya, Tjokroaminoto mengundang kepada Central Komite dari kongres al-Islam Hindia di Garut; Komite Khilafat di Surabaya; *hoofdbestuur* dan *bestuur*-nya perhimpunan dan perserikatan Islam Hindia Timur; serta seluruh umat Islam di Hindia Timur. Dalam cuplikan isi suratnya, Tjokroaminoto mengatakan demikian:

Pendeknya: tali-persatoean Islam kita masih koerang lengkap, masih koerang koekoeh, dan masih beloem selesai djoega pemasanganja tali-persatoean jang mengikat Oemat Islam dinegeri toempah-darag kita dengan Oemat Islam diloeur Hindia kita.

Mengingat kekoerangan² jang sangat menjedihkan hati seperti jang terseboet ini, dan djoega mengingat kesempatan jang sekarang ini ada tersedia, jaitoe kesempatan boeat mentjepatkan kedjadiannja Persatoean Doenia Islam dengan lantaran lekas-lekas moelai mengadakan kongres Moeslim Doenia, sebagaimana lebih pandjang ada dioeraikan dalam perkebaran berkepala "*congres Moeslim Doenia*",³¹³ jang termoeat sebagaimana dibawah ini, maka adalah kita merasa sangat perloe sekali akan meleakaskan kedjadiannja persidangan Congres al-Islam Hindia kita dalam taheen ini.

Dengan senang hati kita wartakan kepada sekalian saudara jang terhormat, bahwa Locale Sarekat Islam Yogyakarta soedah bersiap langkap dalam satoe doea hari ini hendak mengadjak segala perhimpoean dan perserikatan Islam di Yogyakarta boeat mendirikan satoe Komite oentoek mengatoer kedjadiannja persidangan Congres al-Islam Hindia kita, jang dengan seboleh bolehnja (ketjoeali kalau ada halangan jang terpenting) hendak kita djadikan pada *penghabisan boelan Juni dimoeka ini*, bertempat dikota Yogyakarta.³¹⁴

Dalam suratnya tersebut, Tjokroaminoto sebagai pimpinan besar kongres, mengajak untuk segera melakukan kongres al-Islam, untuk membicarakan berbagai hal terkait diadakannya kongres Islam dunia. Sebagaimana yang telah disebutkan dalam isi suratnya Tjokroaminoto, bahwa kongres akan diadakan setelah bulan Juni, ternyata tidak sepenuhnya terwujud. Kongres akhirnya dapat dilakukan pada 21-27 Agustus 1925, di Yogyakarta dan menandai bahwa kongres tersebut adalah kongres al-Islam keempat.

Dalam kongres tersebut membicarakan berbagai hal seperti:

- 1e. Verslagnja Comite Chilafaat di Soerabaja, tentang hasil perhoeboengan dengan Comite Congres Islam di Cairo, dan djoega tentang Pergerakan Chilafaat pada oemoemnja di negeri kita dan diloear negeri kita (Comite Chilafaat dipersilahkan mentjoekoepi hal ini.)
- 2e. Menjampaikan permintaan kepada Comite Congres Islam di Cairo, soepaya berichtiar dengan seboleh bolehnja, agar Congres Islam Doenia boleh di djadikan dengan selekas-lekasnja, baik di Cairo maoepoen di satoe negeri Islam jang lainnja.
- 3e. Menjampaikan permintaan kepada Central-Comite Chilafaat di Hindoestan, agar soepaja berichtiar agar Congres Moeslimin Doenia itoe bisa kedjadian dengan selekas lekasnja di dalam negeri Hindoestan, kalau njata tidak bisa lekas kedjadian di negeri Egypte.
- 4e. Mengangkat satoe *Comite-Perdamaian* Islam, boeat mempeladjari perkara-perkara perselisihan oeroesan Agama jang pada masa ini ada di antara kita sama kita, dan memikirkan serta memvoorstelkan daja -oepaja jang haroes dilakoekan oentoek mengoerangkan dan achirnja bisa melenjapkan perselisihan, jang menjadi rintangan bagi kedjadiannja Persatoean Islam kita.

- 5e. Memadjoekan pendirian Perserikatan-perserikatan Oelama di masing masing negeri, jang kita harap akan mendjadi pangkal pendirinja *Madjelis Al Islam Hindia* kita.
- 6e. Memadjoekan kedjadiannja *Pergerakan Oemat Islam* diseloeroeh Hindia kita, jang kita harap akan mendjadi poesat tempat mengoempoelkan kekoeatan dan tenaga di antara segala perhimpoean dan perserikatan Islam, goena menjampaikan maksoed *bersama*, dan djoega akan mendjadi pesawat jang teroetama goena melakoean dan mendjadikan kepoetoesannja Congres al-Islam Hindia kita.
- 7e. Memoedjikan kedjadiannja *Pergerakan Tanzim* atau *Pergerakan Pengoebah Pergaoelan hidoep Moeslim bersama* di negeri toempah darah kita (akan dioeraikan pandjang lebar oleh jang bertanda di bawah ini.)
- 8e. Mengakoei dan membantoe soerat kabar "*Al-Islam* sebagai centraal orgaanja Congres, atau menerbitkan orgaan baroe.³¹⁵

Kongres di Yogyakarta, kembali membicarakan berbagai hal kemungkinan tentang sikap dan posisi umat Islam di Indonesia. Terjadi perbincangan yang cukup panjang berkaitan dengan pemilihan sikap Badan Koordinasi al-Islam Hindia. Dalam pertemuan tersebut akhirnya diputuskan, bahwa badan tersebut lebih condong ke Mekah yang dipimpin oleh Raja Fu'ad dengan alasan politik. Dalam kon-

gres ini tidak sepenuhnya mencapai titik persetujuan, karena terjadi perdebatan panjang antara kelompok pembaru dengan kelompok tradisi. Kelompok pembaru diwakili oleh Muhammadiyah yang saat itu bergabung dengan PSI, sedangkan kelompok tradisi diwakili oleh Taswirul Afkar yang dipimpin oleh K.H. Wahab Hasbullah. Perdebatan berlangsung berkaitan dengan sikap kelompok tradisi terhadap Raja Fua'ad yang saat itu sebagai pihak yang sangat bersikukuh dengan Wahabi, karena Wahabi sangat menolak terhadap empat mazhab.³¹⁶ Melalui perdebatan yang panjang, akhirnya kelompok tradisi juga memilih hal yang sama dengan harapan para utusan yang dikirim ke Mekah nantinya juga memperjuangkan kebebasan ber-madzab seperti yang diharapkan oleh kelompok tradisi sebelumnya.

Menjelang kongres al-Islam kelima, sebuah pertemuan dilakukan secara tertutup oleh beberapa kelompok pembaru seperti PSI dan Muhammadiyah di Cianjur, sedangkan kelompok tradisi tidak diikutkan. Dalam pertemuan ini, menyepakati sebuah keputusan tentang pihak-pihak yang akan diberangkatkan ke kongres Islam di Mekah. Dalam kesepakatan tersebut, Tjokroaminoto (PSI) dan K.H. Mas Mansyur (Muhammadiyah) menjadi delegasi dalam kongres di Mekah tersebut.

Setelah pertemuan tertutup ini, pada Pebruari 1926, kongres al-Islam kelima di Bandung kembali digelar. Dalam kongres ini tentunya membicarakan dan mengukuhkan kecenderungan dalam mengikuti kongres Islam di Mekah. Selain itu, dibicarakan juga siapa nama-nama yang akan

dikirim dalam menghadiri kongres Islam di Mekah tersebut. Merujuk pada kesepakatan tertutup di Cianjur, dua nama itulah yang akhirnya diusung dan disepakati dalam kongres kelima tersebut. Sejak saat itulah, gagasan PSI membentuk kongres al-Islam di Indonesia, akhirnya dapat menarik simpati berbagai organ Islam dalam menanggapi perkembangan dunia Islam Internasional yang juga bagian dari sebuah proses untuk membangun kekuatan Islam di Indonesia dalam menghadapi kolonialisme Belanda.

Sekembalinya menghadiri kongres Islam di Kairo, Tjokroaminoto dengan organ PSI-nya yang telah menerapkan asas Sosialisme Islam, semakin lebih maju dalam memelopori pergerakan Islam di Indonesia. Upaya Tjokroaminoto dalam membangun Islam di Indonesia yang juga didasarkan pada perkembangan Pan-Islamisme di Timur Tengah, merupakan bentuk konkret dari sikap politik *hijrah* serta penerapan politik *non*-kooperasi terhadap Pemerintah Hindia Belanda, yang diberlakukan oleh PSI pada 1924. Dengan demikian, langkah-langkah organisasi yang dilakukan oleh Tjokroaminoto dalam memperjuangkan Islam di Indonesia melalui kongres al-Islam di Indonesia atau kongres Islam dunia adalah strategi taktis untuk membangun sebuah kekuatan umat Islam bumiputera dalam menolak Komunisme, Sekularisme yang mulai bermunculan pada era tersebut. Lebih dari itu, bahwa tujuan besar yang telah diperjuangkan oleh Tjokroaminoto dan para anggota PSI lainnya adalah melawan kolonialisme Belanda menuju Indonesia Merdeka.

Sebagai upaya untuk memantapkan tekad demikian, Tjokroaminoto yang juga sebagai pimpinan kongres, kembali melakukan kongres al-Islam keenam pada 17-23 September 1926 di Surabaya. Dalam kongres al-Islam di Surabaya akhirnya dihasilkan sebuah keputusan sebagai berikut:

1. Congres seia-sekata mendirikan tjabang Moe'tamaroel Alami-Islami Hindia Timoer dengan dinamakan: Moe'tamaroel Alami Islami Far'oel Hindia-Sjarkijjah (M.A.I. H.S) bertempat di Soerabaja.
2. Pengemoedi M.A.I. H.S itoe diberi nama Loedjnah Tanfidhijah, yakni Executief-Comite, jang menoeroet soeara boelat-boelat terdiri daripada:

Voorzitter	: Hadji Oemar Said Tjokroaminoto
Vice Voorzitter	: Wondosoedirdjo
1e. Secretaris	: Hadji August Salim
2e. Secretaris	: S. Oemar Hoebis
Penningmeester	: Hadji Oesman bin H. M. Amin
Leden	: Kjai Mas Hadji Mansoer
	A. M. Sangadji
	R. Soekaris, dan
	S. As'ad Kalali.
3. Ihtiarnja mentjahari wang goena keperloean biaja kantor, onkost oetoesan dan contributie kepada Moe'tamaroel Alami Islam di Mekah, yakni:
 - a. meminta derma kepada djama'ah² Hadji sedikitnja f 2,50 dengan perantara'an pemerintah Hidjaz. (ini derma manasoeka).
 - b. Tiap-tiap perhimpoean jang mendjadi anggautanja M.A.I. H.S. diharoeskan membajar wang sebagai entree satoe kali sadja sedikitnja f 25.- (doewa poeloeh lima roepijah).
 - c. Diharapkan kepada perhimpoean-perhimpoean jang mendjadi anggautanja M.A.I. H.S. (jang kasnja

- mampoe) soepaja soeka kasih pindjam kepada M.A.I. H.S. sedikitnja f 100.- (seratoes roepijah).
- d. Mendjoeal kaartjis derma jang bergambar dengan harga sepoeloeh cent.
 - e. Diharapkan pada tiap-tiap tahoen ledennja perhimpoean² Islam soeka memasoekkan fitrah dan zakat kepada perhimpoeannja, dan jang 1/3 dari pendapatan terseboet distort boeat kas M.A.I. H.S.
 - f. Mendjalankan bus derma kemana-mana goena M.A.I. H.S.
 - g. Pendapatan Hadji Organisatie Hindia (H.O.H) jang pertama kali ini, jang sebahagian soepaja distort boeat kas M.A.I. H.S.

Selain daripada itoe M.A.I. H.S. akan berdaja oepaja dan mengharap dapat sokongan jang tetap saban boelan dari tiap-tiap orang jang menjetoedjoei dan berdirinja M.A.I. H.S. ini.

...T.A.M. Sangadji diangkat mendjadi Sectie-Commandant H.O.H, ja'ni jang mengamati segala pekerdjaan Sectie-Commandant (pengantar² Hadji).

Diharapkan dengan keras, soepaja ditiap² afdeeling lekas diadakan Comite atau sub-Comite H.O.H.³¹⁷

Sesuai dengan hasil keputusan dalam kongres tersebut, maka status kongres yang selama ini dilakukan dengan memakai nama al-Islam, kini diubah menjadi cabang Mukta-marrul Alamil-Islami Hindia Timur dengan memakai nama M. A. I. H. S. yang berkedudukan di Surabaya. Dengan demikian, M. A. I. H. S. Secara resmi telah disepakati menjadi cabang kongres Islam dunia di Indonesia.³¹⁸ Selain itu, dibentuk juga lembaga yang bernama H.O.H. Lembaga ini bertugas untuk menuntun para calon jamaah haji Indone-

sia yang akan berangkat ke Mekah, serta menjadi penolong bagi para haji yang telantar di Mekah.

Upaya PSI dan Muhammadiyah dalam membangun Islam di Indonesia, terkait pihak-pihak yang diusung sebagai perwakilan kongres Islam dunia di Kairo yang tidak melibatkan dari kalangan tua (tradisi), ternyata memicu kekecewaan mendalam bagi Kyai Wahab Hasbullah bersama dengan kyai-kyai lainnya. Kelompok tradisi yang sejak awal telah menolak kedua delegasi dalam kongres Islam di Kairo tersebut, serta akibat kekecewaan dari kelompok tradisi atas ketidakterwakilannya usulan tentang penerapan madzab bagi umat Islam, maka semakin mengukuhkan pandangannya, bahwa pihak PSI dan Muhammadiyah adalah pihak-pihak yang dianggapnya sebagai pendukung atau pengikut Wahabi. Wahabi adalah sebuah aliran dalam Islam yang mengikuti cara beragama Islam sebagaimana yang dicontohkan oleh Imam Ibnu Wahab.³¹⁹ Wahabi secara tegas menolak atau tidak menerima Madzab, yang dalam hal ini sangat bertentangan dengan aliran Sunni.³²⁰

Sebagai pimpinan Taswirul Afkar, K.H. Wahab Hasbullah yang sejak awal telah memilih aliran Sunni, yang dalam hal berperilaku agama Islam mengikuti salah satu dari empat madzab (Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Hanafi, dan Imam Maliki), akhirnya mengorganisir para ulama dan kyai yang berpegang teguh pada tradisi untuk membentuk sebuah majelis yang secara khusus membicarakan kongres Islam di Mekah tersebut. Kelompok tradisi akhirnya membentuk komite Hijaz. Komite Hijaz bertujuan un-

tuk memperjuangkan kebebasan bermazhab bagi Umat Islam di dunia. Melalui Komite Hijaz inilah, akhirnya dibentuk sebuah lembaga yang dinamakan Nahdlatul Ulama' (NU).³²¹ Selain pembentukan lembaga ini, dibicarakan juga terkait delegasi dalam kongres Islam di Mekah yang khusus untuk memperjuangkan tujuan tersebut. NU sebagai sebuah lembaga Islam, telah muncul dan melalui kelembagaannya tersebut mengupayakan untuk terwujudnya sebuah kebebasan bermazhab bagi seluruh umat Islam, terutama umat Islam di Indonesia.

Pada September 1926 bersamaan dengan dilaksanakannya kongres al-Islam keenam di Surabaya, NU sebagai organ Islam yang mempertahankan dan memperjuangkan umat Islam bermadzab, secara terpisah juga melakukan *Openbaarvergadering*, tepatnya di Masjid Sunan Ampel Surabaya. *Vergadering* tersebut dipimpin oleh seseorang dari Mesir yang bernama Ganaïm al-Amier dan disertai oleh Kyai H. Asnawi dan Kyai Abdoel Wahab. Dalam *vergadering* tersebut dibicarakan tentang berbagai hal terkait juga persoalan Wahabi yang tidak menerima atau menolak madzab.

Dalam pidatonya, Kyai Asnawi membicarakan tentang keterikatannya Sultan Abdoel Aziz bin Sa'ud terhadap Wahabi, sehingga sangat beralasan bahwa Asnawi akhirnya menjelaskan bahwa para haji yang akan datang ke Mekah pada tahun depan, tentunya akan diarahkan untuk mengikuti tata aturan beribadah sebagaimana orang Wahabi beribadah di Mekah. Melihat kondisi yang demikian,

maka selayaknya sultan memberi kebebasan terhadap semua umat Islam untuk menjalankan ibadah, tanpa menghapus keyakinan bermadzab, sebagaimana yang telah diyakininya dalam berperilaku agama Islam. Asnawi juga menjelaskan bahwa kongres al-Islam yang dilakukan oleh PSI dan Muhammadiyah telah mengikuti Wahabi, yaitu tidak bermazhab dan berusaha menghilangkan madzab dalam Islam.³²²

NU berkembang dengan pesat akibat relasi para Kyai yang juga mendukung sepenuhnya terhadap organisasi ini. Ketua dipimpin oleh Kyai Haji Asnawi dari Kudus, sedangkan di beberapa daerah lainnya juga menjadi pimpinan bagi kelembagaan NU di daerahnya masing-masing. Di Surabaya, NU dipimpin oleh Kyai Haji Abdul Wahab dan Ganaim dari Mesir; di Jombang (Tebu Ireng), NU dipimpin oleh Kyai Haji Hasjim As'arie; di Babad, NU dipimpin oleh Kyai Haji Abdul Hamid, dan masih banyak lagi di berbagai daerah lainnya.³²³

Proses penyebaran NU memang relatif cepat, akibat adanya relasi para kyai yang berperan penting di dalam pondok pesantrennya masing-masing. Di Babad misalnya, NU menjadi sebuah organisasi yang tumbuh sangat cepat. Pertumbuhan NU yang sedemikian cepat akhirnya memunculkan berbagai persinggungan di antara para pengikut masing-masing organ Islam di tingkat basis. Persinggungan yang terjadi pada dasarnya berkaitan dengan cara pandang dalam melihat serta menjalankan perilaku beragama Islam sebagaimana yang telah diyakininya, yang itu juga tidak keluar

dari tata aturan berperilaku agama Islam yang telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad saw. Ketika perbedaan cara pandang yang sedemikian tidak terbendung, akhirnya berimbas pada persinggungan secara tidak wajar yang sering kali berakibat pada konfrontasi secara fisik di antara sesama umat Islam. Seperti halnya insiden pemukulan yang terjadi di Babad Jawa Timur.

Insiden pemukulan berawal ketika Kyai Abdul Hamid berpidato pada shalat Jumaat di sebuah masjid di Babad Jawa Timur. Ia menjelaskan tentang keberadaan NU serta menguraikan cara berperilakunya dalam menjalankan agama Islam. Cara berperilaku NU dalam menjalankan Islam tidak sama dengan Sultan Abdul Aziz di Mekah, hal ini dikarenakan, Sultan Abdul Aziz adalah pengikut Wahabi yang secara tegas menolak madzab. Perilaku beragama Islam yang dijalankan oleh Sultan Abdul Aziz, tentunya berbeda dengan NU, yang mengikuti salah satu empat madzab, dan mendukung keyakinan umat Islam bermadzab. Setelah menerangkan perihal tersebut, Kyai Abdul Hamid juga menjelaskan tentang keberpihakannya PSI dan Muhammadiyah sebagai anggota dalam kongres al-Islam, terhadap perilaku beragamanya Sultan Abdul Aziz tersebut, sehingga PSI dan Muhammadiyah adalah juga sebagai pengikut Wahabi.

Ketika mendengar isi pidato atau khotbah Jumat yang demikian, presiden SI dan Commissaris Muhammadiyah Group Babad, saudara Sasmitohardjo, langsung berdiri. Sasmitohardjo langsung menjelaskan bahwa, mengenai kese-

muanya seperti yang diungkapkan oleh Kyai Haji Abdul Hamid, tidaklah sebagai sebuah keputusan pribadi, melainkan telah menjadi keputusan dalam kongres al-Islam. Di tengah argumentasinya untuk menangkai segala tuduhan yang dilakukan oleh Kyai Abdul Hamid, tiba-tiba berdirilah seseorang dari mereka dan memukulnya yang juga diikuti oleh beberapa orang lainnya. Sasmitohardjo yang mendapat pukulan tersebut akhirnya berusaha untuk meloloskan diri dari kerumunan tersebut, dan ia dapat menghindari. Akan tetapi, disitu juga terdapat salah seorang *Adviseur* SI Babad, yang umurnya telah mencapai 70 tahun. *Adviseur* SI Babad, akhirnya menjadi sasaran pemukulan dari kerumunan tersebut, yang menyebabkan ia menjadi pingsan.³²⁴ Kejadian demikian ternyata tidak mendapat perhatian dari pihak kepolisian Pemerintah Hindia Belanda. Pemerintah Hindia Belanda justru membiarkan peristiwa tersebut lebih meruncing dan tidak secara sigap menyelesaikan persoalan tersebut di tingkat akar rumput sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku saat itu. Seiring waktu berjalan, NU terus mengadakan perbaikan kelembagaannya dan memilih untuk berdiri sendiri tanpa bergabung dalam M. A. I. H. S. pada tahun-tahun berikutnya. •

7 Penerapan Ideologi: Mencapai Kemerdekaan Indonesia

Cinta kebangsaan, karena nama kebangsaan dan riwayat kebangsaan, nyata hanyalah buah bibir, yang berfaedah bagi rakyat kebanyakan, hanya menjadi dasar bagi "Komidi Bourgeois".

H. Agus Salim, *Hindia Baru*, 30 Mei 1925

A. Terbentuknya PSII: Program Asas dan Tandhim

1. Struktur Organisasi PSII

Pada 1923, SI telah berubah menjadi PSI. Sebagai partai politik, PSI tidak berhenti untuk melakukan berbagai penyempurnaan, baik yang berkaitan dengan kelembagaan atau hal-hal yang terkait dengan asas partai yang menjadi landasan gerak partai tersebut. Pada 1927, restrukturisasi

sasi kelembagaan partai telah terwujud. Seiring dengan tercapainya restrukturisasi kelembagaan, serta semakin meningkatnya perkembangan berbagai organisasi atau partai di Indonesia, PSI kembali melakukan berbagai perbaikan. Pada 1930, sebagaimana hasil keputusan kongres di Yogyakarta, maka kelembagaan ini berubah menjadi Partai Sarikat Islam Indonesia (PSII).³²⁵

Perubahan nama partai tentunya dibarengi dengan perubahan strukturnya. Perubahan struktur dilakukan agar terbentuk reorganisasi di dalam partai. Struktur pimpinan pusat dibagi menjadi dua; *pertama*: Dewan partai, yang dibentuk oleh atau dalam kongres partai (*majelis tahkim*); *kedua*: Lajnah Tanfidziyah, yang harus bertanggung jawab kepada Dewan Partai di antara dua masa kongres.³²⁶ Tjokroaminoto dan Salim diposisikan sebagai seorang tokoh yang tidak dapat digantikan dalam kepemimpinannya semasa hidupnya. Keduanya diposisikan sebagai Dewan Partai dan kepemimpinan digantikan oleh pihak yang lebih muda. Selain itu, strukturalisasi dilakukan juga terkait kesehatan Tjokroaminoto. Sampai tahun 1933, Tjokroaminoto menduduki posisi Dewan Partai, hingga meninggalnya tahun 1934.³²⁷

Sejak diberlakukannya strukturalisasi dalam PSII, posisi pemimpin digantikan oleh kelompok muda seperti Abikoeno Tjokrosujoso (adik Tjokroaminoto) dan dibantu oleh Sihabuddin Latif, W.A. Rohman, dan lain-lain.³²⁸ Di bawah kendali Abikoeno, PSII secara tegas memberlakukan politik *hijrah* dan secara tegas pula melaksanakan sikap *non-kooperasi* terhadap Pemerintah Hindia Belanda. Sikap tegas

Abikoesno mendapat reaksi dari berbagai pihak, karena dianggap terlalu kaku dalam memaknai politik *hijrah* dan sikap *non-kooperasi* terhadap pemerintah. Terlepas adanya unsur pribadi, Abikoesno memecat beberapa anggota seperti Agus Salim (penggagas politik *hijrah*), Suryopranoto, Sukiman, Martodirejo, Kartosoewiryo, serta beberapa anggota lainnya. Mereka dikeluarkan dari PSI, karena dianggap tidak konsisten terhadap penerapan politik *hijrah* serta sikap *non-kooperasi* terhadap Pemerintah Hindia Belanda.

Pemecatan terhadap Suryopranoto, Sukiman, dan Martodirejo, dilakukan karena telah membuat referendum secara umum atas ketidakberesan terhadap masalah keuangan dalam Persatuan Pekerja Pegadaian Hindia (PPPH) aliansi PSII. Dalam referendum tersebut, nama Tjokroaminoto dianggap terlibat persoalan ketimpangan administrasi dalam PPPH, akan tetapi tidak terbukti. Peristiwa tersebut dianggap telah merugikan partai dan mencemarkan nama baik Tjokroaminoto, sehingga oleh partai, melalui kongres SI tahun 1933 di Jakarta, mereka mendapat skorsing dan pada akhirnya dikeluarkan dari partai. Ketika Suryopranoto dan Sukiman dikeluarkan dari PSII, akhirnya mereka membentuk sebuah partai baru dan diberi nama Partai Islam Indonesia (PII), dan Sukiman bertindak sebagai pimpinan besar partai tersebut.³²⁹

Setelah meninggalnya Tjokroaminoto tahun 1934, politik *hijrah* yang dijalankan oleh Abikoesno ternyata menuai kritik dari Agus Salim. Agus Salim menjelaskan:

Bahwa politik *hijrah* bukan berarti mengambil sikap *non-*

kooperasi secara ketat dan pasif, akan tetapi bekerja sama menyusun diri, menyebarkan suara dan mempersatukan buatan di dalam kalangan sendiri pada seluruh padang kehidupan pergaulan; sosial, ekonomi, dan politik, dengan demikian, *hijrah* bukan berarti "mentalitet pasif" melainkan sikap "aktif".³³⁰

Dari penjelasan Agus Salim tersebut, pada dasarnya Salim mengajak partai untuk meninggalkan sikap *non-kooperasi*, karena zaman telah berubah dan dianggap merugikan partai. Sikap yang seharusnya diambil oleh partai adalah sikap kooperasi terhadap Pemerintah Hindia Belanda. Bagi Salim, politik *hijrah* adalah sama halnya dengan sikap politik *non-kooperasi*. Dengan demikian, untuk mencapai tujuan perjuangan baik di bidang sosial, ekonomi dan politik, tentunya harus menyusun persatuan dengan berbagi organ lain serta berperan serta dalam sistem parlemen yang sebelumnya pernah dilakukan. Kondisi sekarang dengan dulu memang berbeda, parlemen untuk saat ini bagi Salim sedapat mungkin harus dimanfaatkan, sehingga hal demikianlah yang dianggap Salim, bahwa politik *hijrah* bukanlah "mentalitet pasif" melainkan sikap "aktif".³³¹

Berbeda halnya dengan Abikoesno, Abikusno melihat, bahwa Salim kini tidak konsisten terhadap kesepakatan partai yang dihasilkan dari proses panjang, sehingga melahirkan Program Asas dan Tandhim yang itu telah menjadi keputusan akhir. Abikusno melihat bahwa politik *hijrah* adalah berbeda dengan sikap *non-kooperasi*. Politik *hijrah* merupakan sebuah upaya penyempurnaan organ PSII

sebagai sebuah partai yang secara tegas kembali menggali nilai-nilai dasar pergerakan dan partai politik secara menyeluruh dari ajaran Islam yang bersumber pada al-Qur'an dan al-Hadits. Berbeda halnya dengan sikap *non-kooperasi*, sikap *non-kooperasi* merupakan sebuah realisasi atau cerminan sebuah tindakan atau gerak juang sebuah lembaga dalam merealisasikan tujuan partai tersebut. Dengan demikian, sebagaimana menjalankan keputusan bersama tentang program asas dan tandhim, tentunya PSII harus konsisten dalam proses penerapannya, sehingga PSII harus tetap menjalankan politik *hijrah* dan menjalankan sikap *non-kooperasi* terhadap Pemerintah Hindia Belanda secara konsekuen.

Sampai dilaksanakannya kongres Sarekat Islam tahun 1936, perdebatan mengenai sikap politik *hijrah* terus berlanjut, dalam kongres tahun 1936 tersebut, beredar sebuah rumusan tentang sikap *hijrah* yang ditulis oleh S.M. Kartosoewirjo yang saat itu ia menjabat sebagai Vice-President Dewan PSII. Selebaran yang menjelaskan tentang sikap *hijrah* yang ditulis oleh Kartosoewirjo pada 10 September 1936, terdiri dari 2 bagian. Bagian pertama menjelaskan tentang proses kehidupan PSII. Demikian cuplikan uraian tersebut:

Pada zaman pertama PSII mengalami hidoep Hissy. Pada zaman itoe orang hanja mementingkan keperloean kedoe-niaan, baik jang mengenai diri manoesia masing² maoepoen jang mengenai ra'jat oemoem. Pergerakan pada waktoe itoe hidoep sebagai tangga oentoek mentjari keoentoengan

kebendaan, misalnja keoentoengan perdagangan dan lain-lain sebagainya, dengan tidak sadar dan tidak insjaf akan Islam dan ke-Islaman jang sedjati.

Pada zaman itoe orang sangat mementingkan soeara dari pada meotamakan kelakoean, menghargakan koelit lebih dari pada isinja. Karena inilah, maka zaman itoe boleh kita namakan "**Zaman Qualiyah**".

Maka dengan Koedrat dan Iradat Allah Soebhanahoe wa Ta'ala, dengan berangsoer-angsoer, dari sedikit ke sedikit, Pergerakan kita madjoe selangkah. Zaman jang pertama itoe berlakoe sedjak moela timboelnja Sarekat Islam (1912) hingga kira-kira Kongres di Madioen (1923).

Sedjak tahoen 1923 itoe langkah kemadjoean jang pertama sigera diikoeti oleh langkah jang kedoea, hingga achirnja PSII menghadapi zaman kedoea, tegasnja PSII terdjoen dalam Hidoep Ma'nawy. Hidoep kedoea ini menoentoet sebanjak-banjak amal, jang oleh sebab sifat ini, zaman kedoea itoe bolehlah kita namakan "**Zaman Fi'liyah**", soenggoehpoen sekalian perboeatan jang dilakoekannja beloem bersandarkan kepada kesadaran jang soenggoeh-soenggoeh dan kejakinan serta kepertjajaan jang njata. Orang-orang jang masih hidoep dalam zaman pertama, jang tidak pandai mengikoeti gelombang zaman, dari sendirinja mereka moelai ketinggalan. Ada jang keloea karena soekanja, dan ada poela jang terpaksa dikeloearkan, karena ta' pandai mentjoekoeapkan wadjib, jang mendjadi toentoetan zaman kedoea itoe. Zaman jang kedoea ini boleh kita hitoeng moelai tahoen 1923 hingga tahoen 1930 (kongres atau Madjelis Tahkim di Yogyakarta).

Sementara itoe, di dalam tiap-tiap zaman itoe Pergerakan kita tidak sepi dari pada pertjobaan dan oedjian, jang semoeanja itoe tidak dapat memoendoerkan perjalanan soennat-oellah atau soennat-oeth-thabi'ah, jang berlakoe dengan Kehendak dan kekoeasaan jang Esa.

Dengan merangkak-rangkak Pergerakan itoe melangkahkan langkahnja ke arah hidoep jang ketiga, ialah Hidoep Ma'any.

Dalam zaman ketiga ini orang moelai sadar dan insjaf akan kehidoepannja, moelai tahoe akan kewadajibannja, kewadajiban menontoet amal salih jang sebanjak-banjak dan sesempoernanja dengan kejakinan dan kepertjajaan jang koeat dan tegoeh.

Tiada halangan jang dapat memoendoerkan dia, tiada rintangan jang boleh menghentikan atau menghambat perjalanannja. Semoeanja itoe hanjalah mendjadi gemoek bagi kemadjoean PSII jang makin hari makin mendekati tertjapai-nya segala apa jang terkandoeng di dalam tjita-tjita dan maksoed toedjoeannja.

Oleh karena toentoetan pertama kali dalam zaman ini i'tiqad jang koeat, tegoeh, dan santausa, jang dapat menoemboehkan sebanjak² dan sesempoerna² amal itoe, maka zaman ini bolehlah kita namakan "Zaman I'tiqadiyah".

Sementara itoe orang-orang jang masih memegang tetap kehidoepan jang kedoea, moelai ketinggalan dalam langkahnja, dan djika mereka itoe tidak lekas-lekas mensesoeaakan dirinja dengan sjarat-sjarat hidoep jang ketiga ini, tentoelah tidak akan dapat menoesoel saudara²-nja jang soedah hidoep di dalam zaman ketiga itoe. Amal perboeatan mereka itoe sendirilah jang kelak akan menentoekan, dapatkah atau tidakkah mereka mengikoeti perjalanan PSII ke arah Kesempoernaan Hidoep, Doenia dan Achirat itoe !³³²

Uraian ini menjelaskan tentang perjalanan PSII dalam menapak pergerakan di Indonesia. PSII sebagai sebuah partai politik semakin lama-semakin maju dan lebih tegas dalam menjalankan ajaran Islam untuk mencapai kesempurnaan hidup, baik di dunia maupun di akhirat. Kendati

pada 1936, secara kelembagaan para anggota dapat dikatakan semakin melemah, akan tetapi keteguhan serta kondisi kelembagaan PSII dapat dikatakan mengalami kemajuan. Kemajuan dalam arti, bahwa PSII semakin matang dalam bersikap dan bertindak sebagai upaya untuk mewujudkan cita-cita besarnya yaitu menuju keselamatan dunia dan akhirat.

Hanjalah perloe kita peringati, bahwa jang kita tjeritakan di atas itoe ialah perdjuangan PSII sependjang kwaliteitnja (isinja), boekan kwantiteit (djomlahnja).

Tampaknja moendoer dan berkoerang-koerang kemadjoean-ja, tetapi pada hakekatnja PSII adalah dalam kemadjoean !

Kemadjoean jang tidak tergantoeng kepada djoemlah orangnja, melainkan kemadjoean karena keloehoeran harkat-deradjatnja !

Kemadjoean jang hanja boleh tertjapai oleh manoesia jang soeka mensesoeaikan hidoepnja dengan perintah-perintah Ilahy, dengan qadar dan kekoeatan jang ada padanja.³³³

Setelah diberlakukannya kongres tahun tersebut dan telah tercapainya upaya strukturisasi kelembagaan PSII maka, struktur baru tersebut telah menggeser posisi Salim dalam kelembagaan PSII. Agus Salim tidak lagi mendapatkan posisi sebagai salah satu anggota dewan partai. Merasa kecewa dengan keputusan tersebut, Agus Salim tepat pada 28 November 1936 membuat fraksi dalam lingkungan partai bernama Barisan Penyadar PSII (BP PSII) yang diketuai oleh Mohammad Roem.

Dibentuknya fraksi tersebut dalam PSII, pada dasar-

nya untuk menyerukan gagasan serta pemikiran Agus Salim dalam partai. Pembentukan lembaga baru ini, akhirnya memunculkan ketegangan di dalam tubuh PSII itu sendiri. Melihat gelagat yang demikian, tanggal 19 Desember 1936, Abikoesno bereaksi dengan memanggil fraksi tersebut bersama Dewan Partai serta Lajnah Tanfidziyah duduk bersama memusyawarahkan berkaitan dengan persoalan tersebut. Dalam musyawarah ini akhirnya didapat sebuah keputusan untuk mengakhiri perdebatan mengenai politik *hijrah*. *Hijrah* tetap menjadi politik resmi PSII dan hendaknya disebarluaskan oleh segenap anggota partai. Selain itu, keputusan skorsing diberlakukan kepada berbagai pihak yang terlibat dalam Barisan Penyadar. Skorsing tersebut diberlakukan sejak Januari 1937, dengan keputusan dikeluarkannya mereka dari keanggotaan partai. Mereka yang dikeluarkan dari partai adalah Mohammad Roem dan Sabirin sebagai Pimpinan Pusat Penyadar, sedangkan pada Pebruari, pemecatan juga berlaku pada Agus Salim, Sangaji, beserta 24 anggota Penyadar lainnya.³³⁴

Pada Desember 1938, sebuah Kongres Sarekat Islam kembali digelar. Salah satu keputusan yang dihasilkan dalam kongres tersebut adalah dibentuknya lembaga *suffah*. Lembaga ini bertugas serta menjadi media pendidikan, pengajaran, dan latihan bagi pemimpin-pemimpin partai untuk menjalankan hukum dan perintah Islam. Lembaga tersebut pengelolaannya dipercayakan kepada Kartosoewiryo. Kartosoewirjo merupakan kelompok Abikoesno yang menentang sikap politik *hijrah* sebagaimana yang dituturkan oleh

Agus Salim.

Dalam prosesnya, ketika lembaga *suffah* mulai berjalan, ternyata para kader yang dididik dalam lembaga tersebut, lebih berorientasi pada sosok pemikirannya Kartisoe-wirja, bukan berorientasi kepada pengajaran dan pembelajaran kepartaian dalam PSII. Orientasi lembaga *suffah* tersebut dianggap lebih berorientasi pada pembentukan militansi kader yang fanatik atas dasar mistik bukan agama yang dalam hal ini lebih tunduk kepada Kartosoewirjo yang statusnya disamakan dengan seorang maha guru. Dengan demikian, jalannya lembaga tersebut oleh partai dianggap telah menyalahi aturan yang telah ditetapkan oleh partai dalam kongres tahun 1938. Melalui keputusan partai tahun 1939, Kartosoewirjo beserta delapan cabang (semuanya dari Jawa Tengah) dikeluarkan keanggotaannya dari PSII.

2. Program Asas dan Tandhim PSII

Setelah terbentuknya PSII, kelembagaan ini akhirnya lebih memfokuskan pada teori dan falsafah yaitu program asas dan tandhim PSII. Kedua program tersebut tentunya berdasar pada aturan tunggal yang baku dan di dalamnya menjadi landasan tunggal bagi umat manusia di dunia. Landasan utama tersebut adalah al-Qur'an dan al-Hadits. PSII meyakini bahwa al-Qur'an dan al-Hadits menjadi dasar untuk berperilaku bagi umat Islam seluruhnya. Segala sesuatu perkara atau hal-hal yang berkaitan dengan *furu'* (cabang) yang sering kali menjadi perdebatan di antara umat Islam, tentunya masing-masing umat Islam sama

berpegang teguh kepada aqidah yaitu *laailaa ha illa-Allah Muhammadarrasuulullah* (tiada tuhan selain Allah dan Muhammad saw adalah utusan Allah), sehingga tidak menjadikan pecahan bagi seluruh umat Islam.

Al-Qur'an menjadi landasan prinsip bagi umat Islam, karena hanya kitab tersebutlah menjadi penyempurna dari semua kitab lainnya dan di setiap bagian ayat dalam al-Qur'an itulah terdapat suatu kebenaran.³³⁵ Realisasi dari isi al-Qur'an, tentunya dicontohkan oleh para utusan yang dipilih oleh Allah, dan Muhammad mendapat tanggungjawab tersebut sebagai nabi terakhir. Nabi Muhammad saw, menjadi utusan yang dipilih sebagai penyempurna bagi nabi-nabi yang lain. Tuntunan Nabi Muhammad saw adalah al-Qur'an³³⁶ dan melalui perilaku Nabi Muhammad saw, kita sebagai umat Islam wajib menirunya, karena perilaku Muhammad, adalah cerminan dari semua yang diajarkan dalam al-Qur'an.

Program Asas adalah sebuah aturan dan tuntunan bagi partai ini dalam mengusung perjuangannya menuju Indonesia Merdeka. Perumusan Program Asas ini dimaksudkan sebagai langkah maju partai agar tidak selalu merubah program pekerjaan dalam setiap tahunnya. Yang dimaksud dengan program Asas adalah sebuah program yang merangkum serta menjelaskan tentang suatu pengetahuan tentang sifat, keadaan-keadaan, kecelaan dan kebusukan pergaulan hidup.³³⁷ Dalam program asas ini, dijelaskan secara panjang lebar berkaitan dengan: 1) persatuan dalam umat Islam; 2) kemerdekaan umat (*nationale vrij-*

heid); 3) sifat kerajaan (staat) dan pemerintahan; 3) penghidupan ekonomi (ervurter program); 4) keadaan dan derajat manusia di dalam pergaulan hidup bersama dan di dalam hukum; 5) kemerdekaan yang sejati (kemerdekaan, persamaan, dan persaudaraan).³³⁸

Berkaitan dengan persandaran pergerakan, jalan atau haluan serta daya upaya untuk mencapai maksud tersebut, dijelaskan dan dirumuskan dalam program *Tandhim* (perlawanan). Program *Tandhim*, adalah pengganti dari program pekerjaan yang diterapkan sebelumnya. Program *Tandhim*, memiliki kekuatan yang hampir sama kekalnya dengan Program Asas. Dalam program *tandhim* dijelaskan beberapa hal sebagai bentuk aplikasi nilai-nilai yang terkandung dalam program asas seperti: 1) ibadah dan syariat; 2) siyasah (politik); 3) penghidupan rakyat; 4) pergaulan hidup bersama (pernikahan).³³⁹ Di sisi yang lain, apabila dalam setiap kongres, dibutuhkan sebuah pembaruan-pembaruan sesuai dengan kebutuhan partai maka, disinilah akan dirumuskan dan dimasukkan dalam program pekerjaan (program *van actie*), yang akan dijalankan pada tahun berikutnya. Sampai tahun 1933, program asas dan *tandhim* ini menjadi keputusan akhir yang tidak dirubah-rubah lagi hingga masa kemerdekaan Indonesia.

B. Disiplin Umum

Setelah diputuskannya program asas dan *tandhim* PSII pada 1931, partai ini akhirnya semakin tegas dalam menjalankan sikap *non-kooperasi*. Sikap tegas ini tidak hanya

berlaku terhadap organ-organ Islam yang sebelumnya telah berafiliasi dengan PSII, akan tetapi, juga diberlakukan terhadap organ lain yang dianggap dapat merintangi keteguhan sikap PSII dalam melakukan perjuangan melawan penjajahan kolonialisme Belanda.

Dalam perihal agama, PSII secara tegas telah menjelaskan secara panjang lebar berkaitan dengan *furu'* (cabang). Bagi PSII, persoalan *furu'* yang sering kali menjadi perdebatan panjang di antara sesama umat Islam tentunya harus dikembalikan pada persoalan aqidah Islam sebagaimana yang telah dijelaskan dalam prinsip dasar Program Asas dan Tandhim PSII. PSII tidak mempersoalkan *furu'*, di mana persoalan *furu'* dalam agama tidak harus diperdebatkan, sedangkan yang paling penting adalah masing-masing umat Islam harus berpegang teguh dalam persoalan *ushul* (utama) dalam bergama Islam. Apabila umat Islam masih memperdebatkan persoalan *furu'*, justru akan berakibat pada perpecahan di antara umat Islam itu sendiri, sehingga secepatnya harus dihentikan. Dalam Program Tandhim terkait dengan hal ibadah dan Syari'at:

Partai S.I Indonesia berdaja-upaja agar supaya Dunia Islam tidak membesar-besarkan perselisihan² seperti yang ada pada dewasa ini, ialah perselisihan² jang chilafijah dan tjumlah mengenai perkara² *furu'* belaka, oleh karena perpetjahan didalam Dunia Islam dan kurangnya kekuatan untuk mendjalankan perkara² jang wadjib, dan lagi menjejabkan Dunia Islam tidak sadar akan bentjana dan bahaya jang mengantjam kepada Islam dan Ummat Islam.³⁴⁰

Bagi Persis, PSII yang melihat persoalan *furu'* dalam agama adalah sebuah hal yang sifatnya *khilafiyah* (salah benar tergantung konteks), dan justru tidak secara tegas meluruskan untuk mendapatkan sebuah rumusan yang tegas. Bagi Persis, justru dengan membiarkan hal-hal yang bersifat *furu'* dalam agama Islam itulah, akan berakibat tidak adanya bentuk konsistensi dalam menjalankan ajaran Agama Islam. Ketika persoalan *furu'* tidak dapat diselesaikan, maka akan dikhawatirkan munculnya sebuah perilaku beragama dalam Islam yang dalam hal ini dapat dikatakan menyimpang (*bid'ah*) ucapan dan perilaku Nabi Muhammad saw (*sunnah*). Menurut Persis, *bid'ah* adalah persoalan yang sangat penting, karena hal tersebut terkait perilaku politik yang dijalankan oleh PSII. Dalam menjalankan Islam, tentunya harus benar-benar bersih dari *bid'ah*, karena perilaku *bid'ah* adalah dilarang oleh agama Islam. Demikian Persis berpendapat:

Janganlah tuan-tuan biarkan cabang-cabang PSI men-cela, mengeji-ngeji dan memusuhi kaum yang memerangi *bid'ah* dan membicarakan *furu'*, karena kejatuhan Islam ialah lantaran orang-orangnya meninggalkan pokok agama dan terganti dengan *bid'ah*.

Adapun perkara yang tuan-tuan namakan *furu'* ialah hukum-hukum yang sangat perlu bagi orang-orang yang menjalankan ibadah saban hari.

Kalau dilarang orang membicarakan *furu'* berarti melarang orang membicarakan ibadat. Sungguhpun tuan-tuan tidak mementingkan hal-hal ibadat yang mana sebagian

daripada Islam, sebagaimana tuan mementingkan politik, tetapi hal itu menjadi penting bagi golongan yang merasa wajib menjalankan ibadat walaupun belum merdeka.

Kalau tuan-tuan biarkan cabang-cabang melarang yang tersebut lantaran mereka merasa tidak perlu kepada *furu'*, nanti orang lain pula ada hak melarang orang-orang masuk kumpulan politik dengan alasan, yang demikian itu belum perlu sekarang.

Jangan tuan-tuan biarkan orang-orang Islam menjalankan bid'ah, dan jangan salahkan kaum lain memerangi ahli bid'ah, dengan alasan hendak menjaga persatuan.

Akan jadi sia-sia pekerjaan tuan-tuan, kalau tuan-tuan lakukan begitu, karena tak dapat tuan-tuan persatukan golongan sunnah dengan golongan bid'ah, walaupun sampai kiamat.³⁴¹

Pada prinsipnya, Persis ingin menyampaikan bahwa persoalan *furu'* sangat penting untuk diselesaikan, sebab hal tersebut berkaitan dengan perilaku beribadah sehari-hari bagi umat Islam. Ketika PSII menilai bahwa persoalan *furu'* hanya dikembalikan pada persoalan aqidah Islam tanpa memberikan batasan-batasan yang tegas antara mana perilaku beragama tersebut diperbolehkan atau tidak diperbolehkan. Ketika PSII tidak menyelesaikan atau merumuskan hal tersebut, tentunya persatuan yang dimaksudkan oleh PSII, akan sia-sia belaka, bahkan sampai kiamat, tidak akan dapat terwujud.

Ungkapan atau pendapat dari Persisi ini, tentunya sangat terkait dengan dukungannya terhadap PSII. Persis

sangat mendukung terhadap arah perjuangan PSII, terutama di Perangan, sehingga Persis merasa wajib mengingatkan PSII agar tidak keluar dari perilaku beragama Islam. Rasa memiliki seolah-olah menjadi dasar Persis menyampaikan hal tersebut, di mana Persis melihat bahwa hal yang sangat penting bagi terwujudnya persatuan serta cita-cita politik PSII harus didasarkan pada perilaku beragama yang tidak keluar dari *al-Sunnah* Nabi Muhammad saw.

Pendapat yang diungkapkan oleh Persis terkait dengan ketidaksepahaman dalam persoalan *furu'* ternyata sangat mengganggu PSII. PSII merasa bahwa ungkapan Persis tersebut sebagai sebuah bentuk perlawanan terhadap kebijakan partai yang telah dirumuskan dalam Program Asas dan Tandhim tahun 1931. Sebagai upaya untuk menyikapi hal tersebut, PSII akhirnya memberlakukan disiplin terhadap Persis, karena dianggap telah melawan serta menghalangi perjuangan PSII. Dengan demikian, pihak-pihak yang terdapat di dalam Persis, baik secara kelembagaan atau perseorangan di dalamnya, apakah sebagai anggota dalam PSII atau tidak, juga mendapatkan disiplin tersebut. Pihak-pihak yang terkena imbas disiplin tersebut adalah: Zam-zam, Hasan dan Natsir.³⁴² Akibat disiplin tersebut, Natsir akhirnya juga memberikan komentar terhadap pemberlakuan disiplin terhadap Persis:

PSII di Bandung dan Garut menjalankan *opruimingpolitiek*-nya (= politik pembersihannya) terhadap kepada anggota yang dianggap pemecah. Di sini lantaran berani mengkritik pemimpin, di situ lantaran berani membicarakan *furu'*.

Beberapa orang kyai-kyai yang berpengaruh dalam daerah masing-masing, dan sudah bertahun-tahun menjadi lid dan pemimpin PSII, dapat surat onslag (*ontslag*=berhenti), dapat kena disiplin.³⁴³

C. Membangun Federasi Kebangsaan

1. Permufakatan Perhimpunan-Perhimpunan Politik Kebangsaan Indonesia (PPPKI)

Menjelang tahun 1920-an, di Indonesia telah bermunculan berbagai organ yang bergerak di bidang politik selain PSI. Tahun 1923 tercatat telah terjadi perpecahan di tubuh Perhimpunan Indonesia (PI) di Belanda, sehingga para anggotanya yang telah memutuskan pulang ke Indonesia, kembali mewujudkan semangat pergerakan tersebut. Beberapa pihak mantan anggota PI yang pulang ke Indonesia adalah Soetomo (1919-1923). Soetomo mendirikan *Indonesice Studie Club* (ISC) di Surabaya pada 11 Juli 1924 dan ia sendiri yang memimpin organ tersebut. Para anggota PI lainnya seperti Isqak dan Cokroadisoeryo membangun komunikasi dengan para mahasiswa teknik di Bandung. Para mahasiswa teknik di Bandung seperti halnya Anwar dan Sukarno, akhirnya merealisasikan pemikiran tersebut dan membentuk *Algemeene Studie Club* (ASC) di Bandung pada 29 November 1925. Ketua umum ASC dipercayakan kepada Isqak, akan tetapi kurang dari satu tahun kepemimpinannya digantikan oleh Sukarno.³⁴⁴

Sukarno merupakan sosok yang sangat tanggap dalam melihat situasi perpolitikan di Indonesia. Ia merupakan salah satu murid Tjokroaminoto yang cakap selain Alimin. Dalam

kepemimpinannya di ASC, Sukarno mengupayakan agar lembaga tersebut hendaknya beranjak menjadi sebuah partai politik, agar tujuan yang ingin dicapai dapat diralisasikan.

Tahun 1926, situasi Indonesia telah berubah, karena pada tahun ini, muncul pemberontakan PKI terhadap Pemerintah Hindia Belanda di Sumatera Barat³⁴⁵ dan Banten.³⁴⁶ Pemberontakan PKI dapat dilumpuhkan oleh Pemerintah Hindia Belanda, dan sebagian di buang ke Digul. Melihat lemahnya pergerakan nasional yang demikian, Sukarno merubah ASC menjadi partai politik untuk meningkatkan perjuangan nasional. Sukarno sangat berhati-hati mendasarkan cita-cita perjuangan partai yang akan digagasnya tersebut. Selain antisipasi terhadap sikap pemerintah yang represif, Sukarno mengupayakan agar partainya menjadi penyalur gerakan bumiputera yang revolusioner. Sukarno akhirnya mendirikan PNI pada 14 Juli 1927 di Bandung.³⁴⁷

Di tengah-tengah munculnya berbagai organisasi politik di Indonesia, pada Januari 1927, PSI melakukan kongres nasional di Pekalongan. Ketika berlangsungnya kongres, Sukarno sebagai anggota PSI, (yang saat itu juga sebagai ketua ASC) menyerukan kepada kongres agar PSI membentuk sebuah federasi dengan organ pergerakan politik lain. Usulan Sukarno tersebut mendapat sambutan baik dari peserta kongres, dan secepatnya mengagendakan pembentukan federasi. Sukiman sebagai komisaris PSI ditunjuk untuk mempersiapkan berbagai keperluan pem-

bentukan federasi tersebut. Sukiman menunjuk Sabirin yang saat itu menjabat sebagai ketua PSI Bandung sebagai koordinator. Sabirin yang telah mendapat mandat, akhirnya mengupayakan berbagai pertemuan dengan berbagai pihak dalam rangka pembentukan federasi.

Seiring dengan pembentukan federasi ini, Sukarno yang sebelumnya memiliki gagasan tersebut justru kembali aktif di ASC dan mengupayakan pembentukan partainya yaitu PNI. Pembentukan PNI, bagi Sukarno tidak menghalangi pembentukan federasi tersebut. Tepat tanggal 17-18 Desember 1927, resmi mengumumkan berdirinya Per-mufakatan Perhimpunan-Perhimpunan Politik Kebangsaan Indonesia (PPPKI).³⁴⁸

Beberapa pihak yang menyepakati terbentuknya federasi tersebut adalah PSI, BU, PNI, Pasundan, *Sumatranenbond*, Sarekat Madura, kaum Betawi, kelompok Studi Indonesia, dan lain-lain. Fungsi dari dibentuknya federasi ini adalah sebagai "suatu timbunan kekuatan dan satu gelombang tenaga rakyat Indonesia, satu ikhtiar dari satu kemauan".³⁴⁹ Dari fungsi federasi tersebut, akhirnya didapat sebuah tujuan yang lebih nyata yaitu "mendatangkan persatuan di dalam aksinya perhimpunan-perhimpunan yang masuk di dalamnya, dan berdaya upaya supaya aksi itu bisa lebih teratur.

Federasi baru ini akhirnya menjadi medan baru perjuangan organ bumiputera di Indonesia. Federasi yang dibangun dengan nama PPPKI merupakan sebuah langkah maju pergerakan bumiputera dalam merespons sikap po-

litik Pemerintah Hindia Belanda. Sebagaimana yang dikatakan oleh Sukarno:

...dan inipun suatu keadaan jang baik sekali! Sebab tak baiklah bagi pergerakan kita tiap-tiap daja-upaja jang mau menipiskan atau meniadakan guratan antara sini dengan sana; tak baiklah bagi pergerakan kita tiap-tiap usaha jang mau pengumpulkan sini dengan sana itu. Tetapi baiklah perdjoengan kita tiap-tiap usaha jang menjempurnakan pisahan antara kita dengan mereka itu... Makin terang tampaknja garis antara kaum kita dan kaum pertuanan, makin tadjam terlihatnja guratan antara sini dan sana,-jakni makin njata tampaknja dan terasanja antithese itu, maka makin terang dan tadjam pula sifatnja perdjoengan kita, makin djernih dan bersih pula wujudnja perdjoengan kita itu oleh karenanja, sehina perdjoengan kita itu lantas mendapat karakter.³⁵⁰

Sukarno melihat bahwa pembentukan PPPKI merupakan langkah maju dalam mempertegas posisi antara bumi-putera dengan Pemerintah Hindia Belanda. Usaha untuk memisahkan hubungan tersebut, karena sangat merugikan rakyat bumiputera. Dalam sambungan artikel tersebut, Sukarno menambahkan:

Sebab, bagi kita kaum Nasional Indonesia, maka soal perdjoengan kita itu adalah soal kekuasaan, soal macht. Soal ini bukanlah soal keadilan, soal ini bukanlah soal hak.

Bukankan sudah adil dan hak kita, jang misalnya poenale sanctie dihapuskan, jang misalnya meradjalelanja modal gula atau modal tembakau diberhentikan, jang misalnja tanah-tanah kita tidak dibagi-bagikan kepada modal asing sebagai membagikan kueh? Bukankah sudah adil dan hak kita, jang misalnja pengurangan hak berkumpul dan bersidang bagi kita dihapuskan, jang misalnja pemimpin-pemimpin kita

tidak dibuang kemana-mana?... Ja, bukankah sudah adil dan hak kita, jang negeri kita mendjadi merdeka?³⁵¹

Sebagaimana yang dimaksudkan oleh Sukarno, bahwa perjuangan rakyat bumiputera dilakukan oleh PPPKI merupakan langkah yang sangat tepat. Tepat dalam arti mengambil alih kekuasaan untuk kemakmuran bumiputera. Perjuangan bumiputera dalam PPPKI bukan persoalan hak dan keadilan, karena pada prinsipnya hak dan kewajiban telah menjadi milik rakyat bumiputera seutuhnya menuju Indonesia merdeka. Perjuangan yang dimaksudkan adalah untuk mendapatkan kekuasaan untuk mewujudkan Indonesia merdeka. Di satu sisi, perpaduan organisasi yang berbeda haluan dalam PPPKI, sebagai bentuk kemajuan dalam membingkai kesadaran nasional bumiputera, di sisi lain keberagaman tersebut justru menjadi persoalan baru di dalamnya.

Pertama: PSI sebagai pelopor federasi, berharap para anggota menerapkan sikap politik yang sama yaitu *non-kooperasi*, akan tetapi, hal demikian tidak dapat dipaksakan, karena sejak semula para anggota federasi telah menentukan sikap politiknya masing-masing. *Kedua:* sikap politik yang berbeda, tentunya berkaitan dengan nilai ideologi yang terbangun dalam lembaganya masing-masing. Dengan demikian, perbedaan melebar pada persoalan sikap ideologi yaitu antara nasionalis Islam dengan nasionalis sekuler.³⁵²

Perbedaan yang muncul di awal pembentukan PPPKI, semakin lama semakin membesar. Menjelang akhir tahun

1928, tepatnya pada 2 September 1928, PPPKI melangsungkan kongresnya yang pertama. Dalam kongres tersebut, Soetomo didaulat sebagai ketua majelis pertimbangan PPPKI. Terpilihnya Soetomo sedikit banyak memberi angin segar dalam internal PPPKI yang sedang mendapati persinggungan keras di antara sesama anggota. Untuk sementara waktu, persinggungan tersebut dapat diredam.

Meredanya persinggungan di dalam PPPKI hanya bertahan sebentar. Tahun 1929 kembali muncul permasalahan terkait dengan pemberian ucapan selamat yang dilakukan oleh kelompok nasionalis sekuler atas nama majelis pertimbangan PPPKI kepada Muhammadiyah sesuai melakukan kongres di Solo. Tindakan demikian dikecam keras oleh PSI sebagai pihak nasionalis Islam, karena pihak pemberi selamat tersebut dianggap melampaui wewenangnya sebagai majelis pertimbangan PPPKI. Kecaman yang dilakukan oleh PSI terhadap pihak nasionalis sekuler sangat beralasan, karena Muhammadiyah adalah lembaga yang sebelumnya -tepatnya pada 1927- mendapat disiplin umum dari PSI akibat tidak konsisten dalam menerapkan sikap *non-kooperasi* terhadap Pemerintah Hindia Belanda. Pada tahap inilah, muncul persinggungan yang hebat antara kelompok nasionalis Islam dengan nasionalis sekuler.

Pemberian ucapan selamat tersebut merupakan pemicu dari konflik yang tidak terselesaikan sebelumnya, terkait dengan perbedaan sikap politik dan ideologis dalam membangun sebuah kerangka besar federasi PPPKI menuju Indonesia merdeka. Persinggungan semakin meluas, hingga

pada persoalan kuota suara dari masing-masing anggota dalam federasi.

PSI yang saat itu memiliki basis kekuatan lebih besar daripada organ lain, tetap dianggap memiliki suara yang sama dengan anggota federasi lain, walaupun memiliki lebih sedikit keanggotaannya. PSI mengusulkan agar kuota suara adalah 1:50 (satu suara untuk 50 anggota), akan tetapi usulan tersebut ditolak oleh partai lain dalam forum. Selain itu, PSI juga mengusulkan agar perbincangan yang terjadi dalam forum PPPKI dibuka untuk umum, agar rakyat dapat mengenal dan mengikuti perkembangan pemikiran yang muncul di dalamnya.³⁵³ Bagi PSI, forum yang terdapat dalam PPPKI hendaknya menjadi sebuah model atau acuan dalam membangun sistem parlemen untuk Indonesia, karena forum tersebut berdiri sendiri di luar garis Pemerintah Hindia Belanda dengan menerapkan sikap *non-kooperasi*.

Belum selesai perdebatan tentang hal di atas, pertentangan antara pihak nasionalis Islam dengan nasionalis sekuler kembali terjadi. Pertentangan tersebut berkaitan dengan nasionalisme atau kebangsaan. Perdebatan tersebut muncul ketika PPPKI yang dipimpin oleh Sukarno dan disokong sepenuhnya oleh pihak nasionalis sekuler mengumandangkan persatuan terlepas dari, dan tidak peduli dengan prinsip lain. Sukarno sebagai bagian dari pihak nasionalis sekuler dalam pidatonya menegaskan bahwa kecintaan terhadap ibu negara dahulu telah melahirkan sosok seperti Gadjah Mada dari masa Hindu dan berbagai tokoh penting lainnya. Sukarno melihat bahwa untuk mencip-

takan dan mempertahankan persatuan, harus membangun serta memupuk rasa kecintaan terhadap tanah air, kesediaan yang tulus dalam membaktikan diri kepada tanah air, dan rasa kesediaan diri untuk mengesampingkan kepentingan partai demi kecintaan terhadap tanah air. Sukarno banyak menyitir dari para pemikir barat seperti halnya Ernest Renan, Karl Kautsky, Karl Radek, serta Otto Bauer, yang saat itu sangat populer terkait dengan makna nasionalisme. Sebagaimana yang telah dikatakan oleh Otto Bauer, bangsa adalah "suatu persatuan perangai yang terjadi dari persatuan hal-ihwal yang telah dijalani oleh rakyat itu".³⁵⁴

Pemikiran tentang nasionalisme yang dipelajari tersebut, diramu sedemikian rupa oleh Sukarno dan menjadi analisis yang menarik ketika, wacana nasionalisme tersebut dihubungkan dengan semangat nasionalisme ke-Timuran, baik yang ada di Timur Tengah, India, serta Indonesia. Sukarno dalam artikelnya sering menyebut nama para tokoh terkemuka sebagai pejuang nasionalisme seperti, Karamchand Gandhi, Maulana Muhammad Ali, Sjaikat Ali, Gopala Krishna gokhate, Mahatma Gandhi, serta Chita Ranjam Das.³⁵⁵

Pemaknaan nasionalisme oleh Sukarno yang demikian, akhirnya memaksa Agus Salim dan PSI unjuk bicara. Menurut Salim bahwa pandangan Sukarno tentang memuliakan tanah air di atas segala-galanya, tentu dapat mencairkan atau melunturkan ke-tauhid-an (nilai-nilai ketuhanan dalam Islam) seseorang. Demikian Salim menjelaskan:

Cinta kebangsaan, karena nama kebangsaan dan riwayat kebangsaan, nyata hanyalah buah bibir, yang berfaedah bagi rakyat kebanyakan, hanya menjadi dasar bagi "Komidi Bourgeois".

Cinta bangsa, yang mementingkan nasib rakyat sebangsa, sebanyak yang terlebih melarat... yang menghendaki persamaan dalam sebangsa antara segala golongan... yang dengan persamaan hak menuju maslahat umum... yang mengutamakan orang sebangsa daripada kebangsaan, cinta bangsa inilah yang sesungguhnya menghendaki kemerdekaan bangsa segenapnya, bagi keselamatan dan kesejahteraan rakyat sebangsa sekalian, karena kewajiban kepada sesama manusia yang sama bertanah air ke negeri yang satu.

Inilah *Cinta Bangsa* yang menjadi asas kepada S.I.

Cinta Bangsa yang hendak menjunjung tinggi ummat sebangsa, tetapi tidak mengangkat kebangsaan menjadi berhala tempat menyembah dan memuja.

Dan *Cinta Bangsa* ini jugalah hendaknya menjadi asas dalam tiap-tiap kaum politik, sekalipun asas politiknya terambil dari pada kebangsaan.³⁵⁶

Salim bukan berarti menganggap persatuan dan cinta tanah air tidak penting. Salim ingin mengatakan bahwa ungkapan kecintaan yang demikian jangan hanya di bibir saja, serta berlaku bagi sebagian orang. Ungkapan tersebut harus nyata dan bagi keseluruhan orang. Salim juga mengingatkan bahwa kebangsaan janganlah dijadikan sebagai berhala tempat menyembah dan memuja. Artinya, bahwa kebangsaan bukan sebagai alasan atau sandaran atau pijakan bagi sebuah bangsa untuk melakukan sesuatu kepada bangsa lain. Salim khawatir, kecintaan terhadap tanah air terse-

but, lebih mengutamakan orang sebangsa daripada segenap bangsa yang hidup dalam satu tanah air. Lebih lanjut Salim menjelaskan tentang cinta bangsa yang didasari oleh kebendaan adalah “berhala” agama:

Atas nama “tanah air”, jang oleh beberapa bangsa disifatkan “Dewi” atau “Ibu”, bangsa Perantjis dengan gembira menurunkan Lodewijk XIV, penganiaja dan penghisap darah rakjat itu, menjerang, merusak, membinasakan negeri orang dan rakjat bangsa orang, sesamanja manusia.

Atas nama “tanah air” keradjaan Pruisen merubuhkan Oostenrijk daripada deradjat kemuliannya itu.

Atas nama “tanah air”, bala tentara Perantjis menurut tuntutan Napoleon menakluk-menundukkan segala negeri dan bangsa jang berdekatan dengan dia, menghinakan radja-radja orang dan menindas rakjat bangsa lain.

Atas nama “tanah air” pemerintah Djerman pada sebelum perang besar dan dalam masa perang itu, menarik segala anak laki-laki jang sehat dan kuat dari pada ibu-bapaknja, dari pada kampong dan halamannya, bagi menguatkan balatentara untuk mengalahkan, menaklukkan dunia.

Atas nama “tanah air” Italia sekarang ini memberi sendjata, sampai kepada anak-anak, laki-laki dan perempuan, supaya kuat negerinja merendahkan deradjat orang dinegeri orang, merampas hak orang atas tanah air orang itu, memperhambakan kepada bangsanja djuga.

Bahkan atas nama “tanah air” masing-masing, kita lihat bangsa Eropah merendahkan deradjat segala bangsa luar Eropah.

Demikianlah kita lihat, betapa “agama” jang menghambakan manusia kepada berhala “tanah air” itu mendekatkan kepada persaingan berebut-rebutan kekajaan, kemegahan dan ke-

besaran; kepada membusukkan, memperhinakan dan merusakkan tanah air orang lain dengan tidak mengingat hak dan keadilan. Inilah bahajanya apabila kita “menghamba” dan “membudak” kepada “ibu dewi” yang menjadi tanah air kita itu karenanya sendiri sahaja; karena eloknja dan cantiknja; karena kajanja dan baiknja, karena “airnja kita minum”, karena “nasinja kita makan”.

Atas dasar perhubungan jang karena benda dunia dan rupa dunia belaka tidaklah akan dapat ditumbuhkan sifat-sifat keutamaan yang perlu untuk mentjapai kesempurnaan.³⁵⁷

Salim telah melihat bahwa dengan dalih “tanah air”, yang telah dilakukan oleh berbagai orang –tidak terkecuali Barat atau Timur– menimbulkan kesengsaraan bagi bangsa lain. Kecintaan terhadap tanah air akan memunculkan persaingan untuk memperebutkan kekayaan, kemegahan, dan kebesaran bangsa atas bangsa lain. Hal demikian akan melahirkan sebuah ketidakadilan dan pemasungan terhadap hak orang lain. Demikian Salim menegaskan, “apabila menghamba kepada tanah air dengan mengacu kepada kebendaan, hanya karena airnya kita minum, nasi-nya kita makan, niscaya tidak akan dapat ditumbuhkan sifat-sifat keutamaan yang perlu untuk mencapai sebuah kesempurnaan”.

Salim pada dasarnya telah menyelami tentang makna cinta tanah air yang dimaksudkan Sukarno. Analisis Salim justru lebih jauh melesat, melampaui semangat zamannya saat itu, sehingga Salim (bukan menolak), melainkan memberikan penjabaran tentang makna semangat cinta tanah air yang telah didengungkan Sukarno. Semangat cinta

tanah air yang demikian, menurut Salim adalah sebuah kecintaan terhadap tanah air yang hanya didasari oleh nilai-nilai kebendaan semata. Semangat cinta tanah air atas dasar kebendaan, tidak jauh berbeda dengan apa yang telah ditampilkan oleh sejarah tentang sepak terjang para pejuang nasionalisme di belahan dunia lain tersebut.

Beberapa contoh para pejuang kebangsaan berdasar kebendaan yang ditampilkan Salim, bukan berarti hanya bangsa Barat, melainkan, bangsa mana pun tidak terkecuali. Apabila semangat cinta tanah air dengan dasar kebendaan dijadikan sebagai dasar, niscaya tidak akan mendapatkan persatuan yang sempurna dalam membangun nasionalisme.

Bagi Salim, cinta tanah air tentunya harus didasari oleh nilai-nilai rohaniah, bukan kebendaan. Cinta tanah air yang demikian akan membawa kita kepada cinta tanah air yang lebih luhur melampaui kebendaan. Cinta tanah air yang dapat mewujudkan segenap hak dan keadilan serta kebaikan yang batas-batasnya telah ditentukan oleh Allah SWT. Demikian Salim mengutip al-Qur'an Surat 14, ayat 37:

Ya tuhan kami, Sesungguhnya aku telah menempatkan sebahagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanam-tanaman di dekat rumah Engkau (Baitullah) yang dihormati, Ya Tuhan kami –agar mereka mendirikan shalat. Maka jadikanlah hati sebahagian manusia cenderung kepada mereka dan beri rezekilah mereka berupa buah-buahan, mudah-mudahan mereka bersyukur.³⁵⁸

Menyimak uraian Salim yang panjang lebar terkait dengan cinta tanah air, Sukarno kembali menjelaskan secara panjang lebar, sebagaimana Salim memberikan sang-

gahan. Dalam menyikapi sanggahan Salim, Sukarno menegaskan bahwa pada prinsipnya pandangan Salim tersebut merupakan pelengkap atau bersifat menambah belaka dari gagasan yang dibangun oleh Sukarno. Sukarno kembali menegaskan bahwa, nasionalisme yang dimaksud bukan sebagaimana yang dimaksudkan oleh Salim. Demikian ia menjelaskan:

Sebab Hadji Agus Salim lupa mengatakan, bahwa rasa-kebangsaan jang beliau gambarkan dengan kalimat jang kita kutipkan tahadi, ialah rasa-kebangsaan jang berlainan dengan rasa-kebangsaan jang kini berapi-api didalam hati-sanubari kita, kaum Nasional Indonesia.

Hadji Agus Salim lupa mengatakan, bahwa rasa Tjinta pada tanah-air jang menggelapkan matanja pengikut-pengikut Lodewijk XIV, pengikut-pengikut Napoleon, Pengikut-pengikut Bismarck, pengikut-pengikut Musolini, pengikut-pengikut "radja-riwajat" jang lain-lainnja, -bahwa rasa tjinta pada tanah-air jang mendjadi sebabnja tabiat angkara-murka di Eropah itu ialah rasa-kebangsaan jang agresif, rasa-kebangsaan jang menjerang-njerang.

Hadji Agus Salim lupa mengatakan, bahwa beliau tahu, bahwa rasa-kebangsaan jang dimaksudkan oleh Ir. Sukarno ialah rasa-kebangsaan jang tidak agresif, tidak menjerang-njerang, tidak timbul dari pada keinginan akan meradja-lela diatas dunia, -tidak diarahkan keluar, tetapi ialah diarahkan kedalam.³⁵⁹

Sukarno dalam cuplikan tulisannya, ingin menyampaikan kepada Salim, bahwa nasionalisme yang dimaksud

adalah bukan sebuah bentuk nasionalisme yang agresif atau menyerang-nyerang, sebagaimana yang telah dilakukan oleh para penggagas nasionalisme Barat, baik yang ada di Perancis, Italia, serta negara Barat lainnya. Nasionalisme yang dimaksud adalah nasionalisme ke dalam. Nasionalisme yang membangun persatuan bagi rakyat bumiputera, dan persatuan tersebut tidak untuk menyerang atau menindas bangsa lain. Sukarno kembali menegaskan demikian:

Hadji Agus Salim lupa mengatakan, bahwa nasionalisme ke-Timur-an jang mitsalnja mewahjui djuga Mahatma Gandhi, atau C. R. Das, atau arabindo Gjose, atau Mustafa Kamil, atau Dr. Sun Yat Sen dan djuga mewahjui kita, kaum nasional Indonesia, -bahwa nasionalisme ke-Timur-an ini adalah sangat berlainan dan menolak pada nasionalisme ke-Barat-an, jang menurut Bepin Chandra Pal ialah nasionalisme jang "dunia-wi", nasionalisme jang "kerah (Jv) satu sama lain".

... maka nasionalisme kita, kaum nasional Indonesia, bukanlah nasionalisme yang demikian itu. "ia bukanlah nasionalisme jang timbul dari kesombongan bangsa belaka; ia adalah nasionalisme jang lebar, -nasionalisme jang timbul dari pada pengetahuan atas susunan dunia dan riwayat; ia bukanlah "jingo-nationalism" atau chauvinisme, dan bukanlah suatu copie atau tiruan dari pada nasionalisme Barat. Nasionalisme kita ialah suatu nasionalisme, jang menerima rasa-hidupnja sebagai suatu wahju, dan mendjalankan rasa-hidupnja itu sebagai suatu bakti. Nasionalisme kita adalah nasionalisme, jang didalam kelebaran dan keluasannja memberi tempat tjinta pada lain-lain bangsa, sebagai lebar dan luasnja udara, jang memberi tempat pada segenap sesuatu jang perlu untuk hidupnja segala hal dan jang hidup. Nasionalisme kita ialah nasionalisme ke-Timur-an, dan sekali-kali

bukanlah nasionalisme ke-Barat-an, yang menurut perkataannya C. R. Das adalah "suatu nasionalisme yang menjerang-njerang, suatu nasionalisme yang mengedjar keperluan sendiri, suatu nasionalisme perdagangan yang untung atau rugi" Nasionalisme kita adalah nasionalisme yang membuat kita menjadi "perkakasnya Tuhan", dan membuat kita menjadi "hidup dalam Roch" sebagai yang saban-saban dohotbalkan oleh Bipin Chandra Pal, pemimpin India yang besar itu. Dengan nasionalisme yang demikian ini maka kita insjaf dengan seinsjaf-insjafnja, bahwa negeri kita dan rakyat kita adalah sebagian dari pada negeri Asia dan rakyat Asia, dan adalah sebagian dari pada dunia dan penduduk dunia adanya.... Kita, kaum pergerakan nasional Indonesia, kita bukan-nja sahaja merasa menjadi abdi atau hamba dari pada tanah tumpah darah kita, akan tetapi kita juga merasa menjadi abdi dan hamba Asia dan hamba semua kaum yang sengsara, abdi dan hamba dunia" ...³⁶⁰

Penegasan nasionalisme yang dimaksud oleh Sukarno adalah nasionalisme ke-Timur-an dan bukan nasionalisme ke-Barat-an, serta bukan sebagai bentuk jingo nasionalisme atau Chauvinisme. Nasionalisme ke-Timur-an, dimaknai Sukarno sebagai sebuah bentuk yang tidak saling bermusuhan satu dengan lainnya, bukan sebagai bentuk kesombongan sebuah bangsa belaka, melainkan nasionalisme yang mencirikan sebuah kecintaan terhadap bangsa-bangsa yang lain, yang sama-sama menginginkan untuk hidup bersama. Nasionalisme menurut Sukarno bukanlah nasionalisme yang berkaitan dengan kebendaan sebagaimana dimaksudkan Salim. Lebih lanjut Sukarno menegaskan, bahwa nasionalisme yang dimaksud adalah nasionalisme yang menjadikan kita (rakyat bumiputera) sebagai perkakasnya

Tuhan, yang melingkupi segenap alam. Nasionalisme Indonesia adalah sebuah bentuk penghambaan dan sebagai abdi yang tidak hanya bagi tumpah darah kita, melainkan menghamba dan sebagai abdi Asia, semua kaum yang sengsara, serta abdi dan hamba dunia.

Serasa belum lengkap menjelaskan tentang hakikat nasionalisme Indonesia, Sukarno kembali menegaskan dan berbalik mempertanyakan (kepada Salim), bahwa apakah model atau bentuk nasionalisme Indonesia masih tidaklah luhur?, dalam tulisannya Sukarno kembali menjelaskan:

Sekali lagi: nasionalisme kita, kaum nasional Indonesia, tidaklah berlainan dari pada nasionalisme pendekar Islam Mustafa Kamil, yang mengatakan bahwa "tjinta pada tanah air adalah perasaan yang terindah yang bisa memuliakan njawa", -ia tidaklah berlainan dari pada nasional- menyebutkan dirinya "hamba dari pada tanah-airnja"; -ia tidaklah bersumpah "dengan Mesir kesorga, dengan Mesir keneraka"; -ia tidaklah berlainan dengan nasionalismenja Mahatma Gandhi, yang mengadjarkan bahwa nasionalismenja ialah sama dengan "rasa-kemanusiaan", sama dengan "menseljkheid" Ia, nasionalisme kita, yang oleh biru-birunya gunung, oleh indah-indahnja sungai, oleh molek-moleknja ladang, oleh segarnja air yang sehari-hari kita minum, oleh njamannja nasi yang sehari-hari kita makan, mendjundjung, mendjundjung tanah-air Indonesia dimana kita lahir dan dimana kita akan mati itu mendjadi Ibu kita yang harus kita abdi dan harus kita hambai, -nasionalisme kita itu tidaklah berlainan dengan nasionalisme yang berseri-seri didalam semangatnja lagu njanjian *Bande Mataram* yang menggetarkan udara pergerakan nasional India, yakni njanjian yang djuga memudji-mudji negeri India oleh karena "sungai-sungainja yang berkilau-kilauan", djuga mendjatuhkan air mata patriot India oleh pudjiannja atas

segarnya “anginnya jang meniup dari puntjaknja bukit-bukit Vindhya”, djuga menguatkan bakti kepada *Ibu dan Ibu Tanah-Air* adanja.

Atau haruslah nasionalismenja Mustafa Kamil, nasionalismenja Amanullah Khan, nasionalismenja Dr. Sun Yat Sen, nasionalismenja Aurobindo Ghose, -haruskah nasionalismenja pendekar-pendekar jang didalam pemandangan kita ada maha-besar dan maha-luhur itu, kita sebutkan agama jang menghambakan manusia kepada berhala “tanah air” itu? Haruskah nasionalisme jang berseri-serian didalam kalbu pahlawan-pahlawan dan panglima-panglima kemanusiaan itu kita sebutkan pembudakan kepada “benda”? haruskah nasionalisme ke-Timur-an dari pada pendekar-pendekar ini, jang berganda-ganda kali lebih tingginja dari pada imperialistich nationalism ke-Barat-an jang “berkah” satu sama lain, -haruskah nasionalisme jang demikian itu kita sebutkan berdasar “keduniaan” belaka?...³⁶¹

Sukarno menegaskan kembali bahwa nasionalisme Indonesia adalah sebagaimana yang dilakukan oleh pemimpin Islam di Turki yaitu Mustafa Kamil yang menyebutkan bahwa “tjinta pada tanah air adalah perasaan jang terindah jang bisa memuliakan njawa”. Pemimpin Islam ini tidak menjadikan cinta tanah air tersebut membawanya ke Surga atau Neraka. Artinya, bahwa nasionalisme yang dimaksudkan -sebagaimana yang ingin disampaikan oleh Sukarno- adalah murni sebagai semangat untuk bersatu, untuk membangun dan mengangkat harkat dan martabat bangsa agar saling menghargai dalam konteks keduniawian semata. Nasionalisme bukanlah sebuah upaya agar bangsa dapat mencapai Surga atau neraka.

Nasionalisme tersebut sama juga dengan nasionalisme yang dimaknai oleh Mahatma Gandhi, yaitu sebuah rasa kemanusiaan. Nasionalisme muncul dari sebuah rasa penghormatan serta kesetiaan dari semua hal yang telah didapat oleh sebuah bangsa dalam kehidupan sehari-hari dari tanah pertiwi yang telah dipijaknya. Dari tanah air itulah, sebuah kehidupan dapat berlangsung, sehingga senantiasa menghormati serta mencintai serta membela tanah air, sebagaimana seorang Ibu dan Ibu Tanah air, yang telah merawat serta menghidupi anak-anaknya.

Sukarno menanyakan apakah nasionalisme Mustafa Kamil, Amanullah Khan, Dr. Sun Yat Sen, serta nasionalis-menja Aurobindo Ghose, adalah nasionalisme yang hanya bersifat kebendaan? Dari pertanyaan yang diajukan Sukarno tersebut, pada prinsipnya, Sukarno ingin menegaskan, bahwa nasionalisme Indonesia yang tidak ada bedanya dengan nasionalisme ke-Timur-an tidak hanya bersifat kebendaan, melainkan, kebaikan serta kemuliaan yang muncul dari sebuah bangsa dalam perilaku kehidupan sehari-hari. Melalui nilai-nilai kemanusiaan yang ada, sebuah bangsa akan mendapatkan "berkah" untuk kebaikan dunia dan akhirat.

Menurut penulis, perdebatan yang dilakukan oleh Salim dengan Sukarno tidak pada konteks yang sama tentang hakikat atau makna nasionalisme Indonesia. Salim lebih menitikberatkan kepada dasar atau semangat cinta tanah air yang akan dibangun oleh bangsa Indonesia. Dasar cinta tanah air menurut Salim tentunya harus dikembalikan kepada yang menciptakan tanah air itu sendiri, sehingga

cinta tanah air tidak dijadikan sebagai dasar atau landasan dalam membangun nasionalisme bangsa Indonesia. Yang perlu menjadi dasar cinta tanah air dalam mewujudkan nasionalisme adalah kecintaan kita kepada Tuhan sang pencipta, karena hanya karena-Nya, sebuah bangsa dan dunia ada.

Bagi Salim, ketika Sukarno mendasarkan nasionalisme bangsa Indonesia sebagaimana para pendekar nasionalisme dunia, baik Timur atau Barat, tentunya nasionalisme yang muncul belum mengayomi semua bangsa yang ada di dunia. Semangat nasionalisme yang demikian, telah diuraikan dalam proses sejarah, bahwa sebuah bangsa yang memiliki rasa nasionalisme tinggi yang berdasar pada kebendaan semata, akan berupaya memaksa bangsa lain yang dianggapnya belum se-"baik" bangsanya sendiri. Hakekat demikian, yang selalu dikhawatirkan Salim, sebagaimana makna serta hakikat nasionalisme yang dimaksudkan oleh Sukarno tersebut.

Sebagaimana dengan asas yang diyakini Salim dalam PSI, bahwa tidak ada pemisahan antara politik, ekonomi, sosial, dan lain-lain, dengan agama. Semuanya berkelindan di dalamnya. Pendek kata, Salim dalam menjelaskan makna serta dasar cinta tanah air untuk mewujudkan nasionalisme Indonesia, selayaknya tidak dipisahkan dengan agama (sang pencipta). Nasionalisme tidak hanya mampu meraih semangat keduniawian belaka, melainkan membawa kepada kebaikan di akhirat, yang tidak mengurangi nilai-nilai ke-Tuhan-an. Nilai-nilai ke-Tuhan-an itulah yang

mendasari kecintaan kita kepada tanah air untuk mewujudkan nasionalisme.

Berbeda dengan Sukarno, nasionalisme yang dimaksud adalah sebuah nilai-nilai kemanusiaan yang didalamnya terkandung rasa hormat, rasa menghargai dari berbagai aspek yang telah diberikan oleh alam (tanah air), di atas hamparan bumi yang kita pijak. Sukarno dari awal telah membedakan secara tegas, bahwa cinta tanah air adalah sebuah keutamaan dalam membangun rasa nasionalisme. Artinya, nasionalisme yang terkait dengan makna kemanusiaan, hanya berkaitan dengan sifat keduniawian, rasa sosial, kebersamaan bagi setiap manusia dengan manusia yang lain sebagai makhluk sosial. Nasionalisme tidak terkait dengan apakah membawa kita (bangsa) menuju surga atau neraka (pengertian agama). Nasionalisme mengajarkan kepada nilai-nilai kesadaran manusia tentang hakikat persatuan sebuah bangsa, sedangkan persatuan sebuah bangsa tersebut apabila didasari oleh sifat-sifat kemanusiaan, tentunya akan membuahkan rasa kemanusiaan di antara sesama bangsa. Kebaikan yang muncul dari sikap kemanusiaan yang terakumulasi dari masing-masing individu, bangsa dan terakumulasi lebih besar yaitu dunia, tentu akan membawa kebaikan, dan melalui kebaikan itulah, diharapkan mendapat "berkah" dari Tuhan bagi sekalian manusia di dunia persada.

Pendek kata, bahwa Sukarno dalam perdebatan tersebut, tentunya tidak mencampuradukkan makna nasionalisme yang hanya berkaitan dengan persatuan manusia

dengan manusia lainnya, bangsa satu dengan bangsa lainnya dalam mempertahankan tanah air. Nasionalisme tidak terkait secara langsung dengan nilai-nilai agama (akhirat atau sorga dan neraka). Dengan demikian, nasionalisme hanyalah sebuah upaya untuk mempersatukan manusia dengan manusia yang lain, bangsa satu dengan bangsa lainnya dalam konteks satu tanah air di dunia.

Sebagai upaya untuk mengakhiri perdebatan dengan Salim, yang pada dasarnya memiliki pandangan berbeda (bukan bercerai-berai), Sukarno akhirnya mempertegas makna keduniawian itu sebagai dasar nasionalisme Indonesia. Demikian Sukarno menjelaskan:

Amboi, djikalau memang harus disebutkan begitu, -djikalau itu jang disebutkan menjembah berhala, djikalau itu jang disebutkan membudak kepada benda, djikalau itu jang disebut mendasarkan diri atas keduniaan, -maka kita, kaum nasional Indonesia, dengan segala kesenangan hati bernama penjembah berhala, dengan segala kesenangan hati bernama pembudak benda, dengan segala kesenangan hati bernama mendasarkan diri atas keduniaan itu!

Sebab kita yakin, bahwa nasionalisme pendekar-pendekar itu, jang pada hakekatnja tidak beda asal dan tidak beda sifat dengan nasionalisme kita, adalah nasionalisme jang luhur!...³⁶²

Perdebatan yang dilakukan oleh Sukarno dengan Salim, ternyata cukup melelahkan dari kedua belah pihak, baik secara personal, maupun kelembagaan yang secara ideologis masing-masing mewakili nasionalis Islam (Agus Salim) dan nasionalis sekuler (Sukarno). Dari segi kelembagaan, PSI semakin tersingkir dari federasi tersebut, akhirnya, secara

perlahan mulai mengurangi intensitasnya di dalam PPPKI. PSI juga terhitung tidak mengikuti rapat-rapat yang dilakukan oleh PPPKI, sehingga permasalahan di antara kedua belah pihak dibiarkan tanpa ada penyelesaian. Sampai menjelang tanggal 28 Desember tahun 1930, PSI memutuskan keluar dari federasi PPPKI. PSI menilai persatuan dalam PPPKI lebih merupakan impian daripada kenyataan, sehubungan dengan perbedaan-perbedaan dasar di dalamnya antara partai-partai anggota dalam PPPKI.³⁶³ Sikap ini diputuskan dalam rapat Lajnah Tanfidziyah tahun tersebut yang juga menyepakati untuk mengubah namanya menjadi PSII.

Keluarnya PSII dari federasi ini, tentu sangat menyulitkan PPPKI, karena PSI merupakan organ pelopor progresif dalam federasi tersebut. Selain itu, Soekarno³⁶⁴ sebagai motor penggerak dari kelompok nasionalis sekuler, pada 24 Desember 1929, bersama kawan PNI lainnya yaitu: Maskun, Gatot Mangkupraja, dan Supriadinata, ditangkap oleh Pemerintah Hindia Belanda. Tuduhan atas penangkapan itu terkait menyebarnya isu pemberontakan yang akan dilakukan oleh PNI pada akhir 1930.³⁶⁵

Setelah penangkapan Sukarno dan kawan-kawan, kondisi PNI mengalami kemunduran. Kegarangan PNI semakin menurun dan semakin mengalami kelemahan di tingkat internal. Perselisihan demi perselisihan di antara anggotanya semakin tidak dapat dibendung, sehingga tepat pada 1931, PNI bubar.³⁶⁶ Sampai dengan masa pembebasan Sukarno pada 1933, Sukarno mencoba menghidupkan kembali federasi partai politik dan mengubah namanya menjadi

Permufakatan Politik Pengejar Kemerdekaan Indonesia (PPPKI). Federasi ini, pada dasarnya sama dengan PPPKI yang lama, hanya namanya yang sedikit diubah.

Upaya yang dilakukan Sukarno, tidak membuahkan hasil, karena PSII yang sebelumnya menggawangi lahirnya PPPKI memutuskan tidak bergabung dalam federasi tersebut. Upaya-upaya yang dilakukan Sukarno, tetap menjadi perdebatan serta menjadi masalah yang tidak dapat diselesaikan hingga tertangkapnya Sukarno untuk kedua kalinya pada 1 Agustus 1933. Penangkapan kedua ini, akhirnya memutuskan Sukarno dari pergerakan nasional secara nyata, karena Pemerintah Hindia Belanda memberlakukan hukuman buang terhadap Sukarno, tepatnya di pulau Ende Flores Nusa Tenggara Timur.

2. Perjuangan di dalam Majelis Islam A'la Indonesia (MIAI)

Setelah keluar dari PPPKI tahun 1930, Struktur kelembagaan PSII semakin mantap. Persinggungan partai politik antara pihak nasionalis Islam dengan nasionalis sekuler, ternyata benar-benar menjadi pelecut PSII sebagai salah satu organ Islam yang besar saat itu. Kendati PSII sebagai organ Islam yang besar, PSII tidak dapat dianggap sebagai satu-satunya organ yang paling besar yang mewakili perjuangan umat Islam. Tahun-tahun ini telah bermunculan partai politik Islam lain seperti PII, Penyadar PSII, dan lain-lain. Masing-masing partai tersebut, didirikan oleh para mantan anggota PSII.

PSII yang sejak semula telah menginginkan adanya persatuan di kalangan seluruh umat Islam, akan tetapi mengalami berbagai ganjalan sehingga mengakibatkan perpecahan di kalangan organ-organ Islam itu sendiri. Saat ini, kondisi yang diinginkan oleh PSII sebagaimana yang dulu pernah di gagasnya, agar tercipta sebuah persatuan di kalangan umat Islam kembali tampak. Berbagai organ Islam yang dulunya telah bercerai berai dan bergerak sendiri-sendiri dalam kerangka pemahaman agama Islam-nya masing-masing, kini mulai terlihat keseriusannya secara pasti. Kondisi demikian dapat dilihat pada beberapa organ Islam seperti Muhammadiyah, NU, PII serta berbagai organ Islam lainnya mulai saling mendukung persatuan di kalangan umat Islam. Fenomena yang demikian, tentunya tidak lain sebagai bukti bahwa persatuan di kalangan umat Islam benar-benar diperlukan. Pertentangan di antara umat Islam, justru menjadikan umat Islam (perjuangan Islam) tidak dapat terlaksana secara maksimal. Keinginan untuk bersatu kembali di antara organ Islam pada dasarnya akibat semakin kuatnya persatuan di kalangan nasionalis seku-ler. Perlawanan terhadap kekuatan luar inilah, akhirnya menyempitkan jurang perbedaan antara kaum reformis dan ortodok dan secara bersama-sama mampu mensponsori suatu federasi Islam yang besar dan kuat.³⁶⁷

Keinginan bersatu di kalangan organ Islam ini akhirnya benar-benar terwujud dan persatuan tersebut diprakarsai oleh para tokoh nasionalis Islam seperti Kyai Haji Mas Mansur (dari Muhammadiyah), Kyai Haji Wahab

Hasbullah dan Kyai Haji Muhammad Dahlan (dari NU, atas nama pribadi dan secara kelembagaan NU bergabung dengan MIAI pada 1939), serta Wondoamiseno (dari PSII). Masing-masing sebagai perwakilan penggagas terbentuknya sebuah persatuan umat Islam yang besar. Pertemuan para tokoh Islam di Surabaya pada 18 - 23 September 1937, akhirnya bersepakat membentuk federasi umat Islam dengan nama Majelis Islam A'laa Indonesia (MIAI).³⁶⁸

Penyertaan nama Indonesia dalam MIAI memiliki dasar atau alasan identitas negara. Alasan yang saat itu dikemukakan adalah, bahwa di berbagai negara telah banyak bermunculan tentang federasi umat Islam dan dalam lembaga tersebut disertakan pula identitas negaranya, sehingga memudahkan untuk membangun komunikasi lebih lanjut dengan organisasi-organisasi Islam di dunia. Seperti halnya Majelis Islam A'la Toerkijjah (Turki), Irakijjah (Iraq), Hindijjah (India).

Maksud dan tujuan MIAI dapat diringkas menjadi dua yaitu: *Lit-tasjawwoer*, dan *Litta'arroef*. Yang dimaksud dengan *Lit-tasjawwoer* adalah: untuk bermusyawarah untuk membicarakan berbagai hal yang berkaitan dengan perjuangan Islam. Selanjutnya yang dimaksud dengan *Litta'arroef* adalah: untuk saling memberitahu, berkenalan, beramah-ramahan, yang akhirnya membuahkan persatuan lahir dan batin, sebagaimana yang telah diserukan oleh Allah, "hendaknyalah kamu berpegang tali agama Tuhan, jangan bercerai berai."³⁶⁹

Setelah disepakatinya pembentukan federasi umat Islam tersebut, federasi ini secepatnya melakukan kongresnya yang pertama di Surabaya, pada 26 Februari - 1 Maret 1938 dengan nama kongres al-Islam. Pada kongres MIAI yang pertama ini, berbagai organ Islam berbondong-bondong mengikuti kegiatan tersebut.

Bagi para kader PSII, kongres ini dimaknai sebagai lanjutan dari kongres al-Islam yang dulu pernah digagas oleh para pendahulunya tahun 1920-an. Sebagaimana yang disampaikan oleh Abikoesno, bahwa kongres al-Islam ini merupakan sebuah lanjutan dari kongres al-Islam yang dulu pernah digagas oleh pendahulu PSII.³⁷⁰

Melihat gelagat demikian, para perwakilan dari NU (secara pribadi) merasa keberatan terhadap persepsi atau gagasan yang demikian, karena hal itu sedapat mungkin akan mengaburkan cita-cita besar yang ingin dicapainya dalam MIAI sebagai sebuah federasi umat Islam yang baru. NU pada prinsipnya tidak menolak keberadaan al-Islam dahulu, akan tetapi, bukan berarti kongres al-Islam yang digagas federasi MIAI ini sama dengan kongres al-Islam yang dulu. NU menginginkan bahwa MIAI adalah sebuah federasi umat Islam yang benar-benar baru. Sebuah federasi yang baru patut kiranya dibuka dengan sebuah kesepakatan yang baru pula dan seyogianya tidak meremehkan keberadaan MIAI itu sendiri.³⁷¹ Perdebatan dalam kongres semakin memanas, akhirnya NU secara sepihak menuduh bahwa kongres al-Islam yang dahulu pernah berlangsung "tidak berguna" atau "tidak berguna bagi kaum muslimin".³⁷²

Sebagaimana kesepakatan di awal pembentukan federasi ini, bahwa perdebatan di antara sesama organ Islam, selayaknya direorientasi dan lebih mementingkan upaya untuk menangkal berbagai persoalan yang muncul dari luar. Melalui semangat itulah, Wondoamiseno sebagai salah satu penggagas MIAI, dengan besar hati tidak mengambil tindakan kepada NU yang saat itu secara kelembagaan belum resmi masuk dalam keanggotaan MIAI.

Sebagaimana dengan gabungan organ Islam yang dulu pernah digagas, dalam kongres yang pertama, federasi ini membahas tentang hal-hal yang berkaitan dengan prinsip-prinsip agama Islam. Seperti halnya tentang pemurnian nama baik Nabi Muhammad saw, yang saat itu telah muncul penistaan terhadap pimpinan besar umat Islam. Penistaan tersebut termuat dalam majalah *Bangun*, yang dikeluarkan oleh Parindra (Partai Indonesia Raya), terkait dengan pembelaannya terhadap rencana undang-undang perkawinan yang telah diajukan oleh Pemerintah Hindia Belanda. Artikel tersebut ditulis oleh Siti Sumandari yang menilai bahwa Nabi Muhammad saw, sebagai seorang yang “cemburu” dan mengemukakan bahwa banyak bagian peraturan perkawinan Islam dimaksudkan mulanya untuk membenarkan “nafsu” Nabi. Penulis pada dasarnya ingin menilai bahwa persoalan poligami selayaknya harus ditinggalkan.³⁷³

Menilai dari tulisan Siti Sumandari tersebut, kalangan Islam yang tergabung dalam MIAI, mengajukan tuntutan atas keberatannya terhadap penilaian sepihak yang juga

dianggap oleh umat Islam adalah menghina terhadap Nabi Muhammad saw. Federasi ini akhirnya menuntut agar pemerintah mengambil tindakan terhadap penulis atau siapa pun yang melakukannya. Selain penyikapan terhadap masalah tersebut, federasi ini melakukan penolakan terhadap pemindahan perkara hak waris dari pengadilan agama kepada pengadilan negeri biasa (*landraad*), persoalan tentang penyatuan dalam menentukan permulaan bulan puasa, biaya pemotongan Qurban, serta peningkatan pengetahuan agama Islam, juga menjadi pembahasan dalam kongres tersebut.

Kongres kedua diadakan pada 2-7 Mei 1939 di Solo. Dalam kongres ini, orang Islam saling berdatangan hingga mencapai 200 orang. Selain dari para anggota yang lama, saat itu terdapat 10 anggota baru dalam federasi ini. Masing-masing perwakilan yang hadir saat itu adalah: H.B. Al Ittihadoel Islamijah, Soekaboemi (Kyai H. Mhd. Basyoeni), H.B. Al Islam, Solo (R. H. Bilal dan R.H. Moefti), L.T P.S.I.I (abikoesno Tjokrosoejoso), H.B. Persatoean Islam, Bandung (A. Hassan dan M. Natsir), H.B. Persjarekatan Oelama, Madjalengka (Kyai H. Abdoel Halim), H.B. Moehammadijah (H.M. Farid Ma'roef dan H.A. Hamid), H.B. *Party arab Indonesia* (Ar. Baswedan dan Ali Gathmie), H.B. Partij Islam Indonesia (Kyai H. Hadikoesoemo, Wali al-Fatah dan Mr. A. Kasmat), H.B. Jong Islamieten Bond, Semarang (Choesnan dan Kridoharsojo), dan H.B. Nahdlatoel Oelama (Kyai H. Machmoed Siddiq dan Kyai H. Nahrawi).³⁷⁴ Sedangkan bagi perhimpunan yang mengirimkan wakil,

akan tetapi belum menjadi anggota MIAI adalah 10 buah.³⁷⁵

Untuk permulaan bagi perkumpulan umat Islam dalam MIAI, terjadi sebuah hal yang menarik di antara berbagai organ Islam tersebut. Pihak-pihak yang sedang bertikai seperti Persatuan Islam Bandung dengan Nahdlatul Ulama Surabaya; al-Irsjad dengan Ar-Rabithatoel Alawijah (masing-masing dari perkumpulan Islam Arab); PII dengan PSII; semuanya kembali merajut persaudaraan yang saat itu di-semai dalam forum MIAI. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Abikoeno demikian:

Moelanja saja menjangka berdirinja M.I.A.I. seolah-olah hanya melahirkan baji jg akan mati lagi, *dood geboren kond*. Tetapi pengiraan itoe telah saja ambil kembali, dan memoedji agar dapat langsoeng. Jg. perloe kita peringati perkataan Senopati P.S.I.I. (Tjokroaminoto, *pen*)³⁷⁶ itoe, ialah: **waktoe sekarang, kita haroes awas-awas, sebab kini zaman peperangan. Boekannja peperangan sendjata sama sendjata, tetapi peperangan moereel dgn moereel, geest dgn geest.**³⁷⁷

Dalam kongres ini sedikit banyak masih mengulangi tentang perbincangan pada kongres yang pertama, terutama pada persoalan aturan nikah di dalam Islam, untuk mengapuskan sistem selir. Yang lebih penting dihasilkan dalam kongres ini adalah MIAI mengajukan tuntutan untuk mencabut atau menghapuskan artikel 178 I.S, yang berkaitan dengan pola hidup antara laki-laki dengan perempuan, dan mengupayakan agar pemerintah membatalkan pencabutan terhadap artikel 177, terkait dengan sistem pernikahan di Indonesia. Tuntutan tersebut didasarkan ke-

pada bahwa Indonesia adalah negara yang berasaskan Islam.³⁷⁸

Pada 7-8 juli tahun 1941, federasi umat Islam ini kembali melakukan kongresnya yang ketiga di Solo. Akan tetapi, sebelum kongres ini berlangsung, pada 1940, terjadi sebuah pertentangan di antara para anggotanya terkait dengan keberadaan Ahmadiyah dalam sistem keanggotaan MIAI. NU secara tegas menolak keberadaan Ahmadiyah dalam keanggotaannya di MIAI. Penolakan NU ini, tentunya sangat bertentangan dengan PSII, di mana PSII lebih bersikap netral dalam menilai Ahmadiyah dalam keanggotaannya di MIAI. Perdebatan ini akhirnya diselesaikan dalam sebuah pleno dalam kongres ketiga ini dan berakhir dengan sebuah keputusan bahwa MIAI menolak keanggotaan Ahmadiyah.

Keanggotaan dalam federasi MIAI, telah mengalami peningkatan yang luar biasa dari tahun sejak federasi ini muncul. Tahun 1937, jumlah keanggotaan dalam federasi MIAI tercatat sebanyak tujuh lembaga. Beberapa nama lembaga yang tergabung dalam MIAI tersebut adalah: PSI, Muhammadiyah, al-Islam (Solo), Persyarikatan Ulama' (Majalengka), al-Irsyad (Surabaya), Hidayatul Islamiyah (Banyuwangi), dan al-Khoiriyah (Surabaya).

Jumlah keanggotaan ini semakin menunjukkan peningkatan luar biasa. Sampai tahun 1941, keanggotaan MIAI berjumlah 21 lembaga yang masing-masing terbagi dalam dua jenis kelembagaan yaitu anggota biasa dan anggota luar biasa. Jumlah anggota biasa sebanyak 15 lembaga yaitu:

PSI, Muhammadiyah, Persatuan Islam, Persyarikatan Ulama', al-Irsyad, Jong Islamiten Bond, al-Islam (Solo), al-Ittiha-dul Islamiyah (Sukabumi), PII, Partai Arab Indonesia, Per-satuan Ulama Seluruh Aceh (Sigli), Musyawarat al-Toli-bin (Kandangan Kalimantan), NU, al-Jamiatul Washliyah (Medan), dan Nurul Islam (Tanjung Pandan, Bangka Bil-liton).

Anggota luar biasa sebanyak 7 lembaga yaitu: al-Hida-yatul Islamiyah (Banyuwangi), Majlis Ulama Indonesia (Toli-Toli Sulawesi Tengah), Persatuan Muslimin Minahasa (Ma-nado), al-Khoiriyah (Surabaya), Persatuan Putera Borneo (Surabaya), Persatuan India Putera Indonesia dan Persa-tuan Pelajar Indonesia-Malaya (di Mesir).³⁷⁹

Pada proses selanjutnya, sebuah statuta telah ter-bentuk dan akhirnya disepakati bersama pada 14-15 Sep-tember 1940, yang menekankan tentang perlunya persatu-an kegiatan kaum muslimin di tanah air serta pada umum-nya kaum muslimin di dunia. Proses selanjutnya, akan diusa-hakan untuk “mengadakan perdamaian apabila timbul pertikaian di antara golongan umat Islam Indonesia, baik yang telah bergabung di dalam MIAI, maupun yang belum bergabung dalam kelembagaan federasi tersebut”.

Upaya pembentukan statuta adalah untuk mengatur jalannya kelembagaan MIAI sebagai federasi umat Islam di Indonesia. Statuta tersebut sebagai pijakan aturan kelem-bagaan untuk mengantisipasi adanya pemaksaan antara satu golongan dengan golongan lain dalam federasi MIAI, sehingga federasi MIAI sebagai induk gabungan organisasi

umat Islam memiliki daya tawar serta kedudukan yang tinggi untuk menentukan keputusan dari berbagai persoalan yang muncul, baik di internal MIAI, maupun untuk umat Islam secara keseluruhan.

Upaya mempertegas kesepakatan yang tertuang dalam statuta, dibentuklah kepanitiaan yang bertugas untuk menjelaskan cita-cita persatuan yang berdasarkan al-Qur'an pada 1942. Beberapa nama yang masuk dalam kepanitiaan ini adalah Wondoamiseno dan Abikusno (dari PSII), Mas Mansur dan Ki Bagus Hadikusumo (dari Muhammadiyah), dan Sukiman (dari PII).³⁸⁰

MIAI adalah lembaga gabungan umat Islam yang bergerak di bidang agama Islam, akan tetapi, federasi ini akhirnya melebarkan sayapnya dalam bidang politik. Keterlibatan federasi dalam politik, terlihat ketika memberikan dukungan terhadap GAPI yang dipelopori oleh PSII, menjelang keruntuhan Belanda di Indonesia.

3. Berjuang Dalam Gabungan Politik Indonesia (GAPI)

Sebagai federasi umat Islam, MIAI tentunya lebih memberikan ruang yang lebih besar terhadap pengkajian Islam di Indonesia, akan tetapi federasi ini juga turut berpartisipasi dalam perpolitikan di Indonesia. Partisipasi politik baru diarahkan oleh beberapa partai politik Islam yaitu PSII, yang telah lama berproses dalam perpolitikan Indonesia.

Sejalan dengan proses pembentukan MIAI, PSII sebagai penyokong federasi, selalu memantau situasi politik

Indonesia. Sebuah cita-cita yang selama ini diangankan oleh PSII sebagai salah satu partai besar di Indonesia adalah menghantarkan Indonesia ke gerbang kemerdekaan. Cita-cita tersebut, tidak hanya dimiliki oleh PSII, sebagai salah satu partai Islam di Indonesia, melainkan berbagai partai politik lain, termasuk nasionalis sekuler.

Kesamaan keinginan untuk mewujudkan Indonesia merdeka ternyata semakin memperkuat masing-masing organ di Indonesia untuk kembali membentuk wadah yang mampu mengikat semangat serta menyatukan tekad dalam merealisasikan cita-cita kemerdekaan Indonesia tersebut. Tekat demikian telah direalisasikan oleh PSII, akan tetapi selalu gagal dan bubar.

Mengaca dari kegagalan PPPKI, PSII kembali bergabung dengan partai politik lain untuk membentuk *Nationale-Concentratie*. Lembaga ini diikuti oleh beberapa partai politik seperti: PII, PSII, Pasoendan, Party Sarekat Minahasa, Gerindo, Parindra, dan Perkoempoelan Katholiek Kristen Indonesia (PKKI). Lembaga ini berpusat di Betawi, dan beberapa nama yang masuk dalam struktur lembaga ini adalah: *Secretaris*: Abikoesno Tjokrosoejoso (PSII); *Peningmeester*: M.H. Tamrin (Parindra³⁸¹); *Commissaris*: Mr. Amir Sjarifoeddin (Gerindo). Lembaga ini terbentuk sebagai upaya untuk menyatukan kekuatan di antara partai politik dalam rangka pembentukan sebuah Dewan Rakyat bumiputera. Dari rapat yang telah dilakukan, akhirnya disepakati sebuah lembaga yang bernama Gabungan Politik Indonesia (GAPI) dan resmi berdiri pada 21 Mei

1939.³⁸² Dasar kelembagaan GAPI dalam Anggaran Dasar adalah:

G.P.I berdasar kepada: a. Hak oentoek menientoekan diri sendiri. B. Persatoean nasional dari seloeroeh bangsa Indonesia, dengan berdasar kera'jatan dalam faham politik, ekonomi, dan sosial. c. Persatoean aksi seloeroeh pergerakan Indonesia.³⁸³

Melihat dasar yang dibangun dalam GAPI ini, tentunya tidak membicarakan sama sekali tentang asas, tujuan dan perjuangan yang dianut oleh masing-masing anggota dalam federasi ini. Federasi ini murni sebagai upaya bersatu dalam menghadapi berbagai hal atau kemungkinan yang datang dari luar, termasuk penjajahan Belanda.

Tujuan yang ingin dicapai dalam GAPI adalah Indonesia berparlemen. Gagasan GAPI yang demikian, terurai dari sekian lama perjalanan panjang pergerakan nasional Indonesia yang terus mengalami kemunduran, dan bukan kemajuan. Demikian Abikoeso menjelaskan:

Kesjoekoeran haroes kita lahirkan, bahwa dalam keadaan jang soenggoeh berat dan moedharat itoe, rakjat Indonesia menoendjoekkan masih mempoenjai roch jang hidoep jang dapat dinjatakan dari besar dan koeatnja kemaoean oentoek menghimpoen, oentoek memboelatkan tenaga dan fikiran jang ada dalam segenap lapisannja oentoek bersama-sama memboeka djalan kearah perbaikan dan kemadjoean. Tanda jang beroepa menjanggoepi hari kemoe-dian jang baik!

Oleh karena itoe tidaklah keliroe roepanja, djika kita njatakan: "oemoem dan ramainja aksi INDONESIA BER-

PARLEMEN menoenjoekkan koeatnja kemaoean dan kehendak seloeroeh Ra'jat Indonesia oentoek mentjapai perbaikan dalam hidoep dan penghidoepan nja, dan kemoedian kemoeliaan bagi noesa dan bangsa!³⁸⁴

Berdirinya GAP1 disambut baik oleh banyak masyarakat Indonesia, di antaranya juga dari orang-orang Islam. Pada mulanya, upaya pembentukan *Nationale-Concentratie* yang dikomando oleh M.H. Tamrin, sedikit menciutkan hati bagi umat Islam yang saat itu tergabung dalam MIAI, akan tetapi, ketika melihat perkembangan yang lebih membaik, yaitu partai politik yang aktif dalam menggalang persatuan adalah dari kelompok Islam, akhirnya perasaan ciut hati tersebut kembali mereda. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Wondamiseso dalam kongres al-Islam di Solo.

"Concentratie kita boekan seperti concentratie kaoem nasional, sebab concentratie kita dgn ikatan lahir dan bathin, doenia achirat, ikatan satoe toehan, satoe Nabi dan satoe agama. Buat menghadapi kegentingan international kita oemat Islam ta' perloe roboet-riboet hendak mengambil sikap, sebab sikap kita tidak ada. Kita koeatir moelanja kalau MIAI sebagai badan gaboengan perkoempoelan Islam Indonesia akan menjaingi concentratie nasional itoe dengan concentratie jg lain dengan nama Islam. Tetapi kekoeatiran kita itoe mendjadi hilang sendirinja karena tenjata MIAI tidak mengambil tindakan kesana dengan pengemoemannya tidak mentjampoeri politik. kemoedian kita sangsi lagi apa boleh djadi party-party politik Islam jg bergaboeng dalam MIAI akan memboikot atau sekoerangnja tidak soeka memasoeki

badan gaboengan politik nasional itoe. Tetapi kesangsian kita itoe hilang kembali sesoedah kita melihat bahwa jang moela pertama memadjoekan namanja memasoeki badan gaboengan politik Indonesia itoe adalah party-party politik Islam (Party Islam Indonesia dan PSII).³⁸⁵

Melihat dari pandangan Wondoamiseno di atas, tentunya umat Islam telah mengalami kegamangan dalam membangun federasi di antara berbagai organ yang tidak dalam satu agama.³⁸⁶ Kendati berbagai upaya untuk membangun federasi berbagai partai politik telah dilakukan, ternyata sebanyak itulah, perpecahan di antara bumi-putera terjadi. Ketika melihat perkembangan dari GAPI yang secara kuat didorong oleh organ Islam yaitu PII dan PSII, akhirnya kegamangan yang menyelimuti pikiran Wondoamiseno mulai menghilang. Maksud Wondoamiseno adalah, bahwa selayaknya Islam menjadi pelopor dan bukan sekadar ikut tanpa menentukan sebuah kebijakan untuk ribuan umat Islam di Indonesia dan seluruh rakyat Indonesia dalam menggapai kemerdekaan Indonesia.

Indonesia Berparlemen yang menjadi tujuan dari GAPI, ternyata mendapat penolakan dari H.B. Perkoempoelan Christen Indonesia. perkumpulan ini menilai bahwa yang terpenting dalam kepentingan nasional adalah "menoen-toet aman dan tenteram berdjalan bersamanja politik dan ekonomi". Sebagaimana rapat yang dilakukan organ ini di Pematang Siantar, menghasilkan keputusan untuk menolak bergabung dalam GAPI serta menolak terhadap upaya Indonesia Berparlemen.³⁸⁷

Tepat tanggal 1 Oktober tahun 1939, GAPI melakukan rapat umum yang saat itu dihadiri lebih dari 60 wakil perkumpulan dan 20 wakil dari pers. Dalam rapat umum tersebut juga dihadiri oleh pembesar negeri yaitu Mr. Jonkman (voorzitte *Volksraad*), Dr. De Vries (dari kantor Adviseur voor Inlandsche Zaken, para anggota *Volksraad*, serta wakil polisi lengkap. Dalam rapat umum ini membicarakan tentang pentingnya Indonesia berparlemen. Gagasan demikian merupakan sebuah bentuk penolakan terhadap berbagai ungkapan serta praktik-praktik yang telah dilakukan Pemerintahan Hindia Belanda yang masih memberlakukan sistem dualisme dalam *Volksraad*. Artinya, proporsi anggota *Volksraad* antara orang Indonesia, masih tidak seimbang dengan wakil dari Belanda, selain itu, Islam sebagai mayoritas, hanya diwakili oleh satu orang saja yaitu Wiwoho. Selain itu, istilah kooperasi dianggap oleh Pemerintah Hindia Belanda sebagai sebuah cemoohan dan sebagai ungkapan perasaan benci terhadap pemerintah, karena hal demikian pada prinsipnya tidak ada, yang ada hanyalah kehendak untuk bekerja bersama-sama. Sebagaimana ungkapan dalam *memorie van antwoord* dari *Volksraad* demikian:

“pemerintahan tidak soeka menerima perkataan cooperatie, dan ta’ boleh tidak, pemerintah haroes mengingatkan bahwa dalam koempoelan golongan jang programnja berhiaskan perkataan itoe tidak djarang kedengar spreker jang boekannja memoedjo-moedjikan bekerdja bersama tetapi membangoenkan perasaan bentji terhadap pemerintah”.³⁸⁸

Abikoesno menjelaskan, bahwa tuntutan Indonesia berparlemen yang disuarakan GAPI, adalah proses penting bagi pembentukan persatuan rakyat Indonesia. Persatuan yang dimaksud sangat jelas, bahwa dalam GAPI, berbagai organ yang tergabung di dalamnya, memiliki sikap politik yang berbeda terhadap Pemerintah Hindia Belanda, akan tetapi, sikap yang berbeda itu (kooperatif dan *non-kooperatif*), tidak menghalangi bagi rakyat Indonesia untuk bersatu. Seperti halnya Parindra, PII, PPKI, masing-masing bersikap kooperatif terhadap pemerintah, sehingga masing-masing memiliki wakil dalam *Volksraad*. Tidak berbeda dengan partai yang masih menerapkan *non-kooperasi* terhadap pemerintah, seperti Gerindo dan PSII, akan tetapi persatuan yang dibangun dalam GAPI lebih pada sebuah kebutuhan secara bersama dalam membangun sebuah sistem parlemen yang tentunya hanya dapat dikelola oleh rakyat Indonesia. Yang menjadi persoalan bukanlah kooperasi atau non-kooperasi sebagai ungkapan cemoohan terhadap pemerintah, melainkan sebuah keinginan untuk berparlemen, agar seluruh rakyat Indonesia dapat menyampaikan aspirasinya secara total untuk kepentingan dan kebutuhan rakyat Indonesia sendiri.³⁸⁹

Tanggal 23-25 Desember, kembali kongres rakyat Indonesia digelar di Jakarta. Berbagai perwakilan hadir, dan para peserta yang ikut berpartisipasi dalam acara tersebut mencapai 81 ribu orang. Kongres yang digelar, pada dasarnya memiliki agenda yang sama sebagaimana kongres-

kongres yang dilakukan oleh GAPI sebelumnya yaitu membangkitkan kembali semangat Indonesia berparlemen.³⁹⁰

Semakin gencarnya kongres rakyat Indonesia digelar, pada dasarnya hanya berkaitan dengan penyikapan terhadap sebuah pelajaran yang pernah gagal dialami oleh rakyat Indonesia. Sebuah upaya untuk memperkuat barisan, persatuan di antara rakyat Indonesia, menjadi sebuah upaya untuk tidak mengulangi kegagalan yang lalu. Indonesia Berparlemen yang sejak dahulu diupayakan oleh para pendahulu pergerakan seperti Tjokroaminoto, Hasan Djayadiningrat, serta riwayat tentang petisi Soetardjo, jangan sampai terulang kembali. Singkat kata, bahwa rakyat Indonesia mampu untuk memimpin dirinya sendiri.³⁹¹

Sampai tahun 1941, sebagai upaya untuk mempertegas sikap GAPI, maka Kongres Rakyat Indonesia, akhirnya diubah menjadi Majelis Rakyat Indonesia (MRI). Perubahan nama tersebut berkaitan dengan dilakukannya sebuah konferensi yang dilakukan di Yogyakarta 14 September 1941. Dalam konferensi tersebut, menegaskan bahwa perwakilan rakyat yang dimaksud sebagai sebuah perwakilan rakyat yang akan membawa kebaikan bagi seluruh rakyat Indonesia yang berdasar demokratis. Dalam konferensi itulah akhirnya terbentuk sebuah federasi dari berbagai federasi lainnya seperti GAPI, MIAI, dan Persatuan Vakbonden Pegawai Negeri (PVPN).³⁹²

Ketika MRI disepakati sebagai bentuk upaya untuk meneruskan perjuangan menuju Indonesia berparlemen maka terjadilah berbagai kesimpangsiuran dalam masing-

masing anggota dalam GAPI. Kesimpangsiuran tersebut terkait dengan dikabulkannya tuntutan MRI dalam membentuk Komisi Visman oleh Pemerintah Hindia Belanda. Disetujuinya komisi tersebut, ternyata tidak sebagaimana yang diperjuangkan oleh para penggagas GAPI untuk mengusung tuntutannya yaitu Indonesia berparlemen seutuhnya, sebagai upaya untuk mengambil alih pemerintahan Belanda. Komisi ini ternyata lebih menyetujui atau memilih untuk bergabung dengan Pemerintah Hindia Belanda.

Melihat kondisi demikian, PSII sebagai salah satu penggagas Indonesia Berparlemen, merasa sakit hati, karena upaya yang selama ini diupayakan untuk mencapai Indonesia berparlemen tidak dijadikan acuan. Pada tahun inilah, PSII keluar dari GAPI, karena dianggap tuntutan yang diupayakan tersebut telah keluar dari gagasan awal sebagaimana yang telah diperjuangkan dulu.

D. Runtuhnya Kekuasaan Belanda Atas Jepang

1. Situasi Masa Peralihan

Di tengah carut-marutnya pergerakan nasional di akhir 1940, situasi internasional semakin menunjukkan adanya pergerakan yang pasti dari pasukan Jepang. Kekuatan Jepang terus bergerak ke selatan yang memungkinkan masuk ke Indonesia. Ketakutan Belanda atas masuknya Jepang ke Indonesia semakin kuat, sehingga, pemerintah kolonial kembali mendekati perwakilan bumiputera dalam *Volksraad* dengan cara memberikan dukungan serta mengesahkan terhadap komisi Visman. Pada dasarnya, melunaknya pe-

merintah terhadap realisasi dari tuntutan yang dilakukan oleh MRI, merupakan upaya menarik simpati rakyat Indonesia untuk kembali mendukung pertahanan Pemerintah Hindia Belanda dalam menangkal berbagai penyerang dari luar (Jepang), sebagaimana yang telah terlihat di dunia internasional saat itu. Jepang telah di depan mata dan berupaya untuk menggeser status Belanda di Indonesia sebagai sesama penjajah.

PSII sebagai sebuah kekuatan Islam yang sejak semula telah muak terhadap Pemerintah Hindia Belanda beserta anteknya, memutuskan untuk keluar dari GAPI dan Majelis Rakyat Indonesia pada 1941. Keluarnya PSII dari federasi tersebut adalah bentuk protes, karena GAPI dianggap tidak menghasilkan perubahan apa pun. Selain itu, bentuk protes terhadap MRI yang dianggap tidak menghasilkan apa-apa untuk kemandirian rakyat Indonesia.³⁹³

Sejak melihat gelagat yang berkembang di luar tujuan GAPI, (Indonesia berparlemen), PSII sejak 1939, telah bersiap-siap untuk lebih memperkuat federasi umat Islam dalam MIAI. PSII kembali berkecimpung (sebelumnya juga tetap aktif) dalam MIAI dan pada 1939, Abikoesno (pimpinan PSII) mengambil alih kepemimpinan federasi tersebut, dan sejak itulah, berbagai upaya untuk memperbesar tali persaudaran di antara sesama umat Islam dunia digalakkan, termasuk melakukan hubungan dengan federasi umat Islam Jepang.³⁹⁴

Awal tahun 1939, sebuah pameran internasional Islam digelar di Jepang dan sebagai acara puncaknya, fede-

rasi Islam Jepang mengundang federasi Islam di berbagai negara dunia terutama MIAI dari Indonesia. Beberapa tokoh Islam yang dikirim oleh MIAI untuk menghadiri konferensi di Jepang adalah H. A. Kahar Moedzakir, H. Moehammad Faried, tuan dan nyonya Mr. Achmad Kasmat, H. Oesman Machfoed Siddik, dan Abdullah Oesman Alamoedhi. Mereka kesemuanya walaupun dari lembaga yang berbeda, akan tetapi mereka secara resmi sebagai perwakilan atas nama MIAI.³⁹⁵

Islam lagi-lagi menjadi pengikat sebuah kekuatan internasional. Corong dunia Islam kembali melebar di wilayah Asia. Secara cepat Jepang diposisikan sebagai pusat kegiatan Islam kedua setelah Timur Tengah. Akan tetapi, berbagai kepentingan politik yang memboncengi semangat Islam tidak dapat dihindari. Tahun 1942, Jepang secara resmi menginjakkan kakinya di bumi Indonesia melalui kekuatan militernya. Kekuatan Islam Jepang akhirnya diambil alih kekuatan militer atas kewenangan sebuah negara.

Semangat Islam sebagai sebuah pengikat orang-orang Indonesia mulai melemah dan digantikan semangat persaudaraan yang akrab disebut sebagai "gerakan 3 A", *Nippon Cahaya Asia*, *Nippon Pelindung Asia*, dan *Nippon Pembela Asia*. Semangat Islam antara Jepang dan Indonesia hanya diletakkan sebagai sebuah pengikat agar tunduk di bawah kontrol kepentingan Jepang. Hal demikian sangat jelas terlihat, ketika satu-satunya organisasi atau federasi yang mendapat hak lebih oleh pemerintah Jepang adalah MIAI.

Sebagai upaya untuk merangkul berbagai organisasi Islam dalam satu lembaga, dibentuklah *Persiapan Persatuan Oemat Islam* (PPOI). Lembaga ini adalah ranting dari “gerakan 3 A” yang dibentuk oleh Jepang. Lembaga ini dipimpin oleh Abikoesno Tjokrosujoso yang juga sebagai ketua PSII. Sebuah taktik politik yang cerdas, melalui sikap tersebut, Abikoesno kembali membangkitkan gagasan dan perjuangan Islam yang telah redup akibat semakin lemahnya pergerakan umat Islam di bawah tekanan Pemerintah Hindia Belanda sebelumnya.

Ketika organ PPOI terbentuk, maka segala organ politik dilarang dan secara resmi dihapuskan, termasuk PSII. Lembaga ini secara resmi menutup kantor pusatnya di Jakarta pada 9 Mei 1942, dan memerintahkan kepada seluruh cabangnya untuk segera menyusul. Tanggal 20 Mei 1942, PII, melakukan hal yang sama³⁹⁶ yang juga disusul oleh partai politik lainnya.

Bagi kelompok Islam, penghapusan partai politik yang dilakukan Jepang, tidak menimbulkan banyak masalah, hal ini disebabkan Jepang memberikan fasilitas yang lebih dari seluruh umat Islam untuk bergabung dalam MIAI. PSII sebagai salah satu kekuatan Islam yang melebur dalam MIAI mendapatkan angin segar untuk kembali memperjuangkan Indonesia melalui panji-panji Islam. Dengan kata lain, format MIAI adalah wajah baru PSII pada masa Jepang.

Jepang memberikan keleluasaan terhadap umat Islam serta berbagai organisasi yang dapat menunjang persatuan umat Islam, tentunya tidak sekadar saja, melainkan

sebuah strategi untuk menarik simpati umat Islam yang besar. Sebagaimana pada masa penjajahan Belanda, Islam atau politik Islam menjadi pengkajian khusus bagi Pemerintah Hindia Belanda. Begitu pula dengan Jepang, dari proses pengamatan yang dilakukan Jepang sebelum menginjakkan kaki di Indonesia tersebut, Jepang menilai bahwa Islam menjadi daya tarik bagi percepatan proses pengambilalihan Indonesia dari tangan Belanda. Islam dijadikan alat untuk mempercepat serta memperkuat posisi Jepang di Indonesia.

Jepang sementara waktu dapat melihat, bagaimana antusias rakyat Indonesia (khususnya umat Islam) dalam menyambut era baru setelah hancurnya kekuasaan Belanda. Penerimaan umat Islam terhadap Jepang tentunya terkait dengan dua hal, yaitu secara moral, Jepang memberikan keleluasaan terhadap perkembangan Islam di Indonesia, sehingga kemerdekaan Indonesia yang melalui persatuan atas dasar Islam, sedapat mungkin dapat direalisasikan. Pandangan demikian sangat terlihat sebagaimana ungkapan HAMKA berikut:

... meskipun adanya larangan-larangan (Belanda) dan rintangan-rintangan kami senantiasa secara sembunyi-sembunyi mendengarkan siaran dari Jepang, sehingga kami bisa tahu bilamana mereka (orang-orang Jepang) akan datang ke sini... (dan ketika mereka benar-benar datang), ribuan orang kami yang berkumpul di depan mesjid Agung (Medan) dan menerima mereka dengan pekikan "Banzai".³⁹⁷

Selain dari pandangan yang bersifat dukungan moral, umat Islam tentunya memiliki pertimbangan politis yaitu

berbagai upaya yang dilakukan oleh umat Islam dalam MIAI, tentunya melakukan berbagai pengembangan persaudaraan di antara semua umat Islam lainnya di dunia. Upaya demikian tentunya menjadi sebuah loncatan politik yang sangat baik, untuk menghantam berbagai kekuatan politik yang saat itu masih mendukung Belanda.

Perlu digarisbawahi, bahwa perjuangan umat Islam, tentunya juga terkait dengan para aktivis serta organ partai PSII yang saat itu mendapatkan fasilitas untuk memperjuangkan kembali nilai-nilai Islam, tidak sekadar untuk mendapatkan keuntungan dari penjajahan Jepang, melainkan sebuah upaya untuk mencapai cita-cita kemerdekaan Indonesia di bawah panji-panji Islam. Sampai akhir perjuangan Islam masa penjajahan Jepang, tentunya Islam terus berada di garda paling depan dalam melihat ketidakseimbangan kebijakan yang dilakukan oleh Jepang untuk rakyat Indonesia. Sebagaimana yang dikatakan oleh Wertheim, *Matahari Terbit* sia-sia mencoba menarik *Bulan Sabit* untuk menetap di orbitnya. Bulan sabit terlalu besar untuk menjadi satelit yang tidak berbahaya bagi siapa pun, untuk sekadar menjadi sebuah sputnik.³⁹⁸

Berbeda halnya dengan kelompok di luar Islam, atau lebih tepatnya nasionalis sekuler, sampai tahun 1942 ini, mereka tidak dapat bereaksi apa pun akibat organ pergerakan mereka dilarang dan satu-satunya yang tetap hidup adalah MIAI, sedangkan mereka tentu enggan untuk memasuki federasi umat Islam tersebut. Hingga tahun 1943, sebuah perkumpulan baru telah dibentuk oleh Jepang yaitu

Putera (Pusat Tenaga Rakyat). Lembaga ini menjadi salah satu ajang dari para pejuang Indonesia dari garis nasionalise sekuler. Seperti halnya Sukarno yang saat itu telah keluar dari pengasingannya di pulau Ende, Flores Nusa Tenggara Timur. Sukarno berpartisipasi dalam Putera, sehingga ia diberi kepercayaan untuk memimpin pasukan rakyat (penyedia logistik dan obat-obatan) yang tergabung dalam Putera tersebut.

MIAI sebagai satu-satunya federasi umat Islam yang berdiri sejak penjajahan Belanda, menjelang tahun 1943, federasi ini menuai ajalnya. Perdebatan yang hebat diantar sesama umat Islam, serta campur tangan Jepang dalam merealisasikan gerakan sosio-religius yaitu pembentukan *baitul mal* (rumah amal sebagai wadah yang menghimpun harta benda untuk kepentingan umat Islam) kandas di tengah jalan. Perdebatan tentang *baitul mal* di antara sesama umat Islam, antara Wondoamiseno (PSII) sebagai pengganti Abi koesno (PSII), dengan pihak Muhammadiyah dan NU - yang saat itu mendapatkan pengakuan dari Jepang bulan September 1943- telah memupuskan harapan perjuangan MIAI.

Jepang kini melakukan sebuah politik pecah belah terhadap umat Islam yang untuk sementara waktu menguntungkan pihak Muhammadiyah dan NU, sedangkan di sisi lain, sangat merugikan para anggota PSII yang progresif. Pengakuan atas organ Islam tersebut tentunya menghilangkan status federasi MIAI sebagai federasi umat Islam tunggal saat itu. Atas kebijakan Jepang yang demikian, para

pengurus MIAI diperkenan oleh Jepang untuk melakukan rapat serta untuk mengakhiri keberadaan MIAI tersebut. Tepat pada 24 Oktober 1943 ketua MIAI Wondoamiseno akhirnya menutup MIAI. Hilangnya MIAI sebagai federasi umat Islam, sebagaimana yang diungkapkan oleh Benda, bahwa hal demikian merupakan awal kemenangan Jepang terhadap umat Islam Indonesia.³⁹⁹

Sebagai pengganti federasi Islam yang dulu tegabung dalam MIAI, kini Jepang kembali memprakarsai sebuah forum umat Islam yang secara resmi menjadi sebuah lembaga yang mendukung perjuangan Dai Nippin dalam kepentingan Asia Timur Raya. Forum tersebut adalah Masyumi (Majelis Syuro Muslimin Indonesia) yang sejak pertemuannya yang pertama tahun 1943, secara langsung mendapatkan pengakuan dari Jepang. Masyumi merupakan sebuah perkumpulan yang eksklusif yang hanya diisi oleh dua organisais Islam (Muhammadiyah dan NU). Lembaga ini akhirnya menggeser organisasi Islam lain serta berbagai organ nasionalis *non*-agama lainnya.

Jepang telah melihat, bahwa kelompok-kelompok di luar agama tentunya tidak mendapatkan fasilitas sebagaimana NU dan Muhammadiyah. Jepang akhirnya membuka fasilitas tersebut (di Jawa, misalnya) didirikan Djawa Hokokai (organisasi pelayanan Rakyat di Jawa), pada 1944. Lembaga ini akhirnya menggantikan posisi Putera dan berbagai persatuan yang telah dibentuk oleh orang-orang China saat itu.

Masuknya berbagai pihak dari kalangan *non-agama*, untuk sementara waktu mampu memberikan ruang bagi rakyat Indonesia yang dulunya belum sempat menikmati ruang tersebut (khususnya priyayi). Di dalam Djawa Hokokai, Masyumi yang secara resmi sebagai organ yang memiliki kebebasan lebih dibanding dengan organ lainnya, juga turut menentukan keputusan apa pun dalam lembaga ini.

Hasyim Asy'arie diangkat sebagai ketua Masyumi dan Ir. Sukarno diangkat sebagai penasihat Indonesia Utama (Komon) bagi Gunseikan, yang mempelajari Hokokai. Di pihak lain, seperti halnya Mas Mansur dan Moh. Hatta bertanggung jawab terhadap masalah dalam negeri umum di pusat. Dengan demikian Djawa Hokokai merupakan sebuah lembaga independen yang hanya berkaitan dengan pelayanan umum dalam masyarakat dan upaya yang menyeluruh dalam masyarakat hanya dimiliki oleh Masyumi. Lembaga-lembaga yang telah terbentuk tersebut, sedikit demi sedikit, mampu dimanfaatkan berbagai pihak, terutama nasionalis sekuler yang sangat ketat dalam memanfaatkan organ Djawa Hokokai sebagai alat untuk menyekurkan kemerdekaan Indonesia.

2. Menentukan Dasar Negara Indonesia

Persinggungan antara kelompok nasionalis Islam dengan nasionalis sekuler, pada dasarnya tidak dapat dihindarkan sejak pertama para aktivis pergerakan nasional berupaya untuk mencapai kemerdekaan Indonesia. Jalan dan model perjuangan yang ditempuh selalu berbeda, walau-

pun pada saat tertentu mereka bergabung, akan tetapi, penyatuan diantar mereka tentunya selalu tidak menghasilkan sebuah kesepakatan atau hasil akhir yang maksimal. Persinggungan di antara keduanya tidak hanya sampai masa penjajahan Jepang, melainkan terus berlanjut, hingga masa berakhirnya penjajahan Jepang di Indonesia. Sampai akhir penjajahan Jepang di Indonesia, persinggungan antara kelompok nasionalis Islam dan nasionalis sekuler, justru menjadi sebuah hal yang sangat menarik. Dari perdebatan merekalah, akhirnya dapat dirumuskan dasar atau identitas ideologi serta asas bangsa dan negara Indonesia. Selain itu, proses perdebatan itu pulalah, yang akhirnya memunculkan sebuah perseteruan panjang (hingga kini) di antara kelompok nasionalis Islam dan kelompok nasionalis sekuler.

Dari proses panjang ini akhirnya berbagai persinggungan baik secara semu maupun konfrontatif yang dilakukan oleh pihak nasionalis Islam dan nasionalis sekuler semakin terlihat. Masa akhir penjajahan Jepang, menjadi titik tolak untuk kembali melihat proses pertentangan yang lebih hebat dari kedua kubu tersebut untuk menentukan ideologi dan asas Indonesia Merdeka.

Wacana tentang Indonesia secepatnya harus mendapatkan kemerdekaan terus didengungkan oleh para aktivis pergerakan yang saat itu masuk dalam lembaga-lembaga strategis bentukan Jepang. Masyumi dan Djawa Hokokai menjadi tempat bersemayamnya suara untuk secepatnya Indonesia mencapai kemerdekaannya dari Jepang. Tidak

ketinggalan, beberapa tokoh yang menjabat sebagai penasihat Indonesia Utama (Komon) bagi Gunsaikan yaitu Sukarno, serta oleh beberapa orang yang bertanggung jawab dalam urusan dalam negeri umum pusat yaitu Mas Mansur dan Hatta, ternyata sangat membantu dalam proses pencapaian sebuah tekad Indonesia Merdeka.

Berbagai upaya untuk secepatnya Indonesia diberikan kemerdekaan oleh Jepang terus didengungkan, sehingga pada 7 September 1944, Perdana Menteri Kaiso memberikan janji untuk kemerdekaan Indonesia.⁴⁰⁰ Janji kemerdekaan yang disampaikan oleh Kaiso, akhirnya disikapi oleh Masyumi sebagai sebuah lembaga yang sejak semula tetap menginginkan kemerdekaan Indonesia di bawah naungan Islam, walaupun agak malu-malu. Pada Oktober, para eksekutif Masyumi melakukan pertemuan di Jakarta, dan dalam pertemuan tersebut disepakati tiga pasal. Salah satu pasal (pasal terakhir) yang disepakati berbunyi "Dengan Nippon kita berdiri, dengan Nippon kita Jatuh, di jalan Allah untuk membinasakan tirani musuh".⁴⁰¹

Sebagai realisasi janji untuk memberikan kemerdekaan, Jepang akhirnya memberikan sebuah kebebasan kepada Hokokai untuk merealisasikan keputusannya dalam Dewan Penasihat Pusat bulan Mei 1944. Keputusan yang diusung adalah membentuk sebuah barisan pemuda yang ditempatkan di bawah komando *Hokokai*. Keputusan tersebut diterima, sehingga Jepang merealisasikan permintaan tersebut pada September dengan membentuk barisan pelopor yang akrab disebut Pembela Tanah Air (Peta).

Tidak lama dari pembentukan organ tersebut, Jepang juga memberikan kesempatan kepada kelompok umat Islam untuk juga membentuk barisan khusus yaitu *Hisbullah* (tentara Allah) yang diresmikan oleh Jepang setelah pembentukan Barisan pelopor. Setelah pembentukan badan tersebut, Masyumi yang juga mendapat dukungan dari *Gunseikan* maka, atas usulan Wachid Hasyim, dalam laskar *Hizbullah* itulah dibentuk juga Barisan Pekerja Islam.

Tidak lama dari upaya yang dilakukan oleh Masyumi tersebut, pihak-pihak (nasionalis Sekuler) yang berada dalam dewan pusat membentuk sebuah program yaitu "Gerakan Hidup Baru". Dengan demikian dicetuskannya program tersebut, akhirnya pihak-pihak yang ada dalam *Hokokai* (kelompok nasionalis sekuler) juga Masyumi saling berebut untuk mendapatkan posisi dalam kelembagaan tersebut.

Pada prinsipnya berbagai upaya yang dilakukan oleh Jepang tersebut adalah untuk mendapatkan kekuatan dalam rangka perang Asia Timur Raya. Hal ini terlihat, bahwa baru pertama kalinya, Jepang memberikan keleluasaan kepada pihak-pihak yang masuk dalam organ tersebut dan secepatnya dipersenjatai serta mendapat pendidikan militer. Selain itu, realisasi dari pembentukan berbagai organ pendukung tersebut adalah untuk memecah belah antara kelompok nasionalis Islam dengan nasionalis Sekuler. Kekuatan Peta, diimbangi oleh kekuatan *Hizbullah*.

Tepat pada 1 Maret 1945, bertepatan dengan hari ulang tahun pendaratan Jepang di Indonesia, panglima tertinggi akhirnya memutuskan untuk membentuk Panitia Pe-

nyelidik Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Lembaga ini diresmikan bersamaan dengan ulang tahun Kaisar Jepang tanggal 29 April 1945. Lembaga inilah yang nantinya akan menggabungkan berbagai pihak (baik nasionalis Islam maupun nasionalis sekuler) duduk dalam satu lembaga untuk membahas sebuah rumusan yang jelas tentang dasar negara untuk Indonesia Merdeka.

Setelah diresmikannya lembaga panitia penyelidik (BPUPKI) maka, pemerintah Jepang melantik lembaga ini pada 28 Mei 1945. Badan ini melakukan sidang sebanyak dua kali, sidang pertama dilakukan pada 29 Mei-1 Juni 1945. Jumlah keanggotaan yang memiliki hak suara dalam BPUPKI dalam sidang yang pertama sebanyak 62 orang adalah sebagai berikut:

Abdul Kahar **Muzakir**, Agus Muhsin Dasaad, A.R. **Baswedan**, *Bandoro Pangeran Hario* **Purubojo**, *Bendoro Pangeran Hario* **Bintoro**, *Dr. Kanjeng Raden Tumenggung* **Rajiman Wedyodiningrat**, *Dr. Raden Buntaran* **Martoatmojo**, *Dr. Raden Suleiman Effendi* **Kusumaatmaja**, *Dr. Samsi* **Sastrawidagda**, *Dr. Sukiman* **Wiryoanjoyo**, *Drs. Kanjeng Raden Mas Hario* **Sosrodiningrat**, *Drs. Muhammad* **Hatta**, *Haji A.A.* **Sanusi**, *Haji Abdul Wahid* **Hasyim**, *Haji Agus* **Salim**, *Ir. Raden Mas Panji* **Surahman Cokroadisuryo**, *Ir. Raden Ruseno* **Suryohadikusumo**, *Ir. Sukarno*, *K.H. Abdul* **Halim** (Muhammad Syatari), *Kanjeng Raden Mas Tumenggung Ario* **Wuryaningrat**, *Ki Bagus* **Hadikusumo**. *Ki Hajar* **Dewantara**, *Kiai Haji Abdul Fatah* **Hasan**, *Kiai Haji* **Masykur**, *Liem Koen Hian*, *Mas* **Aris**, *Mas Sutarjo* **Kartohadikusumo**, *Mr. A. A.* **Maramis**, *Mr. Kanjeng Raden Mas Tumenggung* **Wongsonagoro**, *Mr. Mas Besar* **Martokusumo**, *Mr. Muhammad* **Yamin**, *Mr. Raden Ahmad* **Subarjo**, *Mr. Raden* **Hindromartono**, *Mr. Raden Mas* **Sartono**,

*Mr. Raden Panji Singgih, Mr. Raden Samsudin, Mr. Raden Suwandi, Mr. Raden, Sastromulyono, Mr. Yohanes Lathary, Ny. Mr. Raden Ayu Maria Ulfah Santoso, Ny. Raden Nganten Siti Sukaptinah Sunaryo Mangunpuspito, Oey Tiang Tjoei, Oey Tjong Hauw, P.F. Dahler, Parada Harahap, Prof. Dr. Mr. Raden Supomo, Prof. Dr. Pangeran Ario Husein Jayadiningrat, Prof. Dr. Raden Jenal Asikin Wijaya Kusuma, Raden Abdul Kadir, Raden Abdulrahim Pratallykrama, Raden Abikusno Cokrosuyoso, Raden Adipati Ario Sumitro Kolopaking Purbonegoro, Raden Adipati Wiranatakusuma, Raden Asikin Natanegara, Raden Mas Tumenggung Ario Suryo, Raden Oto Iskandardinata, Raden Panji Suroso, Raden Ruslan Wongsokusumo, Raden Sudirman, Raden Sukarjo Wiryopranoto, Tan Eng Hoa, Abdul Kaffar.*⁴⁰²

Menjelang sidang yang kedua, tepatnya pada tanggal dan sidang kedua pada 10-16 Juli 1945, jumlah keanggotaan yang memiliki suara ditambah 6 orang, jadi jumlah secara keseluruhan adalah 68 orang. Berikut nama-nama ke-6 anggota:

*Ir. Raden Ashar Sutejo Munandar, Bendoro Kanjeng Pangeran Ario Suryohamijoyo, Ir. Pangeran Muhammad Nur, Kiai Haji Mas Mansur, Mr. Mas Susanto Tirtoprojo, Raden Mas Margono Joyohadikusumo.*⁴⁰³

Dalam setiap persidangan tentunya muncul berbagai pendapat dan masing-masing pihak dapat mengemukakan pendapatnya secara berbeda dengan argumentasinya masing-masing. Pada bagian ini, penulis hanya ingin menjelaskan secara singkat, bahwa rapat yang dilakukan oleh BPUPKI telah menghasilkan asas atau dasar negara Indonesia yang akrab disebut Pancasila.

Bagian-bagian dalam Pancasila yang telah disepakati oleh BPUPKI dalam rapatnya yang pertama adalah sebagai berikut:

1. Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syari'at Islam bagi pemeluk-pemeluknya
2. Kemanusiaan yang adil dan beradab
3. Persatuan Indonesia
4. kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan
5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia⁴⁰⁴

Sebelumnya terdapat berbagai rumusan tentang konsep dasar pembentukan pancasila, akan tetapi sampai akhir rapat yang digelar dalam BPUPKI, menghasilkan Bentuk jadi Pancasila yang bait-perbaitnya sebagaimana yang tertera di atas.

Dalam proses pembentukan dasar negara ini, perdebatan yang terjadi antara kelompok nasionalis Islam dengan nasionalis sekuler adalah berkaitan dengan sila pertama, terutama tentang tujuh kata yaitu: *dengan kewajiban menjalankan syari'at Islam bagi pemeluk-pemeluknya*. Tujuh kata ini bagi kelompok nasionalis Islam merupakan pokok dan dasar ke-tuhid-an (nilai ke-Tuhan-an) yang bagi umat Islam merupakan prinsipel yang tidak dapat diganggu gugat. Sampai pada akhir pembahasan yang dilakukan oleh BPUPKI, tujuh kata yang tertera pada pancasila sila ke-1⁴⁰⁵ diterima. Dengan demikian, preambul Undang-Undang Dasar, dan Undang-Undang Dasar Negara, secara otomatis mengikuti Pancasila yang telah disepakati tersebut.⁴⁰⁶ Diterimanya

tujuh kata tersebut merupakan kompromi antara pihak nasionalis Islam dengan nasionalis sekuler, hingga masa kerja BPUPKI berakhir.

Sampai Bulan Agustus, BPUPKI dibubarkan dan digantikan lembaga baru yaitu Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI), sebagaimana yang disepakati oleh Nanpoo Gun Saikoo Sikikan. Badan ini akhirnya diresmikan pada 7 Agustus 1945 dan beranggotakan 21 orang sebagai berikut:

Ketua: Ir. Soekarno; ketua-muda: Drs. Moh. Hatta.

Anggota dari Djawa:

Radjiman, Oto Iskandar Dinata, Hadikoesoemo, Wachid Hasyim, Soerjohamidjojo, Poeroebojo, Soetardjo, Soeroso, Soepomo, Abd. Kadir, Soetardjo, Soeroso, Soepomo, Abd. Kadir, Yap Tjwan Bing, Anggota-anggota dari Soematra

Mohd. Amir, Teukoe Md. Hasan, Abd. Abbas,

Anggota-anggota dari Angkatan Laoet

Ratulangi, Andi Pangeran, A.A. Hamidhan, I. Goesti Ketut Poetje, J. Latuharhari.⁴⁰⁷

Setibanya Sukarno, Hatta dan Radjiman dari Saigon, Jepang, untuk menghadiri panggilan Nanpoo Gun Saikoo Sikikan, maka Sukarno akhirnya menyampaikan kepada seluruh rakyat Indonesia, bahwa sebentar lagi Indonesia akan diberikan kemerdekaan oleh Jepang. Rakyat Indonesia, terutama pihak-pihak pemuda yang saat itu telah mengetahui bahwa Jepang telah mengalami kekalahan atas Sekutu tanggal 14 agustus 1945, maka Sukarno akhirnya di-

paksa secepatnya merumuskan proklamasi untuk menandai bahwa Indonesia telah bebas dari penjajahan Jepang, serta menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia telah Merdeka. Sampai akhirnya, tanggal 17 Agustus, 1945, Sukarno membacakan proklamasi sebagai sebuah tanda bahwa secara *de facto* (kenyataan), Indonesia telah merdeka.

Akhirnya, pada 18 Agustus, PPKI yang telah dibentuk sebelumnya, secepatnya melakukan pertemuan untuk menentukan dasar dan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang baru lahir tersebut. Dalam rapatnya PPKI inilah, sebuah hal yang sangat mengejutkan bagi kalangan Islam, bahwa hal-hal yang sangat prinsipel dan penting bagi Islam di beberapa bagian dalam asas Pancasila, Preambul, serta UUD negara, kembali di rombak tanpa mengindahkan jerih payah para anggota BPUPKI yang telah merumuskan dan melahirkan kesepakatan tersebut. Beberapa bagian yang telah dirumuskan oleh para penggagas dalam BPUPKI yang secara cepat di ubah dalam PPKI adalah:

1. Kata "Mukaddimah" diganti dengan kata "Pembukaan".
2. dalam Preambul (Piagam Jakarta), anak kalimat: "Berdasarkan kepada Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya" diubah menjadi "Berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa".
3. Pasal 6 ayat 1, "Presiden ialah orang Indonesia asli dan beragama Islam", kata-kata "dan beragama Islam" dicoret.

4. sejalan dengan perubahan yang kedua di atas, maka Pasal 29 ayat 1 menjadi “Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa”, sebagai pengganti “Negara berdasarkan atas Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya.”⁴⁰⁸

Dari proses dan penjelasan di atas terkait dengan proses pembentukan dasar negara Indonesia, hingga kesepakatan yang terakhir dipakai sebagai sebuah landasan berdirinya sebuah negara Indonesia, ternyata masih menyisakan sebuah persoalan yang sangat penting. Persoalan yang sangat penting tersebut adalah bukan pada persoalan ditolaknya 7 kata dalam sila pertama Pancasila, akan tetapi, sebuah kekecewaan mendalam yang dirasakan oleh kelompok nasionalis Islam, ketika hasil jerih payahnya bersidang dalam BPUPKI, dirombak secara cepat dalam PPKI. Dengan demikian, sebuah proses panjang yang telah dialami dan dilalui oleh para penggagas perjuangan kemerdekaan Islam sangat jauh dari harapan. Walaupun rumusan Pancasila, Preambul, serta UUD Negara Indonesia tahun 1945 tetap diterima, akan tetapi, penerimaan bagi umat Islam (terutama bagi para penggagasnya), hanyalah sebuah upaya untuk pernyataan merdeka secepatnya bagi rakyat Indonesia. Kebesaran hati umat Islam (nasionalis Islam) bagian dari pengorbanan yang sangat besar untuk terciptanya kemerdekaan bagi seluruh rakyat Indonesia. ●

8

Kesimpulan

Pokok permasalahan yang diajukan dalam tulisan ini adalah: mengapa SI memutuskan untuk menjalankan Sosialisme Islam sebagai ideologi? Untuk menganalisis hubungan PSII dengan Sosialisme Islam yang dipilih sebagai ideologi, tentu harus melihat gejala penting tentang perubahan-perubahan yang terjadi sekitar partai politik seperti ideologi, organisasi, serta ciri pimpinan dan pengikut masing-masing. Seperti teori yang dikemukakan oleh J. Eliseo Rochamora, bahwa terdapat tiga faktor penting untuk menganalisis hubungan partai politik dengan ideologi yang diterapkan. *Pertama*: Perkembangan Politik Nasional. *Kedua*: Elite. *Ketiga*: ideologis-kultural.

Untuk menjelaskan hubungan PSII dengan Sosialisme Islam yang dipilih sebagai ideologi, maka teori yang di-

kemukakan oleh J. Eliseo Rochamora digunakan sebagai pisau analisis dalam menjelaskan faktor-faktor penting yang mendasari PSII dalam memilih Sosialisme Islam sebagai ideologi. Dengan demikian, kesimpulan yang dapat ditarik dari permasalahan yang telah diajukan adalah bahwa terdapat empat faktor penting yang melingkupi PSII dalam memilih dan menerapkan Sosialisme Islam sebagai ideologi. *Pertama*: perkembangan politik nasional. Faktor ini menjelaskan kondisi sosial-politik Indonesia yang sedang mengalami kolonialisasi Belanda. *Kedua*: *Pan-Islamisme*. Gerakan ini bertujuan untuk membangun semangat persatuan umat Islam dunia di bawah satu kekuatan khalifah Islam. *Pan-Islamisme* menjadi tendensi (*mainstream*) politik internasional yang dipilih dan dijalankan oleh PSII untuk menolak dan membedakan tendensi (*mainstream*) politik Komunis Internasional (*Komintern*) yang dipilih dan dijalankan oleh PKI. Pilihan politik serta sebuah semangat persatuan Islam dunia inilah yang mengilhami dan mendorong PSII dalam melawan Kolonialisme Belanda untuk mencapai persatuan Islam Indonesia yang kuat.

Ketiga: Elite. Faktor ini menjelaskan tentang pertarungan elite muslim di internal partai, karena elite muslim inilah yang memberikan corak terhadap kelembagaan Sarekat Islam (SI), Partai Sarekat Islam (PSI), serta Partai Sarekat Islam Indonesia (PSII). Gesekan yang semakin kuat di tingkat elite muslim akhirnya memunculkan atau memaksa pimpinan besar PSII yaitu Tjokroaminoto, H. Agus Salim, serta para pendukungnya memilih *Pan-Islamisme* sebagai

pilihan garis politik internasional. Di sisi yang lain, sebagai upaya untuk memperkuat basis massa serta untuk mewujudkan sebuah pergerakan yang revolusioner, maka Tjokroaminoto menggabungkan Islam dengan Sosialisme. Islam menjadi sebuah landasan perjuangan, sedangkan Sosialisme yang memperjuangkan “keadilan” sosial dan tidak bertentangan dengan Islam dijadikan sebagai landasan pergerakan. Dengan demikian perpaduan keduanya yang akrab disebut Sosialisme Islam, akhirnya dipilih dan diterapkan sebagai ideologi PSII.

Keempat: ideologi. Pertarungan elite erat kaitannya dengan arah dan tujuan pergerakan yang ingin dicapai. Klaim atas basis massa terjadi sebagai upaya untuk menunjukkan kekuatannya masing-masing. Pada tahap saling klaim basis massa inilah, semuanya ditarik pada konteks ideologi, karena ideologi sangat penting sebagai landasan gerak-juang partai dalam mencapai tujuan, serta menjadi pembeda di antara keduanya. •

Catatan:

¹Kekuatan *Pan Islamisme* baru dirasakan oleh Inggris dan Belanda, ketika Jerman dan Turki bergabung menjadi kekuatan tunggal dan beraksi sesuai dengan kepentingannya masing-masing. Lebih jelas lihat Kees Van Dijk, dalam Nico J.G. Kaptain (ed.), *Kekacauan dan Kerusuhan: Tiga Tulisan Tentang Pan-Islamisme di Hindia Belanda Pada Akhir Abad Kesembilan Belas dan Awal Abad Kedua Puluh* (Leiden-Jakarta, Seri INIS XLIII, 2003), hlm. 29.

²Aqib Suminto, *Politik Islam Hindia Belanda, Het Kantoor Voor Inlandsche zaken* (Jakarta: LP3ES, 1985), hlm. 79-80.

³Anthony Reid, dalam Nico J.G. Kaptain (ed.), *Kekacauan dan Kerusuhan....*, *op.cit.*, hlm. 1.

⁴A.P.E. Korver, *Sarekat Islam Gerakan Ratu Adil?* (Jakarta: PT. Grafitipers, 1985), hlm. 67. Bandingkan dengan Anthony Reid dalam Nico J.G. Kaptein (ed.), *Kekacauan dan Kerusuhan...*, *op. cit.*, hlm. 5-6.

⁵Upaya bersatu bagi para pedagang Islam, dimaksudkan untuk meningkatkan kondisi ekonomi rakyat bumiputera (terutama orang Islam). Hal demikian dilakukan untuk mengimbangi para pedagang asing, baik China (Tionghoa) maupun Eropa (Belanda) yang semakin kuat. Selebihnya dapat dilihat dalam S.A.A. Badjenet; R.M. Tirtoadisoerjo, "Sarikat Dagang Islamiah" *Medan Prijaji*, 1909, hlm. 181-195.

⁶"Statuten dan Huishoudelijk Reglement Sarekat Dagang Islamiah (SDI) ditetapkan di Buitenzorg" *Medan Prijaji*, 1909, hlm. 181-216.

⁷Pramodya Ananta Toer, *Jejak Langkah* (Yogyakarta: Hasta Mitra, 2002), hlm. 196-198, 216-226, 399-404.

⁸Mayon Soetrisno, "Nyai Adipati", dalam *Nyai Wonokromo di depan Pengadilan Hindia Belanda* (Jakarta: Progres, tanpa tahun), hlm. 90.

⁹Aqib Suminto, *op.cit.*, hlm.16-26.

¹⁰Anggotaan SI di Karesidenan Surakarta mencapai 35.000 orang, sedangkan jumlah penduduk Kota Surakarta saat itu ±60.000 orang, kecil atau besar. Lebih jelasnya lihat Sartono Kartodirdjo, dkk., *Laporan Asisten Residen Kepolisian Surabaya (Schippers) Kepada Residen Surabaya, 1913, dalam Arsip Nasional Republik Indonesia, Penerbitan Sumber-Sumber Sejarah. No.7, Sarekat Islam Lokal*, hlm. 333. Berkaitan dengan jumlah masyarakat Surakarta, lihat Takashi Shiraishi, *Zaman Bergerak, Radikalisme Rakyat di Jawa 1912-1926* (Jakarta, Grafiti, 1997), hlm. 44-46.

¹¹Bandinkan dengan Tamar Jaya, *Tahun 1905 Hari Kebangkitan Nasional* (Prasaran dalam Seminar Sejarah Perjuangan Islam Indonesia: 7-10 Mei 1917 di Jakarta), hlm. 15-31.

¹²Arnold C. Brackman, *Indonesian Communism: A History* (New York: Federick A. Praeger Publisher, 1963), hlm. 6.

¹³Ahmad Adaby Darban, *Peran Serta Islam dalam Perjuangan di Indonesia* (Yogyakarta: UII, 1989). Bandingkan dengan A.K. Pringgodigdo, *Sedjarah Pergerakan Rakjat Indonesia* (Djakarta: Pustaka Rakjat, 1960).

¹⁴Pada awalnya memakai nama Partai Komunis Hindia (PKH), dan seiring perkembangan pergerakan di Indonesia, berganti menjadi Partai Komunis Indonesia (PKI). Selebihnya berkaitan dengan proses perubahan dari PKH menjadi PKI, dapat dilihat dalam Ruth Thomas McVey,

The Rise of Indonesian Communism (New York: Cornell University Press, 1965), hlm. 46-47.

¹⁵*Ibid.*, hlm. 171.

¹⁶Deliar Noer, *Gerakan Modern Islam di Indonesia* (Jakarta: LP3ES, 1994), hlm. 138.

¹⁷Tjokroaminoto, "Rechtspersoon" S.K. Darmokondo, dimuat secara berkala tanggal 13, 15, 18 Mei 1914. Pembaruan ketentuan tersebut dimuat dalam *koninklijk Besluit* tanggal 1 September 1919, pasal 111 yang telah diperbarui.

¹⁸H.O.S. Tjokroaminoto, *Islam dan Sosialisme* (Djakarta: Bulan Bintang, 1954), hlm. 9-10.

¹⁹S.M. Kartosoewirjo, *Sikap Hidjrah PSII* (Majelis Tahkim PSII ke-22, bagian pertama), hlm. 49-60.

²⁰Selengkapnya lihat Michael C. Williams, *Arit dan Bulan Sabit Pemberontakan Komunis 1926 di Banten* (Yogyakarta, 1982).

²¹Selengkapnya lihat Mestika Zed, *Pemberontakan Komunis Silungkang 1927 Studi Gerakan Sosial di Sumatra Barat* (Yogyakarta: Syarikat Indonesia, 2004).

²²Soekarno, *Suluh Indonesia Muda*, 1926. Lihat juga Soekarno, *Dibawah Bendera Revolusi* (Djakarta: Panitia Penerbit Dibawah Bendera Revolusi, 1963), hlm. 2.

²³Persamaan yang dimaksud adalah Mendudukkan manusia di atas kursi yang sama tinggi dan sama dihargai. Lihat H.A. Notosoetardjo, *Tindjauan Agama Islam terhadap Sosialisme Indonesia* (Djakarta: Lembaga Penggali dan Penghimpun Sedjarah Revolusi Indonesia, 1964), hlm. 22.

²⁴Islam mengajarkan bahwa semua manusia adalah sama secara lahiriah, sedangkan yang membedakan manusia dengan manusia lainnya hanyalah Iman dan ketaqwaannya kepada Allah SWT, al-Qur'an, Surat al-Hujurat, ayat 11-14.

²⁵MAI sebagai federasi umat Islam dibubarkan dan federasi umat Islam yang baru dibentuk oleh Jepang yang hanya diisi oleh Muhammadiyah dan NU. Federasi ini bernama Majelis Syura Muslimin Indonesia (Masyumi). Lihat Sihombing, *Pemuda Indonesia menantang Fasisme Jepang* (Djakarta: Sinar Djaya, tanpa tahun), hlm. 183. Untuk memobilisasi massa umat Islam, K.H.M. Mas Mansoer dalam pidatonya menyitir al-Quran, Surat al-Anfal ayat 65-66. Lihat *Asia Raya*, 1 Djanuari 2604/ 1944.

²⁶J.G. Kaptain, *op. cit*, hlm. 33.

²⁷A.P.E. Korver, *op. cit*, hlm. 74.

²⁸Muhammad Abdul Gani, *Cita Dasar dan Pola Perjuangan Syarikat Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1984).

²⁹H.O.S. Tjokroaminoto, *Islam dan Sosialisme* (Djakarta: Bulan Bintang, 1954).

³⁰Umar Sa'id Tjokroaminoto, *Moeslim National Ondermijs* (tidak untuk umum) (Jakarta: Sekretariat Jendral Pimpinan Pusat/ Lajnah Tanfidziyah Syarikat Islam, 1995).

³¹J. Eliseo Rochamora, *Nasionalisme Mencari Ideologi Bangkit dan Runtuhnya PNI 1946-1965* (Jakarta: Grafiti, 1991), hlm. 1.

³²*ibid.*, hlm. 5.

³³*ibid.*, hlm. 6.

³⁴*ibid.*, hlm. 6-7.

³⁵*ibid.*, hlm. 8.

³⁶Heddy Shri Ahimsa-Putra, *Paradigma, Epistemologi dan Metode Ilmu Sosial-Budaya Sebuah Pemetaan*, Makalah dalam pelatihan "Metodologi Penelitian" diselenggarakan oleh CRCS UGM Yogyakarta pada 12 Februari-19 Maret 2007, hlm. 27-28.

³⁷Harry J. Benda, "Kaum Inteligensia Timur sebagai Golongan Elite Politik", dalam Sartono Kartodirdjo (peny.), *Elite dalam Perspektif Sejarah* (Jakarta: LP3ES, 1983), hlm. 154-176.

³⁸Sartono Kartodirdjo, *Pemberontakan Petani Banten 1888*, *op.cit.*, hlm. 209.

³⁹Anthony Reid, "Pan-Islamisme Abad Kesembilan Belas di Indonesia dan Malaysia", dalam Nico J. G. Kaptain (ed.), *Kekacauan dan Kerusuhan...*, *op.cit.*, hlm. 2.

⁴⁰Herbert Feith and Lance Castles (ed.), *Indonesian political Thinking 1945-1965* (Cornell University: Ithaca and London, 1970), hlm. 14, dalam Daniel Dhakidae, "Partai Politik dan Sistem Kepartaian di Indonesia", *Prisma*, No. 12, tahun X, Desember 1981, hlm. 19.

⁴¹Di lain pihak, Sosialisme menjadi jembatan tercapainya gerakan Komunis di Indonesia dalam mencapai tujuannya. Lihat Frank Dhont, *Nasionalisme Baru Intelektual Indonesia tahun 1920-an* (Yogyakarta: Gadjah Mada niversity Press, 2005), hlm. 28.

⁴²Tjokroaminoto, *Islam dan Sosialisme*, *op.cit.*, hlm. 10.

⁴³Al-Qur'an sebagai rujukan utama agama Islam, telah menjelaskan bahwa al-Qur'an tidak memiliki kecacatan atau tidak terdapat keraguan sedikitpun di dalamnya, sehingga Islam adalah agama yang sempurna, al-Qur'an, surat al-Baqarah, ayat 2-3.

⁴⁴A.K. Brohi, "Konsepsi Sosialisme Islam", dalam John J. Donohue; John L. Esposito (peny.), *Islam dan Pembaruan Ensiklopedi Masalah-masalah* (Jakarta: CV Rajawali, 1984), hlm. 242.

⁴⁵Mustafa Mahmud, "Islam Versus Marxisme dan Kapitalisme", dalam John J. Donohue; John L. Esposito (peny.), *ibid.*, hlm. 275-279.

⁴⁶Franz Magnis-Suseno, *Sosialisme Utopis Hingga Perselisihan Revisionisme* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2000). Lihat juga Frederick Engels, *On Marx's Capital* (trj.) *Tentang Das Kapital Karl Marx* (Jakarta: Hasta Mitra, 1940), hlm. 4.

⁴⁷Stephen K. Sanderson, *Sosiologi Makro Sebuah Pendekatan Terhadap Realitas Sosial* (eds. kedua) (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1993), hlm. 169, 195.

⁴⁸Abdul Hakim, "Sosialisme Islam", dalam John J. Donohue; John L. Esposito (peny.), *op.cit.*, hlm. 230.

⁴⁹Tjokroaminoto, *Islam dan Sosialisme, op.cit.*, hlm. 10.

⁵⁰G. J. Renier. *Metode dan Manfaat Ilmu Sejarah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997), hlm. 113-118.

⁵¹Kondisi politik Hindia Belanda memiliki kaitan erat dengan perkembangan ekonomi dan politik di Negara Belanda. Tahun 1850-1870 merupakan masa jaya liberalisme di Negara Belanda, sehingga di Hindia Belanda terjadi transisi dari politik kolonial konservatif ke politik kolonial liberal. Lihat Sartono Kartodirdjo, *Pengantar Sejarah Indonesia Baru: Sejarah Pergerakan Nasional Dari Kolonialisme Sampai Nasionalisme* (Jilid 2) (Jakarta: Gramedia, 1990), hlm. 23.

⁵²Sistem pelaksanaan *Agrarische Wet* disebut *Agrarische Besluit* yang menyatalah bahwa "semua tanah yang orang lain tidak dapat membuktikan bahwa tanah itu miliknya, maka tanah tersebut adalah tanah milik negara", selebihnya lihat Mudjiono, *Hukum Agraria* (Yogyakarta: Liberty, 1992), hlm. 3.

⁵³Berbagai hasil keuntungan dari penerapan sistem sewa menyewa tanah memunculkan perilaku buruk seperti sikap boros dan suka menghutang di kalangan para punggawa keraton. Lihat S. Margana, "Kapita-

lisme Pribumi dan Sistem Agraria Tradisional; Perkebunan Kopi di Mangkunegaran, 1853-1881", *Lembaran Sejarah*, Vol.1, No.2. 1997/1998, hlm. 77.

⁵⁴Seperti yang tertera pada pasal 62 *Regeeringsreglement* 1854 (memiliki tiga ayat), di antaranya adalah ayat C, hanya memberikan kesempatan sewa-menyewa tanah untuk pihak asing maksimum 20 tahun, akan tetapi ketika diberlakukannya *Agrarische Wet* tanggal 9 April 1870, maka ditambahkan lima ayat lagi, dan yang berkaitan dengan sistem sewa menyewa, pihak asing mendapatkan peluang lebih lama hingga 75 tahun. Selebihnya lihat R. Wiradiputra, *Agraria Hukum Tanah Seperti Jang Masih Berlaku Sampai Sekarang* (Jakarta/Amsterdam: Djambatan, 1951), hlm. XII-XVI.

⁵⁵Tim Laper (peny.), *Prinsip-Prinsip Reforma Agraria Jalan Penghidupan dan Kemakmuran Rakyat* (Yogyakarta: Laper Pustaka Utama, 2001), hlm. 9.

⁵⁶Van Kol adalah seorang anggota Parlemen Belanda yang pernah bekerja selama 16 tahun di Jawa sebagai insinyur (1876-1892), *ibid.*, hlm. 10.

⁵⁷Singgih Praptodihardjo, *Sendi-sendi Hukum Tanah di Indonesia* (Jakarta: Yayasan Pembangunan, 1952), hlm. 43.

⁵⁸Laporan yang dihasilkan dari penelitian ini (*Mindere Welvaart Onderzoek-MWO*) selesai pada 1920. Tim Laper (peny.), *op.cit.*, hlm. 10.

⁵⁹*ibid.*, hlm. 11.

⁶⁰Takashi Shiraishi, *Zaman Bergerak, Radikalisme Rakyat di Jawa 1912-1926* (Jakarta: Grafiti, 1997), hlm. 35.

⁶¹Furnival dalam Takashi Shiraishi, *Zaman Bergerak, Radikalisme Rakyat di Jawa 1912-1926* (Jakarta: Grafiti, 1997), hlm. 35.

⁶²Robert Van Niel, *Elite Modern Indonesia* (Jakarta: Pustaka Jaya, 1984), hlm. 95.

⁶³Pangreh Praja adalah nama lain dari Pegawai Negeri pada zaman Hindia Belanda. Lihat Suterland, *Terbentuknya Sebuah Elite Birokrasi* (Jakarta: Sinar Harapan, 1983), hlm. 76.

⁶⁴Sebelum diberlakukanya politik etis di Indonesia, sistem pendidikan rendah untuk bumiputera telah diupayakan, akan tetapi hanya memberi pengetahuan dasar bagi bumiputera terutama untuk baca tulis. Pada 1891, pemerintah Hindia Belanda membentuk lembaga pendidikan yaitu: *Eerste Klass Inlandsche Scholen* (sekolah bumiputera angka satu),

merupakan sekolah yang diperuntukkan bagi anak-anak priayi dan mereka yang "berada". Sedangkan *Tweede Klass Inlandsche Scholen* (sekolah bumiputera angka dua), merupakan sekolah yang diperuntukkan bagi kebanyakan rakyat bumiputera.

⁶⁵Cikal bakal sekolah ini adalah pendidikan dokter Jawa yang untuk pertama kalinya dipimpin oleh Dr. P. Bleeker dan beroperasi secara resmi pada 1851. Hingga tahun 1901, sekolah dokter Jawa secara resmi ditingkatkan menjadi STOVIA dan dipimpin oleh Dr. H.F. Rool, yang kemudian dianggap sebagai bapak STOVIA. Lihat S.Z. Hadisutjipto, *Gedung STOVIA Sebagai Cagar Budaya* (Jakarta: Dinas Museum dan Sejarah DKI Jakarta, 1973), hlm. 15-19.

⁶⁶Untuk pertama kali tujuan dibentuknya sekolah dokter Jawa adalah ketika dibutuhkannya juru suntik dari kalangan penduduk untuk memberantas wabah yang terjadi di wilayah Karesidenan Banyumas., *ibid.*, hlm. 15. Ketika kebutuhan juru kesehatan semakin meningkat, maka pemerintah mengupayakan untuk memperpanjang masa studi agar para lulusannya dapat memiliki pendidikan dokter yang lengkap. Selebihnya lihat Robert Van Niel, *op.cit.*, hlm. 76.

⁶⁷Robert Van Niel, *op.cit.*, hlm. 79.

⁶⁸Kehidupan layaknya orang Eropa, secara *apik* diperlihatkan oleh Mas Marco dalam novelnya *Student Hidjo*, dimana gaya, hiburan, serta penggunaan bahasa Belanda menjadi "dunia" baru bagi kalangan terdidik Bumiputera. Mas Marco Kartodikromo, *Student Hidjo* (Yogyakarta: Bentang, tanpa tahun), hlm. 9-19.

⁶⁹Seperti yang dilakukan oleh Tirtoadhisoejo, ia akhirnya memutuskan untuk keluar dari STOVIA, kendati ia harus mengembalikan beasiswa yang diterima sejak pertama masuk sebagai mahasiswa di sekolah dokter itu. Banyak alasan ketika Tirtoadhisoejo memutuskan untuk keluar dari STOVIA, satu alasan penting adalah sebuah pilihan untuk membangun bangsa Indonesia yang mandiri dan berdiri di kaki sendiri dengan berkonsentrasi dalam organisasi SDI. Selebihnya lihat Pramodya Ananta Toer, *Jejak Langkah* (Jakarta: Hasta Mitra, 2002), hlm. 415.

⁷⁰A.P.E. Korver, *Sarekat Islam Gerakan Ratu Adil?* (Jakarta, Grafitipers, 1985), hlm. 7.

⁷¹*ibid.*, hlm. 7.

⁷²Nasionalisme Tiongkok diramu oleh Sun Yat Sen dalam sebuah Partai Rakyat Nasional yang didasarkan pada tiga prinsip rakyat (San Min Cu I). Lihat Hans Kohn, *Nasionalisme Arti dan sejarahnya* (Jakarta: Erlangga, 1984), hlm. 112-115.

⁷³Orang Jepang dikategorikan dalam Timur Asing dan status mereka sama dengan orang-orang Eropa. Perubahan status tersebut dijelaskan dalam perundang-undangan pasal 6-10 *Algemene Bepalingen Van Wetgeving* tahun 1846 dan dijalankan tahun 1848.

⁷⁴Hans Kohn, *op.cit.*, hlm. 112.

⁷⁵Munculnya rasa kebangsaan, oleh Benedict Andersons dijelaskan bahwa proses tersebut secara langsung atau tidak, bentuk dari *print capitalism effect*, di mana persebaran buku serta media tulis lain selalu hadir dan disaksikan setiap hari oleh kaum bumiputera. Efek *print capitalism* itulah yang akhirnya menggugah kesadaran untuk bersatu sebagai sebuah bangsa. Benedict Andersons, *Imagined Communities* (Yogyakarta, Insist dan Pustaka Pelajar, 2001), Bab 5.

⁷⁶Harry J. Benda, *Bulan Sabit dan Matahari Terbit Islam Indonesia Pada Masa Pendudukan Jepang* (Jakarta: Pustaka Jaya, 1980), hlm. 53.

⁷⁷Kata Syarekat selanjutnya ditulis Sarekat, sedangkan kata Prijaji, selanjutnya ditulis Priayi. Hanya ketika dalam kutipan langsung, penulis tetap menggunakan sesuai aslinya. Perubahan masing-masing kata dalam tulisan ini semata-mata untuk konsistensi penulis.

⁷⁸"Pendahoeloean M.P. taoen 1909" *Medan Prijaji*, 1909, hlm. 8.

⁷⁹*Medan Prijaji*, 1909, hlm. 7.

⁸⁰*Medan Prijaji*, 1909, hlm. 10.

⁸¹Motto tertera pada halaman muka setiap terbitan surat kabar Medan Prijaji.

⁸²Surat kabar Medan Prijaji menjadi penyambung komunikasi bagi bumiputera. Selain itu, massifitas Bumiputera sebagai pembaca Medan Prijaji tidak dapat diragukan, lihat tajuk *Soeratnya Orang-orang Desa Bapangan pada Hoofd Red. M.P. Medan Prijaji*, tahun 1909, hlm. 15-18.

⁸³Mengenai ide serta gagasan pendirian Boedi Oetomo (Usaha Luhur), selengkapnya lihat Soewarno (Sekretaris 1 BU), *Circulair* (Surat edaran tentang pendirian Boedi Oetomo, 20 Mei 1908, *Weltevreden*: 1908). Lihat Akira Nagazumi, *Bangkitnya Nasionalisme Indonesia: Budi Utomo 1908-1918* (Jakarta: PT Pustaka Utama Grafiti, 1989).

⁸⁴Goenawan Mangoenkoesoemo, *De Geboorte Van Boedi Oetomo* (lahirnya Boedi Oetomo) dalam Pitut Soeharto-drs. A. Zainoel Ihsan, *Cahaya di kegelapan, Capita Selecta kedua Boedi Oetomo dan Sarekat Islam pertumbuhannya dalam dokumen asli* (Jakarta: Jayasakti, 1981), hlm. 25-39.

⁸⁵Pembentukan Boedi Oetomo di Weltevreden dilakukan pada 1909. Lebih dari 500 orang memadati halaman Kebun Binatang Weltevreden pada saat pembentukan organ tersebut. Lihat "Boedi Oetomo" *Medan Prijaji*, 1909, hlm. 75-80 bersambung.

⁸⁶Masa awal pendirian Boedi Oetomo, Soetomo masih terdaftar sebagai siswa STOVIA menginjak tahun ke-3 dan menjabat sebagai Presiden Pengurus Budyatama Cabang Jakarta. Pitut Soeharto-drs. A. Zainoel Ihsan, *Kapita Selecta...*, *op.cit.*, hlm. 57-64.

⁸⁷Mengenai ide dasar pembentukan SDI secara jelas lihat tulisan S.A.A. Badjenet-R.M. Tirtoadisoerjo, "Sarikat Dagang Islamiah" *Medan Prijaji*, 1909, hlm. 181-195.

⁸⁸"Statuten Perhimpunan Sarikat Dagang Islamiah" *Medan Prijaji*, 1909, hlm. 199.

⁸⁹"Sarekat Dagang Islamiah" *Medan Prijaji*, 1909, hlm. 181.

⁹⁰Yang diperbolehkan menjadi anggota SDI adalah semua orang yang beragama Islam. Sedangkan yang tidak beragama Islam tetap diperbolehkan bergabung dan menjadi anggota kehormatan. Selengkapnya lihat "Statuten SDI" "Fazal 4. Perhimpunan ada terkait dari anggota-anggota biasa dan anggota kehormatan" *Medan Prijaji*, 1909, hlm. 199.

⁹¹Penjelasan lebih lanjut mengenai ke-agen-an (*agency*) lihat Laura M. Ahearn, *Annual Review Anthropolgi* 2001.30:109-137. Dalam *Agency, Knowledge and nature 1&2* (Yogyakarta: Academy Professorship Indonesia dan Sekolah Pascasarjana Universitas Gadjah Mada, 2007), hlm. 112.

⁹²*Medan Prijaji*, 1909, hlm. 191.

⁹³Tamar Jaya, "Menurut H. Samanhudi", *Tahun 1905 Hari Kebangkitan Nasional* (Jakarta: Prasarana dalam Seminar Sejarah Perjuangan Islam Indonesia, 7-10 Mei 1971), hlm. 17.

⁹⁴Tamar Jaya, "Keterangan Tjokroaminoto" *Tahun 1905 Hari Kebangkitan Nasional*, *op.cit.*, hlm. 19.

⁹⁵*ibid.*, hlm. 19-20.

⁹⁶"Huishoudelijk Reglement SDI" (aturan yang berlaku SDI) *Medan Prijaji*, 1909., hlm. 205.

⁹⁷"Verslag Congres S.I. Yogyakarta, 19-20 April 1914, Suatu Penjelasan" *Darmokondo*, April 1914.

⁹⁸Bandingkan dengan Bernhard Dahm, *Sukarno and the Struggle for Indonesian Independence* (Ithaca and London: Cornell University Press, 1969), hlm. 13-14. Bernard mencatat keanggotaan SDI di Jawa antara tahun 1912-1914, sebanyak 366,913 orang, dan antara tahun 1915-1915, keanggotaan walaupun terdapat penurunan pada tahun 1915-1917, akan tetapi sampai tahun 1918, jumlah keanggotaan kembali mengalami peningkatan hingga mencapai 389,410.

⁹⁹Berkaitan dengan tahun pendirian Sarekat Islam, terdapat berbagai kalangan yang masih memperdebatkan bahwa SI adalah organisasi bumiputera yang lebih tua daripada Budi Utomo. Akan tetapi, penulis disini tidak akan menyertakan perdebatan hal tersebut, karena hal demikian tidak menjadi bahasan substansi dari tulisan ini. Mengenai berbagai argumentasi yang mendukung seputar pendirian awal SI diteliti lebih lanjut oleh Ahmad Timur Jaylani dalam tesis M.A., *The Sarekat Islam Movement: Its Contribution to Indonesian Nationalisme* (Montreal: McGill University, 1958). Jejak analisis Jaylani juga diikuti oleh Safrizal Rambe, *Sarekat Islam Pelopor Bangkitnya Nasionalisme Indonesia 1905-1942* (Jakarta: Yayasan Kebangkitan Insan Cendekia, 2008).

¹⁰⁰Asisten Residen Kepolisian Surabaya (schippers) kepada Residen Surabaya, 1913, dalam Sartono Kartodirdjo, *Sarekat Islam Lokal, op.cit.*, hlm. 271.

¹⁰¹Fatimah Binti Maimun adalah seorang perempuan yang beragama Islam dan meninggal di Kecamatan Leran, Gresik Jawa Timur. Makamnya terkenal dengan sebutan Makam Panjang. Sebutan ini banyak kalangan memberikan tafsiran berbeda-beda, akan tetapi, bentuk riil makamnya adalah panjang mencapai 8-10 meter. H.J. De Graaf dan TH. Pigeaud, *Kerajaan Islam Pertama di Jawa Tinjauan Sejarah Politik Abad XV dan XVI* (terj.) (Jakarta: PT. Pustaka Utama dan KITLV, 1986), hlm. 22.

¹⁰²Wali sanga adalah penyebar agama Islam khususnya di pulau Jawa. Wali sanga dikisahkan sebagai sebuah perkumpulan para wali yang berjumlah sembilan. Jumlah tersebut tetap sembilan dan di setiap periode tertentu (meninggal) akan dilakukan pengangkatan seorang

wali sebagai pengganti. Diperkirakan tahun 1404 M – 1436 M, telah terjadi tiga kali pergantian keanggotaan dalam perkumpulan sembilan wali tersebut. Lihat Moh. Zainal S., *Sedjarah Bunga dan Bergelornya Pesantren Sampurnan* (Gresik: BKK Maskumambang, 1962), hlm. 3-4.

¹⁰³Uraian panjang mengenai penyebaran Islam di Jawa selebihnya dapat dilihat dalam H.J. De Graaf dan Th. Pigeaud, *op.cit.*, hlm. 20-23.

¹⁰⁴Perlu dijelaskan lebih lanjut, bagi semua umat Islam, apabila dari setiap ucapan dan perbuatannya untuk kepentingan siar Islam dianggap sebagai mubaligh. Berkaitan dengan siapa orang Islam yang datang ke Indonesia dan mula-mula berada di wilayah mana dalam proses penyebaran Islam, lihat Aboebakar Aceh, *Sekitar Masuknya Islam ke Indonesia* (Semarang: CV. Ramadhani, 1979), hlm. 23.

¹⁰⁵Hans Kohn, *op.cit.*, hlm. 115-116.

¹⁰⁶Kees Van Dijk, *Ketakutan Penjajah, 1890-1918 Pan-Islamisme dan Persekongkolan Jerman-India*, dalam Nico J.G. Kaptain (ed.), *op.cit.*, hlm. 31-41.

¹⁰⁷Relasi antara para ulama Indonesia dengan ulama Timur Tengah telah terjalin jauh sebelum abad ke-20. Hubungan mereka lebih didasarkan pada proses penyebaran ilmu pengetahuan agama Islam dan secara turun-temurun menjadi jaringan ulama di berbagai Nusantara. di Aceh terdapat Abdurrauf Sinkil, Nuruddin Ar-Raniri, serta dari Sulawesi terdapat Muhammad Yusuf al-Maqassari dan berbagai para syaikh atau kyai yang tersebar di Jawa dan pulau lainnya, *ibid.*, bab IV "Para Perintis Gerakan Pembaruan Islam".

¹⁰⁸Snouck Hurgronje memberikan kritik tajam mengenai perilaku berhaji bagi umat Islam Indonesia khususnya, ia mengatakan bahwa naik haji lebih pada penghambur-hamburan uang bagi kalangan umat Islam. Perjalanan-perjalanan mereka ke Mekah lebih mempunyai arti komersil daripada keagamaan. Lihat Snouck Hurgronje, *Perayaan Mekah, seri INIS jilid V* (Jakarta: INIS, 1989), hlm. 108.

¹⁰⁹Lihat Sartono kartodirdjo, *The Peasants' Revolt of Banten in 1888* (The Hague: Nijhoff, 1966), hlm. 219. Bandingkan dengan Anthony Reid, "Pan-Islamisme Abad Kesembilan Belas di Indonesia dan Malaysia" dalam Nico J.G. Kaptain (ed.), *op.cit.*, hlm. 4. Anthony Reid mencatat bahwa jumlah jamaah haji di akhir abad ke-19 antara 4000-8000 orang.

¹¹⁰Rosihan Anwar, *Pergerakan Islam dan Kebangsaan Indonesia* (Jakarta: PT. Kartika Tama, 1971), hlm. 14-15.

¹¹¹Istilah Pesantren di sini hanya untuk menunjukkan sifat atau model pendidikan tradisional. Model pendidikan tersebut sering kali memanfaatkan masjid, langgar, Surau, dan lain-lain sebagai tempat untuk belajar ilmu pengetahuan, khususnya agama Islam. Lihat Mastuhu, *Dinamika Sistem Pendidikan Pesantren, Suatu Kajian Tentang Unsur dan Nilai Sistem Pendidikan Pesantren* (Jakarta: INIS, 1994), bab IV.

¹¹²*ibid.*, hlm. 17-18.

¹¹³Penjelasan mengenai kyai, lihat Clifford Geertz, *Santri, Abangan, Priayi dalam Masyarakat Jawa* (Jakarta: Pustaka Jaya, 1981), hlm. 241-247.

¹¹⁴Martin van Bruinessen, *NU Tradisi Relasi-Relasi Kuasa Pencarian Wacana Baru* (Yogyakarta: LKiS, 1994), hlm. 17.

¹¹⁵Di Sumatera, Islam menjadi sebuah semangat baru dalam melawan praktik-praktik adat yang dianggap tidak baik menurut ajaran Islam. Seperti yang dilakukan oleh Tuanku Nan Tua, ia merupakan tokoh pembaru Islam yang menolak praktik adat yang dianggap telah keluar dari nilai-nilai Islam. Tuanku Nan Tua kembali ke Sumatera tepatnya di Kota Tua, Agam Selatan, setelah bertahun-tahun belajar agama Islam di Mekah. lihat Cristin Dobin, *Kebangkitan Islam Dalam Ekonomi Petani yang Sedang Berubah* (Jakarta: INIS, 1992), hlm. 149.

¹¹⁶Menurut sensus penduduk tahun 1905, dari 37 juta penduduk Hindia Belanda terdapat 35 juta memeluk agama Islam. Lihat *Encyclopedie van Nederlandsch Indie II, cet.I.*, hlm. 168. Bagi umat Islam, orang-orang Belanda adalah dianggap sebagai orang kafir. Seperti halnya orang Aceh, ia memaknai bahwa orang Belanda adalah orang *kape* (kafir). Lihat Ibrahim Alfian, *Perang di Jalan Allah* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1987), hlm. 17.

¹¹⁷Sikap-sikap tersebut sering kali berbeda dengan para kyai yang ada di luar Nahdlatul Ulama' (NU), seperti halnya Kyai Achmad Dahlan ketua Muhammadiyah yang sering kail dianggap sebagai organ pembaru Islam. Andre Feillard, *NU vis a vis Negara Pencarian Isi Bentuk dan Makna* (Yogyakarta: LKiS, 1999), hlm. 15.

¹¹⁸Rosihan Anwar, *op.cit.*, hlm. 31.

¹¹⁹Sinkretisme budaya selalu menyertai proses persebaran Islam di berbagai wilayah terutama Indonesia. Sebagaimana sifat penyebaran Islam yang lembut (melalui tradisi), maka percampuran antara budaya lokal dan wacana Islam cenderung berjalan seiringan. Seperti yang umum menjadi ciri orang-orang Islam Jawa yang menjalankan Haji di Mekah.

Orang-orang Islam Jawa ini sering dicemooh sebagai orang Islam yang masih berbau mistik atau setengah penyembah berhala. Lihat Anthony Reid, "Pan-Islamisme abad Kesembilan Belas di Indonesia dan Malaysia" dalam Nico J. G. Kaptain (ed.), *op.cit.*, hlm. 4.

¹²⁰Jejaring mengenai hubungan Timur tengah dengan Indonesia pada dasarnya telah terjalin sudah lama. Para pewarta Islam (syaiikh) menjelang abad ke-17 dan 18, mereka telah menyebar dengan pesat diberbagai penjuru dunia (juga Indonesia). Mengenai genealogis jaringan para ulama, selengkapnyalihat Azyumardi Azra, *Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara abad XVII dan XVIII akar pembaruan Islam Indonesia* (cet.2) (Jakarta: Prenada Media, 2005), bab 1. Seperti halnya yang terjadi pada perang Aceh, bendera Negara Turki (bulan sabit) telah dikibarkan oleh para militer Turki yang saat itu sedang membantu para pejuang Aceh dalam melawan penjajah Belanda. Lihat Anthony Reid, *Pan-Islamisme Abad Kesembilan Belas di Indonesia dan Malaysia* dalam Nico J. G. Kaptain, (ed.), *op.cit.*, hlm. 1-27.

¹²¹Hermanu, *Mur Jangkung Jan Pieterszoon Koen Babad VOC* (Yogyakarta: Bentara Budaya, 2005), hlm. 132.

¹²²Dalam *Nederlandsch Staatblad*, No.22, pemerintah menetapkan larangan seseorang berkumpul (*rechtspersoon*), perhimpunan, serta *vergadering* yang dapat merusak ketertiban dan keselamatan oemoem (*openbare orde en rust*), lebih lanjut lihat Tjokroaminoto, "Rechtspersoon" *Darmokondo* (berseri), 13, 15, 18 Mei 1914.

¹²³Statuten Perhimpoean "Central Sarekat Islam" 1916, Fatzal 1, "Nama, Tempat, dan Lamanja", dalam A.P.E. Korver, *Sarekat Islam Gerakan Ratu Adil?* (Jakarta: Grafiti Pers, 1985), hlm. 215.

¹²⁴Statuten Perhimpoean "Central Sarekat Islam" 1916, Fatzal 3, "Maksoed dan Pekerdjaannya", *ibid.*, hlm. 215

¹²⁵Statuten Perhimpoean "Central Sarekat Islam" 1916, Fatzal 19 "Bestur Jang Sekarang", A.P.E. Korver, *op.cit.*, hlm. 216. Bandingkan dengan Takashi Shiraishi, *op.cit.*, hlm. 101.

¹²⁶Berkaitan dengan sifat millenearisme, mesianisme di Indonesia, lihat Sartono Kartodirjo, *Protest Movements In Rural Java, A Study of Agrarian Unrest in the Nineteenth and early Twentieth Centuries* (Kuala Lumpur: Oxford University Press), Bab III, "Messianic Movements".

¹²⁷"Tjikenmeuh Klapa Senggeh di Bogor, Mitsalnja "S.I." dan "antinja"" , *Medan Moeslimien*, 1915, hlm. 244-245.

¹²⁸"Consulat General Ottoman Batavia", *Medan Moeslimien*, 1915, hlm. 170-172.

¹²⁹"Sedikit Seroean" *Medan Moeslimien*, 1915, hlm. 172.

¹³⁰"Hal Djoemaah Hadji di Mekah", Consulat general Ottoman di Betawi", *Medan Moeslimien*, 1915, hlm. 116.

¹³¹"Chabar Perloe" *Medan Moeslimien*, 1915, hlm. 90-92. Tindak lanjut dari komite tersebut adalah dengan menampung berbagai sumbangan dari berbagai pihak baik sanak famili atau dari berbagai kalangan yang merasa perhatin atas persoalan tersebut. Lihat D.K. Ardiwinata, "Kabar Perloe", *Medan Moeslimien*, 1915, hlm. 144.

¹³²Berkaitan dengan proses kristenisasi yang berlangsung di Indonesia, dapat dilihat pada, artikel ini dikirim dari Mesir tanggal 1 Maret tahun 1915, "Di Antara Pengiriman Mempertibarkan Agama Christen dan Orang Islam di Poelau Djawa" *Medan Moeslimien*, 1915, hlm. 93-95. Berkaitan dengan perdebatan Islam dan Kristen, lihat A.H. H. Soerodiprono, "Djawaban pada karangan Toeang Z. Noerdin jang terbit di dalam Bentara-Hindia No. 39 tanggal 25 Mei 1916" *Medan Moeslimien*, 1916, hlm. 293-296.

¹³³Pidato H.O.S. Tjokroaminoto pada 1e Nationaal Congres, 17-24 Juni 1916, dalam Zainoel Ihsan, Pitut Soeharto, *Aku Pemuda Kemarin di Hari Esok, Capita Selecta Kumpulan Tulisan, Lezing, Pidato Tokoh Pergerakan Kebangsaan 1913-1938* (Jakarta: Jayasakti, 1981), hlm. 13-14.

¹³⁴Pemberian legalitas terhadap SI dari Gubernur Jenderal Idenburg mendapat kritikan pedas dari orang Belanda lainnya seperti halnya Van Harsters hooftredacteur van het Nieuws van den dag voor N.I. W.K.S. lihat Van Haastert, *De Sarekat Islam* (Weltevreden Albrecht & Co. 1916), hlm. 14-20.

¹³⁵Pidato H.O.S. Tjokroaminoto pada 1e Nationaal Congres, 17-24 Juni 1916, *op.cit.*, hlm. 15.

¹³⁶Pidato H.O.S. Tjokroaminoto pada 1e Nationaal Congres, 17-24 Juni 1916, *op.cit.*, hlm. 15-16.

¹³⁷Pidato H.O.S. Tjokroaminoto pada 1e Nationaal Congres, 17-24 Juni 1916, *op.cit.*, hlm. 16.

¹³⁸Berkaitan dengan kapitalisme yang bertentangan dengan Islam, akan dijelaskan lebih lanjut dalam bab IV.

¹³⁹Lihat "Huishoudelijk Reglement (Atoeran Jang Berlakoe) Sarikat Dagang Islamiah di Buitenzorg" Fatsal 2, *Medan Prijaji*, 1909, hlm. 205. Bandingkan dengan A.P.E. Korver, *Sarekat Islam Gerakan Ratu adil?* (Jakarta: Grafiti Pers, 1985) (lampiran) "Anggaran Dasar Sarekat Dagang Islam di Surakarta 1912" Pasal 2, hlm. 202.

¹⁴⁰Suhartono, *Sejarah Pergerakan Nasional Dari Budi Utomo Sampai Proklamasi 1908-1945* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1994), hlm. 36.

¹⁴¹Pidato H.O.S. Tjokroaminoto pada *2e Nationaal Congres*, 20-27 October di Bandung, dalam dalam Zainoel Ihsan, Pitut Soeharto, *Cahaya di Kegelapan, Capita Selecta Kedua Boedi Oetomo dan Sarekat Islam Pertumbuhannya dalam Dokumen Asli* (Jakarta: Jayasakti, 1981), hlm. 291-292.

¹⁴²Sejak digulirkannya kebijakan desentralisasi Hindia sebagai bentuk *zelfbestuur* yang terepresentasi dalam dewan kota dan daerah, maka para bupati serta berbagai anggota administratif lainnya menduduki posisi dewan tersebut. Berbagai sikap dan tindakan yang diperlihatkan oleh para pangreh praja tersebut ternyata hanya sedikit dari para pangreh praja yang benar-benar berjuang untuk kemakmuran bumiputera. Sikap-sikap *mem-bebek*, nepotisme, serta mengumpulkan keuntungan pribadi justru menjadi perilaku buruk baru bagi pangreh praja bumiputera. Dengan demikian, sikap seperti itu semakin membawa bumiputera mengalami keterpurukan mendalam. Selengkapnya lihat Heather Sutherland, *Terbentuknya Sebuah Elite Birokrasi* (Jakarta: Penerbit Sinar Harapan, 1983), hlm. 130-137.

¹⁴³Pidato H.O.S. Tjokroaminoto pada *2e Nationaal Congres*, 20-27 October di Bandung, *op.cit.*, hlm. 292.

¹⁴⁴Pidato H.O.S. Tjokroaminoto pada *2e Nationaal Congres*, 20-27 October di Bandung, *op.cit.*, hlm. 293.

¹⁴⁵Sampai abad ke-19, sistem kenaikan pangkat dalam pangreh praja tidak didasarkan pada kriteria obyektif, seperti halnya pendidikan atau kesenioran. Munculnya berbagai bentuk sikap menjilat dan nepotisme sejak 1867, adalah akibat adanya hak bagi para residen untuk menunjuk dan mengangkat semua pejabat yang berpendapatan kurang dari 100 gulden sebulan (sama dengan semua priayi di bawah pangkat *wedana*). Selengkapnya lihat Sutherland, *op.cit.*, hlm. 80.

¹⁴⁶Pidato Abdoel Moeis pada 2e Nationaal Congres, 20-27 October di Bandung, *op.cit.*, hlm. 295.

¹⁴⁷Sutterland, *op.cit.*, hlm. 144.

¹⁴⁸Van Niel, *op.cit.*, hlm. 175.

¹⁴⁹Beberapa nama anggota *Volksraad* telah ditetapkan dan total keseluruhan yang terjaring adalah 19 orang. 9 nama dari orang-orang belanda, dan 10 lainnya dari bumiputera. Lihat nama-nama serta berbagai komentar tentang nama-nama anggota *Volksraad* tersebut dalam *Sinar Djawa*, 19 Januari 1918, hlm. 16.

¹⁵⁰*Sinar Djawa*, 19 Januari 1918, hlm. 16.

¹⁵¹Di Belanda, kelompok Sosialis, terkait dengan adanya perbedaan cara pandang dalam memberlakukan bentuk-bentuk kolonisasi di Indonesia, akhirnya mengalami perpecahan. Satu pihak adalah kelompok revisionis yang tetap bersikukuh terhadap penerapan nilai-nilai Sosialisme dan bertindak lebih moderat. Kelompok ini tergabung dalam SDAP. Di pihak lain, adalah kelompok ortodoks. Kelompok ini berhaluan Marxisme ortodok yang berjuang secara revolusioner dan cenderung menolak perjuangan melalui perlemen. Kelompok ini tergabung dalam *Sociaal Democratische Partij* (SDP). Lihat Bambang Sulisty, *Pemogokan buruh, Sebuah Kajian Sejarah* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1995), hlm. 42-43.

¹⁵²Djody Gondokusumo dan Amelz, *Parlemen Indonesia* (Jakarta: Bulan Bintang, 1951), hlm. 6-7.

¹⁵³Van Niel, *op.cit.*, hlm. 242.

¹⁵⁴Deliar Noer, catatan No.4., *op.cit.*, hlm. 131.

¹⁵⁵Van Niel, *op.cit.*, hlm. 243.

¹⁵⁶Parakitri Simbolon, catatan No. 158., hlm. 591.

¹⁵⁷Parakitri Simbolon, catatan No. 158, *op.cit.*, hlm. 591

¹⁵⁸Deliar Noer, catatan No. 65, *op.cit.*, hlm. 131.

¹⁵⁹*Sinar Hindia*, 16 Mei 1919., hlm. 100.

¹⁶⁰Deliar Noer, *op.cit.*, hlm. 131.

¹⁶¹Insulind berdiri sejak 1907 sebagai wadah bagi orang-orang Indo yang berada di Hindia Belanda.

¹⁶²Berkaitan dengan pergerakan kaum Indo di Indonesia, selengkapnya lihat J. Th. Petrus-Blumberger, *De Indo-Europeesche Beweging in Nederlandsch Indie* (Haarlem: H.D. Tjeenk Willink & zoon N.V., 1939), hlm. 38-40.

¹⁶³Tujuan Indische Partij adalah membangun semangat patriotisme seluruh Bangsa Hindia terhadap tanah yang telah menghidupi dan mendorong mereka untuk bekerja sama, atas dasar sama rata secara kenegaraan, dalam mengembangkan tanah air Hindia dan mempersiapkan bagi terwujudnya suatu bangsa yang merdeka. Diambil dari bagian tulisan E.F.E. Douwes Dekker, De Indische Partij, *Haar Wezen en Haar Doel*, 25 Desember 1925, hlm. 2.

¹⁶⁴Berkaitan dengan perjalanan Hidup Sneevliet dalam memperjuangkan Sosial Demokrasi di Hindia Belanda, lihat A. Baars en H. Sneevliet, *Het Proces Sneevliet dalam Socialisme in Indonesie* (Deel 2) (Leiden: KITLV Uitgeverij, 1991), hlm. 11-17.

¹⁶⁵Beberapa nama anggota ISDV pada 1917 adalah: D.J.A. Westerveld, H.J.F.M. Sneevliet, C. Hartogh, A. Baars dan beberapa nama lainnya dapat dilihat dalam A. Baars en H. Sneevliet, *ibid.*, hlm. 1.

¹⁶⁶Lihat Karl Marx, *Kapital, Sebuah Kritik Ekonomi Politik, Buku III, Proses Produksi Kapitalis secara Menyeluruh*, (trj. Oey Hay Djoen) (Jakarta: Hasta Mitra-Ultimus- Institute for Global Justice, 2007), hlm. 20-53.

¹⁶⁷Lihat G.W.F. Hegel, *Filsafat Sejarah G.W.F. Hegel*, (Terj. Cuk Ananta Wijaya) (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001), hlm. 307.

¹⁶⁸Franz Magnis-Suseno, *Pemikiran Karl Marx Dari Sosialisme Utopis ke Perselisihan Revisionisme* (Jakarta: Gramedia, 2005), hlm. 45-55.

¹⁶⁹Tujuan atau arah perjuangan Semaoen dapat dilihat dalam novelnya yang diterbitkan pertama kali di Semarang tahun 1920. Semaoen, *Hikayat Kadiroen* (Yogyakarta: Yayasan Bentang Budaya, 2000). Berkaitan dengan langkah kongkret gerakan Semaoen dalam SI di Semarang, lihat Dewi Yuliati, *Semaoen, Pers Bumiputera, dan Radikalisasi Sarekat Islam Semarang* (Semarang: Bendera, 2000).

¹⁷⁰Rosihan Anwar, *Pergerakan Islam dan Kebangsaan Indonesia* (Jakarta: PT. Kartika Tama, 1971), hlm. 30.

¹⁷¹Mengenai biografi Tan Malaka, lihat *Memperingati 44 Tahun Wafatnya Pahlawan Kemerdekaan Nasional Tan Malaka* (Jakarta: Yayasan Massa, 1993).

¹⁷²Para anggota SI Semarang dalam mempelajari Marxisme cenderung menggabungkan fenomena yang sedang dialami oleh rakyat Indonesia yang saat itu banyak memiliki kesamaan dengan yang dimaksudkan oleh Marx. Dengan demikian, semangat perjuangan melalui garis Marxisme menjadi lebih menarik untuk diterapkan sebagai wujud

pergerakan melawan kolonialisme Belanda. Ketika para pengagum Komunis belajar di negara asal ideologi tersebut berkembang, maka satu persatu dari mereka ingkar terhadap Komunisme. Lebih lanjut lihat Soe Hok Gie, *Di bawah Lentera Merah* (Jakarta, 6 September 1964), Bab V "Sekadar Catatan".

¹⁷³Selengkapnya lihat George Mc. Turnan Kahin, *Nationalism and Revolution in Indonesia* (Ithaca and London: Cornell University Press, 1970), hlm. 72-73.

¹⁷⁴Zbigniew Brzezinski, *Kegagalan Besar Muncul dan Runtuhnya Komunisme Dalam Abad Kedua Puluhan* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1990), hlm. 15.

¹⁷⁵Rosihan Anwar, *Pergerakan Islam dan Kebangsaan Indonesia*, (Jakarta: P.T. Kartika Tama, 1971), hlm. 50.

¹⁷⁶Semaoen, *Sinar Hindia*, 26 Agustus 1918, hlm. 173.

¹⁷⁷*Sinar Hindia*, 8 Mei tahun 1918: 19. Tekanan Pemerintah Belanda terhadap buruh pada prosesnya akan lebih jelas terlihat pada 1921 ketika dicabutnya hak-hak yang dimiliki buruh oleh Gubernur Jenderal Dirk Fork. Beberapa hak buruh yang dicabut adalah: hak mendapat upah yang layak serta hak mendapatkan upah lembur. Lihat Takashi Shiraishi, *Zaman Bergerak, Radikalisme Rakyat di Jawa 1912-1926* (Yogyakarta: Grafiti, 1997), hlm. 317.

¹⁷⁸*Neratja*, 31 Oktober 1918, dalam Deliar Noer, *Gerakan Moderen Islam di Indonesia 1900-1942* (Jakarta: LP3ES, 1994), hlm. 134-135.

¹⁷⁹Lihat A.K. Pringgogidgo, *Sedjarah Pergerakan Rakjat Indonesia* (Djakarta: Pustaka Rakjat, 1950), hlm. 98.

¹⁸⁰Robert Van Niel, *Elite Modern Indonesia* (Jakarta: Pustaka Jaya, 1984), hlm. 206.

¹⁸¹Usulan Suryopranoto, terkait kedudukan pusat PPKB ditempatkan di Yogyakarta sangat wajar, hal ini disebabkan, Suryopranoto adalah berasal dari Yogyakarta, dan saat itu Yogyakarta merupakan pusat kekuatan Muhammadiyah. Lihat. "R. M. Soerjopranoto, Satoe di antara gembong pergerakan rakjat jang paling mempoenjai "darah poetih" diloear dan didalam!" *Pandji Islam*, 3 Juli 1939, hlm. 327-326.

¹⁸²*Sinar Hindia*, 24 Februari 1920, hlm. 38.

¹⁸³"Het S.I. Congres", *De Indische Gids*, 40, 1918, hlm. 215-218; dibandingkan dengan Takashi Shiraishi, *Zaman Bergerak...*, *op.cit.*, hlm. 141.

¹⁸⁴Marthodarsono adalah salah satu anggota SI Surakarta. Menurut Takashi, disebarnya artikel Djojodikoro oleh Marthosarsono adalah terkait pertentangan dalam SI berkaitan dengan penciptaan nilai-nilai kebangsaan yang digagas oleh Djawa Dipa. Pertentangan yang dimaksudkan adalah berkaitan dengan diterapkannya bahasa Jawa atau Melayu sebagai ciri nilai kebangsaan atau nilai-nilai demokratis bangsa Indonesia. Dalam hal ini, Tjokroaminoto pada mulanya tidak begitu bersemangat dalam hal tersebut dan justru bersikukuh untuk menerapkan bahasa melayu, akan tetapi ketika gagasan dari Djawa Dipa mulai berkembang, Tjokroaminoto mulai tertarik dan ikut menyokong gagasan tersebut. Dalam proses dukung mendukung gagasan dari Djawa Dipa, muncullah artikel Djojodikoro yang disebar oleh Marthodarsono di S.K. Djawi Hisworo. Mulai saat itulah, Tjokroaminoto mendapat momentum untuk kembali menegaskan sikapnya bahwa gagasan yang dikembangkan oleh Djawa Dipa berkaitan dengan penerapan bahasa Jawa *ngoko* menjadi ciri kebangsaan Indonesia, terutama bangsa Jawa, tidaklah tepat. lihat Takashi Shiraishi, *op.cit.*, hlm. 143-147.

¹⁸⁵ Takashi Shiraishi, *op.cit.*, hlm. 144.

¹⁸⁶Para anggota TKNM di Surabaya adalah gabungan dari berbagai organisasi yang telah dikembangkan oleh Tjokroaminoto. Seperti halnya al-Irsyad dan berbagai anggota SI Surabaya lainnya. Masuknya Tjokroaminoto sebagai ketua al-Irsyad Surabaya berarti sebuah tanda telah kembalinya para orang-orang Arab dan keturunan di bawah kontrol Tjokroaminoto. Hal demikian sangat jelas terlihat, di mana al-Irsyad merupakan wadah bagi orang-orang Arab dan keturunan di Indonesia.

¹⁸⁷"Vergadering Moeslimin Jang Besar di Solo" *Medan Moeslimien*, 1918, hlm. 76.

¹⁸⁸Tidak terbentuknya TKNM di Yogyakarta karena di daerah ini telah berdiri Muhammadiyah yang juga sejak awal pendiriannya telah berkomitmen untuk berjuang dengan SI. Berbeda halnya di Semarang, Semarang merupakan basis dari ISDV dan organ buruh trem VSTP yang telah dimainkan oleh Semaoen bersama dengan para propagandis komunis lainnya yang tidak terlalu tertarik dengan TKNM seperti yang diinginkan oleh Tjokroaminoto. Dengan demikian, tidak munculnya TKNM di Semarang adalah sebuah hal yang sangat logis bagi keberadaan dan afiliasi kelembagaannya tersebut.

¹⁸⁹Selengkapny proses pembentukan sub atau cabang TKNM Solo, lihat "Vergadering Moeslimin Jang Besar di Solo" *Medan Moeslimien*, 1918, hlm. 73.

¹⁹⁰"Vergadering Moeslimin Jang Besar di Solo" *Medan Moeslimien*, 1918, hlm. 77.

¹⁹¹Poerwodihardjo (officier T.K.N.) (Palgoenadi), "Javaansche Nationalisme (satoe koemidi)" *Medan Moeslimien*, 1918, hlm. 80-82. Cetak miring sesuai aslinya.

¹⁹²HZ. "Hubbul Wathon Minaal Imaan (Kasih akan tanah ajer itoe sebagian dari pada iman)", *Medan Moeslimien*, 1918, hlm. 220-222. Berkaitan dengan cinta tanah air, lihat juga artikel dari D.K. "Agama Islam dan toedjoeannja", *Medan Moeslimien*, 1918, hlm. 158-159.

¹⁹³Dalam sebuah *qoul* disebutkan bahwa *Hubbul wathon minaal iimaan* (cinta tanah air adalah sebagian dari iman). Lihat penjelasan secara luas dalam *al-qawa'id al-khams al-kubra* lima kaidah induk) dalam M. Ali Haidar, *Nahdlatul Ulama dan Islam di Indonesia, Pendekatan Fikih dalam Politik* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1998), hlm. 9.

¹⁹⁴*Sinar Hindia*, 31 Juli 1920, hlm. 146. Lihat juga Robert Van Niel, *op.cit.*, hlm. 205.

¹⁹⁵*Neratja*, 11 Juli 1921.

¹⁹⁶*Sinar Hindia*, 25 Februari 1920, hlm. 39.

¹⁹⁷"Pro betoel-betoel Pro" *Medan Moeslimien*, 1919, hlm. 16-18.

¹⁹⁸Sebelum membentuk SATV, Misbach menulis sebuah artikel yang berjudul "Sroean Kita" dalam *Medan Moeslimien* tahun 1918. Dalam artikel tersebut, Misbach menjelaskan secara panjang lebar berkaitan dengan memperjuangkan Islam di Indonesia. Menurutnya, memperjuangkan Islam tidak boleh dilakukan setengah-setengah, melainkan harus sekuat tenaga, harta dan benda, bukan sebaliknya memanfaatkan organ gerakan Islam untuk mencari keuntungan. Di sini Misbach sedikit menyindir Muhammadiyah, yang dianggap banyak kalangan anggotanya lebih mencari keuntungan dalam Muhammadiyah dibanding memperjuangkan Islam itu sendiri.

Misbach juga menyinggung tentang keberadaan agama Kristen yang didukung sepenuhnya oleh Belanda yang Kapitalistik. Misbach menganjurkan untuk memperkuat Islam dan menolak Kristen. Penolakan Kristen yang dimaksud oleh Misbach, pada dasarnya bukan pada

persoalan agama salah atau benar, melainkan Kristen adalah agama yang disebar oleh Belanda, di mana Belanda adalah kapitalis. Penyerangan Misbach terhadap Kristen lebih didasarkan pada sikap kapitalisme yang dilakukan oleh Belanda semata. Berkaitan dengan tafsiran lain, lihat Takashi Shiraishi, *op.cit.*, hlm. 181-183.

¹⁹⁹Berkaitan dengan nama dan tempat sekolah yang diperjuangkan oleh organ-organ Islam, lihat "Boeah Fikiran" *Medan Moeslimien*, 1917, hlm. 182-186. Dalam perkembangannya, lihat juga "Sekolahan "Tarbi-jatoel-Aitam" di Kaoeman, Solo", *Medan Moeslimien*, 1922, hlm. 736.

²⁰⁰Mengenai ketidaksesuaian antara Misbach dengan Achmad Dahlan dalam menjalankan model gerakannya masing-masing, lihat "Voordrac-nya J.m.H. Dahlan. Koetika Verg. di Djocja pada 24-25-8-"22""", *Medan Moeslimien*, 1922, hlm. 18. Bersambung pada surat kabar yang sama, hlm. 700.

²⁰¹Takashi Shiraishi, *op.cit.*, hlm. 186-187, 199-213, 213-224.

²⁰²Soemantri, "Pembela Agama Islam, Pembela Boemipoetra", *Medan Moeslimien*, 1919, hlm. 139-140. Artikel yang ditulis oleh Soemantri lebih didasarkan kepada pembuktian terhadap organ Islam lain (terutama Muhammadiyah) yang tidak melakukan pergerakan Islam dengan nyata. Ia menyebutkan bahwa Misbach adalah contoh pejuang Islam yang tidak hanya di mulut saja melainkan juga dengan perbuatan.

²⁰³*Neratja*, 16 Juli 1921

²⁰⁴*Neratja*, 28 Juli 1921.

²⁰⁵Para anggota berbagai organ tersebut, sering kali melakukan berbagai bentuk kekacauan dalam masyarakat dengan cara menakut-nakuti serta melakukan aksi brutal lainnya terhadap para anggota SI dan persatuan Islam (Persis). *Hindia Baru*, 18 Mei 1925.

²⁰⁶Deliar Noer, *op.cit.*, hlm. 215.

²⁰⁷*Neratja*, 20 November 1910.

²⁰⁸Deliar Noer, *op.cit.*, hlm. 216.

²⁰⁹Selengkapnya lihat H. Agus Salim, "Hak Berserikat dan Berkoempolan (pasal 3RR)" dalam A. Zainoel Ihsan - Pitut Soeharto, *Aku Pemuda Kemarin di Hari Esok, Kapita Selecta Kumpulan Tulisan Asli, Lezing, Pidato Tokoh Pergerakan Kebangsaan 1913-1938* (Jakarta: Jayasakti, 1981), hlm. 75-92.

²¹⁰Surat Idenburg kepada Gubernur Jenderal Dick Fock perihal Gerakan Pribumi. W.F. Wertheim, "Paralel yang Menyolok" *Kancah Majalah Perhimpunan Indonesia Raya*, No.11, Th.6. Perancis, Januari 1987, hlm. 30-31.

²¹¹Sikap Idenburg yang menyetujui pendirian SI dianggap lemah dan mengakibatkan SI menjadi penggerak berbagai peristiwa dan mencederai *rust en orde*. Fork melihat bahwa pemerintah harus bertindak tegas terhadap bumiputera terutama SI tidak seperti para pendahulunya. Lihat Mr. W.K.S. Van Haasters, *De Sarikat Islam* (Weltevreden: Albrecht & Co., 1916), hlm. 12-13.

²¹²Bandingkan dengan Takashi Shiraishi, *op.cit.*, hlm. 318-319.

²¹³Lihat Pramodya Ananta Toer, *Rumah Kaca* (Yogyakarta: Hasta Mitra, 2000).

²¹⁴Sosrokardono, merasa bahwa ia ditangkap akibat dipojokkan oleh Tjokroaminoto dalam persidangan dalam penyelesaian kasus *afdeling B* tersebut. Sosrokardono dibebaskan pada 5 April 1922 dan pada 1924, ia bergabung dengan PKI melakukan perlawanan terhadap Tjokroaminoto. Lihat *Kemajuan Hindia OIP* (30 Agustus 1924) dalam Deliar Noer, *op.cit.*, hlm. 218.

²¹⁵Semenjak dipenjara, kondisi Rumah tangga atau keluarga Tjokro sangat memprihatinkan, selengkapnya Lihat Cindi Adams, *Bung Karno Penyambung Lidah Rakyat* (Jakarta: Gunung Agung, 1966), hlm. 76.

²¹⁶W.F. Wertheim, *Kancah*, *op.cit.*, hlm. 37.

²¹⁷Dirk Fork merupakan salah satu orang yang menentang kebijakan politik etis di Hindia Belanda. Fork adalah seorang ahli kolonial dari partai liberal dan tidak segan melakukan tindak kekerasan terhadap pergerakan bumiputera. Lihat Takashi Shiraishi, *op.cit.*, hlm. 287, 297.

²¹⁸Frans Magnis-Suseno, *op.cit.*, hlm. 170.

²¹⁹Bergabung dengan Suryopranoto dan mengawal organ PFB, PPPB dan PPKB yang didukung oleh CSI.

²²⁰Tjokroaminoto, *Islam dan Sosialisme* (Jakarta: Bulan-Bintang, 1954), hlm. 25.

²²¹Tjokroaminoto sebagai pimpinan besar CSI yang telah tersandung persoalan insiden SI *afdeling B* di Garut, sontak tidak dapat mengendalikan perdebatan yang semakin berujung pada persoalan pribadi antar anggota SI.

²²²Ideologi Islam tetap dipegang teguh oleh SI Demokratis dan ideologi Komunis juga tetap menjadi identitas dari SI Semarang, yang pada proses berikutnya mengubah nama organ tersebut menjadi Sarekat Rakyat (SR).

²²³Nama Sarekat Rakyat (SR) diusulkan oleh Ali Archam, salah satu anggota SI Bandung yang mendukung sepenuhnya gerakan SI Semarang di bawah kontrol Semaoen. Selebihnya lihat Lely, "Sarekat Rakjat: Dari Disiplin Partai Hingga Pemberontakan (1923-1926)", dalam *Jurnal Progres*, Jilid 3, No. 1, tahun 1993.

²²⁴Berkaitan dengan biografi singkat Haji Misbach, lihat "Tjatakan singkat Tentang Kawan Hadji Misbach", *Medan Moeslimien*, 1922., hlm. 211. Salah satu buku yang mengulas tentang langkah perjuangan dan pemikiran Misbah, lihat Nor Hiqmah, *H. M. Misbach, Sosok dan Kontroversi Pemikirannya* (Yogyakarta: Yayasan Litera Indonesia, 2000).

²²⁵SI pada dasarnya bukan sebagai sebuah bentuk atau model partai politik secara modern, akan tetapi tujuan, *platform*, serta berbagai anasir sistem kepartaian hadir dalam kelembagaan SI. Dengan demikian, untuk memberikan pembedaan dalam proses perubahan secara jelas dalam sistem kepartaian yang nanti diberlakukan pada 1923, maka untuk menamai identitas partai yang masih belum tegas tersebut digunakan Partai SI.

²²⁶Takashi Shiraishi, *op.cit.*, hlm. 142.

²²⁷Misbach, "Assalamoealaikoem waroch matoe'Lohi wa-baro katoeh" *Medan Moeslimien*, 1922, hlm. 699-700.

²²⁸Misbah, "Perbarisan Islam Bergerak: Sikap Kita", *Islam Bergerak*, 20 November 1922.

²²⁹Lihat "Voordracnja J.m.H. Dahlan. Koetika Verg. di Djocja pada 24-25-8-"22" *Medan Moeslimien*, 1922, hlm. 700.

²³⁰Dari hasil kebijakan ekonomi yang diberlakukan oleh Fork, ternyata mendapatkan hasil peningkatan ekonomi yang luar biasa. Pada 1919 pengeluaran negara yang mencapai 1000.000.000 dapat dihemat dan hanya mengeluarkan sebanyak 816.000.000, pada 1922. Tahun 1923 berkurang lagi menjadi 667.000.000, dan tahun 1924, berkurang lagi menjadi 628.000.000. Sejalan dengan penghematan yang dilakukan oleh Pemerintah Hindia Belanda, Dirk Fork juga mendapatkan keuntungan yang lebih besar dari sektor pajak sebelumnya. Sektor pajak pada 1921 hanya mencapai 333.000.000, sedangkan pada 1922 meningkat menjadi 397.000.000.

²³¹Robert Van Niel, *op.cit.*, hlm. 266.

²³²*Sinar Hindia*, 23 Januari 1922.

²³³Sejak gagalnya pemogokan tersebut, Tan Malaka dibuang ke Belanda. Di Belanda ia bergabung dengan partai Komunis Belanda. Ia menjadi kandidat yang populer dan mendapatkan suara cukup banyak untuk menghantarkan dia menduduki kursi parlemen. Akan tetapi, dia hanya sebagai kandidat nomor tiga dan hanya dua kursi yang diperebutkan, maka ia terpaksa tidak dapat menduduki kursi parlemen tersebut. Ia kemudian meneruskan perjalanannya ke Moskow. Berkaitan dengan peranan Tan Malaka dalam PKI, lihat Ruth T. Mc Vey, *The Rise of Indonesian Communism* (Ithaca: Cornell University Press, 1965). Lihat juga Alfian, *Tan Malaka: Pejuang Revolusioner yang Kesepian dalam Manusia Dalam Kemelut Sejarah* (Jakarta: LP3ES, 1978), hlm. 132-173.

²³⁴Lihat Takashi Shiraishi, *op.cit.*, hlm. 321-323.

²³⁵H. Moh. Misbah (ketua M.M. dan I.B.), "Semprong Wasiat, Partijdietsipline S.I. Tjokroaminoto Mendjadi Ratjoen Pergerakan Ra'jat Hindia" *Medan Moeslimien*, 1923, hlm. 156.

²³⁶Bandingkan dengan Takashi Shiraishi, *op.cit.*, hlm. 365.

²³⁷*Sinar Hindia*, 14 Mei 1923, hlm. 90.

²³⁸*Sinar Hindia*, 5 Mei 1923, hlm. 85.

²³⁹Takashi Shiraishi, *op.cit.*, hlm. 370.

²⁴⁰Takashi Shiraishi, *op.cit.*, hlm. 375.

²⁴¹H.M. Misbach, "Kisah Almarhoem H.M. Misbach" *Medan Moeslimien*, 1926, hlm. 295-303.

²⁴²Deliar Noer, *Gerakan Modern Islam* (Jakarta: LP3ES, 1994), hlm. 145-146.

²⁴³*Bandera Islam*, 2 dan 5 Februari, 1926.

²⁴⁴"Oprichtingsvergadering afdeling P. I. S. -BOGOR" *Bintang Islam*, 1924, hlm. 251-253.

²⁴⁵"Oprichtingsvergadering afdeling P. I. S. -BOGOR" *Bintang Islam*, 1924, hlm. 254.

²⁴⁶*Bandera Islam*, 13 dan 27 Agustus 1924. Lihat juga Deliar Noer, *op.cit.*, hlm. 150.

²⁴⁷*ibid.*, hlm. 150.

²⁴⁸*Neratja*, 17 Nopember, 1923.

²⁴⁹Abdoel Moeis, Tjokroaminoto serta Suroso sebagai wakil SI ke luar dari *Volksraad*. Tahun 1927, Pemerintah Hindia Belanda menawarkan kursi *Volksraad* kepada Tjokroaminoto dan tawaran tersebut ditolak. Lihat Deliar Noer, *op.cit.*, hlm. 150.

²⁵⁰Neratja, 22 Maret 1919.

²⁵¹Ds, "Oentoek Bintang Islam, Koempoelan Sarekat Islam Partij Djokjakarta pada 20 Juli 1924" *Bintang Islam*, 1924, hlm. 353.

²⁵²Ds, "Oentoek Bintang Islam, Koempoelan Sarekat Islam Partij Djokjakarta pada 20 Juli 1924" *Bintang Islam*, 1924, hlm. 354.

²⁵³Ds, "Oentoek Bintang Islam, Koempoelan Sarekat Islam Partij Djokjakarta pada 20 Juli 1924" *Bintang Islam*, 1924, hlm. 354.

²⁵⁴Tjokroaminoto, *Islam dan Sosialisme* (Djakarta: Bulan Bintang, 1954), hlm. 7.

²⁵⁵Tjokroaminoto, *Moeslim Nationale Onderwijs* (Jakarta: Sekretariat Jendral Pimpinan Pusat/Lajnah Tanfidziyah Syarikat Islam, 1995), hlm. 1.

²⁵⁶Tjokroaminoto, *Islam dan Socialisme*, *op cit.*, hlm. 83.

²⁵⁷ Mengenai sketsa gelombang penyebaran ideologi besar dunia (terutama peleburan antara Sosialisme dengan Islam) dapat dilihat dalam diagram Herbert Feit dan Lance Castles (ed.) dalam Daniel Dakidie, "Partai Politik dan Sistem Kepartaian di Indonesia" *Prisma*, 12 Desember 1981, hlm. 3-23.

²⁵⁸Tjokroaminoto, *op.cit.*, hlm. 11.

²⁵⁹Al-Quran, Surat Al-Baqarah, ayat 213.

²⁶⁰Tjokroaminoto, *op.cit.*, hlm. 23.

²⁶¹*ibid.*, hlm. 25-26.

²⁶²Dalam sebuah riwayat dikatakan, bahwa Nabi Muhammad mengatakan bahwa haram hukumnya mengalirkan darah seorang kafir Dzimmi (seseorang di luar Islam yang mau hidup bersaudara dengan umat Islam), akan tetapi halal hukumnya mengalirkan darah seorang kafir Harbi (seseorang di luar Islam yang keberadaannya memusuhi umat Islam).

²⁶³Tjokroaminoto, *op.cit.*, hlm. 27.

²⁶⁴1) Orang fakir (di bawah miskin); 2) orang-orang miskin; 3) amil (orang yang diserahi tugas mengumpulkan dan membagi zakat); 4) muallaf (orang yang baru masuk Islam); 5) budak yang baru dimerdekakan; 6) orang yang tidak mampu membayar utang untuk keperluan Islam; 7) orang yang berjuang di jalan Allah; dan 8) musafir (orang yang bepergian, tidak untuk berbuat maksiat). Lihat dalam Tjokroaminoto, *op.cit.*, hlm. 28.

²⁶⁵Tjokroaminoto, *op.cit.*, hlm. 80-82.

²⁶⁶Tjokroaminoto, *op.cit.*, hlm. 82-83.

²⁶⁷Berkaitan dengan riwayat pemerintahan Umar Bin Khattab, dapat dibaca dari berbagai komentar para kaum terdidik Barat, yang juga dikutip dalam tulisannya Tjokroaminoto yaitu Prof. Theodor Noldeke. Selebihnya lihat Tjokroaminoto, bab VI, "Imperialisme Muslim" dalam *Islam dan Sosialisme*, *op.cit.*, hlm. 85-115.

²⁶⁸Tjokroaminoto, *op.cit.*, hlm. 20-24.

²⁶⁹Lebih jelas dalam memahami pemikiran Karl Marx yang berkaitan dengan Sosialisme Ilmiah sebagai upaya untuk merasionalkan (meramalkan) sebuah kehancuran Kapitalisme dan keniscayaan Sosialisme, lihat Karl Marx, *Kapital I, II, III*, (trj. Oey Hay Djoen) (Bandung: Hasta Mitra -Ultimus- Institute for Global Justice, 2007).

²⁷⁰*Bandera Islam*, 24 Januari 1927. Lihat juga Deliar Noer, *Gerakan Modern Islam* (Jakarta: LP3ES, 1994), hlm. 257.

²⁷¹"Toedoehan Pada H. Soedjak" *Bintang Islam*, 16 Agustus 1926, hlm. 261.

²⁷²"Ma'loemat (dari AFD. P.S.I. Randoebelatoeng) Rahasia Moehammadijah Terboeka" *Bintang Islam*, 1926, hlm. 261.

²⁷³"Ma'loemat Pengoeroes Besar Moehamamdijah di Djokja Kepada Sekalian Leden-leden dan Group-group teroetama Tjabang-tjabang Moehammadijah Hindia Timoer" *Bintang Islam*, 16 Agustus 1926, hlm. 261. Cetak tebal sesuai aslinya.

²⁷⁴"Datangnja Fitnah Didalam Kalangan Islam" *Bintang Islam*, 1927, hlm. 102-103. Cetak tebal sesuai aslinya.

²⁷⁵"Datangnja Fitnah Didalam Kalangan Islam" *Bintang Islam*, 1927, hlm. 102-103.

²⁷⁶Lihat dialog yang berkelanjutan antara Haji Fachrudin Maulana Ahmad (pihak penanya) tentang keberadaan organisasi dan ajaran Ahmadiyah. Dalam dialog tersebut, memang secara jelas terlihat bahwa Haji Fachrudin menjadi pihak penjawab dari berbagai pertanyaan terkait ajaran serta organisasi Ahmadiyah yang ada di India. Haji Fachrudin adalah orang pertama yang memperkenalkan Ahmadiyah di kalangan pergerakan Indonesia. Selebihnya lihat "Oetoesan achmadiyah soedah Datang di Djawa" *Bintang Islam*, 1924, hlm. 179-183, bersambung ke halaman 198-202. Diterbitkan secara berkala.

²⁷⁷Selengkapnnya lihat "Openbare Vergadering Madjelis Oelama di Djokjakarta, Pembitjaraan Tentang Tafsir Qoer'an Inggris Jang diter-

jemahkan Oleh O.S. Tjokroaminoto dan Akan Diterbitkan Oleh Fadjar Asia" *Bintang Islam*, 1928, hlm. 81- 85.

²⁷⁸Lihat sambungan "Datangnja Fitnah Didalam kalangan Islam" *Bintang Islam*, 1928, hlm.158-161.

²⁷⁹Lihat sambungan "Datangnja Fitnah Didalam kalangan Islam" *Bintang Islam*, 1928, hlm. 175-178.

²⁸⁰Identifikasi tersebut, adalah ungkapan dari berbagai pihak dari para anggota PSI, sedangkan dari pihak Muhammadiyah terus memberikan tanggapan serupa, di mana kemerosotan PSI, bukan disebabkan oleh mulai meningkatnya Muhammadiyah di tempat yang sama. Lihat "Datangnja Fitnah Didalam kalangan Islam" *Bintang Islam*, 1928, hlm. 212.

²⁸¹Lihat sambungan "Datangnja Fitnah Didalam kalangan Islam" *Bintang Islam*, 1928, hlm. 212.

²⁸²Mohammad Roem, "Memimpin adalah Menderita: Kesaksian Haji Agus Salim" dalam *Manusia Dalam Kemelut Sejarah* (Jakarta: LP3ES, 1978), hlm. 103-131.

²⁸³Fachroedin, "Datangnja Fitnah Didalam kalangan Islam" *Bintang Islam*, 1928, hlm. 216.

²⁸⁴Laporan Muhammadiyah selama di Sumatera, "Verslag Kepergian Selama di Sumatra dengan Pendek" *Bintang Islam*, 1928, hlm. 119, bersambung pada halaman 181, 221.

²⁸⁵Deliar Noer, *op.cit.*, hlm. 255-25.

²⁸⁶Lihat sambungan "Datangnja Fitnah Didalam kalangan Islam" *Bintang Islam*, 1928, hlm. 176.

²⁸⁷*Fajar Asia* 1929. Lihat juga Deliar Noer, *op.cit.*, hlm. 257.

²⁸⁸Lihat Achmad Jaenuri, *Ideologi Kaum Reformis* (Surabaya: LPAM, 2002), hlm. 2-12.

²⁸⁹Sejak 1914, Ahmad Dahlan diposisikan sebagai *Adviseur* SI, lihat Takashi Shiraishi, *op.cit.*, hlm. 101. Ia juga ditetapkan sebagai *Adviseur* dalam CSI, lihat "Statuten CSI, Bestuur jang sekarang, Fatzal 19" dalam A.P.E. Korver, *Sarekat Islam Gerakan Ratu Adil?* (Jakarta: Grafiti Pers, 1985), hlm. 220.

²⁹⁰M. Masyhur Amin, *Syarikat Islam, Obor Kebangkitan Nasional (1905-1942)* (Yogyakarta: al Amin Press, 1996), hlm. 33.

²⁹¹Pringgodigdo, *Sedjarah Pergerakan Rakjat Indonesia* (Djakarta: Pustaka Rakjat, 1950), hlm. 105.

²⁹²Takashi Shiraishi, *Zaman Bergerak, Radikalisme Rakyat di Jawa 1912-1926* (Yogyakarta: Grafiti, 1997), hlm. 324-326. Bandingkan dengan Robert Van Niel, *Elite Modern Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Jaya, 1984), hlm. 273.

²⁹³Wardini Akhmad, "Kongres al-Islam 1922-1941, Satu Telaah tentang Integrasi dan Disintegrasi Organisasi-Organisasi Islam di Indonesia dalam Perkembangan Pergerakan Nasional" *Disertasi Institut Agama Islam Negeri Syarif Hidayatullah*, 1989, tidak diterbitkan, hlm. 98.

²⁹⁴Deliar Noer, *op.cit.*, hlm. 151.

²⁹⁵Kekecewaan Tjokroaminoto terhadap Moeis sangat besar, sehingga pada tahun berikutnya, ketika kongres PSI dilakukan di Madiun, Moeis tidak lagi berperan penting dan namanya hilang dari jajaran kepengurusan PSI.

²⁹⁶H.A. Notosoetardjo, *Tindjauan Agama Islam terhadap Sosialisme Indonesia* (Djakarta: Penerbitan Bersama Lembaga Penggali dan Penghimpun Sedjarah Revolusi Indonesia (Endang, Pemuda, 1964), hlm. 19. Lihat juga Tjokroaminoto, *op.cit.*, hlm. 20.

²⁹⁷"Comite Congres Islam Besar Cheribon" *Medan Moeslimien*, 1922, hlm. 718.

²⁹⁸"Comite Congres Islam Besar Cheribon" *Medan Moeslimien*, 1922, hlm. 719.

²⁹⁹"Islam dan Bolsjewisme" *Bintang Islam*, 1924, hlm. 42.

³⁰⁰Pidato Toean S. Moh. Alie, "M O E F, Politik Inggris dan Kemadjoean Islam" *Bintang Islam*, 1924, hlm. 172-174.

³⁰¹Pidatonja Anwar Pacha, "Negeri Loear" *Bintang Islam*, 1924, hlm. 43.

³⁰²Islam telah mendorong sebuah kemajuan bagi perkembangan bumiputera, bukan sebaliknya, bahwa Islam menghambat kemajuan pergerakan bumiputera. Lebih lanjut lihat artikel "Agama Islam Tida Menghambat Kemadjoean" *Bintang Islam*, 1924, hlm. 279. Lihat juga pidato Mahatma Gandie, "Mahatma Gandie Melahirkan Pendapatannja Terhadap Kepada Agama Islam" *Bintang Islam*, 1924, hlm. 304. Dalam pidatonya, Gandi menyerukan bahwa Islam bukan agama palsu, sehingga umat Hindu selayaknya suka mempelajari Agama Islam, serta saling mencintai layaknya mencintai dirinya sendiri.

³⁰³Safrizal Rambe, *Sarekat Islam Pelopor Bangkitnya Nasionalisme Indonesia 1905-1942* (Jakarta: Yayasan Kebangkitan Insan Cendekia, 2008), hlm. 167.

³⁰⁴Muhammadiyah didirikan oleh K.H. Achmad Dahlan pada 1912. Di awal pembentukannya, Muhammadiyah bertujuan untuk merehabilitasi kaum muslim Indonesia dengan memperbaiki kondisi keagamaan dan sosial ekonomi. Selebihnya lihat Alwi Shihab, *Membendung Arus Respons Gerakan Muhammadiyah Terhadap Penetrasi Misi Kristen di Indonesia* (Bandung: Mizan, 1998), Bab IV "Gerakan Muhammadiyah".

³⁰⁵Al-Irsyad dipimpin oleh Syaikh Ahmad Surkati. Organ ini sepaham dengan Muhammadiyah, akan tetapi konsentrasinya lebih pada muslim Arab Indonesia. Lihat Achmad Jainuri, *Ideologi Kaum Reformis, Melacak Pandangan Keagamaan Muhammadiyah Periode Awal* (Surabaya: LPAM, 2002), hlm. 3.

³⁰⁶Tasywirul Afkar merupakan nama sekolah yang didirikan oleh perkumpulan ulama tradisional di Surabaya. Tasywirul Afkar digerakkan oleh K.H. Wahab Hasbullah sebagai bentuk reaksi terhadap Faqih Hasyim yang menyerang praktik-praktik tradisional seperti *tahlilan*, *slamatan* dan unsur *furu'* lainnya yang dianggap bid'ah oleh kaum pembaru. Tasywirul Afkar merupakan cikal bakal NU. Lihat Martin van Bruinessen, *NU Tradisi, Relasi-relasi Kuasa, Pencarian Wacana Baru* (Yogyakarta: LKiS, 1994), hlm. 21-23.

³⁰⁷Ali Haider, *Nahdlatul Ulama dan Islam di Indonesia* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1998), hlm. 47.

³⁰⁸*Bandera Islam*, 16 Oktober 1924.

³⁰⁹Hal-hal yang menjadi perdebatan panjang di antara kedua kelompok ini adalah berkaitan dengan Taqlid, mengikuti aliran empat madzab serta berkaitan dengan syarat-syarat bagi seseorang untuk dapat melakukan ijtihad. Lihat Ali Haider, *op.cit.*, hlm. 43.

³¹⁰Martin Van Bruinessen, *op.cit.*, hlm. 30.

³¹¹H.S. Djogja, "Hedjaz! Heran 1000 Heran" *Bintang Islam*, 1924, hlm. 52.

³¹²Terkait dengan pungutan liar yang dilakukan oleh Raja Hoesin terhadap para haji yang datang ke Mekah, lihat "Kabar dari lain Negeri" *Bintang Islam*, 1924, hlm. 80.

³¹³Congres Moeslim Doenia" *Bintang Islam*, 1925, hlm. 125-126.

³¹⁴Congres al-Islam Hindia" *Bintang Islam*, 1925, hlm. 123-124. Cetak tebal sesuai aslinya.

³¹⁵"Congres al-Islam Hindia" *Bintang Islam*, 1925, hlm. 124-125. Cetak tebal sesuai aslinya.

³¹⁶1) Syafi'i; 2) Hanafi; 3) Hambali; dan 4) Maliki

³¹⁷"Al-Islam Congres Hindia Kita dan Ringkasnja Kepoatoesan Congres al-Islam" *Bintang Islam*, 1926, hlm. 309-310.

³¹⁸Berkaitan dengan pendanaan awal untuk mengaktifkan lembaga ini, maka disusunlah berbagai kebutuhan pada tahun pertama pendirian kantor tersebut. Selebihnya lihat "Begrooting M. A. I. H. S. Boeat Tahoen Pertama Biaja Kantoor di Soerabaja" *Bintang Islam*, 1926, hlm. 310.

³¹⁹Salah satu aliran dalam Islam yang diajarkan oleh Muhammad Ibnu Wahab.

³²⁰Salah satu aliran atau mazhab dalam Islam yang diajarkan oleh Imam Syafii yang diperoleh dari Asy'ariah.

³²¹Tahun 1924, bersama K.H. Hasyim Asy'ari ulama terkemuka, pemangku Pondok pesantren Tebuireng, Jombang, KH. Wahab Hasbullah menulis AD/ART dan secara resmi mengumumkan pendirian NU tahun 1926. Martin van Bruinessen, *op.cit.*, hlm. 31-32.

³²²"Sarekat Biroe" *Bintang Islam*, 1926, hlm. 324-325.

³²³"Sarekat Biroe" *Bintang Islam*, 1926, hlm. 326.

³²⁴"Sarekat Biroe" *Bintang Islam*, 1926, hlm. 325.

³²⁵Tjokroaminoto, *Program Asas Partai Sjarikat Islam Indonesia* (Jakarta: Sekretariat Jenderal Pimpinan Pusat/ Lajnah Tanfidziyah Syarekat Islam, 1995), hlm. 15.

³²⁶Dalam perkembangannya strukturisasi ini diberlakukan hingga masa-masa selanjutnya dalam AD/ART PSII. Perubahan hanya pada redaksional, seperti halnya; Dewan partai menjadi Dewan Pusat Syarekat Islam (DPSI) dan Lajnah Tanfidziyah menjadi Lajnah Tanfidziyah Syarekat Islam (LTSI). Lihat Bab VII, Pimpinan Organisasi, pasal 12 AD/ART PSII, program kerja lima tahun Sarekat Islam masa bakti 1985-1990.

³²⁷Maklumat No.33, Lajnah Tanfidziah PSII, dalam Safrizal Rambe, *op.cit.*, hlm. 244-247.

³²⁸Catatan harian Ismail Jaelani, tokoh PSII Yogyakarta.

³²⁹Berkaitan dengan proses perjuangan yang dilakukan oleh Suryopranoto dan Sukiman, lihat. "R.M. Soerjopranoto" *Pandji Islam*, 3 Juli 1939, hlm. 7159/ 327.

³³⁰*Bandera Islam*, 14 Februari 1927 dalam Deliaer Noer, *op.cit.*, hlm. 160. Penjelasan mengenai politik hijrah juga dapat dilihat dalam Kartosoewirjo, *Sikap Hijrah PSII*, (1) (Batavia-C: Majelis tahkim PSII, 10 September 1936).

³³¹Salim pernah ditawarkan pemerintah untuk masuk dalam struktur di dalam *Volksraad* pada 1930, akan tetapi, ketentuan partai tentunya harus dipegang teguh, sehingga secara kelembagaan, Salim tidak diperkenankan masuk di dalam *Volksraad*. Perlu dicermati lebih lanjut, bahwa perdebatan tentang sikap *hijrah* dan sikap politik *non-kooperasi*, antara Abi-koesno dengan Salim, bukan berarti hanya karena Salim pernah ditawarkan sebagai anggota *Volksraad* oleh pemerintah, melainkan lebih dari itu, hal ini sangat jelas bahwa kondisi saat itu, partai politik tidak hanya diwakili oleh PSII, akan tetapi berbagai partai politik baik yang memperjuangkan nasionalisme-Islam maupun nasionalisme sekuler, telah bermunculan. Dengan demikian, PSII seharusnya mampu mengimbangi dengan sikap yang lunak, sehingga sedapat mungkin dapat memperkuat kelembagaan partai.

³³²Kartosoewirjo, *Sikap Hijrah PSII*, *op.cit.*, hlm. 221-22. Cetak miring dan tebal sesuai aslinya.

³³³*ibid.*, hlm. 23.

³³⁴Deliaer Noer, *op.cit.*, hlm. 163.

³³⁵Al-Qur'an, Surat *al-Baqara*, ayat 106.

³³⁶Al-Qur'an, Surat *al-Bayyinah*, ayat 2-3. Lihat juga al-Qur'an, Surat *an-Nahl*, ayat 64.

³³⁷Tjokroaminoto, *Tafsir Program Asas dan Tandhim PSII*, Bogor, 26 Oktober 1931, hlm. 16.

³³⁸Penjelasan yang mendalam tentang program asas dapat dilihat dalam M.A. Gani, *Cita Dasar dan Pola Perjuangan Syarekat Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1984), hlm. 80-160.

³³⁹*ibid.*, hlm. 176-196.

³⁴⁰Tjokroaminoto, *Tafsir Program asas dan Tandhim PSII* (Bogor, 26 Oktober 1931), hlm. 49. Lihat juga Amelz, H.O.S. Tjokroaminoto *hidup dan Perjuangannya* (Jakarta: Bulan Bintang, 1952), hlm. 49.

³⁴¹M.S. "Selamat Hari Raja" *Pembela Islam*, Januari 1932, hlm. 35. Lihat juga Deliaer Noer, *op.cit.*, hlm. 259.

³⁴²*ibid.*, hlm. 259.

³⁴³*ibid*, dalam catatan kaki No. 84, hlm. 259.

³⁴⁴Lihat biografi Iskaq dalam Ruben Nalenan, *Iskaq Tjokrohadisurjo Alumni Desa Bersemangat Banteng* (Jakarta: Gunung Agung, 1982), hlm. 20-58.

³⁴⁵Lihat Mestika Zed, *Pemberontakan Komunis Silungkang 1927 Studi Gerakan Sosial di Sumatera Barat* (Yogyakarta: Syarikat Indonesia, 2004).

³⁴⁶Lihat Michael C. Williams, *Arit dan Bulan Sabit Pemberontakan Komunis 1926 di Banten* (Yogyakarta: Syarikat, 1982). Pemberontakan PKI tahun 1926 adalah mengakhiri fase pertama PKI, lihat Arnold C. Brackman, *Cornell Paper di Balik Kolapsnya PKI* (Yogyakarta: elsReba, 2000), hlm. 11.

³⁴⁷Ingleson, *Jalan Ke Pengasingan Pergerakan Nasionalis Indonesia Tahun 1927-1934* (Jakarta: LP3ES, 1978), hlm. 32.

³⁴⁸*Bintang Hindia*, Januari 1928, hlm. 55.

³⁴⁹Artikel 2 Anggaran Dasar Federasi PPPKI, dalam Deliar Noer, *Gerakan Moderen Islam di Indonesia 1900-1942* (Jakarta: LP3ES, 1994), hlm. 271.

³⁵⁰Soekarno, "Menjambut Kongres P.P.P.K.I", *Suluh Indonesia Muda*, 1928. Lihat juga dalam Soekarno, *Dibawah Bendera Revolusi* (Djakarta: Panitia Penerbit Dibawah Bendera Revolusi, 1963), hlm. 84.

³⁵¹*ibid.*, hlm. 84.

³⁵²Seperti yang dinyatakan oleh Wertheim, bahwa PNI merupakan sebuah organisasi politik yang bercorak nasionalisme sekuler. Artinya, identifikasi terhadap corak nasionalisme sekuler tersebut didasarkan pada pemisahan yang sangat tegas antara Islam sebagai agama dengan politik. Lihat Wertheim, "Paralel yang Menyolok" *Kancah Majalah Perhimpunan Indonesia Raya*, No.11, Th.6. Perancis, Januari 1987, hlm. 36-39.

³⁵³Soekiman, "Tenaga jang Aktief" *Pandji Islam*, 1939, hlm. 7089/457.

³⁵⁴Soekarno, "Nationalisme, Islamisme dan Marxisme" *Suluh Indonesia Muda*, 1926. Lihat juga Soekarno, *Dibawah Benderah Revolusi* (Djakarta: Panitia Penerbit Dibawah Bendera Revolusi, 1963), hlm. 3.

³⁵⁵*ibid.*, hlm. 5-6.

³⁵⁶*Hindia Baru*, 30 Mei 1925. Lihat juga Deliar Noer, *op.cit.*, hlm. 274-275.

³⁵⁷*Fajar Asia*, No. 170, 26 Juli 1928. Lihat juga dalam kutipan Soekarno, "Kearah Persatuan, Menjambut Tulisan H. A. Salim" *Suluh Indonesia Muda*, 1928. Lihat juga Soekarno, *Dibawah Bendera Revolusi*, *op.cit.*, hlm. 110-111. Lihat juga sebagian dalam Deliar Noer, *op.cit.*, hlm. 275.

³⁵⁸ Al-Qur'an Surat Ibrahim, ayat 37

³⁵⁹ Soekarno, "Kearah Persatuan, Menjambut Tulisan H. A. Salim" *Suluh Indonesia Muda*, 1928. Lihat Soekarno, *Dibawah Bendera Revolusi*, *op.cit.*, hlm. 111-112.

³⁶⁰ Soekarno, *Suluh Indonesia Muda*, 1928; lihat Soekarno, *Dibawah Bendera Revolusi*, *op.cit.*, hlm. 111-112.

³⁶¹ *ibid.*, hlm. 113.

³⁶² *ibid.*, hlm. 113-114.

³⁶³ Maklumat LT PSII tentang pembicaraan dalam Actie umum pada 28 Desember 1930, *Lascar*, 1930, No.4-5. Lihat juga dalam Deliar Noer, *op.cit.*, hlm. 272.

³⁶⁴ Seusai menghadiri kongres PPPKI di Surakarta, Sukarno akhirnya ditangkap di Yogyakarta. Lihat Ingleson, *op.cit.* lihat juga Cindy Adam, *Bung Karno Penjambung Lidah Rakjat Indonesia* (Djakarta: Gunung Agung, 1966), hlm. 121-126.

³⁶⁵ Sembilan bulan kemudian, perkara Sukarno tersebut akhirnya baru diterima oleh *Landraad* Bandung (pengadilan Tinggi Bandung). Sebagai upaya untuk melakukan pembelaan, Sukarno secara khusus menulis pembelaannya tersebut dengan judul "Indonesia Menggugat". Dalam persidangan tersebut, Sukarno dan kawan-kawan lainnya dibantu oleh pembela rakyat yaitu Mr. Sartono, Ir. Suyudi, dan Mr. Sastro Mul-yono. Dengan demikian, dalam persidangan itulah, akhirnya diputuskan bahwa Sukarno dijatuhi hukuman selama 4 tahun penjara, Gatot Mang-kuprojo, selama 2 tahun, Maskun 1 tahun 8 bulan, dan Supriadinata 1 tahun 3 bulan, dengan tuduhan melakukan perbuatan yang meng-ganggu ketertiban umum dan menentang kekuasaan, dan hal demikian adalah sebuah kejahatan, sebagaimana yang tercantum dalam pasal 153 dan 169 KUHP. Lihat Cindy Adam, *op.cit.*, hlm. 136-142. Lihat juga Ali Sastroamijoyo, *Tonggak-Tonggak di Perjalanananku* (Jakarta: Kinta, 1974), hlm. 103-105.

³⁶⁶ Bubarnya PNI akhirnya sampai di telinga Sukarno yang saat itu masih dalam penjara. Sukarno merasa sangat kecewa, di mana organisa-si yang telah dibina dengan sekuat tenaga telah mengalami perpecahan dan berakhir pada titik kehancuran. Kesedihan Sukarno tersebut, pada dasarnya telah berlangsung ketika federasi partai politik PPPKI telah mengalami perpecahan. Dengan demikian, berbagai upaya Sukarno

dalam membangun sebuah organisasi yang kuat menuju Indonesia merdeka semakin tidak menampakkan hasilnya. Berkaitan dengan kondisi Sukarno yang sangat terpukul tersebut, lihat Cindy Adam, *op.cit.*, hlm. 153.

³⁶⁷Harry J. Benda, *Bulan Sabit dan Matahari Terbit* (Bandung: Pustaka Jaya, 1980), hlm. 119.

³⁶⁸Sribintara, ""Maksoed dan toedjoan M.I.A.I." (diambil dari Choethbah: Kyai H. M. Mansoer" *Panji Islam*, 10 April 1939, hlm. 6031/299. Berkaitan dengan pembentukan M.I.A.I yang diadakan di Surabaya tersebut, Deliar Noer, mencatat tanggal pertemuan yang berbeda yaitu tanggal 21 September 1937, bandingkan dengan Deliar Noer, *op.cit.*, hlm. 262.

³⁶⁹Sribintara, ""Maksoed dan toedjoan M.I.A.I." (diambil dari Choethbah: Kyai H. M. Mansoer)" *Panji Islam*, 10 April 1939, hlm. 6032/ 300.

³⁷⁰*Suara PSII*, Maret 1938.

³⁷¹Benda, *op.cit.*, hlm. 119.

³⁷²*Berita Nahdlatul Ulama*, 1 dan 15 April. Lihat juga *Suara PSII*, Maret 1938. Lihat juga Deliar Noer, *op.cit.*, hlm. 264.

³⁷³Deliar Noer, *ibid.*, hlm. 265.

³⁷⁴Asnawi Hadisiswaja (wakil Pandji Islam dalam kongres), "Kongres Al Islam Indonesia II di Solo" *Pandji Islam*, 15 Mei 1939, hlm. 7020/388.

³⁷⁵Dari keseluruhan perhimpunan Islam yang saat itu telah berkumpul, ternyata dari Party Penyadar yang dipimpin oleh H. Agus Salim tidak tampak dalam kongres tersebut.

³⁷⁶Lihat Tjokroaminoto, *Islam dan Sosialisme* (Djakarta: Bulan Bintang, 1954), hlm. 82.

³⁷⁷Lihat Asnawi Hadisiswaja (wakil Pandji Islam dalam kongres), "Kongres Al Islam Indonesia II di Solo" *Pandji Islam*, 15 Mei 1939, hlm. 7020/388. Cetak tebal sesuai aslinya.

³⁷⁸Pasal 177 I.S. adalah berkaitan dengan penghinaan terhadap umat Islam dan perkawinan. Usulan untuk mempertahankan pasal ini diungkapkan oleh M. Natsir, perwakilan dari perkumpulan umat Islam Sumatera yaitu Badan Pertahanan Islam (BPI). Ia adalah satu-satunya perwakilan dari luar pulau Jawa. Bandingkan dengan Deliar Noer, *op.cit.*, hlm. 266.

³⁷⁹W. Wondoamiseno, "Pemandangan tentang Pergerakan Islam 1939" *Pandji Islam*, 1939, hlm. 1039.

³⁸⁰W. Wondoamiseno, "Pemandangan tentang Pergerakan Islam 1939", *Pandji Islam*, 1939., hlm. 1040. Lihat pula Adil, 29 Januari 1942.

³⁸¹Parindra merupakan peleburan dari berbagai partai politik dan organisasi social yang sebelumnya mengalami perpecahan. Beberapa organ yang melebur dalam Parindra adalah: PBI, Timorsche Verbond, BO, Party Sarikat Selebes, dan Serikat Soematera.

³⁸²"Warta-warta jang Penting, Doenia Dari Senin ke Senin" *Pandji Islam*, 29 Mei 1939, hlm. 7059/ 427.

³⁸³"Menjamboet lahirnja "Gaboengan Politiek Indonesia"" *Pandji Islam*, 5 Juni 1939, hlm. 23. Cetak tebal sesuai aslinya.

³⁸⁴Abikoesno Tjokrosoejoso, "Indonesia Berparlement dan Kongres Ra'jat Indonesia" *Pandji Islam*, 25 Desember 1939, hlm. 7647/ 1015. Cetak tebal sesuai aslinya.

³⁸⁵"Menjamboet lahirnja "Gaboengan Politiek Indonesia"" *Pandji Islam*, 5 Juni 1939, hlm. 23.

³⁸⁶Telah tercatat, bahwa federasi yang demikian telah terjadi beberapa kali dan hanya berakhir dengan penyingkiran terhadap organ Islam. Tahun 1918, telah dibentuk *Radicale Concentratie*; tahun 1922, telah dibentuk *All Indian Congres*; tahun 1927, telah dibentuk PPPKI; dan yang ke empat adalah GAPI yang sedang dibangun sebagai federasi partai politik Indonesia.

³⁸⁷Abikoesno Tjokrosoejoso, "Indonesia Berparlement dan Kongres Ra'jat Indonesia" *Pandji Islam*, 25 Desember 1939, hlm. 7647/ 1015.

³⁸⁸Ungkapan dalam tulisan tersebut di cuplik oleh Abikoesno. Lihat Abikoesno Tjokrosoejoso, "Indonesia Berparlement dan Kongres Ra'jat Indonesia" *Pandji Islam*, 25 Desember 1939, hlm. 7647/ 1015. Berkaitan dengan bagaimana pemerintah menanggapi tuntutan GAPI tentang Indonesia berparlemen, lihat pidato M. Natsir dalam rapat GAPI di Bandung 17 Desember 1939, M. Natsir, "Toentoetan Indonesia Berparlement" *Pandji Islam*, 25 Desember 1939, hlm. 7655/1021.

³⁸⁹Abikoesno Tjokrosoejoso, "Indonesia Berparlemen dan Kongres Ra'jat Indonesia" *Pandji Islam*, 25 Desember 1939, hlm. 7647/ 1015.

³⁹⁰"Kongres Ra'jat Indonesia 23-25 Desember 1939" *Pandji Islam*, 31 Desember 1939, hlm. 1034-1036.

³⁹¹"Tjatetan diachir tahoen (1939)" *Pandji Islam*, 31 Desember 1939, hlm. 1033.

³⁹²Suhartono, *Sejarah Pergerakan Nasional, dari Budi Utomo sampai Proklamasi 1908-1945* (cet.2) (Jakarta: Pustaka Pelajar, 2001), hlm. 94-96.

³⁹³Harry J. Benda, *op.cit.*, hlm. 129.

³⁹⁴Upaya Jepang dalam membangun hubungan di antara sesama umat Islam dunia, terlepas dari nilai-nilai agama, ternyata juga diselipkan sebuah upaya untuk melakukan propaganda di Indonesia. Berbagai propaganda Jepang telah dilakukan dan mendapatkan momentum Islam semenjak pertengahan tahun 1920. Berbagai kajian tentang Islam meningkat semenjak momentum tersebut terbentuk hingga tahun 1938. Pada tahun tersebut, sebuah federasi Islam telah dibentuk dan dipimpin oleh seorang jenderal bernama Senjuro Hayashi. Senjuro Hayasi oleh kalangan Islam Jepang disebut sebagai "Bapak Islam Jepang". Oemar Yadi, "Oetoesan Persatoean Islam M.I.A.I. di Djepoen" *Pandji Islam*, 31 Desember 1939, hlm. 7075/1034.

³⁹⁵Oemar Yadi, "Oetoesan Persatoean Islam M.I.A.I. di Djepoen" *Pandji Islam*, 31 Desember 1939, hlm. 7075/1034-7076/1035.

³⁹⁶Benda, *op.cit.*, hlm. 142.

³⁹⁷Selebihnya dapat dilihat dalam Haji Muhammad Karim Amrullah (HAMKA), *Kenang-kenangan Hidup* (Jakarta: Bulan Bintang, 1951). Cuplikan tulisan ini juga dikutip oleh Benda, *op.cit.*, hlm. 136.

³⁹⁸W.F. Wertheim, "pengantar" dalam Benda. *op.cit.*, hlm. 10.

³⁹⁹Benda, *op.cit.*, hlm. 183.

⁴⁰⁰Benda, *op.cit.*, hlm. 210.

⁴⁰¹*Suara Muslim Indonesia*, 15 Oktober 1944. Lihat juga dalam Benda, *op.cit.*, hlm. 212.

⁴⁰²Safroedin Bahar et. al. (Ed). (1993) *Risalah Sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) dan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) 29 Mei 1945 - 19 Agustus 1945* (Edisi II. Cet. 4) (Jakarta: Sekretariat Negara RI. Cetak tebal sesuai aslinya.

⁴⁰³*ibid.*

⁴⁰⁴Endang Saifuddin Anshari, *Piagam Jakarta 22 Juni 1945 Sebuah Konsensus Nasional Tentang Dasar Negara Republik Indonesia (1945-1949)* (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), lampiran 5, hlm. 191.

⁴⁰⁵Dihasilkan dari persidangan BPUPKI pertama.

⁴⁰⁶Dihasilkan dari sidang panitia sembilan yang beranggotakan sembilan orang untuk merumuskan preambule, serta UUD Negara In-

donesia. Para anggota panitia sembilan adalah: (4 orang dari pihak nasionalis Islam) H. Agus salim, K.H. Wahid Hasyim, Abikusno, dan Abdul Kahar Muzakkir, dan (lima orang dari kalangan nasionalis Sekuler: Sukarno, Mohammad Hatta, A. A. Maramis, Achmad Subarjo, M. Yamin.

⁴⁰⁷*Asia Raya*, 14 Agustus 1945, hlm. 195.

⁴⁰⁸Endang Saifuddin Anshari, *Piagam Jakarta...*, *op.cit.*, hlm. 47.

—oo00oo—

Daftar Pustaka

Arsip (Koleksi ANRI Jakarta)

Sartono Kartodirdjo., dkk. *Laporan Asisten Residen Kepolisian Surabaya (Schippers) Kepada Residen Surabaya, 1913, dalam Arsip Nasional Republik Indonesia, Penerbitan Sumber-Sumber Sejarah. No.7, Sarekat Islam Lokal.*

Surat Kabar dan Majalah Soesaman (Koleksi Perpustakaan Jakarta)

"Agama Islam Tidak Menghambat Kemadjoean", *Bintang Islam*, 1924.

"Aksi brutal terhadap para anggota SI dan persatuan Islam (Persis)", *Hindia Baru*, 18 Mei 1925.

"Al-Islam Congres Hindia Kita dan Ringkasnja Kepoatoesan Congres al-Islam", *Bintang Islam*, 1926.

"Begrooting M. A. I. H. S. Boeat Tahoen Pertama Biaja Kantoer di Soerabaja", *Bintang Islam*, 1926.

"Boeah Fikiran", *Medan Moeslimien*, 1917.

- "Boedi Oetomo: 75-80", Medan Prijaji, 1909.
- "Chabar Perloe", *Medan Moeslimien*, 1915.
- "Comite Congres Islam Besar Cheribon", *Medan Moeslimien*, 1922.
- "Congres al-Islam Hindia", *Bintang Islam*, 1925.
- "Congres Moeslim Doenia", *Bintang Islam*, 1925.
- "Consulat General Ottoman Batavia", *Medan Moeslimien*, 1915.
- "Datangnja Fitnah Didalam Kalangan Islam", *Bintang Islam*, 1927.
- "Di antara Pengiriman Mempertibarkan Agama Christen dan Orang Islam di Poelau Djawa", *Medan Moeslimien*, 1915.
- "Hal Djoemaah Hadji di Mekah", Consulat general Ottoman di Betawi", *Medan Moeslimien*, 1915.
- "Het S.I. Congres", *De Indische Gids*, 40, 1918.
- "Huishoudelijk Reglement SDI" (aturan yang berlaku SDI) *Medan Prijaji*, 1909.
- "Islam dan Bolsjewisme", *Bintang Islam*, 1924.
- "Kabar dari lain Negeri", *Bintang Islam*, 1924.
- "Kisah Almarhoem H.M. Misbach", *Medan Moeslimien*, 1926.
- "Kongres Al Islam Indonesia II di Solo", *Pandji Islam*, 15 Mei 1939.

- "Kongres Ra'jat Indonesia 23-25 Desember 1939", *Pandji Islam*, 31 Desember 1939.
- "M O E F, Politik Inggris dan Kemadjoean Islam", *Bintang Islam*, 1924.
- "Ma'loemat (dari AFD. P.S.I. Randoebelatoeng) Rahasia Moehamamdijah Terboeka", *Bintang Islam*, 1926.
- "Ma'loemat Pengoeroes Besar Moehamamdijah di Djokja Kepada Sekalian Leden-leden dan Group-group teroetama Tjabang-tjabang Moehammadijah Hindia Timoer", *Bintang Islam*, 16 Agustus 1926.
- "Mahatma Gandie Melahirkan Pendapatannja Terhadap Kepada Agama Islam", *Bintang Islam*, 1924.
- "Menjamboet lahirnja "Gaboengan Politiek Indonesia"", *Pandji Islam*, 5 Juni 1939.
- "Nama-nama serta berbagai komentar", *Sinar Djawa*, 19 Januari 1918.
- "Negeri Loear" *Bintang Islam*, 1924.
- "Oetoesan achmadiyah soedah Datang di Djawa", *Bintang Islam*, 1924.
- "Openbare Vergadering Madjelis Oelama di Djokjakarta, Pembitjaraan Tentang Tafsir Qoer'an Inggris Jang di Terjemahkan Oleh O.S. Tjokroaminoto dan Akan Diterbitkan Oleh Fadjar Asia", *Bintang Islam*, 1928.
- "Oprichtingsvergadering afdeling P. I. S. -BOGOR", *Bintang Islam*, 1924.

- "Pendahoeloean M.P. taoen 1909", *Medan Prijaji*, 1909.
- "Pidato K.H.M. Mansyur mengutip al-Quran, Surat al-Anfal ayat 65-66", *Asia Raya*, 1 Djanuari 1944.
- "Pro betoel-betoel Pro", *Medan Moeslimien*, 1919.
- "R. M. Soerjopranoto, Satoe di antara gembong pergerakan rakjat jang paling mempoenjai "darah poetih" diloear dan didalam!", *Pandji Islam*, 3 Juli 1939.
- "Sarekat Biroe", *Bintang Islam*, 1926.
- "Sarekat Dagang Islamiah", *Medan Prijaji*, 1909.
- "Sedikit Seroean" *Medan Moeslimien*, 1915.
- "Sekolahan "Tarbijatoel-Aitam" di Kaoeman, Solo", *Medan Moeslimien*, 1922.
- "Soeratnya Orang-orang Desa Bapangan pada Hoofd Red. M.P.", *Medan Prijaji*, 1909.
- "Statuten dan Huishoudelijk Reglement Sarekat Dagang Islamiah (SDI) ditetapkan di Buitenzorg", *Medan Prijaji*, 1909.
- "Tjatatan singkat Tentang Kawan Hadji Misbach", *Medan Moeslimien*, 1922.
- "Tjatetan diachir tahoen (1939)", *Pandji Islam*, 31 Desember 1939.
- "Tjikenmeuh Klapa Senggeh di Bogor, Mitsalnja "S.I." dan "antinja""", *Medan Moeslimien*, 1915.

- "Toedoehan Pada H. Soedjak", *Bintang Islam*, 16 Agustus 1926.
- "Vergadering Moeslimin Jang Besar di Solo", *Medan Moeslimien*, 1918.
- "Verslag Congres S.I. Yogyakarta, 19-20 April 1914, Suatu Penjelasan", *Darmokondo*, April 1914.
- "Verslag Kepergian Selama di Sumatra dengan Pendek", *Bintang Islam*, 1928.
- "Voordracnya J.m.H. Dahlan. Koetika Verg. di Djocja pada 24-25-8-"22", *Medan Moeslimien*, 1922.
- "Warta-warta jang Penting, Doenia Dari Senin ke Senin", *Pandji Islam*, 29 Mei 1939.
- A.H. H. Soerodiprono., "Djawaban pada karangan Toe'an Z. Noerdin jang terbit di dalam Bentara-Hindia No. 39 tanggal 25 Mei 1916", *Medan Moeslimien*, 1916.
- Abikoeshno Tjokrosoejoso., "Indonesia Berparlement dan Kongres Ra'jat Indonesia", *Pandji Islam*, 25 Desember 1939.
- Asnawi Hadisiswaja (wakil Padji Islam dalam kongres)., "Kongres Al Islam Indonesia II di Solo", *Pandji Islam*, 15 Mei 1939.
- D.K. "Agama Islam dan toedjoeannja", *Medan Moeslimien*, 1918.
- D.K. Ardiwinata., "Kabar Perloe", *Medan Moeslimien*, 1915.

- Ds., "Oentoeik Bintang Islam, Koempoelan Sarekat Islam Partij Djokjakarta pada 20 Juli 1924", *Bintang Islam*, 1924.
- E.F.E. Douwes Dekker., "De Indische Partij", *Haar Wezen en Haar Doel*, 25 December 1925.
- Encyclopedaie van Nederlansch Indie II, cet.I.*, hlm. 168.
- Fachroedin., "Datangnja Fitnah Didalam kalangan Islam", *Bintang Islam*, 1928.
- H. Moh. Misbah., (ketua M.M. dan I.B.), "Semprong Wasiat, Partijdiesipline S.I. Tjokroaminoto Mendjadi Ratjoen Pergerakan Ra'jat Hindia", *Medan Moeslimien*, 1923.
- H.S., "Hedjaz! Heran 1000 Heran", *Bintang Islam*, 1924.
- H.Z., "Hubbul Wathon Minaal Iimaan (Kasih akan tanah ajer itoe sebagian dari pada iman)", *Medan Moeslimien*, 1918.
- Kemajuan Hindia OIP*, 30 Agustus, 1924.
- M. Natsir., "Toentoetan Indonesia Berparlement", *Pandji Islam*, 25 Desember 1939.
- M.S., "Selamat Hari Raja", *Pembela Islam*, Januari 1932.
- Misbach., "Perbarisan Islam Bergerak: Sikap Kita", *Islam Bergerak*, 20 November, 1922.
- Misbach., "Assalamoealaikoem waroch matoe'Lohi wa-baro katoeh", *Medan Moeslimien*, 1922.
- Oemar Yadi., "Oetoesan Persatoean Islam M.I.A.I. di Djepoen", *Pandji Islam*, 31 Desember 1939.

- Poerwodihardjo., "Javaansche Nationalisme (satoe koe-midi)", *Medan Moeslimien*, 1918.
- S.A.A. Badjenet-R.M. Tirtoadisoerjo., "Sarikat Dagang Islamiah", *Medan Prijaji*, 1909.
- Soekarno., "Kearah Persatuan, Menjambut Tulisan H. A. Salim", *Suluh Indonesia Muda, Fajar Asia*, No. 170, 26 Juli 1928.
- Soekarno., "Menjambut Kongres P.P.P.K.I", *Suluh Indonesia Muda*, 1928.
- Soekarno., "Nationalisme, Islamisme dan Marxisme", *Suluh Indonesia Muda*, 1926.
- Soekarno., *Suluh Indonesia Muda*, 1926.
- Soekiman., "Tenaga jang Aktief", *Pandji Islam*, 1939.
- Soemantri., "Pembela Agama Islam, Pembela Boemipoetra", *Medan Moeslimien*, 1919.
- Soewarno., *Circulair* (Surat edaran tentang pendirian Boedi Oetomo, 20 Mei 1908, *Weltevreden*, 1908.
- Sribintara., "Maksoed dan toedjoan M.I.A.I." (diambil dari Choethbah: Kyai H. M. Mansoer", *Panji Islam*, 10 April 1939.
- Tjokroaminoto., "Rechtspersoon" *Darmokondo* (berseri), 13, 15, 18 Mei 1914.
- Tjokroaminoto., "Rechtspersoon" S.K. *Darmokondo*, dimuat secara berkala tanggal 13, 15, 18 Mei 1914.

W. Wondoamiseno., "Pemandangan tentang Pergerakan Islam 1939", *Pandji Islam*, 1939.

Tesis dan Disertasi

Jaylani, Ahmad Timur., dalam tesis M.A., *The Sarekat Islam Movement: Its Contribution to Indonesian Nationalisme* (Montreal: McGill University, 1958).

Wardini Akhmad, "Kongres al-Islam 1922-1941, Satu Telaah tentang Integrasi dan Disintegrasi Organisasi Organisasi Islam di Indonesia dalam Perkembangan Pergerakan Nasional", *Disertasi Institut Agama Islam Negeri Syarif Hidayatullah*, 1989.

Jurnal, Makalah dan Majalah Umum

Ahimisa-Putra, Heddy Shri, *Paradigma, Epistemologi dan Metode Ilmu Sosial-Budaya Sebuah Pemetaan*, Makalah dalam pelatihan "Metodologi Penelitian" diselenggarakan oleh CRCS UGM Yogyakarta pada 12 Februari-19 Maret 2007

Lely., "Sarekat Rakjat: Dari Disiplin Partai Hingga Pemberontakan (1923-1926)", dalam *Jurnal Progres*, jilid 3, No. 1, tahun 1993.

Margana, S., "Kapitalisme Pribumi dan Sistem Agraria Tradisional; Perkebunan Kopi di Mangkunegaran, 1853-1881", dalam: *Lembaran Sejarah*, Vol.1, No.2. 1997/1998.

Abdulgani, Ruslan., *Sosialisme Indonesia*, Malang, Jajasan Prapantja, 1961.

- Aceh, Aboebakar., *Sekitar Masuknya Islam ke Indonesia*, Semarang, CV. Ramadhani, 1979.
- Ahearn, Laura M., *Annual Review Anthropolgi* 2001.30: 109-137, dalam: *Agency, Knowledge and nature* 1&2, Yogyakarta, Academy Professorship Indonesia dan Sekolah Pascasarjana Universitas Gadjah Mada, 2007.
- Aidit, D.N., *Revolusi Indonesia Latar Belakang Sejarah dan Hari Depan*, Yogyakarta, Radja Minjak, 2002.
- Alfian, "Tan Malaka: Pejuang Revolusioner yang Kesenian", dalam: *Manusia Dalam Kemelut Sejarah*, Jakarta, LP3ES, 1978.
- Alfian, Ibrahim., *Perang di Jalan Allah*, Jakarta, Pustaka Sinar Harapan, 1987.
- Al-Qur'an., Departemen Agama RI, 2005.
- Amelz, H.O.S. *Tjokroaminoto hidup dan Perjuangannja*, Djakarta: Bulan Bintang, 1952.
- Amin, M. Masyhur., *Syarikat Islami, Obor Kebangkitan Nasional (1905-1942)*, Yogyakarta, al Amin Press, 1996.
- Ananta Toer, Pramodya., *Rumah Kaca*, Yogyakarta, Hasta Mitra, 2000.
- Andersons, Benedict., *Imagined Communities*, Yogyakarta, Insist dan Pustaka Pelajar, 2001.
- Anshari, Endang Saifuddin., *Piagam Jakarta 22 Juni 1945 Sebuah Konsensus Nasional Tentang Dasar Negara Re-*

- publik Indonesia (1945-1949)*, Jakarta, Gema Insani Press, 1997.
- Anwar, Rosihan., *Pergerakan Islam dan Kebangsaan Indonesia*, Djakarta, P.T. Kartika Tama, 1971.
- Azra, Azyumardi., *Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara abad XVII dan XVIII akar Pembaruan Islam Indonesia*, Jakarta, Prenada Media, 2005.
- Baars, A., en Sneevliet, H., "Het Proces Sneevliet", dalam: *Socialisme in Indonesie*, deel 2., Leiden, KITLV Uitgeverij, 1991.
- Bahar, Saifroedin, et.al., Ed., *Risalah Sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) dan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) 29 Mei 1945 - 19 Agustus 1945*, Jakarta, Sekretariat Negara RI, 1993.
- Benda, Harry J., *Bulan Sabit dan Matahari Terbit*, Bandung, Pustaka Jaya, 1980.
- Biografi Tan Malaka., *Memperingati 44 Tahun Wafatnya Pahlawan Kemerdekaan Nasional Tan Malaka*, Jakarta, Yayasan Massa, 1993.
- Blumberger, J. Th. Petrus., *De Indo-Europeesche Beweging in Nederlandsch Indie*, Haarlem, H.D. Tjeenk Willink & zoon N.V., 1939.
- Brackman, Arnold C., *Cornell Paper di Balik Kolapsnya PKI*, Yogyakarta, elsReba, 2000.

- Brackman, Arnold C., *Indonesian Communism: A History*, New York, Federick A. Praeger Publisher, 1963.
- Brohi, A.K., "Konsepsi Sosialisme Islam", dalam: *Islam dan Pembaruan Ensiklopedi Masalah-masalah*, John J. Donohue; John L. Esposito, peny., Jakarta, CV. Rajawali, 1984.
- Bruinessen, Martin van., *NU Tradisi Relasi-Relasi Kuasa Pencarian Wacana Baru*, Yogyakarta, LKiS, 1994.
- Brzezinski, Zbigniew., *Kegagalan Besar Muncul dan Runtuhnya Komunisme Dalam Abad Kedua Puluh*, Bandung, PT. Remaja Rosdakarya, 1990.
- Dahm, Bernhard., *Sukarno and the Struggle for Indonesian Independence*, Ithaca and London, Cornell University Press, 1969.
- Darban, Ahmad Adaby., *Peran Serta Islam dalam Perjuangan di Indonesia*, Yogyakarta, UII, 1989.
- Dhakidae, Daniel., "Partai Politik dan Sistem Kepartaian di Indonesia", *Prisma*, No. 12, tahun X, Desember 1981.
- Dhont, Frank., *Nasionalisme Baru Intelektual Indonesia tahun 1920-an*, Yogyakarta, Gadjah Mada University Press, 2005.
- Dobin, Cristin., *Kebangkitan Islam Dalam Ekonomi Petani yang Sedang Berubah*, Jakarta, INIS, 1992.
- Donohue, John J.; Esposito, John L. (peny.), *Islam dan Pembaruan Ensiklopedi Masalah-masalah*, Jakarta, CV. Rajawali, 1984.

- Engels, Frederick., *On Marx's Capital*, trj., Jakarta, Hasta Mitra, 1940.
- Feillard, Andre., *NU vis a vis Negara Pencarian Isi Bentuk dan Makna*, Yogyakarta, LKiS, 1999.
- Gani, Muhammad Abdul., *Cita Dasar dan Pola Perjuangan Syarikat Islam*, Jakarta, Bulan Bintang, 1984.
- Geertz, Clifford., *Santri, Abangan, Priayi dalam Masyarakat Jawa*, Jakarta, Pustaka Jaya, 1981.
- Gie, Soe Hok., *Di Bawah Lentera Merah*, Jakarta, 1964.
- Gondokusumo, Djody., dan Amelz, *Parlemen Indonesia*, Jakarta, Bulan Bintang, 1951.
- Graaf, H.J. De., dan Pigeaud, TH., *Kerajaan Islam Pertama di Jawa Tinjauan Sejarah Politik Abad XV dan XVI*, terj., Jakarta, PT. Pustaka Utama dan KITLV, 1986.
- Hadisutjipto, S.Z., *Gedung STOVIA Sebagai Cagar Budaya*, Jakarta, Dinas Museum dan Sejarah DKI Jakarta, 1973.
- Haidar, M. Ali., *Nahdlatul Ulama dan Islam di Indonesia, Pendekatan Fikih dalam Politik*, Jakarta, PT. Gramedia Pustaka Utama, 1998.
- Hakim, Abdul., "Sosialisme Islam", dalam: *Islam dan Pembaruan Ensiklopedi Masalah-masalah*, John J. Donohue; John L. Esposito, peny., Jakarta, CV. Rajawali, 1984.
- Harsters, Van., *De Sarekat Islam*, Weltevreden Albrecht & Co. 1916.

- Hegel, G.W.F., *Filsafat Sejarah G.W.F. Hegel*, terj. Cuk Ananta Wijaya, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2001.
- Herbert Feith dan Lance Castles, ed., *Indonesian political Thinking 1945-1965*, Cornell University, Ithaca and London, 1970.
- Hermanu, *Mur Jangkung Jan Pieterszoon Koen Babad VOC*, Yogyakarta, Bentara Budaya, 2005.
- Hiqmah, Nor., H. M. Misbach, *Sosok dan Kontroversi Pemikirannya*, Yogyakarta, Yayasan Litera Indonesia, 2000.
- Hurgronje, Snouck., *Perayaan Mekah*, seri INIS jilid V., Jakarta, INIS, 1989.
- Ingleson, J., *Jalan Ke Pengasingan Pergerakan Nasionalis Indonesia Tahun 1927-1934*, Jakarta, LP3ES, 1978.
- Jainuri, Achmad., *Ideologi Kaum Reformis, Melacak Pandangan Keagamaan Muhammadiyah Periode Awal*, Surabaya, LPAM, 2002.
- Jaya, Tamar., *Tahun 1905 Hari Kebangkitan Nasional*, Prasaran dalam Seminar Sejarah Perjuangan Islam Indonesia: 7-10 Mei 1917, Jakarta).
- Kahin, George Mc. Turnan., *Nationalism and Revolution in Indonesia*, Ithaca and London, Cornell University Press, 1970.
- Kaptain, Nico J.G., ed., *Kekacauan dan Kerusuhan: Tiga Tulisan Tentang Pan-Islamisme di Hindia Belanda Pada Akhir*

Abad Kesembilan Belas dan Awal Abad Kedua Puluh,
Leiden-Jakarta, Seri INIS XLIII., 2003.

Kartodikromo, Mas Marco., *Student Hidjo*, Yogyakarta, Bentang, tanpa tahun.

Kartodirdjo, Sartono (peny.), *Elite dalam Perspektif Sejarah*, Jakarta, LP3ES, 1983.

Kartodirdjo, Sartono., *Pemberontakan Petani Banten 1888 Kondisi, Jalan Peristiwa, dan Kelanjutannya, Sebuah Studi Kasus Mengenai Gerakan Sosial di Indonesia*, Jakarta, Pustaka Jaya, 1984.

Kartodirdjo, Sartono., *Pengantar Sejarah Indonesia Baru: Sejarah Pergerakan Nasional Dari Kolonialisme Sampai Nasionalisme*, Jilid 2., Jakarta, Gramedia, 1990.

Kartodirdjo, Sartono., *Protest Movement In Rural Java A Study of Agrarian Unrest in the Nineteenth and early Twentieth Centuries*, Kuala Lumpur, Oxford University Press, 1978.

Kartosowirjo, S.M., *Sikap Hidjrah PSII*, Majelis Tahkim PSII ke-22, bagian pertama, 1936.

Kohn, Hans., *Nasionalisme Arti dan Sejarahnya*, Jakarta, Erlangga, 1984.

Korver, A.P.E., *Sarekat Islam Gerakan Ratu Adil?*, Jakarta, Grafitipers, 1985.

Kuntowijoyo, "Dari Integrasi Nasional ke Sistematisasi Nasional", dalam: *Transformasi Masyarakat Indone-*

- sia!, Denny. J.A. ed., Jakarta, Kelompok Studi Proklamasi, 1986.
- Magnis-Suseno, Franz., *Sosialisme Utopis Hingga Perselisihan Revisionisme*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 2000
- Mahmud, Mustafa., "Islam Versus Marxisme dan Kapitalisme", dalam: *Islam dan Pembaruan Ensiklopedi Masalah-masalah*, John J. Donohue; John L. Esposito, peny., Jakarta, CV. Rajawali, 1984.
- Mangoenkoesoemo, Goenawan., "De Geboorte Van Boedi Oetomo" (lahirnya Boedi Oetomo), dalam: *Cahaya di kegelapan, Capita Selecta kedua Boedi Oetomo dan Sarekat Islam pertumbuhannya dalam dokumen asli*, Pitut Soeharto-drs. A. Zainoel Ihsan, peny., Jakarta, Jayasakti, 1981.
- Marx, Karl., *Kapital, Sebuah Kritik Ekonomi Politik, Buku III, Proses Produksi Kapitalis secara Menyeluruh*, trj. Oey Hay Djoen, Jakarta, Hasta Mitra-Ultimus-Institute for Global Justice, 2007.
- Mastuhu, *Dinamika Sistem Pendidikan Pesantren, Suatu Kajian Tentang Unsur dan Nilai Sistem Pendidikan Pesantren*, Jakarta, INIS, 1994.
- McVey, Ruth T., *The Rise of Indonesian Communism*, Ithaca, Cornell University Press, 1965.
- Moeis, Abdoel., *Pidato 2e Nationaal Congres, 20-27 October di Bandung*, dalam: *Cahaya di Keggelapan, Capita Selecta Kedua Boedi Oetomo dan Sarekat Islam Pertumbuhannya*

- dalam Dokumen Asli*, Zainoel Ihsan, Pitut Soeharto, Jakarta, Jayasakti, 1981.
- Mudjiono, *Hukum Agraria*, Yogyakarta, Liberty, 1992.
- Nagazumi, Akira., *Bangkitnya Nasionalisme Indonesia: Budi Utomo 1908-1918*, Jakarta, PT. Pustaka Utama Grafiti, 1989.
- Nalenan, Ruben., *Iskaq Tjokrohadisurjo Alumni Desa Bersemangat Banteng*, Jakarta, Gunung Agung, 1982.
- Noer, Deliar., *Gerakan Modern Islam di Indonesia*, Jakarta, LP3ES, 1994.
- Notosoetardjo, H.A., *Tindjauan Agama Islam terhadap Sosialisme Indonesia*, Jakarta, Penerbitan Bersama Lembaga Penggali dan Penghimpun Sedjarah Revolusi Indonesia, Endang, Pemuda, 1964.
- Praptodihardjo, Singgih., *Sendi-sendi Hukum Tanah di Indonesia*, Jakarta, Yayasan Pembangunan, 1952.
- Pringgodigdo, A.K., *Sedjarah Pergerakan Rakjat Indonesia*, Djakarta, Pustaka Rakjat, 1960.
- Rambe, Safrizal., *Sarekat Islam Pelopor Bangkitnya Nasionalisme Indonesia 1905-1942*, Jakarta, Yayasan Kebangkitan Insan Cendekia, 2008.
- Reid, Anthony., "Pan-Islamisme Abad Kesembilan Belas di Indonesia dan Malaysia", dalam: *Kekacauan dan Kerusuhan: Tiga Tulisan Tentang Pan-Islamisme di Hindia Belanda Pada Akhir Abad Kesembilan Belas dan Awal*

- Abad Kedua Puluh*, Nico J.G. Kaptain, edt., Leiden-Jakarta, Seri INIS XLIII., 2003.
- Renier, G. J., *Metode dan Manfaat Ilmu Sejarah*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 1997.
- Rocamora, J. Eliseo., *Nasionalisme Mencari Ideologi Bangkit dan Runtuhnya PNI 1946-1965*, Jakarta, Pustaka Utama Grafitim 1910.
- Roem, Mohammad., "Memimpin adalah Menderita: Kesaksian Haji Agus Salim", dalam: *Manusia Dalam Kemelut Sejarah*, Jakarta, LP3ES, 1978.
- Salim, H. Agus., "Hak Berserikat dan Berkoempoelan (pasal 3RR)", dalam: *Aku Pemuda Kemarin di Hari Esok, Kapita Selecta Kumpulan Tulisan Asli, Lezing, Pidato Tokoh Pergerakan Kebangsaan 1913-1938*, A. Zainoel Ihsan - Pitut Soeharto, Jakarta, Jayasakti, 1981).
- Sanderson, Stephen K., *Sosiologi Makro Sebuah Pendekatan Terhadap Realitas Sosial*, eds.II., Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 1993.
- Sastroamijoyo, Ali., *Tonggak-Tonggak di Perjalananku*, Jakarta, Kinta, 1974.
- Semaoen, *Hikayat Kadiroen*, Yogyakarta, Yayasan Bentang Budaya, 2000.
- Shihab, Alwi., *Membendung Arus Respons Gerakan Muhammadiyah Terhadap Penetrasi Misi Kristen di Indonesia*, Bandung, Mizan, 1998.

Shiraishi, Takashi., *Zaman Bergerak, Radikalisme Rakyat di Jawa 1912-1926*, Jakarta, Grafiti, 1997.

Sihombing, *Pemuda Indonesia menantang Fasisme Jepang*, Djakarta, Sinar Djaya, tanpa tahun.

Soekarno., *Dibawah Bendera Revolusi*, Djakarta, Panitia Penerbit Dibawah Bendera Revolusi, 1963.

Soetrisno, Mayon., "Nyai Adipati", dalam: *Nyai Wonokromo di depan Pengadilan Hindia Belanda*, Jakarta, Progres, tanpa tahun.

Suhartono., *Sejarah Pergerakan Nasional Dari Budi Utomo Sampai Proklamasi 1908-1945*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 1994.

Sulistyo, Bambang., *Pemogokan buruh, Sebuah Kajian Sejarah*, Yogyakarta, Tiara Wacana, 1995.

Suminto, Aqib., *Politik Islam Hindia Belanda, Het Kantoor Voor Inlandsche zaken*, Jakarta, LP3ES, 1985.

Suseno, Franz Magnis., *Sosialisme Utopis Hingga Perselisihan Revisionisme*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 2000.

Sutherland, H., *Terbentuknya Sebuah Elite Birokrasi*, Jakarta, Sinar Harapan, 1983.

Tim Lapera., peny., *Prinsip-Prinsip Reforma Agraria Jalan Penghidupan dan Kemakmuran Rakyat*, Yogyakarta, Lapera Pustaka Utama, 2001.

Tjokroaminoto, H.O.S., *Islam dan Sosialisme*, Djakarta, Bulan Bintang, 1954.

- Tjokroaminoto, H.O.S., *Pidato 2e Nationaal Congres, 20-27 October di Bandung*, dalam: *Cahaya di Kegelapan, Capita Selecta Kedua Boedi Oetomo dan Sarekat Islam Pertumbuhannya dalam Dokumen Asli*, Zainoel Ihsan, Pitut Soeharto, Jakarta, Jayasakti, 1981.
- Tjokroaminoto, *Program Asas Partai Sjarikat Islam Indonesia*, Jakarta, Sekretariat Jenderal Pimpinan Pusat/ Lajnah Tanfidziyah Syarekat Islam, 1995.
- Tjokroaminoto, *Tafsir Program Asas dan Tandhim PSII*, Jakarta, Sekretariat Jenderal Pimpinan Pusat/ Lajnah Tanfidziyah Syarekat Islam, 1995.
- Tjokroaminoto, Umar Sa'id., *Moeslim National Ondermijns* (tidak untuk umum), Jakarta, Sekretariat Jendral Pimpinan Pusat/ Lajnah Tanfidziyah Syarikat Islam, 1995.
- Toer, Pramoedya Ananta., *Jejak Langkah*, Jakarta, Hasta Mitra, 2002.
- Wertheim, W.F., "Paralel yang Menyolok", *Kancali Majalah Perhimpunan Indonesia Raya*, No.11, Th.6. Prancis, Januari 1987.
- Williams, Michael C., *Arit dan Bulan Sabit Pemberontakan Komunis 1926 di Banten*, Yogyakarta, Syarikat, 1982.
- Wiradiputra, R., *Agraria Hukum Tanah Seperti Jang Masih Berlaku Sampai Sekarang*, Djakarta-Amsterdam, Djambatan, 1951.

Yuliati, Dewi., *Semaoen, Pers Bumiputera, dan Radikalisasi Sarekat Islam Semarang*, Semarang, Bendera, 2000.

Zainal, Moh., *Sedjarah Bunga dan Bergelornya Pesantren Sampurnan*, Gresik, BKK Maskumambang, 1962.

Zed, Mestika., *Pemberontakan Komunis Silungkang 1927 Studi Gerakan Sosial di Sumatra Barat*, Yogyakarta, Syarikat Indonesia, 2004.

— oo00oo —

Daftar Istilah

- Bid'ah : Sikap yang menyimpang dari perilaku dan ucapan Nabi Muhammad SAW.
- Democratische Concentratie : Nama komisi dalam Dewan Rakyat (Volksraad)
- Djawa Hokokai : Himpunan kebaktian rakyat di Jawa
- Furu' : Istilah hukum Islam yang berarti cabang atau turunan
- Gunsaikan : Kepala Pemerintahan militer Jepang di suatu daerah yang telah di duduki atau diambil alih.
- Gunsaikanbu : Kantor pusat kepala Pemerintahan Jepang di suatu daerah yang telah di duduki atau diambil alih.
- Herendiensten : Kerja paksa

Hijrah	: dari bahasa arab yang artinya berpindah
Hisbullah	: Tentara Allah, atau pasukan pejuang Islam
Hokokai	: Himpunan kebaktian rakyat yang dibentuk oleh Pemerintahan Jepang di Indonesia
Hoofd Bestuur	: Pimpinan Besar
Indie Weerbaar Actie	: Aksi pertahanan Indonesia
Kecu	: Berandal, pencuri, penjahat, pengacau
Khalifah	: Pemimpin tertinggi umat Islam
Khilafah	: Persatuan para pemimpin umat Islam
Landreform	: Reformasi pertanahan pada masa pemerintahan Belanda di Indonesia
Onderneming	: Para pengusaha perkebunan
Pan-Islamisme	: Gerakan Kebangkitan perjuangan Islam di Timur Tengah
Pangreh Praja	: Pegawai Negeri pada masa Pemerintahan Belanda di Indonesia
Politik hijrah	: Politik berpindah, yang sebelumnya kooperasi, menjadi non-kooperasi terhadap Pemerintah Hindia Belanda.

Radicale Concentratie	: Salah satu komisi dalam Dewan Rakvat (Volksraad)
Staten general	: Parlemen Belanda
Suiker syndicat	: Pengusaha Gula atau sindikat gula
Ushul	: Istilah hukum Islam yang berarti utama atau penting
Vergadering	: Pertemuan atau rapat besar
Volksraad	: Dewan rakyat
Zelfbestuur	: Berpemerintahan sendiri

Daftar Singkatan

ASC	: Algemeene Studie Club, berpusat di Bandung
BO/BU	: Boedi Oetomo/Budi Utomo
BP PSII	: Barisan Penyadar Partai Sarekat Islam Indonesia
BPUPKI	: Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia
CSI	: Centrale Sarekat Islam
ELS	: Europeesche Lagere Scholen.
GAPI	: Gabungan Politik Indonesia
Gerindo	: Gerakan Rakyat Indonesia
HBS	: Hollandsche Burgerscholen
HCS	: Hollandsche Chineesche Scholen
HIS	: Hollandsche Inlandsche School
HOH	: Hadji Organisatie Hindia
IP	: Indische Partij

ISC	: Indonesische Studi Club, berpusat di Surabaya
ISDV	: Indische Sociaal Democratische Vereeniging
JN	: Javaansche Nationalisme
Komintern	: Komunis Internasional
MAIHS	: Moe'tamaroel Alami Islami Far'oel Hindia-Sj arkijjah
Masyumi	: Majelis Syura Muslimin Indonesia
MIAI	: Majelis Islam Ala Indonesia (A'la= tinggi)
MRI	: Majelis Rakyat Indonesia
MULO	: Meer Uitgebreide Lagere Onderwijs
NIP	: Nationale Indische Partfi
NU	: Nahdlatul Ulama
OSVIA	: Opleiding School voor Inlandsche Ambtenaren
Parindra	: Partai Indonesia Rava
Partindo	: Partai Indonesia
PEB	: Personil Economics
PFB	: Personel Fabriek Bond
PII	: Partai Islam Indonesia
PKI	: Partai Komunis Indonesia
PKKI	: Perkoempoelan Katholiek Kristen Indonesia
PNI	: Partai Nasionalis Indonesia

PPKB	: Perkumpulan Pergerakan Kaum Buruh
PPKI	: Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia
PPOI	: Persiapan Persatuan Oemat Islam
PPPB	: Persatuan Pegawai Pegadaian Bumiputera
PPPKI	: Permufakatan Perhimpunan - perhimpunan Kebangsaan Indonesia
PSI	: Partai Sarekat Islam
PSII	: Partai Sarekat Islam Indonesia
PVPN	: Persatuan Vakbonden Pegawai Negeri
SATV	: Sidiq Amanah Tableg Fatonah
SDI	: Sarekat Dagang Islamiyah
SI	: Sarekat Islam
SKVC	: Semarangsche Keizervereeniging Club
SR	: Sarekat Ralryat
STOVIA	: School tot Opleiding van Inlandshe Artsen
TBTO	: Tolak Bahla Towil Umur
THHK	: Tionghoa Hwe Koan
TKNM	: Tentara Kanjeng Nabi Moehammad SAW
UUD	: Undang Undang Dasar

VSTP

: Vereeniging voor Spoor en
Tramweg Personeel

—oo00oo—

Indeks

A

A.P.E. Korver, 15
Abendanon, 27
Agrarische Wet (hukum
pertanahan), 25
Ahmad Dahlan, 129, 171
Anthony Reid, 20
A. Willem Frederik, Idenburg,
50

B

Baars, Ir. A., 80
Bauer, Otto, 230
Brigsmas, 80
Budi Utomo, 35

C

Central Sarekat Islam (CSI), 2,
51
Ch.G.Cramer, 73

D

Dalam Sosialisme Islam, 7
Deliar Noer, 16, 176, 188

desentralisasi, 64
Douwes Dekker, E.F.W., 80

E

Ernest, Renan, 230

F

Filsafat Sejarah, 82
Furnivall, 27

G

Gabungan Politik Indonesia
(GAPI), 255
G. W. F., Hegel, 82

H

Harry J. Benda, 33
Hollandsche Burgerscholen
(HBS), 28
Hollandsche Chineesche
Scholen (HCS), 31
Hollandsche Inlandsche
School (HIS), 28

I

Indische Partij (IP), 81
Indische Sociaal Democratische
Vereeniging (ISDV), 3, 70
Industrialisati, 26

J

J. Eliseo Rochamora, 18, 280,
281
J.G. Kaptain, 14
J.H. Carpentier Alting, 74

K

kapitalisme, 85, 140, 104, 149,
152, 153; Belanda, 69
Karl, Kautsky, 230
Karl, Marx, 82, 163-164
Karl, Radek, 230,
kolonialisme, 104, 149, 152,
189; Belanda, 27, 47
komunisme, 4, 83, 104, 140,
186, 199
Korver, A.P.E., 15
Kristenisasi, 47, 48, 56

M

M. A. Gani, 16
Marxian, 21
Marxis, 70, 83
Marxisme, 82
Meer Uitgebreide Lagere
Onderwijs (MULO), 28
Misbach, 129

N

nasionalisme, 9, 70, 234, 236,
237, 239, 241, 242

Nationale Indische Partij
(NIP), 81

O

Opleiding School voor
Inlandsche Ambtenaren
(OSVIA), 28
organisch lichaam, 155

P

Pan Islamisme, 1, 5, 14, 20,
43, 44, 47, 149, 281
Panitia Persiapan
Kemerdekaan Indonesia
(PPKI), 277
Partai Komunis Indonesia
(PKI), 4
Partai Sarekat Islam (PSI), 5
Partai Sarekat Islam Indonesia
(PSII), 7, 18
Partai Sarikat Islam Indonesia
(PSII), 208
Pembela Tanah Air (Peta), 272
Personel Fabriek Bond (PFB),
89
Politik Etis, 26, 29, 80
Putera (Pusat Tenaga Rakyat),
268

R

revolusioner, 91, 138, 152,
153

S

Sarekat Dagang Islamiah
(SDI), 2, 37
Sarekat Islam (SI), 2
Sartono Kartodirdjo, 20

School tot Opleiding van
Inlandsche Artsen
(STOVIA), 28
Sekularisme, 199
Siraishi, Takashi, 183
Sneevliet, H.J.F.M., 70, 80, 81
Sociaal Democratische Arbeiders Partij (SDAP), 73
Sosialisme, 3, 5, 17, 21, 80, 82, 149, 152, 153, 154;
Islam, 6, 12, 17, 18, 20, 150, 152, 154, 155, 164, 184, 281
Sukarno, 230, 239, 242

T

Tirtoadhisuryo, 37
Tjokroaminoto, 15, 17, 22, 52, 129, 155, 156, 160, 163, 164

V

Van Deventer, C.TH., 26, 27
van Heutz, Joannes B., 50
Van Kol, 26, 27
Van Limburg Stirum, 72, 75
Van Niel, 187
Vereeniging voor Spoor en Tramweg Personeel (VSTP), 3

W

Wardini Ahmad, 188
Wertheim, 267

— oo00oo —

Tentang Penulis

Nasihin, S.S., M.A., lahir pada 03 April 1982 di Desa Sungegeneng, Kecamatan Sekaran, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur. Penulis Menyelesaikan studi tingkat sarjana pada Jurusan Sejarah Fakultas Sastra Universitas Jember (Unej) pada 2006. Berhasil menyelesaikan studi program pasca sarjana Jurusan Sejarah Fakultas Ilmu Budaya pada Universitas Gadjah Mada tahun 2009. Beberapa makalah yang pernah ditulis seperti: *"Dendam Kesumat" Tragedi Kemanusiaan di Kecamatan Sekaran Kabupaten Lamongan, 1965-1966*; *Islam dan Kebangsaan: Studi Tentang Politik Islam di Indonesia 1905-1955*; *Fenomena Munculnya Gerakan al-Qiyadah di Indonesia, Sebuah Analisis Historis*; *Sarekat Islam (SI) Mencari Ideologi: Re-posisi Identitas SI Sebelum Kemerdekaan Indonesia 1945*; *H. O. S. Tjokroaminoto dan Dinamika Pergerakan Islam di Indonesia*; dan beberapa makalah lainnya. Penulis dapat dihubungi melalui email amunsent@gmail.com •

